



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

— 2026 —





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Ruang Lingkup	10
1.5 Metodologi Penyusunan	11
BAB II ARAH PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	13
2.1 Pemerintah Digital dan Perubahan Paradigma	13
2.2 Keselarasan dengan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah	14
2.3 Visi Pemerintah Digital	15
2.4 Misi Pemerintah Digital	16
2.5 Tujuan Pemerintah Digital	17
2.6 Sasaran Pemerintah Digital	17
2.7 Ekosistem dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemerintah Digital	18
2.8 Arah Kebijakan Pemerintah Digital	19
2.9 Strategi Pemerintah Digital	19
BAB III LANDASAN DAN KERANGKA ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL	21
3.1 Posisi Arsitektur dalam Transformasi Pemerintah Digital	21
3.2 Definisi dan Tujuan Arsitektur Pemerintah Digital	21
3.3 Prinsip Arsitektur Pemerintah Digital	22
3.4 Tingkatan Arsitektur Pemerintah Digital: Makro, Meso, dan Mikro	23
3.5 Posisi Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan	24
3.6 Struktur Arsitektur Pemerintah Digital	24
3.7 Domain Arsitektur Pemerintah Digital	25



3.8 Referensi Regulasi Arsitektur Pemerintah Digital	26
3.8.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis	26
3.8.2 Referensi Arsitektur Layanan	27
3.8.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi	30
3.8.4 Referensi Arsitektur Aplikasi	33
3.8.5 Referensi Arsitektur Infrastruktur	36
3.8.6 Referensi Arsitektur Keamanan.....	38
3.8.7 Keterkaitan Antar Referensi Arsitektur Pemerintah Digital	41
3.9 Metadata Arsitektur Pemerintah Digital	42
3.10 Pengelolaan dan Pemutakhiran Arsitektur	42
BAB IV ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	44
4.1 Gambaran Umum Arsitektur Pemerintah Digital.....	44
4.2 Gambaran Kondisi Eksisting Pemerintah Digital	44
4.3 Arsitektur Layanan Digital Pemerintah	46
4.3.1 Arsitektur Proses Bisnis.....	46
4.3.2 Arsitektur Layanan	59
4.4 Arsitektur Data	71
4.5 Arsitektur Teknologi	84
4.5.1 Arsitektur Aplikasi	85
4.5.2 Arsitektur Infrastruktur	85
4.6 Arsitektur Keamanan.....	86
BAB V PENUTUP.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis	28
Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Layanan	30
Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi	32
Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi	34
Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur	36
Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan	38
Gambar 7. Keterkaitan antar Referensi Arsitektur	39
Gambar 8. Arsitektur Layanan SPBE As-Is	109
Gambar 9. Diagram Integrasi Layanan SPBE (To-Be).....	110
Gambar 10. Diagram Jaringan As-Is Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	534
Gambar 11. SNI 27001 Tahun 2022 SMKI.....	552
Gambar 12. Annex A 27001 tahun 2022 SMKI	553
Gambar 13. Risiko, Ancaman, dan Kerentanan	561
Gambar 14. Tahap Proses Manajemen Risiko Berbasis Permen PAN-RB Nomor 5 Tahun 2020	562
Gambar 15. Mekanisme Vulnerability Assessment	570

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah telah berubah secara mendasar pada era digital. Masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan tidak lagi menilai pemerintah dari ketersediaan aplikasi, melainkan dari kemudahan, kecepatan, dan keandalan layanan yang mereka terima. Perubahan ini bersamaan dengan meningkatnya tuntutan tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta kebutuhan pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis data.

Selama satu dekade terakhir, digitalisasi pemerintahan di banyak daerah berkembang secara sektoral. Sistem dibangun per urusan dan per organisasi, sehingga menimbulkan silo data, silo aplikasi, dan silo layanan yang saling terpisah. Akibatnya, masyarakat harus mengakses banyak kanal untuk satu urusan, data yang sama dikumpulkan berulang kali oleh perangkat daerah yang berbeda, dan proses lintas organisasi berjalan lambat karena tidak ada keterpaduan.

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, arah kebijakan nasional bergeser dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Pemdi). SPBE telah meletakkan fondasi penting berupa tata kelola TIK, standar interoperabilitas awal, manajemen data dan keamanan informasi, serta budaya evaluasi berkala, dan capaian itu tetap menjadi modal berharga. Pemerintah Digital mengubah titik tolak, dari “membangun dan mengintegrasikan sistem elektronik” menjadi “merancang keterpaduan layanan digital berdasarkan kebutuhan pengguna dan sasaran pembangunan, yang didukung oleh data, teknologi, dan keamanan secara terpadu”. Dokumen ini disusun sepenuhnya dalam kerangka Pemerintah Digital sebagai paradigma yang berlaku saat ini, dengan SPBE diperlakukan sebagai fondasi historis dan sumber pembelajaran transformasi sebelumnya.

Lima Pilar Pemerintah Digital

Sebagai paradigma, Pemerintah Digital bertumpu pada lima unsur yang saling menopang:

- **Pengguna** — kebutuhan dan kepuasan pengguna menjadi titik awal perancangan;
- **Layanan digital pemerintah** — dirancang terpadu lintas perangkat daerah, bukan sekadar mengintegrasikan aplikasi yang sudah ada;
- **Data** — layanan ditopang oleh data yang dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan bersama;
- **Teknologi Pemerintah Digital** — diposisikan sebagai pemungkin (enabler), bukan tujuan; dan

- **Keamanan Pemerintah Digital** — melindungi keseluruhan ekosistem, tidak ditempatkan di ujung proses.

Dengan demikian, Pemerintah Digital bersifat berorientasi pengguna, berbasis data, kolaboratif lintas organisasi, mengutamakan keamanan dan kepercayaan digital, mendukung sasaran pembangunan, serta menerapkan prinsip digital by design (dirancang digital sejak awal) untuk memutus silo organisasi, data, aplikasi, dan layanan.

Peran Arsitektur Pemerintah Digital

Agar transformasi ini terarah dan tidak kembali terfragmentasi, diperlukan Arsitektur Pemerintah Digital, yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan keterpaduan layanan digital pemerintah, data, teknologi Pemerintah Digital, dan keamanan Pemerintah Digital untuk mendukung ekosistem Pemerintah Digital. Arsitektur berperan sebagai penghubung antara sasaran pembangunan dan penyelenggaraan layanan, menerjemahkan arah kebijakan menjadi rancangan layanan, data, teknologi, dan keamanan yang saling terhubung.

Arsitektur Pemerintah Digital tersusun dalam tiga tingkatan yang saling terhubung:

- **Arsitektur Makro** — arah, prinsip, kebijakan, referensi, dan standar nasional;
- **Arsitektur Meso** — arsitektur layanan digital lintas instansi, khususnya layanan prioritas dan tematik; dan
- **Arsitektur Mikro** — penerapan arsitektur pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dokumen Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan merupakan Arsitektur Mikro Pemerintah Digital. Sebagai Arsitektur Mikro, dokumen ini harus selaras dengan arah Arsitektur Makro, mengakomodasi dan menerapkan Arsitektur Meso yang relevan, sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, kewenangan, dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemerintah daerah di wilayah Sumatera dengan pusat pemerintahan di Kota Palembang.

Permasalahan Strategis

Sejumlah permasalahan strategis menjadi alasan utama disusunnya arsitektur ini:

- Layanan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum sepenuhnya terpadu;
- Proses yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah belum berjalan mulus karena keterbatasan interoperabilitas;
- Pertukaran dan pemanfaatan data bersama masih terbatas sehingga pengumpulan data cenderung berulang;
- Aplikasi berkembang secara sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi;
- Pemanfaatan infrastruktur bersama belum optimal;

- Aspek keamanan perlu diperkuat secara menyeluruh; serta
- Koordinasi lintas organisasi masih menjadi tantangan.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan konsekuensi dari pendekatan digitalisasi yang berbasis organisasi dan aplikasi, dan menjadi fokus yang hendak dijawab melalui keterpaduan yang dirancang oleh arsitektur. *(gambaran rinci kondisi eksisting per perangkat daerah perlu dikonfirmasi terhadap hasil pemetaan dan data yang tersedia.)*

Keselarasan dengan Sasaran Pembangunan

Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Rancangan keterpaduan layanan, data, teknologi, dan keamanan diturunkan dari prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga penyelenggaraan Pemerintah Digital berkontribusi pada hasil pembangunan yang ingin dicapai daerah. *(rujukan dan sasaran spesifik RPJPD/RPJMD Provinsi Sumatera Selatan perlu disesuaikan dengan dokumen perencanaan daerah yang berlaku.)*

Atas dasar itu, dokumen ini berfungsi untuk memetakan kondisi eksisting, merumuskan arsitektur target, mengidentifikasi kesenjangan antara keduanya, dan menetapkan kebutuhan penguatan. Melalui fungsi tersebut, dokumen menjadi acuan bersama bagi keterpaduan pengembangan digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi masukan utama bagi penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital.

Dengan demikian, dokumen ini bukanlah katalog perangkat TIK dan bukan pula Dokumen Arsitektur SPBE yang sekadar berganti nama. Dokumen ini merupakan kerangka transformasi untuk memastikan bahwa sasaran pembangunan diterjemahkan menjadi layanan digital yang terpadu, didukung data yang dapat dimanfaatkan, teknologi yang tepat guna, dan keamanan yang terintegrasi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Dokumen Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan dikelompokkan menurut hierarki dan relevansinya sebagai berikut.

A. Landasan Pembangunan Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045; *(nomor/tahun UU RPJPN 2025–2045 perlu dikonfirmasi.)*

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

B. Landasan Pemerintah Digital dan Transformasi Digital

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital;
6. Peraturan Kementerian PanRB Nomor 8 Tahun 2026;
7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (dipertahankan sebagai landasan teknis/transisi);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Landasan Perencanaan dan Pemerintahan Daerah

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

D. Landasan Data, Teknologi, dan Keamanan

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi dan Standar Teknis serta Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE (dipertahankan sebagai regulasi teknis);
18. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE (dipertahankan sebagai regulasi teknis);
19. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (dipertahankan sebagai regulasi teknis).

E. Landasan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);



21. Peraturan Daerah atau peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan;
22. Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terkait penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau digital.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Dokumen Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan menjadi kerangka acuan keterpaduan penerapan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan — yang menyelaraskan layanan digital, data, teknologi, dan keamanan dengan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi rujukan bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam mengembangkan dan memadukan layanan digital secara terarah.

Tujuan

1. Menyelaraskan penyelenggaraan Pemerintah Digital dengan sasaran pembangunan daerah dan arah pembangunan nasional;
2. Memetakan kondisi eksisting layanan, data, teknologi, dan keamanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Merumuskan arsitektur target yang menggambarkan keterpaduan yang ingin diwujudkan;
4. Mewujudkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan lintas perangkat daerah;
5. Memperkuat pemanfaatan dan pertukaran data sebagai basis penyelenggaraan layanan dan pengambilan keputusan;
6. Mengarahkan penataan teknologi Pemerintah Digital — aplikasi dan infrastruktur — sebagai pemungkin layanan yang efisien dan berbagi pakai;
7. Mengintegrasikan keamanan Pemerintah Digital ke dalam keseluruhan ekosistem layanan, data, dan teknologi;
8. Menghasilkan kebutuhan penguatan sebagai hasil analisis kesenjangan yang menjadi masukan bagi Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital.

1.4 Ruang Lingkup

Lingkup Organisasi

Dokumen ini mencakup penyelenggaraan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi seluruh perangkat daerah, serta memperhatikan keterkaitan dengan Instansi Pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang terlibat dalam keterpaduan layanan digital.

Lingkup Arsitektur

Pemetaan mencakup empat kelompok Arsitektur Pemerintah Digital yang terdiri atas enam domain, yaitu:

- **Arsitektur Layanan Digital Pemerintah** — mencakup Domain Proses Bisnis dan

Domain Layanan;

- **Arsitektur Data** — mencakup Domain Data;
- **Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital** — mencakup Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur;
- **Arsitektur Keamanan Pemerintah Digital** — mencakup Domain Keamanan.

Lingkup Kondisi Arsitektur

Untuk setiap domain, dokumen memetakan kondisi eksisting, arsitektur target, kesenjangan antara eksisting dan target, serta kebutuhan penguatan yang timbul dari kesenjangan tersebut.

Lingkup Keselarasan

Dokumen dijaga keselarasannya dengan arah pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dengan Arsitektur Makro, dan dengan Arsitektur Meso yang relevan, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Batasan Dokumen

Dokumen ini merupakan dokumen arsitektur, bukan dokumen pelaksanaan. Program dan kegiatan rinci, roadmap tahunan, jadwal pelaksanaan, quick wins, milestone, kebutuhan anggaran, dan penanggung jawab (PIC) tidak termasuk dalam dokumen ini, melainkan menjadi substansi Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital yang disusun secara terpisah.

Penyusunan dokumen dilakukan melalui delapan tahap yang berurutan:

1. **Penelaahan Kebijakan dan Dokumen Perencanaan.** Menelaah kebijakan Pemerintah Digital, Arsitektur Makro dan Meso yang relevan, RPJPN dan RPJMN, serta dokumen perencanaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai kerangka acuan.
2. **Pengumpulan dan Konsolidasi Data.** Menghimpun data dari perangkat daerah melalui studi dokumen dan inventarisasi layanan, data, aplikasi, dan infrastruktur yang ada.
3. **Pemetaan Arsitektur Eksisting.** Menyusun gambaran kondisi saat ini pada keenam domain arsitektur.
4. **Identifikasi Temuan dan Permasalahan.** Merumuskan temuan atas keterpaduan layanan, pemanfaatan data, integrasi aplikasi, infrastruktur bersama, keamanan, dan koordinasi lintas organisasi.
5. **Penyusunan Arsitektur Target.** Merumuskan kondisi yang ingin diwujudkan, selaras dengan Arsitektur Makro dan Meso serta sasaran pembangunan daerah.
6. **Analisis Kesenjangan.** Membandingkan kondisi eksisting dengan arsitektur target

untuk mengidentifikasi kesenjangan pada tiap domain.

7. **Perumusan Kebutuhan Penguatan.** Menetapkan kebutuhan penguatan sebagai hasil analisis kesenjangan, yang menjadi masukan bagi Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital.
8. **Validasi dan Penyempurnaan.** Memvalidasi hasil melalui wawancara, diskusi terarah (FGD) bersama perangkat daerah, dan penyempurnaan akhir.

Penyusunan menggunakan studi dokumen, data perangkat daerah, wawancara, serta diskusi atau FGD sebagai sumber utama, dan memanfaatkan repository arsitektur atau SIAP Digital sebagai basis dokumentasi apabila relevan

BAB II

ARAH PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Pemerintah Digital dan Perubahan Paradigma

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia berkembang melalui tiga tahap. Tahap pertama, e-Government, berfokus pada digitalisasi proses administratif secara parsial. Tahap kedua, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) — yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 — memperkenalkan tata kelola, arsitektur, dan manajemen elektronik pemerintahan yang lebih terstruktur, dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. SPBE meletakkan fondasi penting: standar tata kelola TIK, pengelolaan data dan aplikasi, keamanan informasi, serta budaya evaluasi berkala.

Tahap ketiga adalah Pemerintah Digital, paradigma yang berlaku saat ini sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045. Pemerintah Digital bukan sekadar kelanjutan atau penggantian istilah SPBE, melainkan pergeseran titik tolak: dari “membangun dan mengintegrasikan sistem elektronik” menjadi “merancang keterpaduan layanan digital berdasarkan kebutuhan pengguna dan sasaran pembangunan, yang didukung oleh data, teknologi, dan keamanan secara terpadu”. SPBE diperlakukan sebagai fondasi historis dokumen ini, bukan sebagai arah dokumen ini.

Karakteristik Pemerintah Digital

Karakteristik	Padanan	Penjelasan Ringkas
User-centric	Berorientasi pengguna	Kebutuhan dan kepuasan pengguna menjadi titik awal perancangan layanan
Digital by design	Dirancang sejak awal digital	Proses bisnis dirancang ulang secara digital, bukan sekadar mendigitalkan proses manual
Data-driven	Berbasis data	Data menjadi dasar layanan dan pengambilan keputusan, dapat dipertukarkan lintas organisasi
Integrated government	Pemerintahan terpadu	Layanan dirancang lintas perangkat daerah, memutus silo organisasi
Collaborative	Kolaboratif	Whole-of-government — koordinasi antarunit dan antartingkat pemerintahan
Adaptive	Adaptif	Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi

Karakteristik	Padanan	Penjelasan Ringkas
Secure and trusted	Aman dan terpercaya	Keamanan dibangun sejak desain (security by design), membangun kepercayaan digital
Outcome-oriented	Berorientasi hasil	Keberhasilan diukur dari manfaat dan kepuasan pengguna, bukan sekadar ketersediaan sistem

Pergeseran Pendekatan

Dimensi	Pendekatan Sebelumnya (SPBE)	Pemerintah Digital
Orientasi	Organisasi/unit kerja	Pengguna dan sasaran pembangunan
Layanan	Aplikasi dan portal per instansi	Layanan terpadu lintas perangkat daerah
Proses bisnis	Digitalisasi proses manual	Rekayasa ulang proses secara digital (digital by design)
Data	Dikelola per aplikasi/unit kerja	Aset strategis lintas sektor, dapat dipertukarkan
Teknologi	Sering menjadi tujuan pembangunan	Enabler bagi layanan dan hasil pembangunan
Kolaborasi	Terbatas pada Tim Koordinasi SPBE	Whole-of-government, lintas pemerintah dan ekosistem
Keamanan	Ditangani di ujung proses	Terintegrasi sejak tahap desain
Ukuran keberhasilan	Nilai indeks/kepatuhan teknis	Manfaat dan kepuasan pengguna

Perubahan ini tidak menegaskan capaian SPBE, melainkan memperkuatnya melalui paradigma yang lebih berpusat pada pengguna dan hasil pembangunan.

2.2 Keselarasan dengan Arah Pembangunan Nasional dan Daerah

Penyelenggaraan Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan diturunkan dari rangkaian arah pembangunan berikut:

→ RPJPN 2025–2045

- **RPJMN 2025–2029**
- **Arah Transformasi Pemerintah Digital Nasional**
- **RPJPD/RPJMD Provinsi Sumatera Selatan**
- **Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**
- **Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan**

Pada tingkat nasional, RPJPN 2025–2045 (UU Nomor 59 Tahun 2024) mengamanatkan Visi dan Misi Strategis Transformasi Pemerintah Digital 2025–2045, dengan tahapan implementasi bertahap: penguatan kebijakan dan tata kelola (2025–2029), akselerasi whole-of-government (2030–2034), ekspansi platform governance (2035–2039), hingga perwujudan pemerintahan berbasis manusia (human-based governance) pada 2040–2045. Provinsi Sumatera Selatan saat ini berada pada tahap pertama, yaitu penguatan kebijakan, tata kelola, dan manajemen transformasi digital pemerintah.

Pada tingkat daerah, arah pembangunan Pemerintah Digital selaras dengan Misi ke-3 Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pembangunan Berkesinambungan”, dengan tujuan meningkatkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Arah Pembangunan	Kebutuhan Transformasi Digital	Implikasi bagi Pemerintah Digital
Penyelenggaraan pemerintahan bebas korupsi (RPJMD Sasaran 1)	Transparansi proses melalui sistem yang terpadu dan tertelusur	Penguatan tata kelola dan keamanan data lintas layanan
Pelayanan publik yang merata dan berkualitas (RPJMD Sasaran 2)	Layanan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah terpencil	Layanan digital berorientasi pengguna dan inklusif
Digitalisasi administrasi pemerintahan (RPJMD Sasaran 3)	Integrasi proses bisnis dan data lintas perangkat daerah	Keterpaduan layanan, data, dan teknologi sebagai fondasi Pemerintah Digital

Catatan: rujukan lengkap RPJPD/RPJMD Provinsi Sumatera Selatan — termasuk nomor Perda, periode, dan prioritas pembangunan lain di luar Misi ke-3 (mis. kemiskinan, iklim usaha, pendidikan, kesehatan) — perlu dikonfirmasi terhadap dokumen perencanaan daerah yang berlaku sebelum dicantumkan lebih lanjut.

2.3 Visi Pemerintah Digital

Visi Pemerintah Digital Nasional (RPJPN 2025–2045, UU Nomor 59 Tahun 2024)

ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

“Terwujudnya Pemerintah Digital untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045.”

Visi Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan

Visi Pemerintah Digital yang bersifat khusus untuk Provinsi Sumatera Selatan belum ditetapkan secara resmi dalam dokumen perencanaan daerah yang tersedia. Berdasarkan arah nasional dan arah RPJMD (Misi ke-3: tata kelola pemerintahan dalam pembangunan berkelanjutan), berikut rumusan yang diusulkan:

Arah Nasional + Arah Pembangunan Daerah + Kebutuhan Pengguna = Visi Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan

[USULAN RUMUSAN VISI]

“Terwujudnya Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan yang terpadu, berorientasi pengguna, dan tepercaya, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.”

Rumusan ini merupakan hasil formulasi konsultan berdasarkan arah kebijakan yang tersedia, dan perlu dibahas serta ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2.4 Misi Pemerintah Digital

Misi Pemerintah Digital Nasional (RPJPN 2025–2045)

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transformatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan keterpaduan data.
2. Mengembangkan transformasi digital pemerintah yang kolaboratif dan berorientasi pengguna.
3. Meningkatkan penguatan sistem digital yang terintegrasi dan tepercaya, adaptif, inovatif, serta memiliki kemandirian sumber daya.

Misi Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan

[USULAN RUMUSAN] — diadaptasi dari misi nasional dan diselaraskan dengan RPJMD Misi ke-3

1. Mewujudkan layanan digital pemerintah yang terpadu dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, lintas perangkat daerah.
2. Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai dasar penyelenggaraan layanan dan pengambilan keputusan.
3. Membangun teknologi Pemerintah Digital yang andal, tepat guna, dan berbagi pakai.
4. Mengintegrasikan keamanan dan membangun kepercayaan digital di seluruh

ekosistem layanan.

5. Memperkuat tata kelola, kolaborasi lintas organisasi, dan kapabilitas digital aparatur.

2.5 Tujuan Pemerintah Digital

Disusun berorientasi hasil, selaras dengan visi dan misi di atas

1. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan layanan digital pemerintah lintas perangkat daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pertukaran data sebagai basis layanan dan pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui teknologi yang tepat guna.
4. Meningkatkan keamanan dan kepercayaan digital dalam penyelenggaraan layanan pemerintah.
5. Meningkatkan kemampuan adaptasi, kolaborasi, dan kapabilitas digital organisasi pemerintah daerah.
6. Meningkatkan kontribusi Pemerintah Digital terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

2.6 Sasaran Pemerintah Digital

Sasaran merupakan kondisi konkret yang ingin diwujudkan sebagai penjabaran dari tujuan di atas:

1. Meningkatnya keterpaduan layanan digital lintas perangkat daerah.
2. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan digital pemerintah.
3. Meningkatnya pemanfaatan dan pertukaran data antarperangkat daerah.
4. Berkurangnya duplikasi aplikasi dan pengumpulan data yang berulang.
5. Meningkatnya interoperabilitas antarsistem dan layanan.
6. Meningkatnya keandalan dan pemanfaatan bersama infrastruktur teknologi.
7. Meningkatnya keamanan dan keberlangsungan layanan digital.
8. Meningkatnya kapabilitas dan budaya digital organisasi pemerintah daerah.

Catatan: indikator dan target kuantitatif untuk setiap sasaran di atas belum tersedia secara resmi dan perlu ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dapat merujuk pada kerangka penilaian Indeks Pemerintah Digital sebagai basis, namun disajikan terpisah dari BAB II sebagai materi evaluasi/lampiran.

2.7 Ekosistem dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemerintah Digital

Berbeda dengan ruang lingkup pada BAB I — yang menjelaskan cakupan penyusunan dokumen ini — subbab ini menjelaskan cakupan penyelenggaraan Pemerintah Digital di Provinsi Sumatera Selatan, dengan pengguna sebagai pusat ekosistem.

Pengguna, didukung oleh:

1. Layanan Digital Pemerintah
2. Data
3. Teknologi Pemerintah Digital
4. Keamanan Pemerintah Digital

Dengan fondasi:

1. Tata Kelola dan Penyelenggara
2. Kapabilitas dan Budaya Digital
3. Kolaborasi

Kelompok Pengguna

Kelompok pengguna yang dilayani mencakup: masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lain (akademisi, media, komunitas) sesuai kebutuhan. *(pemetaan lengkap kelompok pengguna spesifik Provinsi Sumatera Selatan.)*

Kelompok Layanan

- **Layanan Prioritas** — layanan yang mendukung program prioritas pembangunan, misalnya layanan terkait pengentasan kemiskinan, layanan berusaha (perizinan, pengadaan), administrasi pemerintahan, dan penerimaan daerah;
- **Layanan Tematik** — layanan lintas sektor berbasis siklus hidup pengguna, misalnya layanan kependudukan, sosial, kesehatan, dan pendidikan;
- **Layanan Instansional** — layanan yang menjadi kewenangan spesifik satu perangkat daerah.

Ditegaskan bahwa layanan digital bukan sama dengan aplikasi — aplikasi adalah salah satu sarana pendukung layanan, sementara layanan itu sendiri didefinisikan dari sisi kebutuhan pengguna, bukan dari sisi sistem yang tersedia.

2.8 Arah Kebijakan Pemerintah Digital

Arah kebijakan berikut menjadi jembatan antara sasaran (2.6) dan strategi (2.9):

1. Transformasi layanan digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna;
2. Penyederhanaan dan integrasi proses bisnis lintas perangkat daerah;
3. Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai aset bersama;
4. Konsolidasi dan interoperabilitas teknologi Pemerintah Digital;
5. Penguatan keamanan dan kepercayaan digital di seluruh ekosistem layanan;
6. Penguatan tata kelola dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Digital;
7. Penguatan kapabilitas dan budaya digital aparatur;
8. Penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, pemerintah pusat, dan ekosistem digital.

2.9 Strategi Pemerintah Digital

Arah Kebijakan	Strategi Utama	Hasil yang Diharapkan
Transformasi layanan berorientasi pengguna	Mengintegrasikan layanan berdasarkan kebutuhan pengguna, bukan struktur organisasi	Layanan yang lebih mudah diakses dan relevan bagi pengguna
Penyederhanaan proses bisnis	Melakukan rekayasa ulang proses bisnis lintas sektor (digital by design)	Proses lintas perangkat daerah lebih cepat dan efisien
Penguatan data	Memperkuat berbagi pakai data antarperangkat daerah	Berkurangnya duplikasi pengumpulan data
Konsolidasi teknologi	Menata portofolio aplikasi dan memanfaatkan infrastruktur bersama	Efisiensi belanja TIK dan interoperabilitas sistem
Keamanan dan kepercayaan digital	Menerapkan keamanan sejak tahap desain (security by design)	Layanan yang aman dan tepercaya bagi pengguna
Tata kelola dan koordinasi	Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital	Penyelenggaraan yang terpadu dan tidak tumpang tindih
Kapabilitas dan budaya digital	Memperkuat pengukuran kepuasan pengguna dan literasi digital ASN	Peningkatan kapabilitas digital organisasi

Arah Kebijakan	Strategi Utama	Hasil yang Diharapkan
Kolaborasi lintas ekosistem	Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain	Penyelenggaraan Pemerintah Digital yang selaras secara whole-of-government

Strategi di atas bersifat implementatif dan konseptual — tidak memuat tahun pelaksanaan, anggaran, atau daftar kegiatan rinci, karena hal tersebut menjadi substansi Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital.

BAB III

LANDASAN DAN KERANGKA ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

3.1 Posisi Arsitektur dalam Transformasi Pemerintah Digital

Arsitektur Pemerintah Digital merupakan penghubung antara “apa yang ingin dicapai” dan “apa yang harus diubah” dalam penyelenggaraan pemerintahan. Posisinya berada dalam rantai transformasi berikut:

- Arah Pembangunan
- Strategi Pemerintah Digital
- Arsitektur Pemerintah Digital
- Analisis Kesenjangan
- Kebutuhan Penguatan
- Rencana Aksi
- Implementasi dan Evaluasi

Dokumen	Pertanyaan yang Dijawab
Strategi Pemerintah Digital (BAB II)	Ke mana transformasi diarahkan?
Arsitektur Pemerintah Digital (BAB III–IV)	Bentuk keterpaduan targetnya seperti apa?
Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital	Bagaimana target tersebut diwujudkan?

Arsitektur menerjemahkan arah kebijakan dan strategi (BAB II) menjadi gambaran keterpaduan layanan, data, teknologi, dan keamanan yang konkret — sehingga dapat dibandingkan dengan kondisi saat ini, diukur kesenjangannya, dan dijadikan dasar penyusunan kebutuhan penguatan. BAB III ini bersifat konseptual — kerangka dan cara membaca arsitektur; penerapannya pada kondisi Provinsi Sumatera Selatan (data eksisting, target, dan kesenjangan aktual) dibahas pada BAB IV.

3.2 Definisi dan Tujuan Arsitektur Pemerintah Digital

Definisi

Arsitektur Pemerintah Digital adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan keterpaduan layanan digital pemerintah, data, teknologi Pemerintah Digital, dan keamanan Pemerintah Digital untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung sasaran pembangunan.

Definisi ini berbeda dari definisi Arsitektur SPBE sebelumnya yang menekankan “integrasi proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE” arsitektur kini bertitik tolak dari kebutuhan pengguna dan sasaran pembangunan, bukan dari sistem yang tersedia.

Tujuan Arsitektur Pemerintah Digital

1. Memastikan keselarasan penyelenggaraan Pemerintah Digital dengan sasaran pembangunan;
2. Mewujudkan layanan digital yang berorientasi pengguna;
3. Membangun keterpaduan lintas perangkat daerah;
4. Memastikan pemanfaatan data sebagai aset bersama;
5. Mengarahkan pemanfaatan teknologi sebagai enabler, bukan tujuan;
6. Memastikan keamanan dan kepercayaan digital di seluruh ekosistem;
7. Menjadi dasar identifikasi kesenjangan dan kebutuhan penguatan bagi Dokumen Rencana Aksi.

3.3 Prinsip Arsitektur Pemerintah Digital

Prinsip berikut menjadi alat pengambilan keputusan dalam penyusunan dan penerapan arsitektur:

Prinsip	Makna	Implikasi terhadap Arsitektur
Berorientasi Pengguna	Arsitektur disusun berdasarkan kebutuhan dan pengalaman pengguna	Layanan tidak disusun hanya berdasarkan struktur perangkat daerah
Berorientasi Hasil Pembangunan	Arsitektur diukur dari kontribusinya terhadap sasaran pembangunan	Setiap domain arsitektur harus dapat ditelusuri ke sasaran pembangunan
Keterpaduan	Layanan, data, teknologi, dan keamanan saling terhubung, bukan berdiri sendiri	Perubahan pada satu domain dipertimbangkan dampaknya ke domain lain
Digital by Design	Proses dirancang ulang secara digital sejak awal	Bukan sekadar mendigitalkan proses manual yang ada
Data sebagai Aset Strategis	Data dikelola dan dimanfaatkan lintas organisasi	Data tidak dimiliki eksklusif oleh satu perangkat daerah
Interoperabilitas	Sistem dan data dapat saling	Menghindari duplikasi aplikasi

Prinsip	Makna	Implikasi terhadap Arsitektur
dan Berbagi Pakai	terhubung dan dipertukarkan	dan data
Teknologi Tepat Guna	Teknologi dipilih sesuai kebutuhan layanan, bukan tren	Investasi teknologi diarahkan pada nilai manfaat, bukan kecanggihan semata
Keamanan sejak Tahap Perancangan	Keamanan menjadi bagian desain, bukan tambahan di akhir	Setiap domain arsitektur memuat pertimbangan keamanan sejak awal
Kolaborasi dan Whole-of-Government	Penyelenggaraan melibatkan koordinasi lintas organisasi dan tingkat pemerintahan	Arsitektur mikro harus selaras dengan arsitektur meso dan makro
Adaptif dan Berkelanjutan	Arsitektur dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi	Arsitektur direviu dan dimutakhirkan secara berkala

3.4 Tingkatan Arsitektur Pemerintah Digital: Makro, Meso, dan Mikro

Tingkat	Fokus	Ruang Lingkup	Hubungan
Makro	Arah nasional, prinsip, kebijakan, referensi, dan standar umum	Nasional	Menjadi arah dan standar bagi Meso dan Mikro
Meso	Keterpaduan layanan digital pemerintah lintas instansi	Layanan Prioritas dan Layanan Tematik	Mengorkestrasi layanan lintas instansi berdasarkan arah Makro
Mikro	Penerapan arsitektur pada konteks organisasi	Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	Menerapkan arah Makro dan mengakomodasi Meso yang relevan

Alur hubungannya bersifat berjenjang dan tidak berdiri sendiri:

- **Makro (arah dan standar)**
- **Meso (mengorkestrasi layanan lintas instansi)**

→ **Mikro (menerapkan pada konteks Instansi Pusat/Pemerintah Daerah)**

3.5 Posisi Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan

Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan merupakan Arsitektur Mikro Pemerintah Digital.

Diagram konseptual posisi:

- **Arsitektur Makro Nasional**
- **Arsitektur Meso (Layanan Prioritas dan Tematik)**
- **Arsitektur Mikro Provinsi Sumatera Selatan**

Sebagai Arsitektur Mikro, arsitektur ini harus:

1. Selaras dengan Arsitektur Makro;
2. Mengakomodasi Arsitektur Meso yang relevan;
3. Mendukung sasaran pembangunan daerah;
4. Sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi;
5. Memperhatikan kebutuhan pengguna;
6. Menghubungkan lintas perangkat daerah;
7. Memperhatikan hubungan dengan pemerintah pusat;
8. Memperhatikan hubungan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Arsitektur Mikro bukan sekadar inventaris internal perangkat daerah — arsitektur ini harus memperlihatkan hubungan vertikal (dengan Makro dan Meso), horizontal (antarperangkat daerah), dan lintas sektor (dengan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain).

3.6 Struktur Arsitektur Pemerintah Digital

Berbeda dari struktur lama yang menempatkan enam Arsitektur SPBE sejajar, struktur baru menggunakan empat kelompok arsitektur yang menaungi enam domain:

Kelompok Arsitektur	Fokus	Domain
Arsitektur Layanan Digital Pemerintah	Bagaimana proses dan layanan dirancang untuk pengguna	Proses Bisnis, Layanan
Arsitektur Data	Bagaimana data dikelola dan dimanfaatkan	Data
Arsitektur Teknologi Pemerintah Digital	Bagaimana teknologi mendukung layanan	Aplikasi, Infrastruktur
Arsitektur Keamanan	Bagaimana seluruh ekosistem	Keamanan

Kelompok Arsitektur	Fokus	Domain
Pemerintah Digital	dilindungi	

4 Kelompok Arsitektur, 6 Domain Arsitektur — bukan lagi “6 Arsitektur Pemerintah Digital” yang berdiri sejajar.

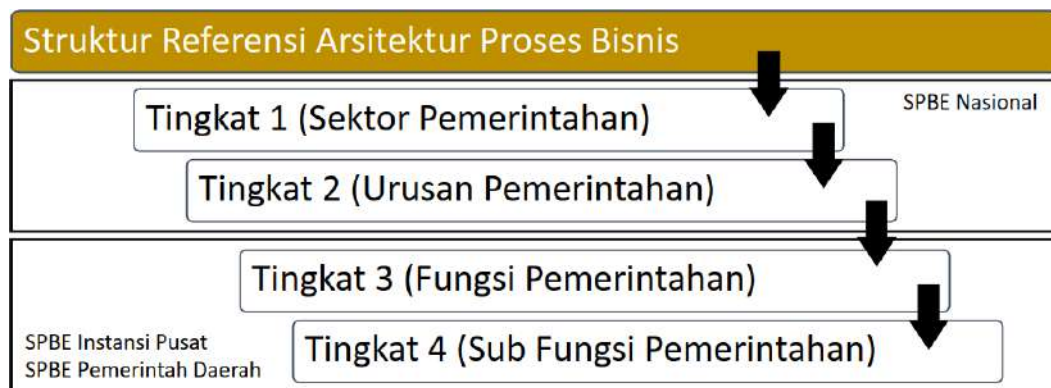
3.7 Domain Arsitektur Pemerintah Digital

Domain	Pertanyaan Utama	Objek yang Dipetakan	Hasil
Proses Bisnis	Bagaimana proses bekerja untuk menghasilkan layanan?	Proses utama, proses lintas fungsi, pengampu, keterkaitan dengan layanan, kebutuhan penyederhanaan	Peta proses bisnis yang efisien dan terpadu
Layanan	Layanan apa yang diberikan dan untuk siapa?	Pengguna, layanan, kanal, kebutuhan, keterpaduan	Katalog layanan yang berorientasi pengguna
Data	Data apa yang dibutuhkan layanan?	Data, produsen, pengguna, sumber, pertukaran, kualitas	Peta data yang dapat dipertukarkan dan berkualitas
Aplikasi	Kapabilitas digital apa yang mendukung layanan?	Aplikasi, fungsi, layanan, data, integrasi	Portofolio aplikasi yang efisien dan tidak terduplikasi
Infrastruktur	Kapabilitas teknologi apa yang memungkinkan aplikasi dan layanan berjalan?	Komputasi, pusat data, cloud, jaringan, integrasi, perangkat pendukung	Infrastruktur yang andal dan dimanfaatkan bersama
Keamanan	Bagaimana seluruh ekosistem dilindungi?	Layanan, data, aplikasi, infrastruktur, identitas, akses, keberlangsungan	Ekosistem yang aman dan tepercaya

Rincian data aktual (jumlah proses, layanan, aplikasi, dan infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan) dibahas pada BAB IV, bukan pada bab ini.

- 4) Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 1. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL).



Gambar 1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.8.2 Referensi Arsitektur Layanan

Referensi Arsitektur Layanan Pemerintah Digital (RAL) adalah sistem pengklasifikasian layanan organisasi yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan yang ada, sehingga menjadi tematik layanan terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dalam memberikan layanan secara komprehensif.

Layanan Pemerintah Digital merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL



panrb
NAGASARIN
PENGANTARAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPADA MASYARAKAT



diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka

diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/ G2G, Government to Employee/G2E*).

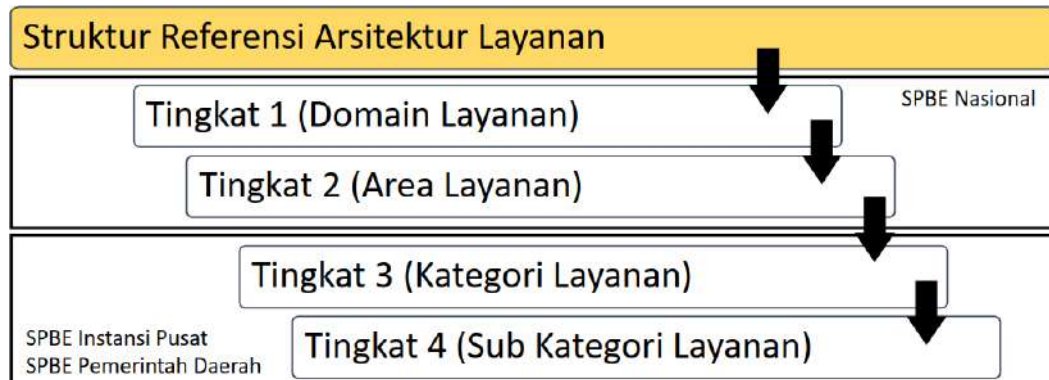
Diharapkan dengan penerapan RAL SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat *user- centric* menuju penerapan *Society 5.0*.

Dengan mengemban urusan yang dimiliki, setiap instansi akan dituntut untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah administratif pemerintahan yang dimiliki. Jika pada RAB, taksonomi disusun berdasarkan tugas dan fungsi tiap lembaga dalam pemerintahan, maka dalam menyusun taksonomi RAL dilakukan dengan menganalisis luaran yang dihasilkan dari tiap fungsi pada instansi yang ada. Hasil analisis ini yang kemudian dijadikan dasar penetapan model referensi layanan.

Struktur dari Referensi Arsitektur Layanan SPBE terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu:

- 1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 (pertama);
- 2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai RAL tingkat 2 (kedua);
- 3) Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- 4) Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh) area layanan di tingkat 2 (kedua). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam menyusun RAL masing-masing mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 2. Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE.



Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Layanan Pemerintah Digital

3.8.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (*data share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan Pemerintah Digital yang terintegrasi.

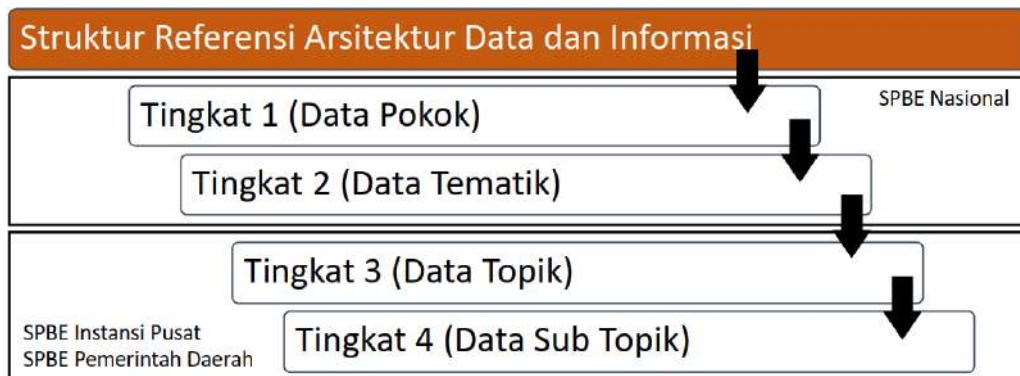
Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan yang diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI). Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Data dan informasi yang laik dan dapat dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE.

Pelaksanaan SPBE di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik. Domain arsitektur data dan informasi SPBE disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur



data yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis ataupun layanan ataupun data yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip pada sesuai dengan Perpres Satu Data Indonesia. Data dan



Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

3.8.4 Referensi Arsitektur Aplikasi

Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 21).

Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun, baik untuk kondisi saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara lain:

1. Taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan/atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
2. Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
3. Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
4. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
5. Berbasis standar terbuka (*open source*);
6. Terkorelasi dengan RAL, dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK.

Komponen Arsitektur Aplikasi SPBE:

1. Aplikasi Umum Layanan Publik. Lapisan aplikasi umum layanan publik merupakan lapisan aplikasi umum yang mendukung layanan publik, secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (*shared services*). Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik sesuai bidang dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tindak lanjut dan sebagai presentasi kepada publik hasil dari tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini akan berhubungan dengan lapisan di bawahnya baik Lapisan Aplikasi Khusus maupun Lapisan Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan.
2. Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan. Lapisan aplikasi umum administrasi pemerintahan memiliki fungsi yang sama dan digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara berbagi pakai dan dapat berupa modul fungsi aplikasi yang dipakai bersama (*shared services*). Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan. Lapisan ini akan mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung aplikasi pada lapisan di atasnya.
3. Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu. Aplikasi khusus ini hanya dikembangkan dan digunakan oleh instansi tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi dari instansi lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam organisasi pemerintahan. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.
4. Aplikasi Khusus Misi Tertentu. Lapisan aplikasi khusus misi tertentu mendukung misi tertentu organisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi khusus hanya dikembangkan dan digunakan oleh instansi tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi lain. Hal ini digunakan secara vertikal dalam organisasi pemerintahan. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

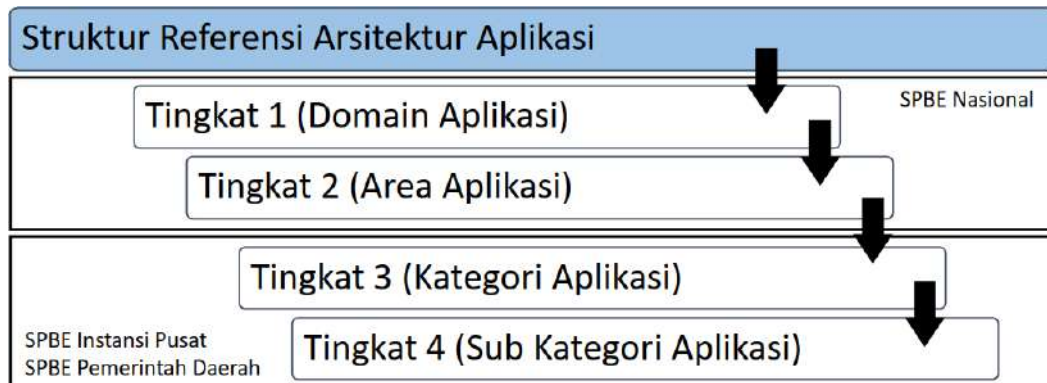
Struktur dari referensi Arsitektur Aplikasi terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu:

- 1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama);
- 2) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua).
- 3) Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target

layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan

- 4) Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 4 (empat) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam menyusun RAA masing-masing mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

3.8.5 Referensi Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 15).

Tujuan dari disusunnya Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah:

7. Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
8. Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
9. Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
10. Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
11. Berbasis standar umum (*open standard*);
12. Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Komponen Arsitektur Infrastruktur:

1. Platform

Lapisan ini terdiri dari:

- a. Komputasi Awan. Merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur TIK berupa sistem *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (PaaS), dan *Software as a Service* (SaaS), berupa berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, yang dikelola oleh instansi pemerintah dalam bentuk *Government Cloud*.
- b. Kerangka infrastruktur TIK dan aplikasi. Lapisan ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar platform lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan dibawahnya maupun diatasnya.

2. Sistem Integrasi

Lapisan ini terdiri dari:

- a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Lapisan sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan di bawahnya menjadi hubungan logikal yang akan mendukung lapisan domain layanan, domain data dan informasi, domain aplikasi, serta domain infrastruktur di atasnya.
- b. Jaringan Intra Pemerintah. Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan di bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya.

3. Fasilitas Komputasi

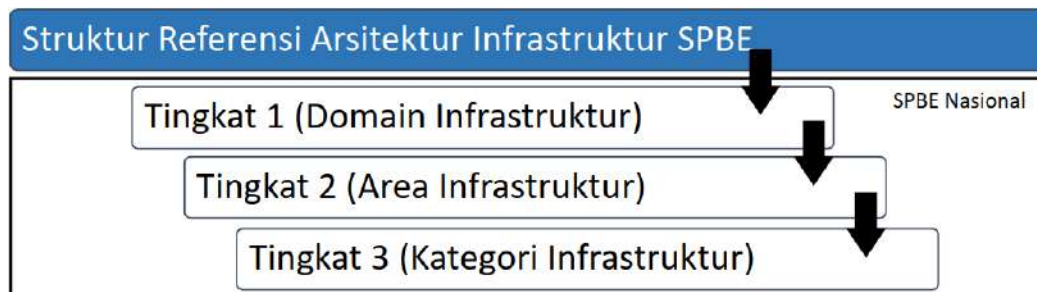
Lapisan ini terdiri dari Pusat Data Nasional, Pusat Komputasi dan Pusat Kendali yang bersifat nasional dan dapat terdiri dari milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah sesuai dengan nasional. Lapisan ini merupakan fasilitas dari layanan infrastruktur dasar dalam hal untuk penyimpanan (*storage*), kendali dan komputasi dari sistem nasional.

Struktur dari referensi Arsitektur Infrastruktur berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- 1) Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama) yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- 2) Area infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai

- tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- 3) Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE yang diperlukan. RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 7 (Tujuh) area di tingkat 2. RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK, sebagaimana pada Gambar 5.



Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

3.8.6 Referensi Arsitektur Keamanan

Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi suatu instansi pemerintah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Domain arsitektur keamanan adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Dalam kerangka kerja arsitektur SPBE, keberadaan domain arsitektur keamanan berbeda dengan domain arsitektur lainnya. Domain arsitektur keamanan selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE yang ditetapkan.

Komponen Arsitektur Keamanan:

1. Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

- a. standar dan/atau peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan;
- b. standar internasional terkait keamanan informasi; dan
- c. regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

2. Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan

kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Target pelaksanaan program kerja Keamanan SPBE ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
- b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
- c. peningkatan Keamanan SPBE; dan
- d. penanganan insiden Keamanan SPBE.

3. Kelaikan keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara *self assessment* (penilaian mandiri) oleh

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi pemrakarsa terhadap aplikasi umum dan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap *self assessment* tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Struktur dari referensi Arsitektur Keamanan terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

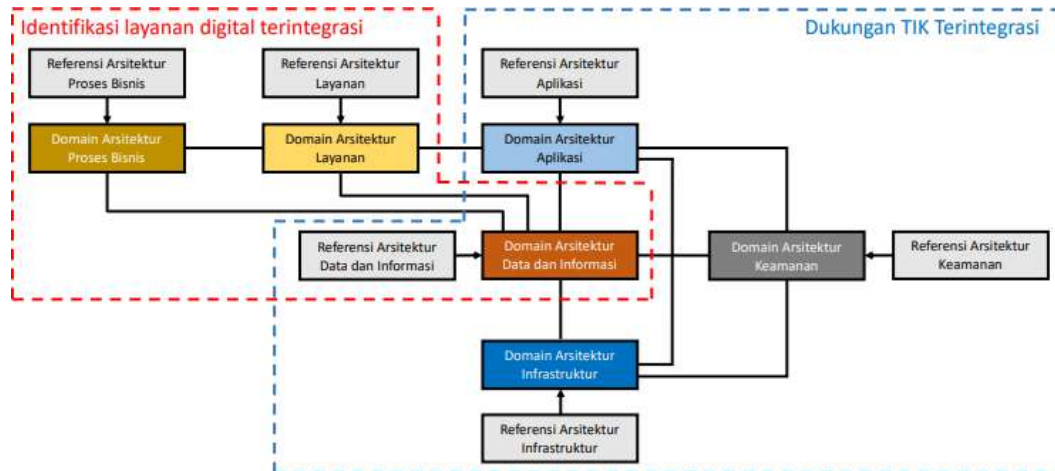
RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana pada Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

3.8.7 Keterkaitan Antar Referensi Arsitektur Pemerintah Digital

Arsitektur SPBE Nasional terdapat 6 (enam) domain referensi arsitektur yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur TIK berbagi pakai yang andal dan aman. Keterkaitan antar domain tersebut, dapat terlihat dalam kerangka kerja SPBE sebagaimana pada Gambar 7 berikut.



Gambar 7. Keterkaitan antar Referensi Arsitektur SPBE

Setiap organisasi pemerintahan, perlu mendefinisikan dengan jelas komponen-komponen ataupun entitas yang terkait dalam penyelenggaraan urusan yang diembannya. Dengan demikian, dapat dilakukan pemetaan semua entitas tersebut secara terintegrasi dengan lingkup nasional pada seluruh domain arsitektur SPBE. Kompleksitas yang ada dalam sistem pemerintahan sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pengaturan yang baik secara konvensional (*non-digital*).

Pemetaan entitas di atas akan menghasilkan sebuah peta arsitektur SPBE yang menyeluruh. Ini akan memberikan peluang untuk melihat apakah terdapat duplikasi fungsi yang tidak diperlukan. Dengan meminimalkan duplikasi yang ada akan mengurangi terjadinya pemborosan pembiayaan secara signifikan. Dikarenakan cakupan yang menyeluruh, maka arsitektur SPBE akan dapat mempermudah pendefinisian proses bisnis baru, penyederhanaan proses bisnis, pembentukan layanan yang inovatif, efisiensi penggunaan infrastruktur dengan berbagi pakai, efisiensi pengembangan aplikasi yang diperlukan, peningkatan kredibilitas pemerintah dengan informasi yang akurat dan terpercaya, dan lainnya.

3.9 Metadata Arsitektur Pemerintah Digital

Metadata adalah informasi terstruktur yang menjelaskan identitas, karakteristik, kepemilikan, serta hubungan suatu objek arsitektur. Metadata berfungsi untuk: (1) memberi identitas unik setiap objek arsitektur; (2) menunjukkan kepemilikan dan penanggung jawab; (3) menjelaskan hubungan antarobjek lintas domain; dan (4) menjadi dasar pemutakhiran arsitektur.

3.10 Pengelolaan dan Pemutakhiran Arsitektur

Arsitektur Pemerintah Digital bukan dokumen statis — arsitektur perlu dikelola agar tetap

aktual dan dapat digunakan. Prinsip pengelolaan mencakup:

1. Kejelasan pemilik arsitektur dan pemilik masing-masing objek arsitektur;
2. Mekanisme validasi dan persetujuan atas perubahan;
3. Pemutakhiran dan revidi berkala;
4. Pengendalian perubahan (change control);
5. Pengelolaan repository arsitektur;

Pemanfaatan SIAP Digital sebagai basis dokumentasi, apabila relevan.

Siklus pemutakhiran:

- **Identifikasi Perubahan**
- **Asesmen Dampak**
- **Validasi**
- **Persetujuan**
- **Pemutakhiran**
- **Monitoring**

BAB IV

ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bab ini disusun sebagai kerangka struktur, mengingat data eksisting Provinsi Sumatera Selatan (proses bisnis, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan) belum tersedia pada dokumen sumber. Bagian yang memerlukan data aktual ditandai belum tersedia dan agar dilengkapi setelah hasil pengumpulan dan validasi data dari perangkat daerah selesai dilakukan.

4.1 Gambaran Umum Arsitektur Pemerintah Digital

Bab ini merupakan penerapan kerangka Arsitektur Pemerintah Digital (BAB III) pada konteks Provinsi Sumatera Selatan — mencakup empat kelompok arsitektur (Layanan Digital Pemerintah, Data, Teknologi Pemerintah Digital, dan Keamanan Pemerintah Digital) beserta enam domainnya. Setiap arsitektur dibaca melalui alur yang sama: kondisi eksisting dibandingkan dengan kondisi target untuk menghasilkan analisis kesenjangan dan kebutuhan penguatan, yang selanjutnya menjadi masukan bagi Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital. dengan Arsitektur Keamanan Pemerintah Digital melindungi keseluruhan lapisan di atas.

Pengguna ditempatkan sebagai pusat setiap arsitektur, bukan struktur organisasi perangkat daerah atau aplikasi yang sudah ada. Hasil BAB IV — berupa kesenjangan dan kebutuhan penguatan — menjadi input utama bagi Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital.

4.2 Gambaran Kondisi Eksisting Pemerintah Digital

Ringkasan eksekutif kondisi Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan saat ini, berdasarkan empat kelompok arsitektur:

Analisis kondisi eksisting minimal mencakup delapan aspek berikut (untuk dilengkapi setelah data tersedia):

1. Tingkat keterpaduan layanan;
2. Tingkat keterhubungan proses lintas perangkat daerah;
3. Pemanfaatan dan pertukaran data;
4. Kondisi portofolio aplikasi;
5. Tingkat integrasi aplikasi;
6. Pemanfaatan infrastruktur bersama;
7. Kondisi keamanan;
8. Hubungan lintas domain.



4.3 Arsitektur Layanan Digital Pemerintah

Arsitektur Layanan Digital Pemerintah menjawab pertanyaan bagaimana proses pemerintahan dirancang dan bagaimana layanan disampaikan kepada pengguna. Kelompok arsitektur ini terdiri atas dua domain, yaitu Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan. Keduanya disusun menggunakan referensi arsitektur nasional sebagaimana diuraikan pada BAB III, kemudian diturunkan menjadi metadata pada konteks Provinsi Sumatera Selatan.

4.3.1 Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Proses Bisnis memetakan proses utama, proses lintas fungsi, dan proses pendukung yang dijalankan perangkat daerah untuk menghasilkan layanan. Pemetaan ini menjadi dasar penyederhanaan dan rekayasa ulang proses agar layanan dapat berjalan terpadu lintas perangkat daerah.

Referensi Arsitektur

Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) terdiri atas empat tingkat: sektor pemerintahan (tingkat 1), urusan pemerintahan (tingkat 2), fungsi pemerintahan (tingkat 3), dan sub fungsi pemerintahan (tingkat 4). Tabel berikut menyajikan referensi yang digunakan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis yang Digunakan di Provinsi Sumatera Selatan

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
RAB.01 PERTAHANAN DAN LUAR NEGERI	RAB.01.01 PERTAHANAN	RAB.01.01.01 STRATEGI PERTAHANAN
		RAB.01.01.02 PERENCANAAN PERTAHANAN
		RAB.01.01.03 POTENSI PERTAHANAN
		RAB.01.01.04 KEKUATAN PERTAHANAN
	RAB.01.02 URUSAN LUAR NEGERI	RAB.01.02.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI
		RAB.01.02.02 HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
		RAB.01.02.03 INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK
		RAB.01.02.04 PROTOKOL DAN KONSULER
		RAB.01.02.05 PELINDUNGAN WNI
		RAB.01.02.06 FASILITAS DIPLOMATIK
RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
		RAB.02.01.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0
		RAB.02.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI
		RAB.02.01.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		RAB.02.01.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
		RAB.02.01.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI
		RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF
	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
		RAB.02.02.02 PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
		RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
		RAB.02.02.04 OPTIMALISASI AKSES PASAR INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI PERDAGANGAN
		RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
		RAB.02.02.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK
		RAB.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN
		RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
		RAB.02.03.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
		RAB.02.03.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA
		RAB.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
		RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
		RAB.02.03.17 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAB.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
		RAB.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN
		RAB.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN
		RAB.02.03.21 KERAHANAN PANGAN DAN GIZI
		RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN
		RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
	RAB.02.04 PERKEBUNAN	RAB.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.07 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.08 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PERKEBUNAN
		RAB.02.04.10 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PERKEBUNAN

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		RAB.02.04.11 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PERKEBUNAN
	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK
		RAB.02.05.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN
		RAB.02.05.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
		RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
		RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		RAB.02.05.06 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PETERNAKAN
		RAB.02.05.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
		RAB.02.05.08 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
		RAB.02.05.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS PETERNAKAN
		RAB.02.05.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN PETERNAKAN
		RAB.02.05.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN
		RAB.02.05.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN
		RAB.02.05.13 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PETERNAKAN
	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
		RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
		RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
	RAB.02.07 BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAB.02.07.01 PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.02 INISIATIF BISNIS STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.03 PENGUATAN DAYA SAING DAN SINERGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.04 PENGUATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.05 PENCIPTAAN PERTUMBUHAN

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		BERKELANJUTAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.06 RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.07 PENGELOLAAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.08 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.09 TEKNOLOGI DAN INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.10 KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.11 MANAJEMEN RISIKO BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAB.02.07.12 PENGELOLAAN BADAN USAHA KAWASAN
	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		RAB.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
		RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
		RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		RAB.02.08.05 HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
		RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
	RAB.02.09 KOPERASI	RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
		RAB.02.09.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI
		RAB.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
		RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAB.02.10.01 USAHA MIKRO
		RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
		RAB.02.10.03 KEWIRAUSAHAAN
	RAB.02.11 PARIWISATA	RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
		RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
		RAB.02.11.03 INDUSTRI PARIWISATA
		RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA
		RAB.02.11.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS)
		RAB.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
		RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
		RAB.03.01.04 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
		RAB.03.01.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR
	RAB.03.02 TRANSMIGRASI	RAB.03.02.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAB.03.02.02 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JARINGAN KONEKTIVITAS INTRA KAWASAN TRANSMIGRASI, DAN ANTARA KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN KAWASAN SEKITAR
		RAB.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAB.03.02.04 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
		RAB.03.02.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAB.03.02.06 FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
		RAB.03.02.07 FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
	RAB.03.03 TRANSPORTASI	RAB.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
		RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
		RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
		RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
		RAB.03.03.05 PENGELOLAAN SDM TRANSPORTASI
		RAB.03.03.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
		RAB.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN
	RAB.03.04 PERUMAHAN	RAB.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
		RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		PRASARANA STRATEGIS
		RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
	RAB.03.05 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAB.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAB.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAB.03.05.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAB.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAB.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAB.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAB.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
		RAB.03.05.08 PENYERASIAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH KHUSUS
		RAB.03.05.09 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
		RAB.03.05.10 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAERAH TERTINGGAL
		RAB.03.05.11 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL
		RAB.03.05.12 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DAERAH TERTINGGAL
		RAB.03.05.13 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH TERTINGGAL
		RAB.03.05.14 PENYERASIAN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS
	RAB.03.06 PERTANAHAN	RAB.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		PEMANFAATAN RUANG
		RAB.03.06.02 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG
		RAB.03.06.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG
		RAB.03.06.04 PENYELENGGARA REFORMA AGRARIA
		RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
		RAB.03.06.06 PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN
		RAB.03.06.07 PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN RUANG
		RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
		RAB.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN
	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN	RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
		RAB.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
		RAB.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA
		RAB.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
		RAB.03.07.05 PENDATAAN KELUARGA
RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		RAB.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN
		RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
		RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
		RAB.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
		RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
		RAB.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
	RAB.04.02 SOSIAL	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
		RAB.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		SOSIAL
		RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
		RAB.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
		RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
		RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
		RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK
		RAB.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
		RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.
RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAB.05.01 HUKUM	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
		RAB.05.01.03 PEMASYARAKATAN
		RAB.05.01.04 KEIMIGRASIAN
		RAB.05.01.05 PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
		RAB.05.01.06 PENYIDIKAN
		RAB.05.01.07 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
		RAB.05.01.08 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT
		RAB.05.01.09 PERADILAN
		RAB.05.01.10 PENUNTUTAN
	RAB.05.02 KEAMANAN	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
		RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM
		RAB.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
		RAB.05.02.04 PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN TERORISME
	RAB.05.03 HAK ASASI MANUSIA	RAB.05.03.01 PERLINDUNGAN HAM
		RAB.05.03.02 PEMAJUAN HAM
		RAB.05.03.03 PENEGAKAN HAM

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		RAB.05.03.04 PEMENUHAN HAM
RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAB.06.01 PENDIDIKAN	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
		RAB.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL
		RAB.06.01.04 PENDIDIKAN TINGGI
		RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN
		RAB.06.01.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN	RAB.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
		RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
		RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
		RAB.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
		RAB.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
		RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
		RAB.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI
	RAB.06.04 PEMUDA	RAB.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
		RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
	RAB.06.05 OLAHRAGA	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
		RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAB.07.01 PERTAMBANGAN	RAB.07.01.01 PENGELOLAAN MINYAK
		RAB.07.01.02 PENGELOLAAN GAS BUMI
		RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
		RAB.07.01.04 PENGELOLAAN BATUBARA
		RAB.07.01.05 PENGELOLAAN GEOLOGI
	RAB.07.02 ENERGI	RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
		RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
	RAB.07.03 KEHUTANAN	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
		RAB.07.03.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
		RAB.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
		RAB.07.03.04 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGS
		RAB.07.03.05 PENINGKATAN REHABILITASI HUTAN
		RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
	RAB.07.04 KELAUTAN	RAB.07.04.01 PENGELOLAAN LAUT
		RAB.07.04.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT
		RAB.07.04.03 PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
		RAB.07.04.04 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
		RAB.07.04.05 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
		RAB.07.04.06 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
		RAB.07.04.07 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN
	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP	RAB.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
		RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
		RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
		RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
		RAB.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
		RAB.07.05.06 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
		RAB.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA	RAB.08.01 AGAMA	RAB.08.01.01 PEMAHAMAN DAN LAYANAN KEAGAMAAN
		RAB.08.01.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
		RAB.08.01.03 OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN
		RAB.08.01.04 PENJAMINAN PRODUK HALAL
		RAB.08.01.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
		RAB.08.01.06 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		PENDIDIKAN MADRASAH
		RAB.08.01.07 PENINGKATAN AKSES, MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
		RAB.08.01.08 PENINGKATAN MUTU PESANTREN
		RAB.08.01.09 PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
	RAB.08.02 KEBUDAYAAN	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
		RAB.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
		RAB.08.02.03 PERIZINAN KEBUDAYAAN
		RAB.08.02.04 PENGELOLAAN BANTUAN KEBUDAYAAN DAN KEBAHASAAN
		RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
		RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM	RAB.09.01 DALAM NEGERI	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
		RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH
		RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
		RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
		RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
		RAB.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH
		RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RAB.09.02 KEUANGAN	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
		RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
		RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
		RAB.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA
		RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
		RAB.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
		RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
		RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
		RAB.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN
		RAB.09.02.10 PENGELOLAAN FISKAL LAINNYA

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
	RAB.09.03 INFORMASI	RAB.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
		RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
		RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
		RAB.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL
		RAB.09.03.06 PENYIARAN RADIO PUBLIK
		RAB.09.03.07 PENYIARAN TELEVISI PUBLIK
		RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
	RAB.09.04 KOMUNIKASI	RAB.09.04.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
		RAB.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
	RAB.09.05 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAB.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		RAB.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
		RAB.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
		RAB.09.05.04 PRAKARSA STRATEGIS (ENABLER)
	RAB.09.06 APARATUR NEGARA	RAB.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
		RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
		RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
		RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
		RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
	RAB.09.07 KESEKRETARIATAN NEGARA	RAB.09.07.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
		RAB.09.07.02 PEMBERIAN ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		RAB.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
		RAB.09.07.04 PENANGANAN PENETAPAN KEPUTUSAN DALAM KEWENANGAN PRESIDEN

RAB 1 (Sektor Utama)	RAB 2 (Bidang/Fungsi)	RAB 3 (Sub-Kegiatan/Program)
		RAB.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN
		RAB.09.07.06 PENGENDALIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
		RAB.09.07.07 PENGELOLAAN ISU STRATEGIS
		RAB.09.07.08 PENGELOLAAN KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN
		RAB.09.07.09 DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI KSP
		RAB.09.07.10 DUKUNGAN MANAJEMEN KABINET KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
		RAB.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN

Metadata Arsitektur

Metadata Arsitektur Proses Bisnis Provinsi Sumatera Selatan disajikan secara lengkap pada Lampiran A. Metadata memuat atribut identitas, pemilik, keterkaitan antar domain, serta status pemutakhiran untuk setiap objek arsitektur, dan diisi setelah proses pengumpulan data eksisting pada perangkat daerah selesai dilaksanakan.

4.3.2 Arsitektur Layanan

Arsitektur Layanan memetakan layanan yang diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan internal pemerintahan, beserta pengguna, kanal, dan kebutuhan yang dilayani. Hasilnya berupa katalog layanan yang berorientasi pengguna, bukan berorientasi aplikasi atau struktur organisasi.

Referensi Arsitektur

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) terdiri atas empat tingkat: domain layanan (tingkat 1), area layanan (tingkat 2), kategori layanan (tingkat 3), dan sub kategori layanan (tingkat 4).

Tabel 4.2 Referensi Arsitektur Layanan yang Digunakan di Provinsi Sumatera Selatan

RAL 1 (Sektor Utama)	RAL 2 (Bidang/Fungsi)	RAL 3 (Sub-Kegiatan/Program)
RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.01 PERTAHANAN	RAL.01.01.01 STRATEGI PERTAHANAN
		RAL.01.01.02 PERENCANAAN PERTAHANAN
		RAL.01.01.03 POTENSI PERTAHANAN

		RAL.01.01.04 KEKUATAN PERTAHANAN
	RAL.01.02 URUSAN LUAR NEGERI	RAL.01.02.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI
		RAL.01.02.02 HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
		RAL.01.02.03 INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK
		RAL.01.02.04 PROTOKOL DAN KONSULER
		RAL.01.02.05 PELINDUNGAN WNI
		RAL.01.02.06 FASILITAS DIPLOMATIK
	RAL.01.03 KENEGARAAN	(Tidak ada sub-kegiatan)
	RAL.01.04 EKONOMI	(Tidak ada sub-kegiatan)
	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
		RAL.01.05.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0
		RAL.01.05.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI
		RAL.01.05.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI
		RAL.01.05.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
		RAL.01.05.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI
		RAL.01.05.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF
	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
		RAL.01.06.02 PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
		RAL.01.06.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
		RAL.01.06.04 OPTIMALISASI AKSES PASAR INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI PERDAGANGAN
		RAL.01.06.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
		RAL.01.06.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK
		RAL.01.06.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN

		RAL.01.07.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
		RAL.01.07.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
		RAL.01.07.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA
		RAL.01.07.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
		RAL.01.07.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
		RAL.01.07.17 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAL.01.07.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
		RAL.01.07.19 KETERSEDIAAN PANGAN
		RAL.01.07.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN
		RAL.01.07.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
		RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN
		RAL.01.07.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
	RAL.01.08 PERKEBUNAN	RAL.01.08.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.07 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.08 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA

		TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.10 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAL.01.08.11 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PERKEBUNAN
	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK
		RAL.01.09.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN
		RAL.01.09.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
		RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
		RAL.01.09.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		RAL.01.09.06 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PETERNAKAN
		RAL.01.09.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
		RAL.01.09.08 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
		RAL.01.09.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS PETERNAKAN
		RAL.01.09.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN PETERNAKAN
		RAL.01.09.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN
		RAL.01.09.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN
		RAL.01.09.13 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PETERNAKAN
	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		RAL.01.10.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
		RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
		RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
	RAL.01.11 BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAL.01.11.01 PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.02 INISIATIF BISNIS STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.03 PENGUATAN DAYA SAING DAN SINERGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.04 PENGUATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.05 PENCIPTAAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.06 RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.07 PENGELOLAAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

		RAL.01.11.08 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.09 TEKNOLOGI DAN INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.10 KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.11 MANAJEMEN RISIKO BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAL.01.11.12 PENGELOLAAN BADAN USAHA KAWASAN
	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		RAL.01.12.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
		RAL.01.12.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
		RAL.01.12.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		RAL.01.12.05 HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
		RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
		RAL.01.13.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI
		RAL.01.13.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
		RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI
	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 USAHA MIKRO
		RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
		RAL.01.14.03 KEWIRAUSAHAAN
	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
		RAL.01.15.02 DESTINASI PARIWISATA
		RAL.01.15.03 INDUSTRI PARIWISATA
		RAL.01.15.04 PEMASARAN PARIWISATA
		RAL.01.15.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS)
		RAL.01.15.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
	RAL.01.16 PERIZINAN DAN AKREDITASI	(Tidak ada sub-kegiatan)
	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
		RAL.01.17.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
		RAL.01.17.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
		RAL.01.17.04 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
		RAL.01.17.05 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR
	RAL.01.18 TRANSMIGRASI	RAL.01.18.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI

		RAL.01.18.02 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JARINGAN KONEKTIVITAS INTRA KAWASAN TRANSMIGRASI, DAN ANTARA KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN KAWASAN SEKITAR
		RAL.01.18.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAL.01.18.04 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
		RAL.01.18.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAL.01.18.06 FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
		RAL.01.18.07 FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
		RAL.01.19.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
		RAL.01.19.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
		RAL.01.19.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
		RAL.01.19.05 PENGELOLAAN SDM TRANSPORTASI
		RAL.01.19.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
		RAL.01.19.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN
	RAL.01.20 PERUMAHAN	RAL.01.20.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		RAL.01.20.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
		RAL.01.20.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS
		RAL.01.20.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAL.01.21.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAL.01.21.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAL.01.21.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAL.01.21.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN

		KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAL.01.21.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAL.01.21.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
		RAL.01.21.08 PENYERASIAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH KHUSUS
		RAL.01.21.09 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
		RAL.01.21.10 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAERAH TERTINGGAL
		RAL.01.21.11 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL
		RAL.01.21.12 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DAERAH TERTINGGAL
		RAL.01.21.13 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH TERTINGGAL
		RAL.01.21.14 PENYERASIAN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS
	RAL.01.22 PERTANAHAN	RAL.01.22.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG
		RAL.01.22.02 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG
		RAL.01.22.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG
		RAL.01.22.04 PENYELENGGARA REFORMA AGRARIA
		RAL.01.22.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
		RAL.01.22.06 PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN
		RAL.01.22.07 PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN RUANG
		RAL.01.22.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
		RAL.01.22.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN
	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	RAL.01.23.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
		RAL.01.23.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
		RAL.01.23.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA
		RAL.01.23.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
		RAL.01.23.05 PENDATAAN KELUARGA

	RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH	(Tidak ada sub-kegiatan)
	RAL.01.25 KESEHATAN	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		RAL.01.25.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN
		RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
		RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
		RAL.01.25.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
		RAL.01.25.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
		RAL.01.25.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
	RAL.01.26 SOSIAL	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
		RAL.01.26.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
		RAL.01.26.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
		RAL.01.26.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
		RAL.01.26.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
		RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAL.01.27.01 KESETARAAN GENDER
		RAL.01.27.02 PEMENUHAN HAK ANAK
		RAL.01.27.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
		RAL.01.27.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		RAL.01.27.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL
	RAL.01.28 HUKUM	RAL.01.28.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		RAL.01.28.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
		RAL.01.28.03 PEMASYARAKATAN
		RAL.01.28.04 KEIMIGRASIAN
		RAL.01.28.05 PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
		RAL.01.28.06 PENYIDIKAN
		RAL.01.28.07 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
		RAL.01.28.08 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT
		RAL.01.28.09 PERADILAN
		RAL.01.28.10 PENUNTUTAN

	RAL.01.29 KEAMANAN	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
		RAL.01.29.02 PENEGAKAN HUKUM
		RAL.01.29.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT
		RAL.01.29.04 PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN TERORISME
	RAL.01.30 HAK ASASI MANUSIA	RAL.01.30.01 PERLINDUNGAN HAM
		RAL.01.30.02 PEMAJUAN HAM
		RAL.01.30.03 PENEGAKAN HAM
		RAL.01.30.04 PEMENUHAN HAM
	RAL.01.31 PENDIDIKAN	RAL.01.31.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
		RAL.01.31.03 PENDIDIKAN NON FORMAL
		RAL.01.31.04 PENDIDIKAN TINGGI
		RAL.01.31.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN
		RAL.01.31.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	RAL.01.32.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
		RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
		RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
		RAL.01.32.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
		RAL.01.32.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAL.01.33.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
		RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI
		RAL.01.33.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI
	RAL.01.34 PEMUDA	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
		RAL.01.34.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
	RAL.01.35 OLAHRAGA	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
		RAL.01.35.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
	RAL.01.36 PERTAMBANGAN	RAL.01.36.01 PENGELOLAAN MINYAK
		RAL.01.36.02 PENGELOLAAN GAS BUMI
		RAL.01.36.03 PENGELOLAAN MINERAL

		RAL.01.36.04 PENGELOLAAN BATUBARA
		RAL.01.36.05 PENGELOLAAN GEOLOGI
	RAL.01.37 ENERGI	RAL.01.37.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
		RAL.01.37.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
		RAL.01.37.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
	RAL.01.38 KEHUTANAN	RAL.01.38.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
		RAL.01.38.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
		RAL.01.38.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
		RAL.01.38.04 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI
		RAL.01.38.05 PENINGKATAN REHABILITASI HUTAN
		RAL.01.38.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
	RAL.01.39 KELAUTAN	RAL.01.39.01 PENGELOLAAN LAUT
		RAL.01.39.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT
		RAL.01.39.03 PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
		RAL.01.39.04 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
		RAL.01.39.05 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
		RAL.01.39.06 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
		RAL.01.39.07 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN
	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
		RAL.01.40.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
		RAL.01.40.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
		RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH
		RAL.01.40.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
		RAL.01.40.06 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
		RAL.01.40.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
	RAL.01.41 AGAMA	RAL.01.41.01 PEMAHAMAN DAN LAYANAN KEAGAMAAN
		RAL.01.41.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
		RAL.01.41.03 OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN
		RAL.01.41.04 PENJAMINAN PRODUK HALAL
		RAL.01.41.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
		RAL.01.41.06 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH

ARSITEKTUR PEMERINTAH DIGITAL

Metadata Arsitektur

Metadata Arsitektur Layanan Provinsi Sumatera Selatan disajikan secara lengkap pada Lampiran B. Metadata memuat atribut identitas, pemilik, keterkaitan antar domain, serta status pemutakhiran untuk setiap objek arsitektur, dan diisi setelah proses pengumpulan data eksisting pada perangkat daerah selesai dilaksanakan.

4.4 Arsitektur Data

Arsitektur Data menjawab pertanyaan data apa yang dibutuhkan oleh layanan, siapa produsen dan penggunaanya, serta bagaimana data dipertukarkan antar perangkat daerah. Arsitektur ini menjadi dasar berbagi pakai data dan penghapusan duplikasi pengumpulan data.

- **Referensi Arsitektur**

Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) terdiri atas empat tingkat: pokok data (tingkat 1), tema data (tingkat 2), topik data (tingkat 3), dan sub topik data (tingkat 4).

Tabel 4.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi yang Digunakan di Provinsi Sumatera Selatan

RAD level 1	RAD level 2	RAD Level 3
RAD.01 INFORMASI PERTAHANAN DAN LUAR NEGERI	RAD.01.01 DATA PERTAHANAN	RAD.01.01.01 STRATEGI PERTAHANAN
		RAD.01.01.02 PERENCANAAN PERTAHANAN
		RAD.01.01.03 POTENSI PERTAHANAN
		RAD.01.01.04 KEKUATAN PERTAHANAN
	RAD.01.02 DATA URUSAN LUAR NEGERI	RAD.01.02.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI
		RAD.01.02.02 HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
		RAD.01.02.03 INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK
		RAD.01.02.04 PROTOKOL DAN KONSULER

		RAD.01.02.05 PELINDUNGAN WNI
		RAD.01.02.06 FASILITAS DIPLOMATIK
RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
		RAD.02.01.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0
		RAD.02.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI
		RAD.02.01.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI
		RAD.02.01.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
		RAD.02.01.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI
		RAD.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF
	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
		RAD.02.02.02 PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
		RAD.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
		RAD.02.02.04 OPTIMALISASI AKSES PASAR INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI PERDAGANGAN
		RAD.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
		RAD.02.02.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK
		RAD.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM

		PERTANIAN
		RAD.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
		RAD.02.03.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
		RAD.02.03.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA
		RAD.02.03.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
		RAD.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
		RAD.02.03.17 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
		RAD.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
		RAD.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN
		RAD.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN
		RAD.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
		RAD.02.03.22 KEAMANAN PANGAN
		RAD.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.07 PENGELOLAAN STANDARDISASI

		DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.08 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.10 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PERKEBUNAN
		RAD.02.04.11 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PERKEBUNAN
	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK
		RAD.02.05.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN
		RAD.02.05.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
		RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
		RAD.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		RAD.02.05.06 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PETERNAKAN
		RAD.02.05.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
		RAD.02.05.08 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
		RAD.02.05.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS PETERNAKAN
		RAD.02.05.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN PETERNAKAN
		RAD.02.05.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN
		RAD.02.05.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN
		RAD.02.05.13 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PETERNAKAN
	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		RAD.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
		RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
		RAD.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN

		SUMBER DAYA PERIKANAN
	RAD.02.07 DATA BADAN USAHA MILIK NEGARA	RAD.02.07.01 PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.02 INISIATIF BISNIS STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.03 PENGUATAN DAYA SAING DAN SINERGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.04 PENGUATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.05 PENCIPTAAN PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.06 RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.07 PENGELOLAAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.08 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.09 TEKNOLOGI DAN INFORMASI BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.10 KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.11 MANAJEMEN RISIKO BADAN USAHA MILIK NEGARA
		RAD.02.07.12 PENGELOLAAN BADAN USAHA KAWASAN
	RAD.02.08 DATA INVESTASI	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
		RAD.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
		RAD.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
		RAD.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		RAD.02.08.05 HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
		RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
	RAD.02.09 DATA KOPERASI	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
		RAD.02.09.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI
		RAD.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
		RAD.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAD.02.10.01 USAHA MIKRO
		RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
		RAD.02.10.05 KEWIRAUSAHAAN
	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

		RAD.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
		RAD.02.11.03 INDUSTRI PARIWISATA
		RAD.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA
		RAD.02.11.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS)
		RAD.02.11.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
		RAD.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
		RAD.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
		RAD.03.01.04 PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
		RAD.03.01.06 PENGELOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR
	RAD.03.02 DATA TRANSMIGRASI	RAD.03.02.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAD.03.02.02 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JARINGAN KONEKTIVITAS INTRA KAWASAN TRANSMIGRASI, DAN ANTARA KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN KAWASAN SEKITAR
		RAD.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAD.03.02.04 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
		RAD.03.02.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		RAD.03.02.06 FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI
		RAD.03.02.07 FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	RAD.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
		RAD.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
		RAD.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
		RAD.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS

		TRANSPORTASI
		RAD.03.03.05 PENGELOLAAN SDM TRANSPORTASI
		RAD.03.03.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
		RAD.03.03.07 PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN
	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	RAD.03.04.07 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		RAD.03.04.08 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
		RAD.03.04.09 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS
		RAD.03.04.10 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAD.03.05.02 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAD.03.05.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAD.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAD.03.05.05 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAD.03.05.06 PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
		RAD.03.05.07 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
		RAD.03.05.08 PENYERASIAN DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN DAERAH KHUSUS
		RAD.03.05.09 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL
		RAD.03.05.10 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN DAERAH TERTINGGAL
		RAD.03.05.11 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH

		TERTINGGAL
		RAD.03.05.12 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DAERAH TERTINGGAL
		RAD.03.05.13 PENYERASIAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH TERTINGGAL
		RAD.03.05.14 PENYERASIAN DAN FASILITASI PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS
	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	RAD.03.06.01 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG
		RAD.03.06.02 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR GEOSPASIAL TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG
		RAD.03.06.03 KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DAN RUANG
		RAD.03.06.04 PENYELENGGARA REFORMA AGRARIA
		RAD.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
		RAD.03.06.06 PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN
		RAD.03.06.07 PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN RUANG
		RAD.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
		RAD.03.06.09 PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN
	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
		RAD.03.07.02 KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
		RAD.03.07.03 PEMBANGUNAN KELUARGA DAN KELUARGA SEJAHTERA
		RAD.03.07.04 PEMBERDAYAAN DAN PERAN MASYARAKAT
		RAD.03.07.05 PENDATAAN KELUARGA
RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		RAD.04.01.02 PENGELOLAAN KEFARMASIAN
		RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
		RAD.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
		RAD.04.01.05 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
		RAD.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT

		RAD.04.01.07 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
		RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
	RAD.04.02 DATA SOSIAL	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
		RAD.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
		RAD.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
		RAD.04.02.04 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
		RAD.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
		RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	RAD.04.03.01 KESETARAAN GENDER
		RAD.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK
		RAD.04.03.03 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
		RAD.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.
RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.01 DATA HUKUM	RAD.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
		RAD.05.01.03 PEMASYARAKATAN
		RAD.05.01.04 KEIMIGRASIAN
		RAD.05.01.05 PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
		RAD.05.01.06 PENYIDIKAN
		RAD.05.01.07 PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
		RAD.05.01.08 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT
		RAD.05.01.09 PERADILAN
		RAD.05.01.10 PENUNTUTAN
	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
		RAD.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM
		RAD.05.02.03 PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

		RAD.05.02.04 PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN TERORISME
	RAD.05.03 DATA HAK ASASI MANUSIA	RAD.05.03.01 PERLINDUNGAN HAM
		RAD.05.03.02 PEMAJUAN HAM
		RAD.05.03.03 PENEGAKAN HAM
		RAD.05.03.04 PEMENUHAN HAM
RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	RAD.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
		RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
		RAD.06.01.03 PENDIDIKAN NON FORMAL
		RAD.06.01.04 PENDIDIKAN TINGGI
		RAD.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN
		RAD.06.01.06 PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
		RAD.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
		RAD.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
		RAD.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
		RAD.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	RAD.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
		RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI
		RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI
	RAD.06.04 DATA PEMUDA	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
		RAD.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
		RAD.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.01 DATA PERTAMBANGAN	RAD.07.01.01 PENGELOLAAN MINYAK
		RAD.07.01.02 PENGELOLAAN GAS BUMI

		RAD.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
		RAD.07.01.04 PENGELOLAAN BATUBARA
		RAD.07.01.05 PENGELOLAAN GEOLOGI
	RAD.07.02 DATA ENERGI	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
		RAD.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
		RAD.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
		RAD.07.03.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
		RAD.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
		RAD.07.03.04 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI
		RAD.07.03.05 PENINGKATAN REHABILITASI HUTAN
		RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
	RAD.07.04 DATA KELAUTAN	RAD.07.04.01 PENGELOLAAN LAUT
		RAD.07.04.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT
		RAD.07.04.03 PELINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
		RAD.07.04.04 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
		RAD.07.04.05 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
		RAD.07.04.06 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
		RAD.07.04.07 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN
	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
		RAD.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
		RAD.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
		RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
		RAD.07.05.05 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
		RAD.07.05.06 PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
		RAD.07.05.07 PENYELENGGARAAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN	RAD.08.01 DATA AGAMA	RAD.08.01.01 PEMAHAMAN DAN LAYANAN KEAGAMAAN

AGAMA		
		RAD.08.01.02 PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
		RAD.08.01.03 OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI KEAGAMAAN
		RAD.08.01.04 PENJAMINAN PRODUK HALAL
		RAD.08.01.05 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
		RAD.08.01.06 PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH
		RAD.08.01.07 PENINGKATAN AKSES, MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
		RAD.08.01.08 PENINGKATAN MUTU PESANTREN
		RAD.08.01.09 PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
		RAD.08.02.02 PENGELOLAAN PROGRAM KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN
		RAD.08.02.03 PERIZINAN KEBUDAYAAN
		RAD.08.02.04 PENGELOLAAN BANTUAN KEBUDAYAAN DAN KEBAHASAAN
		RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
		RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
		RAD.09.01.02 OTONOMI DAERAH
		RAD.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
		RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
		RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
		RAD.09.01.06 PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH
		RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
		RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
		RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
		RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA
		RAD.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN

		RAD.09.02.06 PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
		RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
		RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
		RAD.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN
		RAD.09.02.10 PENGELOLAAN FISKAL LAINNYA
		RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
	RAD.09.03 DATA INFORMASI	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
		RAD.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
		RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
		RAD.09.03.05 PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL
		RAD.09.03.06 PENYIARAN RADIO PUBLIK
		RAD.09.03.07 PENYIARAN TELEVISI PUBLIK
		RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	RAD.09.04.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS
		RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		RAD.09.05.02 PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
		RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
		RAD.09.05.04 PRAKARSA STRATEGIS (ENABLER)
	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
		RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
		RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
		RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
		RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
		RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA	RAD.09.07.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL

		PRESIDEN
		RAD.09.07.02 PEMBERIAN ANALISIS PENDAPAT HUKUM DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		RAD.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
		RAD.09.07.04 PENANGANAN PENETAPAN KEPUTUSAN DALAM KEWENANGAN PRESIDEN
		RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN
		RAD.09.07.06 PENGENDALIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
		RAD.09.07.07 PENGELOLAAN ISU STRATEGIS
		RAD.09.07.08 PENGELOLAAN KOMUNIKASI POLITIK PRESIDEN
		RAD.09.07.09 DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI KSP
		RAD.09.07.10 DUKUNGAN MANAJEMEN KABINET KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
		RAD.09.07.11 PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN
RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH	(Tidak ada sub-kegiatan)
	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	(Tidak ada sub-kegiatan)
	RAD.10.03 DATA KEWILAYAHAN	(Tidak ada sub-kegiatan)
	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	(Tidak ada sub-kegiatan)

- **Metadata Arsitektur**

Metadata Arsitektur Data dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan disajikan secara lengkap pada Lampiran C. Metadata memuat atribut identitas, pemilik, keterkaitan antar domain, serta status pemutakhiran untuk setiap objek arsitektur, dan diisi setelah proses pengumpulan data eksisting pada perangkat daerah selesai dilaksanakan.

4.5 Arsitektur Teknologi

Arsitektur Teknologi menjawab pertanyaan bagaimana teknologi mendukung penyelenggaraan layanan digital secara andal, efisien, dan dapat dibagipakaikan.

Kelompok arsitektur ini mencakup Domain Aplikasi dan Domain Infrastruktur.

4.5.1 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi memetakan portofolio aplikasi umum dan aplikasi khusus yang digunakan perangkat daerah, beserta fungsi, pemilik, dan keterkaitannya dengan proses bisnis, layanan, serta data.

- **Referensi Arsitektur**

Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA) terdiri atas empat tingkat: area aplikasi (tingkat 1), sistem aplikasi (tingkat 2), modul aplikasi (tingkat 3), dan fungsi aplikasi (tingkat 4).

Tabel 4.5 Referensi Arsitektur Aplikasi yang Digunakan di Provinsi Sumatera Selatan

Kategori	Kode Referensi	Deskripsi Referensi
Aplikasi Umum	01.01	Aplikasi Layanan Publik
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	
Aplikasi Khusus	02.01	Aplikasi Misi Tertentu
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	

- **Metadata Arsitektur**

Metadata Arsitektur Aplikasi Provinsi Sumatera Selatan disajikan secara lengkap pada Lampiran D.1. Metadata memuat atribut identitas, pemilik, keterkaitan antar domain, serta status pemutakhiran untuk setiap objek arsitektur, dan diisi setelah proses pengumpulan data eksisting pada perangkat daerah selesai dilaksanakan.

4.5.2 Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur Infrastruktur memetakan fasilitas komputasi, komputasi awan, perangkat keras, perangkat lunak platform, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan yang menopang operasional layanan digital.

- **Referensi Arsitektur**

Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) terdiri atas empat tingkat: fasilitas komputasi (tingkat 1), platform (tingkat 2), jaringan (tingkat 3),

Tabel 4.6 Referensi Arsitektur Infrastruktur yang Digunakan di Provinsi Sumatera Selatan

RAI LEVEL 1	RAI LEVEL 2	RAI LEVEL 3
RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional
		RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat
		RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah
		RAI.01.01.04 Pusat Data Non Pemerintah
		RAI.01.01.05 Pusat Data Pemulihan
		RAI.01.02.01 Network Operation Center
		RAI.01.02.02 Data Operation Center

	RAI.01.02 Pusat Kendali	RAI.01.02.03 Command/Operation Center
		RAI.01.02.04 Security Operation Center
		RAI.01.02.05 Emergency Operation Center
	RAI.01.03 Fasilitas Komputasi	RAI.01.03.01 Laboratorium Komputer
		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm
		RAI.01.03.03 Workstation Farm
RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah
		RAI.02.01.02 Jaringan Intra Instansi Pusat
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum
	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah
RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server
		RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
		RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
		RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
		RAI.03.01.05 Peripheral
		RAI.03.01.06 Mobile Device
		RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
	RAI.03.02 Teknologi Awan	RAI.03.02.01 PaaS
		RAI.03.02.02 IaaS
		RAI.03.02.03 SaaS
		RAI.03.02.04 BaaS

- **Metadata Arsitektur**

Metadata Arsitektur Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan disajikan secara lengkap pada Lampiran E. Metadata memuat atribut identitas, pemilik, keterkaitan antar domain, serta status pemutakhiran untuk setiap objek arsitektur, dan diisi setelah proses pengumpulan data eksisting pada perangkat daerah selesai dilaksanakan.

4.6 Arsitektur Keamanan

Arsitektur Keamanan menjawab pertanyaan bagaimana kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan serta data dijaga pada seluruh domain arsitektur. Arsitektur ini bersifat lintas domain dan melekat pada Arsitektur Layanan Digital Pemerintah, Arsitektur Data, dan Arsitektur Teknologi.

- **Referensi Arsitektur**

Referensi Arsitektur Keamanan (RAK) terdiri atas empat tingkat: kebijakan keamanan (tingkat 1), standar keamanan (tingkat 2), kontrol keamanan (tingkat 3), dan mekanisme keamanan (tingkat 4).

- **Metadata Arsitektur**

Metadata Arsitektur Keamanan Provinsi Sumatera Selatan disajikan secara lengkap pada Lampiran F. Metadata memuat atribut identitas, pemilik, keterkaitan antar domain, serta status pemutakhiran untuk setiap objek arsitektur, dan diisi setelah proses pengumpulan data eksisting pada perangkat daerah selesai dilaksanakan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen ini menegaskan satu pergeseran mendasar: pemerintahan digital tidak lagi diukur dari banyaknya sistem yang dibangun, melainkan dari kemudahan layanan yang dirasakan pengguna. Karena itu arsitektur disusun bertolak dari kebutuhan pengguna dan sasaran pembangunan, bukan dari struktur organisasi atau aplikasi yang telanjur ada.

Sebagai Arsitektur Mikro, Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan menyelaraskan arah nasional dengan kewenangan dan kebutuhan daerah. Empat kelompok arsitektur — Layanan Digital Pemerintah, Data, Teknologi, dan Keamanan — yang menaungi enam domain, menempatkan teknologi pada posisi yang tepat: sebagai pemungkin layanan, bukan sebagai tujuan.

Nilai dokumen ini terletak pada fungsinya sebagai penghubung. Dengan membandingkan kondisi eksisting terhadap arsitektur target, kesenjangan dapat dikenali, dan dari kesenjangan itulah lahir kebutuhan penguatan yang menjadi masukan bagi Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Digital. Tanpa langkah tersebut, arsitektur berhenti sebagai gambar; dengan langkah tersebut, arsitektur menjadi dasar keputusan.

5.2 Tindak Lanjut

Empat langkah berikut menentukan apakah dokumen ini dapat digunakan:

- Melengkapi data eksisting perangkat daerah, kemudian mengisi tabel referensi pada BAB IV dan tabel metadata pada Lampiran.
- Menetapkan secara resmi visi, misi, sasaran, serta indikator dan target Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan.
- Menyusun arsitektur target, melaksanakan analisis kesenjangan, dan merumuskan kebutuhan penguatan sebagai masukan bagi Dokumen Rencana Aksi.
- Menetapkan pemilik arsitektur serta menjalankan pengendalian perubahan dan pemutakhiran berkala melalui repository arsitektur.

5.3 Penutup

Arsitektur bukan dokumen yang selesai ketika ditandatangani. Ia perlu dirawat, ditinjau, dan dimutakhirkan agar tetap menjadi rujukan yang hidup. Keberhasilannya pada akhirnya tidak ditentukan oleh ketebalan dokumen, melainkan oleh komitmen pimpinan, konsistensi perangkat daerah, dan kesediaan seluruh pemangku kepentingan menempatkan kepentingan pengguna di atas kepentingan unit masing-masing. Pada titik itulah Pemerintah Digital Provinsi Sumatera Selatan berpindah dari rancangan menjadi kenyataan.



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Dokumen Arsitektur Pemerintah Digital Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun sebagai acuan arah pengembangan layanan, proses bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan digital secara terintegrasi. Dokumen ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada layanan publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2026





panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



METADATA ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

— 2026 —





ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Versi 1 (Probis-v1)

Jumlah Proses Bisnis/Urusan: 881 • Jumlah Unit Kerja: 43



1. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

1. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

2. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

3. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN



RAB Level 5

RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

5. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

6. Pengembangan Perpustakaan Deposit

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan perpustakaan deposit yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI



7. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-007
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas dan pengembangan bahan pustaka yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

8. Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-008
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pemanfaatan koleksi perpustakaan (Cetak/Digital) oleh masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

9. Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-009
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengukuran tingkat gemar membaca masyarakat tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

**10. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi**

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-010
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan perpustakaan umum dan khusus tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

11. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-011
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

12. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI



13. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-Tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

14. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

15. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

**16. Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi**

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemilihan duta baca/ bunda baca/ bunda literasi tingkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

17. Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan kerja sama dalam peningkatan kegemaran membaca dan literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

18. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

**19. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan**

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-008
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan penyusunan data dan informasi perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

20. Kegiatan Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.02-009
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pengukuran tingkat gemar membaca masyarakat tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Nilai IKU Target	75,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI

21. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penghimpunan dan pengelolaan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.02 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.05.02.01 PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH DI DAERAH PROVINSI



22. Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemberian penghargaan kepada penerbit dan produsen karya rekam yang aktif dalam melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.02 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.05.02.01 PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH DI DAERAH PROVINSI

23. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Literatur Sekunder Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penerbitan katalog induk daerah dan literatur sekunder lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.01 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.01.01.01 PENERBITAN KATALOG INDUK DAERAH DAN BIBLIOGRAFI DAERAH

24. Penerbitan Bibliografi Daerah

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penerbitan bibliografi daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.01 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.01.01.01 PENERBITAN KATALOG INDUK DAERAH DAN BIBLIOGRAFI DAERAH



25. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan

ID	SUMSEL-DAB.08.02.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.06.01 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.06.01.01 PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH PROVINSI

26. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

ID	SUMSEL-DAB.08.02.06.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.06.01 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.06.01.01 PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH PROVINSI

27. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.02.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.02 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.05.02.02 PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITENTUKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI



28. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.02.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kemanfaatan Naskah Kuno
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengunjung yang Memanfaatkan Naskah Kuno
Nilai IKU Target	0.14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.02 PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
RAB Level 5	RAB.08.02.05.02.02 PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA YANG DITENTUKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

2. Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

29. Penyusunan Arsip Dinamis

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan arsip dinamis yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

30. Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan alih media arsip dinamis dan autentikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI



31. Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penciptaan dan pemeliharaan arsip dinamis yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

32. Pemilihan Arsip Teladan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemilihan arsip teladan yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

33. Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan kearsipan kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

34. Penyusunan Database Arsiparis

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-006



Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan database arsiparis yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

35. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

36. Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

37. Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.01-009
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemberian penghargaan gerakan sadar tertib arsip yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.



Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PROVINSI

38. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH PROVINSI

39. Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan Naskah Sumber Arsip

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan khazanah arsip statis melalui penerbitan naskah sumber arsip yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH PROVINSI

40. Akuisisi Arsip Statis

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan akuisisi arsip statis yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH PROVINSI

41. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.02-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH PROVINSI

42. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIKN yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI

43. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.03-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip



Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN DALAM SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI

44. Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Kearsipan terhadap Perangkat Daerah Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi dan Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.04-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan bimbingan teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.04 PEMBINAAN KEARSIPAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH PROVINSI, BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI DAN LEMBAGA KEARSIPAN KABUPATEN/KOTA

45. Pelaksanaan Pembinaan Kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.04-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pembinaan kearsipan terhadap organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi, organisasi politik tingkat provinsi, perusahaan swasta, dan tokoh masyarakat tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.04 PEMBINAAN KEARSIPAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH PROVINSI, BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI DAN LEMBAGA KEARSIPAN KABUPATEN/KOTA

46. Pengawasan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.05-001



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.05 PENGAWASAN KEARSIPAN DI PROVINSI

47. Pengawasan Kearsipan terhadap Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.05-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.05 PENGAWASAN KEARSIPAN DI PROVINSI

48. Pengawasan Kearsipan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.01.05-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Ketersediaan Arsip
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.01 PENGELOLAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.01.05 PENGAWASAN KEARSIPAN DI PROVINSI

49. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.01-001



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.01 PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN

50. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi 10 (Sepuluh) Tahun

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi 10 (Sepuluh) tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.01 PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 TAHUN

51. Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP



RAB Level 5

RAB.09.06.06.02.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA PROVINSI

52. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.02-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA PROVINSI

53. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pendataan penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA

54. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.03-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pendataan penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi pembubaran perangkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA

55. Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.03-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.03 PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH PROVINSI YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN DAN PEMEKARAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA

56. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.04-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penilaian dan penetapan autentisitas arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA YANG DIKELOLA OLEH LEMBAGA KEARSIPAN PROVINSI

57. Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.04-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.04 AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA YANG DIKELOLA OLEH LEMBAGA KEARSIPAN PROVINSI

58. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.05-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.05 PENCARIAN ARSIP STATIS PROVINSI YANG DINYATAKAN HILANG

59. Evaluasi dan Penerapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.05-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan evaluasi dan penerapan hasil alih media yang dinyatakan hilang yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.05 PENCARIAN ARSIP STATIS PROVINSI YANG DINYATAKAN HILANG

60. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.02.05-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penetapan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA) yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.



Sasaran Strategis	Meningkatkan Layanan Kearsipan Berbasis Digital dan Terbuka
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Arsip Statis yang Sudah Didigitalisasi dan Dipublikasikan dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah/Nasional
Nilai IKU Target	0.91
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.02 PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.02.05 PENCARIAN ARSIP STATIS PROVINSI YANG DINYATAKAN HILANG

61. Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.03.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan dan penerapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	-
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.03 PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.03.01 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI DAERAH PROVINSI

62. Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.03.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	-
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.03 PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
RAB Level 5	RAB.09.06.06.03.01 PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP DI DAERAH PROVINSI

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan

**63. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat**

ID	SUMSEL-DAB.07.04.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pengelolaan atas kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT
RAB Level 4	RAB.07.04.02.01 PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RAB Level 5	RAB.07.04.02.01.01 PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI

64. Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

ID	SUMSEL-DAB.07.04.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT
RAB Level 4	RAB.07.04.02.01 PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RAB Level 5	RAB.07.04.02.01.01 PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI

65. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir

ID	SUMSEL-DAB.07.04.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.02 PENGELOLAAN RUANG LAUT
RAB Level 4	RAB.07.04.02.01 PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



RAB Level 5

RAB.07.04.02.01.01 PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI

66. Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

ID	SUMSEL-DAB.07.04.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.06 PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN
RAB Level 4	RAB.07.04.06.01 PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RAB Level 5	RAB.07.04.06.01.01 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

67. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan data dan informasi sumber daya ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 5	RAB.02.06.01.01.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

68. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP



RAB Level 5

RAB.02.06.01.01.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

69. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 5	RAB.02.06.01.01.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL

70. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 5	RAB.02.06.01.01.02 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

71. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

**RAB Level 5**

RAB.02.06.01.01.02 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

72. Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk Kapal Ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan Beroperasi Sampai dengan 12 Mil

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian rekomendasi perizinan berusaha subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 5	RAB.02.06.01.01.03 PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT

73. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.04-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 5	RAB.02.06.01.01.04 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI

74. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.01.04-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Nilai IKU Target	175.457 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI



RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 5	RAB.02.06.01.01.04 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI

75. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.02.06.01.02.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

76. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.02.06.01.02.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

77. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan

ID	SUMSEL-DAB.02.06.01.02.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan data dan informasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAB Level 4	RAB.02.06.01.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.02.06.01.02.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

78. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.07.04.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.01 PENGELOLAAN LAUT
RAB Level 4	RAB.07.04.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.07.04.01.01.01 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT

79. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut

ID	SUMSEL-DAB.07.04.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.01 PENGELOLAAN LAUT
RAB Level 4	RAB.07.04.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.07.04.01.01.01 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT

80. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.07.04.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM



RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.01 PENGELOLAAN LAUT
RAB Level 4	RAB.07.04.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.07.04.01.01.01 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT

81. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.07.04.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian monitoring kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.01 PENGELOLAAN LAUT
RAB Level 4	RAB.07.04.01.01 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.07.04.01.01.01 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT

82. Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.02.06.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
RAB Level 4	RAB.02.06.02.01 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.02.06.02.01.01 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT

83. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.02.06.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
Nilai IKU Target	325.000 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN



RAB Level 3	RAB.02.06.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
RAB Level 4	RAB.02.06.02.01 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
RAB Level 5	RAB.02.06.02.01.01 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT

84. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sampai dengan 12 Mil Sesuai Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.04.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil sesuai kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.05 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
RAB Level 4	RAB.07.04.05.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.07.04.05.01.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL

85. Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas

ID	SUMSEL-DAB.07.04.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.04 KELAUTAN
RAB Level 3	RAB.07.04.05 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
RAB Level 4	RAB.07.04.05.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.07.04.05.01.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL

86. Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan/atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sesuai Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.06.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
RAB Level 4	RAB.02.06.04.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.02.06.04.01.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

87. Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Sesuai Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.06.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
RAB Level 4	RAB.02.06.04.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.02.06.04.01.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

88. Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Sesuai Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.06.04.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengawasan terhadap usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
RAB Level 4	RAB.02.06.04.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.02.06.04.01.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI



89. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

ID	SUMSEL-DAB.02.06.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan berusaha pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan skala menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
RAB Level 4	RAB.02.06.03.01 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.02.06.03.01.01 PENERBITAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

90. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar

ID	SUMSEL-DAB.02.06.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor pengolahan ikan dan subsektor pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
RAB Level 4	RAB.02.06.03.01 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.02.06.03.01.01 PENERBITAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

91. Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

ID	SUMSEL-DAB.07.04.07.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan daya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kelautan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-



Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perikanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.06 PERIKANAN
RAB Level 3	RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
RAB Level 4	RAB.02.06.03.01 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
RAB Level 5	RAB.02.06.03.01.02 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

95. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pengawasan terhadap sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

96. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Peredaran Sarana Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan peredaran sarana pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN



RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

97. Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap sebaran sarana pasca panen tanaman pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

98. Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap sebaran sarana pascapanen hortikultura yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

99. Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

100. Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

101. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas penerbitan sertifikat benih yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

**102. Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang**

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perbanyak benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

103. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/Benih yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

104. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengawasan terhadap mutu dan peredaran benih tanaman pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN



RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

105. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pengawasan terhadap mutu dan peredaran benih tanaman hortikultura yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi Ubi Kayu (%); Persentase Peningkatan Produksi Bawang Merah (%); Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%); Persentase Peningkatan Produksi Nanas (%); Persentase Peningkatan Produksi Duku (%)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

106. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

107. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI



RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

108. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

109. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

110. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen hortikultura yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN



RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

111. Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara Numerik dan Spasial di Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

112. Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

113. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-008
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas lahan pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan Berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Ha)
Nilai IKU Target	- Padi (%): 5,00 % - Jagung (%): 2,50 %
Nilai IKU Terealisasi	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan:



RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

114. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	95,00% ; 65,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.03.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.03.01.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI

115. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	95,00% ; 65,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.03.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.03.01.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI

116. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pencegahan penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	95,00% ; 65,00%



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.03.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.03.01.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI

117. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.03.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	95,00% ; 65,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.03.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.03.01.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI

118. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.01 PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

119. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-



Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.01 PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

120. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.12.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.12.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.12.01.01 PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN

121. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.12.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.12.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.12.01.01 PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN

122. Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pendampingan dan pengawasan korporasi petani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian



Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN

123. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN

124. Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN

125. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.02-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	2,00% ; 10,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERBASIS KAWASAN

5. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan

126. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

127. Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENGAWASAN PEREDARAN SARANA PERTANIAN

128. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-008



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas penerbitan sertifikat benih yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

129. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap mutu dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

130. Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

ID	SUMSEL-DAB.02.03.01.01.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.01.01.01 PENGAWASAN MUTU, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH TANAMAN

131. Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

ID	SUMSEL-DAB.02.03.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.02.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.02.01.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN DAN MIKROORGANISME KEWENANGAN PROVINSI

132. Koordinasi, Singkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-009
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi singkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

133. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.01.01-010
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.01.01 PENATAAN PRASARANA PERTANIAN

134. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.03.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.03.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.03.01.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI

135. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.03.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.03.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.03.01.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI

136. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

ID	SUMSEL-DAB.02.03.03.01.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pencegahan penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.03.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.03.01.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROVINSI

137. Pembinaan Kegiatan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.13.02.01-001



Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan kegiatan dan pengawasan penerapan standar dan izin usaha pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.13.02 PERIZINAN USAHA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.13.02.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

138. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.12.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.12.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.12.01.01 PENGEMBANGAN PENERAPAN PENYULUHAN PERTANIAN

139. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Produksi
Nilai IKU Target	Karet: 0,113 Ton Kelapa Sawit: 0,453 Ton Kopi: 3,725 Ton Kelapa: 1,451 Ton
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.03 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI PERTANIAN BERBASIS KAWASAN

6. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

**140. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan**

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.01.01.01 PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI

141. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi (RKTP) yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.01.01.01 PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI

142. Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemeliharaan sarana prasarana operasionalisasi KPH yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.01 PENGELOLAAN HUTAN



RAB Level 5

RAB.07.03.01.01.01 PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI

143. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.01.01.02 RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)

144. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.01 PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

145. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi dan sinkronisasi pengendalian perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM



RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.01 PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

146. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan rencana tahunan rehabilitasi lahan (RTnRL) yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

147. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

148. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM



RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

149. Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

150. Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rehabilitasi mangrove di luar kawasan hutan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

151. Pembangunan Sumur Resapan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembangunan sumur resapan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM



RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

152. Pembangunan Gully Plug

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan gully plug yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

153. Pembangunan Dam Penahan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.01.02-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan dam penahan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.06.01.02 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

154. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN



RAB Level 3	RAB.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
RAB Level 4	RAB.07.03.03.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.03.01.01 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

155. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
RAB Level 4	RAB.07.03.03.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.03.01.01 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

156. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
RAB Level 4	RAB.07.03.03.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.03.01.01 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

157. Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.03.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembinaan dan pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.02.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.02.01.01 PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN

158. Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit

ID	SUMSEL-DAB.07.03.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap peredaran benih dan/atau bibit yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)
Nilai IKU Target	0,33; 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.05 PENINGKATAN REHABILITASI HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.05.01 PENGELOLAAN HUTAN
RAB Level 5	RAB.07.03.05.01.01 PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

159. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)
Nilai IKU Target	3092
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.02 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
RAB Level 5	RAB.07.03.06.02.01 PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

160. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.03.06.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.



Sasaran Strategis	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati hutan secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Keanekaragaman Hayati (Angka)
Nilai IKU Target	3092
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.06.02 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
RAB Level 5	RAB.07.03.06.02.01 PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

161. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%); Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)
Nilai IKU Target	11%; 7%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
RAB Level 5	RAB.07.03.01.02.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

162. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%); Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)
Nilai IKU Target	11%; 7%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
RAB Level 5	RAB.07.03.01.02.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN



163. Penyiapan Perhutanan Sosial

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.02.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyiapan perhutanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%); Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)
Nilai IKU Target	11%; 7%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
RAB Level 5	RAB.07.03.01.02.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

164. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

ID	SUMSEL-DAB.07.03.01.02.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengembangan usaha perhutanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) Meningkatnya kapasitas dan daya saing usaha perhutanan sosial melalui penguatan KUPS
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%); Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)
Nilai IKU Target	11%; 7%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAB Level 4	RAB.07.03.01.02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
RAB Level 5	RAB.07.03.01.02.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN

165. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS

ID	SUMSEL-DAB.07.03.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)
Nilai IKU Target	1,72%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN



RAB Level 3	RAB.07.03.04 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI
RAB Level 4	RAB.07.03.04.01 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
RAB Level 5	RAB.07.03.04.01.01 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

166. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

ID	SUMSEL-DAB.07.03.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)
Nilai IKU Target	1,72%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.04 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI
RAB Level 4	RAB.07.03.04.01 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
RAB Level 5	RAB.07.03.04.01.01 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

167. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS

ID	SUMSEL-DAB.07.03.04.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan koordinasi dan sinkronisasi optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kehutanan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya perlindungan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai sebagai ekosistem penyangga
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (%)
Nilai IKU Target	1,72%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.03 KEHUTANAN
RAB Level 3	RAB.07.03.04 PENINGKATAN DAYA DUKUNG DAERAH ALIRAN SUNGAI
RAB Level 4	RAB.07.03.04.01 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
RAB Level 5	RAB.07.03.04.01.01 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

168. Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah

ID	SUMSEL-DAB.07.01.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-



Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.05 PENGELOLAAN GEOLOGI
RAB Level 4	RAB.07.01.05.01 PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN
RAB Level 5	RAB.07.01.05.01.01 PENETAPAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

169. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah

ID	SUMSEL-DAB.07.01.05.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.05 PENGELOLAAN GEOLOGI
RAB Level 4	RAB.07.01.05.01 PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN
RAB Level 5	RAB.07.01.05.01.02 PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM DAERAH PROVINSI

170. Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penentuan dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.01 PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI DAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL



171. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.02 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT

172. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.02 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT

173. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah



Sasaran Strategis	provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Nilai IKU Target	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)
Nilai IKU Terealisasi	100%; 3,330%
RAB Level 1 Nasional	-
RAB Level 2	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 3	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 4	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.03 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

174. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.03-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.03 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

175. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.04-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL



RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.04 PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

176. Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.04-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penentuan dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.04 PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

177. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.04-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.04 PENETAPAN HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

178. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.05-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.05 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT

179. Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.06-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap teknis kaidah pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (Satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.06 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAERAH YANG BERADA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TERMASUK WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL LAUT

180. Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.07-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan dan perumusan rekomendasi surat izin pengelolaan batuan yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.07 PENATAUSAHAAN PEMBERIAN SURAT IZIN PENGELOLAAN BATUAN (SIPB)

**181. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)**

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.07-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan surat izin pengelolaan batuan (SIPB) yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.07 PENATAUSAHAAN PEMBERIAN SURAT IZIN PENGELOLAAN BATUAN (SIPB)

182. Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.08-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembinaan pelaksanaan izin usaha pertambangan yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
RAB Level 5	RAB.07.01.03.01.08 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

183. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

ID	SUMSEL-DAB.07.01.03.01.08-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pertambangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor pertambangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang tidak Melanggar Perda (%); 2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan (%)
Nilai IKU Target	100%; 3,330%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.01 PERTAMBANGAN
RAB Level 3	RAB.07.01.03 PENGELOLAAN MINERAL
RAB Level 4	RAB.07.01.03.01 PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA



RAB Level 5

RAB.07.01.03.01.08 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBAHAN

184. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.01 PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN

185. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan dan Informasi Izin Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian dan pengawasan perizinan dan informasi izin usaha bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.01 PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN 10.000 (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN

186. Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.02 PENGELOLAAN PENYEDIAAN BIOMASSA DAN/ATAU BIOGAS DALAM WILAYAH PROVINSI

187. Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan Biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (Kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.03 PENGELOLAAN PEMANFAATAN BIOMASSA DAN/ATAU BIOGAS SEBAGAI BAHAN BAKAR DALAM WILAYAH PROVINSI

188. Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah

ID	SUMSEL-DAB.07.02.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAB Level 4	RAB.07.02.01.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.01.01.01 PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI

189. Pemberian Bimbingan Teknis Pemanfaatan Aneka EBT

ID	SUMSEL-DAB.07.02.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.



Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAB Level 4	RAB.07.02.01.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.01.01.01 PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI

190. Perencanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT

ID	SUMSEL-DAB.07.02.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAB Level 4	RAB.07.02.01.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.01.01.01 PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI

191. Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT

ID	SUMSEL-DAB.07.02.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAB Level 4	RAB.07.02.01.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.01.01.01 PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI

192. Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi aneka EBT di daerah

ID	SUMSEL-DAB.07.02.01.01.01-005



Uraian Bisnis/Urutan	Urusan penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAB Level 4	RAB.07.02.01.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.01.01.01 PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI

193. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi pada Kegiatan yang Izin Usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.04-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.04 PENGELOLAAN KONSERVASI ENERGI TERHADAP KEGIATAN YANG IZIN USAHANYA DIKELUARKAN OLEH DAERAH PROVINSI

194. Bimbingan Teknis Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.05-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.05 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI YANG DILAKUKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN DI TINGKAT DAERAH PROVINSI



195. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.05-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.05 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI YANG DILAKUKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN DI TINGKAT DAERAH PROVINSI

196. Sosialisasi Konservasi Energi kepada Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.05-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.02.01.05 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI YANG DILAKUKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN DI TINGKAT DAERAH PROVINSI

197. Sosialisasi Konservasi Energi kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.07.02.02.01.05-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.02 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.02.01 PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN



RAB Level 5

RAB.07.02.02.01.05 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI YANG DILAKUKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN DI TINGKAT DAERAH PROVINSI

198. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.07.02.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.03.01 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.03.01.01 PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI

199. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

ID	SUMSEL-DAB.07.02.03.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.03.01 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.03.01.02 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI BADAN USAHA DALAM NEGERI/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI

200. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

ID	SUMSEL-DAB.07.02.03.01.02-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/Mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.03.01 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.03.01.02 PENATAUSAHAAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK BAGI BADAN USAHA DALAM NEGERI/MAYORITAS SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PENANAM MODAL DALAM NEGERI

201. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

ID	SUMSEL-DAB.07.02.03.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.03.01 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.03.01.03 PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN

202. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

ID	SUMSEL-DAB.07.02.03.01.03-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penetapan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.03.01 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.03.01.03 PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN

203. Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

ID	SUMSEL-DAB.07.02.03.01.03-003



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengendalian dan pengawasan penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.03.01 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.03.01.03 PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN

204. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah terpencil dan Perdesaan

ID	SUMSEL-DAB.07.02.03.01.03-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang diselenggarakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Energi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketahanan energi daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Elektrifikasi (%) Persentase Desa Berlistrik (%)
Nilai IKU Target	100%; 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.02 ENERGI
RAB Level 3	RAB.07.02.03 PENGELOLAAN ENERGI TAK TERBARUKAN
RAB Level 4	RAB.07.02.03.01 PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
RAB Level 5	RAB.07.02.03.01.03 PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN

8. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

205. Pameran Dagang Internasional/Nasional

ID	SUMSEL-DAB.02.02.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pameran dagang internasional/Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
RAB Level 4	RAB.02.02.05.01 PENGEMBANGAN EKSPOR



RAB Level 5

RAB.02.02.05.01.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

206. Pameran Dagang Lokal

ID	SUMSEL-DAB.02.02.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pameran dagang lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
RAB Level 4	RAB.02.02.05.01 PENGEMBANGAN EKSPOR
RAB Level 5	RAB.02.02.05.01.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

207. Peningkatan Citra Produk Ekspor

ID	SUMSEL-DAB.02.02.05.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan citra produk ekspor yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
RAB Level 4	RAB.02.02.05.01 PENGEMBANGAN EKSPOR
RAB Level 5	RAB.02.02.05.01.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

208. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

ID	SUMSEL-DAB.02.02.05.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL



RAB Level 4	RAB.02.02.05.01 PENGEMBANGAN EKSPOR
RAB Level 5	RAB.02.02.05.01.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

209. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian pengawasan terhadap distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.01 PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
RAB Level 5	RAB.02.02.01.01.01 PENGENDALIAN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA PENGECER TERDAFTAR

210. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.01 PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
RAB Level 5	RAB.02.02.01.01.02 PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BAGI DAERAH PROVINSI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI INSTANSI PENERBIT SKA DAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

211. Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian fasilitas promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI



RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.02 PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
RAB Level 5	RAB.02.02.01.02.01 PELAKSANAAN PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI

212. Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.02.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitas pemasaran penggunaan produk dalam negeri di tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.02 PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
RAB Level 5	RAB.02.02.01.02.02 PELAKSANAAN PEMASARAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

213. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.02.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekspor Barang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Ekspor Barang dan Jasa
Nilai IKU Target	22,52%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.02 PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
RAB Level 5	RAB.02.02.01.02.03 PELAKSANAAN PENINGKATAN PRODUK DALAM NEGERI

214. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.03.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI



RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.03 STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
RAB Level 5	RAB.02.02.01.03.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH PROVINSI

215. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.03.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.03 STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
RAB Level 5	RAB.02.02.01.03.02 PENGENDALIAN HARGA, INFORMASI KETERSEDIAAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

216. Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.03.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.03 STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
RAB Level 5	RAB.02.02.01.03.02 PENGENDALIAN HARGA, INFORMASI KETERSEDIAAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG LINTAS KABUPATEN/KOTA YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

217. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.03.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.03 STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
RAB Level 5	RAB.02.02.01.03.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA TINGKAT DAERAH PROVINSI DALAM MELAKUKAN PELAKSANAAN PENGADAAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI DI WILAYAH KERJANYA

218. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.04.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.04 PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
RAB Level 5	RAB.02.02.01.04.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS

219. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.04.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.04 PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
RAB Level 5	RAB.02.02.01.04.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS

220. Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas

ID	SUMSEL-DAB.02.02.01.04.01-003



Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penataan pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAB Level 4	RAB.02.02.01.04 PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
RAB Level 5	RAB.02.02.01.04.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL DAN PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI SERTA PASAR LELANG KOMODITAS

221. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen

ID	SUMSEL-DAB.02.02.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
RAB Level 4	RAB.02.02.03.01 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
RAB Level 5	RAB.02.02.03.01.01 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA

222. Pengembangan Layanan Kalibrasi

ID	SUMSEL-DAB.02.02.03.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan layanan kalibrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
RAB Level 4	RAB.02.02.03.01 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
RAB Level 5	RAB.02.02.03.01.02 PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA

**223. Pengembangan Layanan Pengujian**

ID	SUMSEL-DAB.02.02.03.01.02-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengembangan layanan pengujian yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
RAB Level 4	RAB.02.02.03.01 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
RAB Level 5	RAB.02.02.03.01.02 PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA

224. Pemantauan Mutu Produk

ID	SUMSEL-DAB.02.02.03.01.02-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pemantauan mutu produk yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
RAB Level 4	RAB.02.02.03.01 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
RAB Level 5	RAB.02.02.03.01.02 PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU PRODUK DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA

225. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

ID	SUMSEL-DAB.02.02.03.01.03-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa serta kegiatan perdagangan sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Nilai IKU Target	6,64%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
RAB Level 4	RAB.02.02.03.01 STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN



RAB Level 5

RAB.02.02.03.01.03 PELAKSANAAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN/ATAU JASA DI SELURUH DAERAH KABUPATEN/KOTA

9. Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

226. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan rencana pembangunan industri provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

227. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

228. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)



Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

229. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

230. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

231. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-006



Uraian Bisnis/Urutan	Urusan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

232. Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-007
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan penyediaan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

233. Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-008
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI



RAB Level 5

RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

234. Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-009
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rekomendasi kebutuhan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

235. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.01.01.01.01-010
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pengawasan jaminan produk halal (JPH) di level provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.01.01 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.01.01.01 PENYUSUNAN, PENERAPAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

236. Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka Penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

ID	SUMSEL-DAB.02.01.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem online single submission risk base approach (OSS RBA) yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.04.01 PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.04.01.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI), DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN PROVINSI

237. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.01.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI
RAB Level 4	RAB.02.01.04.01 PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
RAB Level 5	RAB.02.01.04.01.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI), DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN PROVINSI

238. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

ID	SUMSEL-DAB.02.01.07.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup provinsi melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF
RAB Level 4	RAB.02.01.07.01 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL



RAB Level 5

RAB.02.01.07.01.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN PROVINSI BERBASIS SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)

239. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINAS

ID	SUMSEL-DAB.02.01.07.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup provinsi dalam penyampaian data ke SIINAS yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Industri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Hasil Kinerja Pembangunan Industri Pengolahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB) (%) Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)
Nilai IKU Target	21,11% 5,19% 2,54%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.01 INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF
RAB Level 4	RAB.02.01.07.01 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
RAB Level 5	RAB.02.01.07.01.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI, DAN IPKI KEWENANGAN PROVINSI BERBASIS SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)

10. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan**240. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas administrasi kebijakan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.01.01.01.01 PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN

241. Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas pelaksanaan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM



RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.01.01.01.01 PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN

242. Fasilitasi Penataan Wilayah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi penataan wilayah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.01.01.01.01 PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN

243. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.01.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi kepala daerah dan DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.02.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.01.02.01.01 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

244. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan otonomi dan penataan urusan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH



RAB Level 4	RAB.09.01.02.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.01.02.01.01 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

245. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.02.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.01.02.01.01 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

246. Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.02.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.02.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.01.02.01.01 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

247. Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.02.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.02 OTONOMI DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.02.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



RAB Level 5

RAB.09.01.02.01.01 PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

248. Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah

ID	SUMSEL-DAB.09.07.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi kerjasama antar pemerintah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesekretariatan Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.07 KESEKRETARIATAN NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
RAB Level 4	RAB.09.07.03.01 PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.07.03.01.01 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH

249. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.01 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
RAB Level 5	RAB.05.01.01.01.01 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

250. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.01 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
RAB Level 5	RAB.05.01.01.01.01 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**251. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya**

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.01 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
RAB Level 5	RAB.05.01.01.01.01 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN-UNDANGAN

252. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.01 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
RAB Level 5	RAB.05.01.01.01.01 FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN-UNDANGAN

253. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

ID	SUMSEL-DAB.05.01.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi penyelesaian masalah hukum yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
RAB Level 4	RAB.05.01.02.01 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
RAB Level 5	RAB.05.01.02.01.01 FASILITASI BANTUAN HUKUM

254. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

ID	SUMSEL-DAB.05.01.02.01.01-002



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM
RAB Level 4	RAB.05.01.02.01 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
RAB Level 5	RAB.05.01.02.01.01 FASILITASI BANTUAN HUKUM

255. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas sarana dan prasarana spiritual yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.01 FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL

256. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi kelembagaan bina spiritual yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.01 FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL

257. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.02-001



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.02 FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

258. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.02 FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

259. Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.02 FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR

**260. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.03 FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

261. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.03-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.03 FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

262. Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.01.03-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi kesejahteraan rakyat bidang komunikasi informatika, statistik, persandian, dan perhubungan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM



RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.01 KESEJAHTERAAN RAKYAT
RAB Level 5	RAB.09.01.05.01.03 FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NON PELAYANAN DASAR

263. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro

ID	SUMSEL-DAB.02.02.07.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
RAB Level 4	RAB.02.02.07.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.02.02.07.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN

264. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

ID	SUMSEL-DAB.02.02.07.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Perdagangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.02 PERDAGANGAN
RAB Level 3	RAB.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
RAB Level 4	RAB.02.02.07.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.02.02.07.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PEREKONOMIAN

265. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA



RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.06.03.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM

266. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.06.03.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM

267. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.06.03.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM

268. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha

ID	SUMSEL-DAB.09.02.07.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah jasa keuangan dan aneka usaha yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN



RAB Level 3	RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
RAB Level 4	RAB.09.02.07.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.02.07.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD

269. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi

ID	SUMSEL-DAB.09.02.07.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
RAB Level 4	RAB.09.02.07.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.02.07.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD

270. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD

ID	SUMSEL-DAB.09.02.07.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
RAB Level 4	RAB.09.02.07.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.02.07.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD

271. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.07.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan badan layanan umum daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN



RAB Level 3	RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
RAB Level 4	RAB.09.02.07.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.02.07.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD

272. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD

ID	SUMSEL-DAB.09.02.07.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
RAB Level 4	RAB.09.02.07.01 PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.02.07.01.01 PENGELOLAAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI BUMD DAN BLUD

273. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.02 KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.01.05.02.01 PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

274. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.02 KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



RAB Level 5

RAB.09.01.05.02.01 PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

275. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.02.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.02 KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.01.05.02.01 PENGENDALIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

276. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.02.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.02 KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.01.05.02.02 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

277. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.02.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.02 KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.01.05.02.02 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**278. Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.02.02-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Kebijakan
Nilai IKU Target	84
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.02 KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
RAB Level 5	RAB.09.01.05.02.02 PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

279. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas strategi pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.01 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

280. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.01 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

281. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.01-003



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.01 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

282. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.02 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

283. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.02 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

284. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas informasi pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.02 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

285. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.03 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

286. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.03-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.03 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

287. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.01.03-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pendampingan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.01 KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
RAB Level 5	RAB.09.02.11.01.03 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

288. Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitas penataan kelembagaan provinsi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAB Level 4	RAB.09.06.02.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.02.01.01 FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

289. Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.06.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitas penataan kelembagaan kab./Kota yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAB Level 4	RAB.09.06.02.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.02.01.01 FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

290. Penataan Analisis Jabatan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penataan analisis jabatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM



RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAB Level 4	RAB.09.06.02.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.02.01.01 FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

291. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.01.01 FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

292. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.01.01 FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

293. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian evaluasi pelaksanaan budaya kerja yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA



RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.01.01 FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

294. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas tatalaksana pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.01.01 FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

295. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitasi peningkatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pelayanan Publik
Nilai IKU Target	4,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.01 PENATAAN ORGANISASI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.01.01 FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

11. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

296. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN



RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.01 PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD

297. Pembahasan Rancangan Perda

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian pembahasan rancangan perda yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.01 PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD

298. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penyelenggaraan kajian perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.01 PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD

299. Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian fasilitas penyusunan naskah akademik yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.01 PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD

300. Penyusunan Tata Tertib DPRD

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan tata tertib DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.01 PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD

301. Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.01 PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD

302. Pembahasan KUA dan PPAS

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembahasan KUA dan PPAS yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

**303. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

304. Pembahasan APBD

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembahasan APBD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

305. Pembahasan Perubahan APBD

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.02-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembahasan perubahan APBD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

306. Pembahasan Laporan Semester

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.02-005



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembahasan laporan semester yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

307. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.02-006
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembahasan pertanggungjawaban APBD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN

308. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengawasan terhadap urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

309. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengawasan terhadap urusan pemerintahan bidang infrastruktur yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.



Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

310. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

311. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap urusan pemerintahan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

312. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap urusan pemerintahan bidang sumber daya alam yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

313. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

314. Pengawasan Penggunaan Anggaran

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

315. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.05.03.01-008
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi



Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAB Level 4	RAB.09.01.05.03 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.01.05.03.01 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

316. Orientasi DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan orientasi DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.06.05.01 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.05.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

317. Pendalaman Tugas DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pendalaman tugas DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.06.05.01 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.05.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

318. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

ID	SUMSEL-DAB.09.06.05.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.06.05.01 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.05.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

319. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.05.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan tenaga ahli fraksi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.06.05.01 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.05.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

320. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.09.06.05.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyelenggaraan hubungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.06.05.01 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.05.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

321. Penyusunan Program Kerja DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.05.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan program kerja DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA



RAB Level 3	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.06.05.01 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.05.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

322. Publikasi dan Dokumentasi DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.05.01.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian publikasi dan dokumentasi DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.06.05.01 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.05.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD

323. Kunjungan Kerja dalam Daerah

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian kunjungan kerja dalam daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.03 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

324. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.03-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD



RAB Level 5

RAB.05.01.01.02.03 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

325. Pelaksanaan Reses

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.03-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan reses yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.03 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

326. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.03-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian sosialisasi rancangan peraturan daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.03 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT

327. Penyusunan Kode Etik DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan kode etik DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.04.02.01 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD

**328. Pengawasan Kode Etik DPRD**

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap kode etik DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.04.02.01 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD

329. Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.04-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.04 PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH

330. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

ID	SUMSEL-DAB.05.01.01.02.04-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan bahan komunikasi dan publikasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Hukum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.01 HUKUM
RAB Level 3	RAB.05.01.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAB Level 4	RAB.05.01.01.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.05.01.01.02.04 PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH

331. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.02.02-001



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.04.02.02 FASILITASI TUGAS DPRD

332. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.02.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan laporan kinerja DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.04.02.02 FASILITASI TUGAS DPRD

333. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.02.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.04.02.02 FASILITASI TUGAS DPRD

334. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.02.02-004



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi tugas pimpinan DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.04.02.02 FASILITASI TUGAS DPRD

335. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.02.02-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi pelaksanaan tugas panitia khusus yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas kegiatan DPRD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kegiatan yang terfasilitasi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.02 DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
RAB Level 5	RAB.09.06.04.02.02 FASILITASI TUGAS DPRD

12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

336. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

ID	SUMSEL-DAB.09.02.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAB Level 4	RAB.09.02.01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.01.01.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

**337. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

ID	SUMSEL-DAB.09.02.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAB Level 4	RAB.09.02.01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.01.01.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

338. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

ID	SUMSEL-DAB.09.02.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAB Level 4	RAB.09.02.01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.01.01.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

339. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

ID	SUMSEL-DAB.09.02.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN



RAB Level 4	RAB.09.02.01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.01.01.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

340. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

ID	SUMSEL-DAB.09.02.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAB Level 4	RAB.09.02.01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.01.01.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

341. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

ID	SUMSEL-DAB.09.02.01.01.01-006
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAB Level 4	RAB.09.02.01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.01.01.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

342. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

ID	SUMSEL-DAB.09.02.01.01.01-007
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)



Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAB Level 4	RAB.09.02.01.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.01.01.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH

343. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.01 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

344. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.01 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



345. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.01 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

346. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.01 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

347. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian konsultasi dan koordinasi pembinaan penyusunan dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/Kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah



Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.01 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

348. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.01 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

349. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi dan pengelolaan kas daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.02.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.02.01.01 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

350. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

ID	SUMSEL-DAB.09.02.02.01.01-002



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.02.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.02.01.01 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

351. Penatausahaan Pembiayaan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penatausahaan pembiayaan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.02.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.02.01.01 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

352. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.09.02.02.01.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi fasilitas, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.02.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



RAB Level 5

RAB.09.02.02.01.01 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

353. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

ID	SUMSEL-DAB.09.02.02.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.02.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.02.01.01 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

354. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

ID	SUMSEL-DAB.09.02.02.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.02.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.02.01.01 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

355. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.02 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

356. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.02-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.02 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

357. Kordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.02-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian kordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.02 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

358. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.02-004



Uraian Bisnis/Urutan	Urusan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.02 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

359. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.02-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.02 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

360. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.02.08.01.02-006
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM



RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAB Level 4	RAB.09.02.08.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.08.01.02 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

361. Analisis Investasi Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis investasi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

362. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

363. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)



Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

364. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas dana darurat dan mendesak yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

365. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas dana bagi hasil provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan. 2. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)
Nilai IKU Target	1. 100% 2. 5%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

366. Penyusunan Standar Harga

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan standar harga yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset



Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

367. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

368. Penatausahaan Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

369. Pengamanan Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengamanan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

370. Penilaian Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penilaian barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

371. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

372. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

373. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-008
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

374. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.11.02.01-009
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan laporan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Aset
Nilai IKU Target	2,21%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAB Level 4	RAB.09.02.11.02 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.11.02.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

13. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

375. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas dana cadangan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

376. Analisis Investasi Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-011
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis investasi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

377. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

378. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-012
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM



RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

379. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-008
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

380. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-009
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

381. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-010
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN



RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

382. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-013
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

383. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-014
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas dana darurat dan mendesak yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

384. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.02.05.01.01-015
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas dana bagi hasil provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.05 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
RAB Level 4	RAB.09.02.05.01 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



RAB Level 5

RAB.09.02.05.01.01 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

385. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perencanaan pengelolaan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

386. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

387. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



RAB Level 5

RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

388. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

389. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

390. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



RAB Level 5

RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

391. Penetapan Wajib Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penetapan wajib pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

392. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelayanan dan konsultasi pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

393. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-009
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**394. Penagihan Pajak Daerah**

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-010
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penagihan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

395. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-011
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyelesaian keberatan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

396. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-012
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

**397. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-013
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

398. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.02.03.01.01-014
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keuangan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Nilai IKU Target	1. 8,01% 2. 54,20% 3. 2,4% 4. 78%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.02 KEUANGAN
RAB Level 3	RAB.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAB Level 4	RAB.09.02.03.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.02.03.01.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

14. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan**399. Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK**

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi dan fasilitas pengadaan PNS dan PPPK yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Menguatnya Sistem Merit Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH



RAB Level 5

RAB.09.06.03.02.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN

400. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Menguatnya Sistem Merit Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.03.02.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN

401. Fasilitas Lembaga Profesi ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas lembaga profesi ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Menguatnya Sistem Merit Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.03.02.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN

402. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas sistem informasi kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Menguatnya Sistem Merit Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.03.02.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN

**403. Pengelolaan Data Kepegawaian**

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas data kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Menguatnya Sistem Merit Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	-
Nilai IKU Target	-
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.03.02.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN

404. Pengelolaan Mutasi ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas mutasi ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengembangan Karis ASN Sesuai Dengan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.93
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.03.02.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN

405. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.02-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas kenaikan pangkat ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengembangan Karis ASN Sesuai Dengan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.93
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.03.02.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN

406. Pengelolaan Promosi ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.02.02-003



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas promosi ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pengembangan Karis ASN Sesuai Dengan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.93
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.02 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.03.02.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN

407. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan kapasitas kinerja ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

408. Pengelolaan Assessment Center

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas assessment center yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

409. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas pendidikan lanjutan ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

410. Fasilitas sertifikasi jabatan ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas sertifikasi jabatan ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

411. Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas sertifikasi fungsional ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

412. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.01-006
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembinaan jabatan fungsional ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

413. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.02 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR

414. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.02-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.02 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR

415. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.02-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas pemberian penghargaan bagi pegawai yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya



Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.02 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR

416. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.02-004
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian pengelolaan atas tanda jasa bagi pegawai yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.02 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR

417. Pembinaan Disiplin ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.02-005
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian pembinaan disiplin ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.02 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR

418. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.02-006
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian pelayanan proses izin perceraian pegawai yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.02 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR

419. Evaluasi Disiplin ASN

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.03.02-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan evaluasi disiplin ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Nilai IKU Target	0.92
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.03 KEPEGAWAIAN DAERAH
RAB Level 5	RAB.09.06.04.03.02 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR

15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

420. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.03.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAB Level 5	RAB.09.06.03.03.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

421. Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.03.02-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAB Level 5	RAB.09.06.03.03.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

422. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.03.02-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAB Level 5	RAB.09.06.03.03.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

423. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.03.02-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi dan sumber belajar yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



RAB Level 5

RAB.09.06.03.03.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

424. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.03.02-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAB Level 5	RAB.09.06.03.03.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

425. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.03.03.02-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAB Level 4	RAB.09.06.03.03 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RAB Level 5	RAB.09.06.03.03.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

16. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan**426. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

427. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kapabilitas Inovasi
Nilai IKU Target	3,05
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

428. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pengembangan aparatur dan reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kapabilitas Inovasi
Nilai IKU Target	3,05
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

**429. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah, Reformasi Birokrasi**

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

430. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengelolaan atas data kelitbangan dan peraturan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

431. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.01-006
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi pelaksanaan peraturan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Nilai IKU Target	0.9
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET



RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN

432. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

433. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penelitian dan pengembangan pariwisata yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

434. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penelitian dan pengembangan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET



RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

435. Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.02-004
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penelitian dan pengembangan bidang partisipasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

436. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

437. Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-002
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET



RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

438. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

439. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

440. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI



RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

441. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penelitian dan pengembangan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

442. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penelitian dan pengembangan kehutanan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

443. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

ID	SUMSEL-DAB.06.03.01.01.03-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.01 REKOMENDASI KEBIJAKAN BERBASIS RISET
RAB Level 4	RAB.06.03.01.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.01.01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

444. Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penelitian pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.02.01.01 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

445. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan uji coba dan penerapan rancang bangun / model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.02.01.01 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

446. Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.02.01.01 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

447. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan sosialisasi dan diseminasi hasil-Hasil kelitbangan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kapabilitas Inovasi
Nilai IKU Target	3,05
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.02.01.01 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

448. Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas hak kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RAB Level 5	RAB.06.03.02.01.01 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

449. Fasilitas dan pembinaan, pelaksanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas dan pembinaan, pelaksanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,67
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.01 KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

450. Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.01 KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

451. Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan kebijakan berbasis hasil riset yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Nilai IKU Target	0.9
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.01 KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

452. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.01 KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

453. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.01 KEGIATAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN DAN PENERAPAN

454. Fasilitas dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

455. Fasilitas dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

456. Penyusunan Kebijakan di Bidang Invenisi dan Inovasi

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Nilai IKU Target	0.9
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

457. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

458. Pemantauan dan evaluasi Invenisi dan Inovasi

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

459. Fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-006
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian fasilitas dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

460. Fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan Kebun Raya Daerah

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-007
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian fasilitas dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kapabilitas Inovasi
Nilai IKU Target	3,05
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

461. Fasilitas dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-008
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian fasilitas dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

462. Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

ID	SUMSEL-DAB.06.03.02.02.02-009
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ekosistem Inovasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Inovasi Daerah
Nilai IKU Target	79,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.03 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAB Level 3	RAB.06.03.02 RISET DAN INOVASI
RAB Level 4	RAB.06.03.02.02 RISET DAN INOVASI DAERAH
RAB Level 5	RAB.06.03.02.02.02 KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI

17. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

463. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.09.01.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kepuasan OPD yang menjadi Mitra Kerja
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
RAB Level 4	RAB.09.01.03.01 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
RAB Level 5	RAB.09.01.03.01.01 PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG

464. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

ID	SUMSEL-DAB.09.01.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan fasilitas promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas layanan Informasi dan ekspose Sumatera Selatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Informasi Potensi Daerah Sumatera Selatan yang telah dipublikasi
Nilai IKU Target	0.95



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
RAB Level 4	RAB.09.01.03.01 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
RAB Level 5	RAB.09.01.03.01.01 PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG

465. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

ID	SUMSEL-DAB.09.01.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH dan unsur pimpinan DPRD yang bertugas di Ibukota Jakarta
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
RAB Level 4	RAB.09.01.03.01 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
RAB Level 5	RAB.09.01.03.01.01 PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG

18. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

466. Review Laporan Kinerja

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian review laporan kinerja yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

467. Review Laporan Keuangan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian review laporan keuangan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti



Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

468. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap umum dan teknis kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

469. Kerjasama Pengawasan Internal

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan kerja sama dalam pengawasan internal yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

470. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut pemeriksaan APIP yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti



Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

471. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

472. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap dengan tujuan tertentu yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

473. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

474. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

ID	SUMSEL-DAB.09.06.06.04.02-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1. 89% 2. 77%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAB Level 4	RAB.09.06.06.04 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
RAB Level 5	RAB.09.06.06.04.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

475. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.04.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Level Kapabilitas APIP 2. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK 3. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Nilai IKU Target	1. 3 2. 89,5 3. 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.04 PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.04.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

476. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.04.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi



Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Level Kapabilitas APIP 2. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK 3. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Nilai IKU Target	1. 3 2. 89,5 3. 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.04 PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.04.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN

477. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.04.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Level Kapabilitas APIP 2. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK 3. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Nilai IKU Target	1. 3 2. 89,5 3. 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.04 PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.04.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

478. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

ID	SUMSEL-DAB.09.06.04.04.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Aparatur Negara.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Level Kapabilitas APIP 2. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK 3. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Nilai IKU Target	1. 3 2. 89,5 3. 100%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.06 APARATUR NEGARA
RAB Level 3	RAB.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAB Level 4	RAB.09.06.04.04 PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
RAB Level 5	RAB.09.06.04.04.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI



19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

479. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,9
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

480. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,10
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

481. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,11



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

482. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,12
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

483. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

484. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-006



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,14
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

485. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,15
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

486. Pembentukan Paskibraka

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-008
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembentukan paskibraka yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,16
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

**487. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-009
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,17
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

488. Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-010
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,18
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

489. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.02.01-011
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,19
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.02 PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.02.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN



490. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.03.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/Pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.03 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
RAB Level 5	RAB.09.01.01.03.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

491. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.03.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/Pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.03 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
RAB Level 5	RAB.09.01.01.03.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

492. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.03.01-003



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/Pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.03 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
RAB Level 5	RAB.09.01.01.03.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

493. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.03.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/Pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.03 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
RAB Level 5	RAB.09.01.01.03.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

494. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.03.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/Pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.



Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.03 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
RAB Level 5	RAB.09.01.01.03.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

495. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.04.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.04 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.04.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

496. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.04.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.04 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN



RAB Level 5

RAB.09.01.01.04.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

497. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.04.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.04 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.04.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

498. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.04.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.04 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.04.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

499. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.04.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Nilai IKU Target	85,13



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.04 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
RAB Level 5	RAB.09.01.01.04.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

500. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.05.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,19
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
RAB Level 5	RAB.09.01.01.05.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

501. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.05.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,20
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
RAB Level 5	RAB.09.01.01.05.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA



502. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.05.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,21
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
RAB Level 5	RAB.09.01.01.05.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

503. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.05.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,22
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
RAB Level 5	RAB.09.01.01.05.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

504. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.05.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,23



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
RAB Level 5	RAB.09.01.01.05.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

505. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.06.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,24
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.06 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RAB Level 5	RAB.09.01.01.06.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

506. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.06.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,25
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.06 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



RAB Level 5

RAB.09.01.01.06.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

507. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.06.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,26
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.06 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RAB Level 5	RAB.09.01.01.06.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

508. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.06.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,27
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.06 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RAB Level 5	RAB.09.01.01.06.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

509. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.06.01-005



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,28
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.06 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RAB Level 5	RAB.09.01.01.06.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

510. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.01.01.06.01-006
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Penguatan Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2. Indeks Harmoni Indonesia (IHA)
Nilai IKU Target	1. 78,85 2. 6,29
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 4	RAB.09.01.01.06 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
RAB Level 5	RAB.09.01.01.06.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

20. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

511. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA

ID	SUMSEL-DAB.06.01.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan pelayanan Pendidikan di Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.01.01 PENDIDIKAN MENENGAH



RAB Level 5

RAB.06.01.01.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

512. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMA

ID	SUMSEL-DAB.06.01.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian rehabilitasi sedang/Berat ruang kelas SMA yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan pelayanan Pendidikan di Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Capaian SPM Pendidikan Menengah
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.01.01 PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.06.01.01.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

513. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMA

ID	SUMSEL-DAB.06.01.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan SMA yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka harapan lama sekolah
Nilai IKU Target	13,00 (Tahun)
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.01.01 PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.06.01.01.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

514. Melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan

ID	SUMSEL-DAB.06.01.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian melanjutkan program literasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya budaya literasi di Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai Rata-rata Literasi (Rapor Pendidikan)
Nilai IKU Target	Meningkat
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.01.01 PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.06.01.01.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

**515. Penyediaan Beasiswa Kuliah bagi Siswa Berprestasi**

ID	SUMSEL-DAB.06.01.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan beasiswa kuliah bagi siswa berprestasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka harapan lama sekolah
Nilai IKU Target	13,00 (Tahun)
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.01.01 PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.06.01.01.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

516. Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.01.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penguatan pendidikan vokasi (Link and match) dengan dunia kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
Nilai IKU Target	0.85
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.06.01.02.01 PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.06.01.02.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

517. Penyediaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMK

ID	SUMSEL-DAB.06.01.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan alat praktik dan peraga siswa SMK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah SMK yang memiliki LSP-P1
Nilai IKU Target	80 (Sekolah)
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.06.01.02.01 PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.06.01.02.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

**518. Pembangunan Laboratorium/Ruang Praktik Siswa SMK**

ID	SUMSEL-DAB.06.01.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembangunan laboratorium/Ruang praktik siswa SMK yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
Nilai IKU Target	0.85
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.06.01.02.01 PENDIDIKAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.06.01.02.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

519. Penyediaan Alat Bantu Belajar dan Fasilitas Ramah Disabilitas

ID	SUMSEL-DAB.06.01.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan alat bantu belajar dan fasilitas ramah disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Fasilitas bagi penyandang disabilitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.05.01 PENDIDIKAN KHUSUS
RAB Level 5	RAB.06.01.05.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS

520. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SLB

ID	SUMSEL-DAB.06.01.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rehabilitasi sarana dan prasarana SLB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Fasilitas bagi penyandang disabilitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Capaian SPM Pendidikan Khusus
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.05 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUBSTANSI PENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.05.01 PENDIDIKAN KHUSUS
RAB Level 5	RAB.06.01.05.01.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS

521. Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik

ID	SUMSEL-DAB.06.01.01.02.01-001



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase pendidik berkualifikasi D-IV/S-1
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.01.02 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 5	RAB.06.01.01.02.01 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

522. Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru Berkelanjutan

ID	SUMSEL-DAB.06.01.01.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelatihan dan pengembangan profesional guru berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pendidikan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase pendidik berkualifikasi D-IV/S-1
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.01 PENDIDIKAN
RAB Level 3	RAB.06.01.01 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 4	RAB.06.01.01.02 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RAB Level 5	RAB.06.01.01.02.01 PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

21. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

523. Pembangunan RS Beserta Sarana Pendukungnya

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembangunan rS beserta sarana pendukungnya yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

**524. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

525. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

526. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



RAB Level 5

RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

527. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengadaan prasarana fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

528. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

529. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN



RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

530. Distribusi Alat Kesehatan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian distribusi alat kesehatan obat bahan habis pakai bahan medis habis pakai vaksin makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

531. Pengadaan Obat Bahan Habis Pakai Bahan Medis Habis Pakai Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-009
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengadaan obat bahan habis pakai bahan medis habis pakai vaksin makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

532. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kematian Ibu
Nilai IKU Target	77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

533. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kematian Ibu
Nilai IKU Target	77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

534. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan ibu dan anak yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kematian Ibu
Nilai IKU Target	77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

**535. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif**

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan usia produktif yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

536. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan usia lanjut yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

537. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan gizi masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Prevalensi Stunting
Nilai IKU Target	11,3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



RAB Level 5

RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

538. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

539. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas pelayanan kesehatan lingkungan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Sasaran 3: Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Nilai IKU Target	352
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

540. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-009
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas pelayanan promosi kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Sasaran 3: Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Nilai IKU Target	352
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN



RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

541. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-010
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan tradisional akupuntur asuhan mandiri dan tradisional lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

542. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-011
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

543. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-012
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan haji yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN



RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

544. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-013
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

545. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-014
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas jaminan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Nilai IKU Target	98,9
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

546. Pengelolaan Surveilans Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-015
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas surveilans kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)



Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

547. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-016
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi penerapan SPM bidang kesehatan lintas kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kematian Ibu
Nilai IKU Target	77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

548. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-017
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Nilai IKU Target	77,5
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

549. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-018



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan verifikasi dan penilaian kelayakan puskesmas untuk registrasi puskesmas yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Nilai IKU Target	77,5
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

550. Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-019
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

551. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-020
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan operasional pelayanan rumah sakit yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Nilai IKU Target	77,5
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

**552. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)**

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-021
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kematian Ibu
Nilai IKU Target	77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

553. Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-022
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas rujukan dan rujuk balik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kematian Ibu
Nilai IKU Target	77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

554. Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-023
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Usia Harapan Hidup (UHH)
Nilai IKU Target	75,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



RAB Level 5

RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

555. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-024
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Sasaran 3: Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Nilai IKU Target	352
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

556. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas sistem informasi kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola OPD
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.04.01.06.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.06.01.01 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI

557. Pengawasan dan Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap dan tindak lanjut perizinan rumah sakit kelas b dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
Nilai IKU Target	77,5
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN



RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.02 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS B DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

558. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
Nilai IKU Target	5,8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI

559. Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
Nilai IKU Target	5,8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI

560. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
Nilai IKU Target	5,8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN



RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI

561. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
Nilai IKU Target	5,8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI

562. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi
Nilai IKU Target	5,8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI

563. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK

ID	SUMSEL-DAB.04.01.08.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan PBF cabang dan cabang PAK yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar
Nilai IKU Target	95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN



RAB Level 3	RAB.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
RAB Level 4	RAB.04.01.08.01 SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN
RAB Level 5	RAB.04.01.08.01.01 KEGIATAN PENERBITAN PENGAKUAN PBF CABANG DAN CABANG PAK

564. Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM

ID	SUMSEL-DAB.04.01.06.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian bimbingan teknis dan supervisi UKBM yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Sasaran 3: Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Nilai IKU Target	352
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.04.01.06.02 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.06.02.01 PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI

22. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan

565. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-010
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	89
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

566. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-020
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengadaan alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	89



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

567. Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-011
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemeliharaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	89
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

568. Pengembangan RS

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-012
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan RS yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Strata Pelayanan Jantung
Nilai IKU Target	Utama
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

569. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-013
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Strata Pelayanan Jantung
Nilai IKU Target	Utama
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

570. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-025
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian operasional pelayanan rumah sakit yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanganan Jantung
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Strata Pelayanan Jantung
Nilai IKU Target	Utama
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

571. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	87,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.01 PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP PROVINSI

572. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.02-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	87,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.02 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

573. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.01.06.02.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	87,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.04.01.06.02 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.06.02.02 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH PROVINSI

574. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

ID	SUMSEL-DAB.04.01.06.02.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyelenggaraan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	87,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.04.01.06.02 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.06.02.01 PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI



575. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

ID	SUMSEL-DAB.04.01.06.02.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang diselenggarakan oleh RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan
Nilai IKU Target	87,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.04.01.06.02 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.06.02.01 PELAKSANAAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH PROVINSI

23. RS Khusus Mata Masyarakat Prov. Sumsel

576. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan usia produktif yang diselenggarakan oleh RS Khusus Mata Masyarakat Prov. Sumsel dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah Layanan Kesehatan Mata
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pelaksanaan Program Penanggulangan Gangguan Refraksi bagi Kelompok Target (PENGGARIS)
Nilai IKU Target	90
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.02 PEMENUHAN UKP & UKM
RAB Level 5	RAB.04.01.04.02.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN KHUSUS UNTUK UKP RUJUKAN

24. RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan

577. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-026
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan operasional pelayanan rumah sakit yang diselenggarakan oleh RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jumlah Layanan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase pasien yang mendapatkan penanganan Program Berkas Plus Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN



RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

578. Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-027
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas rujukan dan rujuk balik yang diselenggarakan oleh RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks kepuasan masyarakat
Nilai IKU Target	85
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

579. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-021
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

580. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-022
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan alat kesehatan/Alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi Layanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat paripurna



Nilai IKU Target	8,3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

581. Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Pendukungnya

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-014
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembangunan rumah sakit beserta sarana pendukungnya yang diselenggarakan oleh RS Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi Layanan Rumah Sakit
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat paripurna
Nilai IKU Target	8,3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

25. Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan

582. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-023
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

583. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-015



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

584. Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-016
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan barang penunjang operasional rumah sakit yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

585. Pemeliharaan Alat Kesehatan / alat penunjang fasilitas layanan kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-017
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemeliharaan alat kesehatan / alat penunjang fasilitas layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

**586. Pengembangan Rumah Sakit**

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-018
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan rumah sakit yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

587. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.03.01.01-019
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.03.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.03.01.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

588. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

ID	SUMSEL-DAB.04.01.04.01.01-029
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN



RAB Level 4	RAB.04.01.04.01 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.04.01.04.01.01 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

589. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektorial Tingkat Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.01.06.02.03-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian peningkatan upaya advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektoral tingkat daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani
Nilai IKU Target	100,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.06 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.04.01.06.02 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.06.02.03 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LISNTAS SEKTORAL TINGKAT DAERAH PROVINSI

590. Peningkatan Komptensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.01.01.01.03-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian peningkatan komptensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kesehatan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kompetensi SDM
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kemampuan minimal 20 JPL per tahun
Nilai IKU Target	58,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.01 KESEHATAN
RAB Level 3	RAB.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 4	RAB.04.01.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAB Level 5	RAB.04.01.01.01.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

26. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

591. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi



Nilai IKU Target	67,23
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.01 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

592. Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan operasional kelembagaan pengelola irigasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
Nilai IKU Target	67,23
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.01 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA - 3000 HA DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

593. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)
Nilai IKU Target	7,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

594. Normalisasi / Restorasi Sungai

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan normalisasi / restorasi sungai yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Nilai IKU Target	88,01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

595. Pembangunan Polder / Kolam Retensi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan polder / kolam retensi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Nilai IKU Target	88,01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

596. Peningkatan Polder / Kolam Retensi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan polder / kolam retensi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Nilai IKU Target	88,01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

597. Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian operasi dan pemeliharaan polder/Kolam retensi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir



Nilai IKU Target	88,01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

598. Pembangunan Tanggul Sungai

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembangunan tanggul sungai yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Nilai IKU Target	88,01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

599. Rehabilitasi Tanggul Sungai

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rehabilitasi tanggul sungai yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Nilai IKU Target	88,01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

600. Operasional dan Pemeliharaan Sungai

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-008
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan operasional dan pemeliharaan sungai yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Nilai IKU Target	88,01



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

601. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-009
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Nilai IKU Target	88,01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

602. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-010
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan sumur air tanah untuk air baku yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)
Nilai IKU Target	7,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

603. Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-011
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)
Nilai IKU Target	7,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

604. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-012
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)
Nilai IKU Target	7,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

605. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-013
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas hidrologi dan kualitas air WS kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Ketahanan Air Provinsi
Nilai IKU Target	3,90
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

606. Rehabilitasi Embung

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-014
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rehabilitasi embung yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Ketahanan Air Provinsi
Nilai IKU Target	3,90
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

607. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.03.01.03.01.02-015
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan embung dan penampung air lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Ketahanan Air Provinsi
Nilai IKU Target	3,90
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
RAB Level 5	RAB.03.01.03.01.02 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

27. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang

608. Rehabilitasi Jalan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian rehabilitasi jalan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

609. Rekonstruksi Jalan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-002



Uraian Bisnis/Urutan	Urusan rekonstruksi jalan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

610. Pembangunan Jalan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pembangunan jalan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

611. Pembangunan Jembatan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pembangunan jembatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

612. Penggantian Jembatan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan penggantian jembatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

613. Survey Kondisi Jalan/Jembatan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-006
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian survey kondisi jalan/Jembatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Waktu Tempuh Jalan Provinsi (jam/100 Km)
Nilai IKU Target	2,50
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

614. Pengelolaan Leger Jalan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-007
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas leger jalan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Waktu Tempuh Jalan Provinsi (jam/100 Km)
Nilai IKU Target	2,50
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

615. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-008
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

616. Pemeliharaan Rutin Jembatan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-009
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemeliharaan rutin jembatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

617. Pemeliharaan Berkala Jembatan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-010
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemeliharaan berkala jembatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

618. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Jembatan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-011
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan jembatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Waktu Tempuh Jalan Provinsi (jam/100 Km)
Nilai IKU Target	2,50
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

619. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-012
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Waktu Tempuh Jalan Provinsi (jam/100 Km)
Nilai IKU Target	2,50
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

620. Pemeliharaan Rutin Jalan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-013
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemeliharaan rutin jalan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

621. Pemeliharaan Berkala Jalan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.01.01-014
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemeliharaan berkala jalan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%)
Nilai IKU Target	93,33
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM



RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN
RAB Level 5	RAB.03.01.01.01.01 PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

622. Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.01 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG

623. Penyusunan RTRW Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan RTRW provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.01 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG

624. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan rencana tata ruang kepada kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM



RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.01 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG

625. Penyusunan Peta Dasar

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.01-004
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penyusunan peta dasar yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.01 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG

626. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

ID	SUMSEL-DAB.03.01.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.01.02 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.01.02.01 PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

627. Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar teknis kawasan yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR



RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI

628. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI

629. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan operasionalisasi tugas dan fungsi forum penataan ruang yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI

630. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.02-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan operasionalisasi tugas dan fungsi inspektur pembangunan bidang penataan ruang yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH PROVINSI

631. Penilaian Perwujudan RTR

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penilaian perwujudan RTR yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemantauan Penataan ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.03 MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG

632. Audit Tata Ruang

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.03-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan audit tata ruang yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemantauan Penataan ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.03 MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG

633. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

ID	SUMSEL-DAB.03.01.02.01.03-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap TURBINLAK dan pengawasan fungsi dan manfaat yang diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam bidang Pekerjaan Umum.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemantauan Penataan ruang
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang
Nilai IKU Target	75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



RAB Level 2	RAB.03.01 PEKERJAAN UMUM
RAB Level 3	RAB.03.01.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
RAB Level 4	RAB.03.01.02.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
RAB Level 5	RAB.03.01.02.01.03 MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG

28. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

634. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.03.04.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Air Minum
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Akses Air Minum Layak
Nilai IKU Target	97,59
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
RAB Level 4	RAB.03.04.02.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
RAB Level 5	RAB.03.04.02.01.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA

635. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.03.04.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Air Minum
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Akses Air Minum Layak
Nilai IKU Target	97,59
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
RAB Level 4	RAB.03.04.02.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
RAB Level 5	RAB.03.04.02.01.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA

636. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

ID	SUMSEL-DAB.03.04.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pelayanan Air Minum
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Akses Air Minum Layak
Nilai IKU Target	97,59
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
RAB Level 4	RAB.03.04.02.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
RAB Level 5	RAB.03.04.02.01.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA

637. Pembangunan TPA/TPST/SPA

ID	SUMSEL-DAB.03.04.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembangunan tPA/TPST/SPA yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Nilai IKU Target	88,11
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS
RAB Level 4	RAB.03.04.03.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
RAB Level 5	RAB.03.04.03.01.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

638. Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA

ID	SUMSEL-DAB.03.04.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Nilai IKU Target	88,11
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS
RAB Level 4	RAB.03.04.03.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
RAB Level 5	RAB.03.04.03.01.01 PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

639. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.04.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembangunan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani
Nilai IKU Target	27,75
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
RAB Level 4	RAB.03.04.01.01 PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
RAB Level 5	RAB.03.04.01.01.01 PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI

640. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

ID	SUMSEL-DAB.03.04.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani
Nilai IKU Target	27,75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
RAB Level 4	RAB.03.04.04.01 PENGEMBANGAN PERUMAHAN
RAB Level 5	RAB.03.04.04.01.01 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI

641. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

ID	SUMSEL-DAB.03.04.02.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (Sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (Lima belas) ha yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani
Nilai IKU Target	27,75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
RAB Level 4	RAB.03.04.02.02 KAWASAN PERMUKIMAN
RAB Level 5	RAB.03.04.02.02.01 PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 HA

642. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.04.02.03.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan strategis provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani
Nilai IKU Target	27,75



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
RAB Level 4	RAB.03.04.02.03 PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
RAB Level 5	RAB.03.04.02.03.01 PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI

643. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

ID	SUMSEL-DAB.03.04.03.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani
Nilai IKU Target	27,75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.03 PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA STRATEGIS
RAB Level 4	RAB.03.04.03.02 PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
RAB Level 5	RAB.03.04.03.02.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN

644. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli

ID	SUMSEL-DAB.03.04.04.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam bidang Perumahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Bangunan Gedung dan Rumah yang Tertangani
Nilai IKU Target	27,75
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.04 PERUMAHAN
RAB Level 3	RAB.03.04.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
RAB Level 4	RAB.03.04.04.02 PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI
RAB Level 5	RAB.03.04.04.02.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI

29. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan

645. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan sOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketenteraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Nilai IKU Target	49,73
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

646. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kapasitas SDM satuan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat
Nilai IKU Target	99
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

647. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Nilai IKU Target	49,73
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

648. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.



Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Nilai IKU Target	49,73
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

649. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat
Nilai IKU Target	99
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

650. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Nilai IKU Target	49,73
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

**651. Pengawasan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan**

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum atau disebut juga Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Nilai IKU Target	49,73
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

652. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

ID	SUMSEL-DAB.05.02.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan sOP penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan
Nilai IKU Target	2
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM
RAB Level 4	RAB.05.02.02.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.02.01.01 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

653. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

ID	SUMSEL-DAB.05.02.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan gubernur yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan
Nilai IKU Target	2
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM
RAB Level 4	RAB.05.02.02.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



RAB Level 5

RAB.05.02.02.01.01 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

654. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah

ID	SUMSEL-DAB.05.02.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak peraturan daerah yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan
Nilai IKU Target	2
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.02 PENEGAKAN HUKUM
RAB Level 4	RAB.05.02.02.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.02.01.01 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

655. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

ID	SUMSEL-DAB.05.02.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan kapasitas dan karier PPNS yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Keamanan.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan
Nilai IKU Target	2
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.05 KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAB Level 2	RAB.05.02 KEAMANAN
RAB Level 3	RAB.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAB Level 4	RAB.05.02.01.01 PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RAB Level 5	RAB.05.02.01.01.02 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PROVINSI

656. Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
Nilai IKU Target	74
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.01 PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
RAB Level 5	RAB.04.02.06.01.01 PENYELENGGARAAN PEMETAAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN

**657. Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
Nilai IKU Target	74
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.01 PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
RAB Level 5	RAB.04.02.06.01.02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

658. Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
Nilai IKU Target	74
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.01 PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
RAB Level 5	RAB.04.02.06.01.02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

659. Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.01.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sistem proteksi kebakaran yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
Nilai IKU Target	74
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA



RAB Level 4	RAB.04.02.06.01 PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
RAB Level 5	RAB.04.02.06.01.02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

660. Pembinaan dan pengawasan penguatan kapasitas Penyelenggaraan urusan kebakaran di kabupaten/kota

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan pengawasan penguatan kapasitas penyelenggaraan urusan kebakaran di kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
Nilai IKU Target	74
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.01 PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
RAB Level 5	RAB.04.02.06.01.03 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN URUSAN KEBAKARAN DI KABUPATEN/KOTA

30. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

661. Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)

ID	SUMSEL-DAB.04.02.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial (Penyuluh, peksos, TKSK) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemberdayaan sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
Nilai IKU Target	45
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.05.01 PEMBERDAYAAN SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.05.01.01 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI

662. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

ID	SUMSEL-DAB.04.02.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemberdayaan sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Nilai IKU Target	45



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.05.01 PEMBERDAYAAN SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.05.01.01 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN PROVINSI

663. Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

ID	SUMSEL-DAB.04.02.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemulangan dan pendampingan warga negara migran korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.01.01 PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
RAB Level 5	RAB.04.02.01.01.01 FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DAERAH KABUPATEN/ KOTA ASAL

664. Penyediaan Permakanan dan Sandang bagi Anak Terlantar

ID	SUMSEL-DAB.04.02.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan permakanan dan sandang bagi anak terlantar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Rehabilitasi sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.01.02 REHABILITASI SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.01.02.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI

665. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial serta Akses Pendidikan/Kesehatan

ID	SUMSEL-DAB.04.02.01.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial serta akses pendidikan/Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Rehabilitasi sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti
Nilai IKU Target	100



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.01.02 REHABILITASI SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.01.02.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI

666. Penyediaan Alat Bantu dan Asrama yang Mudah Diakses bagi Disabilitas

ID	SUMSEL-DAB.04.02.01.02.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan alat bantu dan asrama yang mudah diakses bagi disabilitas yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Rehabilitasi sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penyandang disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.01.02 REHABILITASI SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.01.02.02 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI DALAM PANTI

667. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bimbingan bagi Lanjut Usia Terlantar

ID	SUMSEL-DAB.04.02.01.02.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan bagi lanjut usia terlantar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Rehabilitasi sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.01.02 REHABILITASI SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.01.02.03 REHABILITASI LANJUT USIA TERLANTAR DI DALAM PANTI

668. Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan, Pengemis, dan ODGJ di dalam Panti

ID	SUMSEL-DAB.04.02.01.02.04-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, dan ODGJ di dalam panti yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Rehabilitasi sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.01.02 REHABILITASI SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.01.02.04 REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI

669. Penanganan PPKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza

ID	SUMSEL-DAB.04.02.01.02.05-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penanganan PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan napza yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Rehabilitasi sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Napza yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya didalam panti
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.01.02 REHABILITASI SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.01.02.05 KOORDINASI, SINKRONISASI & PEMBINAAN PELAKSANAAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG PMKS LAINYA DILUAR HIV/AIDS DAN NAFZA

670. Penyaluran Bantuan Sosial bagi Keluarga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

ID	SUMSEL-DAB.04.02.05.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyaluran bantuan sosial bagi keluarga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.05.02 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.05.02.01 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA

671. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi warga miskin

ID	SUMSEL-DAB.04.02.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan bantuan usaha ekonomi produktif bagi warga miskin yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN



RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.02.01 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.02.01.01 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT

672. Pemutakhiran Data Terpadu (DTSEN/DTKS) dan Pengelolaan Data Fakir Miskin

ID	SUMSEL-DAB.04.02.05.02.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemutakhiran data terpadu (DTSEN/DTKS) dan pengelolaan data fakir miskin yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.05 SISTEM PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.05.02 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
RAB Level 5	RAB.04.02.05.02.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH PROVINSI

673. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi dan Layanan Dukungan Psikososial

ID	SUMSEL-DAB.04.02.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan tempat penampungan pengungsi dan layanan dukungan psikososial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL
RAB Level 4	RAB.04.02.03.01 PENANGANAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.03.01.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL PROVINSI

674. Pemeliharaan dan Tata Kelola Taman Makam Pahlawan (TMP)

ID	SUMSEL-DAB.04.02.03.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemeliharaan dan tata kelola taman makam pahlawan (TMP) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik
Nilai IKU Target	100
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.03 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL



RAB Level 4

RAB.04.02.03.02 PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

RAB Level 5

RAB.04.02.03.02.01 PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL PROVINSI

31. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

675. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri
Nilai IKU Target	0.77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.01.01 PELAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

676. Pelayanan Antar Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelayanan antar kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri
Nilai IKU Target	0.77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.01.01 PELAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

677. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri
Nilai IKU Target	0.77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN



RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.01.01 PELAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

678. Perluasan Kesempatan Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian perluasan kesempatan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Proporsi penciptaan lapangan kerja formal
Nilai IKU Target	48,40%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.01.01 PELAYANAN ANTAR KERJA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

679. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengawasan terhadap dan pengendalian LPTKS yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri
Nilai IKU Target	0.77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.01.02 PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA

680. Job Fair/Bursa Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian job fair/Bursa kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri
Nilai IKU Target	0.77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN



RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.01.03 PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA

681. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

ID	SUMSEL-DAB.06.02.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan pelindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI)/Pekerja migran indonesia (PMI) yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri
Nilai IKU Target	0.77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
RAB Level 4	RAB.06.02.05.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.05.01.01 PERLINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH PROVINSI

682. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

ID	SUMSEL-DAB.06.02.05.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di dalam negeri
Nilai IKU Target	0.77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
RAB Level 4	RAB.06.02.05.01 PENEMPATAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.05.01.01 PERLINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH PROVINSI

683. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan rencana tenaga kerja makro yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.02 PERENCANAAN TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.02.01 PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA

684. Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.03.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Nilai IKU Target	85.100.000
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.03 PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.03.01 PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI

685. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.03.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengadaan sarana pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Nilai IKU Target	85.100.000
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.03 PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.03.01 PELAKSANAAN LATIHAN KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI

686. Survey dan Penilaian Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.03.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan survey dan penilaian akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Nilai IKU Target	85.100.000
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.03 PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.03.02 PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

687. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.02.03.03-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Nilai IKU Target	85.100.000
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.02.03 PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
RAB Level 5	RAB.06.02.02.03.03 KONSULTASI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN MENENGAH

688. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial

ID	SUMSEL-DAB.06.02.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
Nilai IKU Target	0.6
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.03.01 HUBUNGAN INDUSTRIAL
RAB Level 5	RAB.06.02.03.01.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

689. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial

ID	SUMSEL-DAB.06.02.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pendaftaran perjanjian kerja bersama yang terkait dengan hubungan industrial yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi



Nilai IKU Target	0.6
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.03.01 HUBUNGAN INDUSTRIAL
RAB Level 5	RAB.06.02.03.01.01 PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

690. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

ID	SUMSEL-DAB.06.02.03.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
Nilai IKU Target	0.6
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.03.01 HUBUNGAN INDUSTRIAL
RAB Level 5	RAB.06.02.03.01.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN

691. Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.02.03.01.02-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan pengupahan skala provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
Nilai IKU Target	0.6
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.03.01 HUBUNGAN INDUSTRIAL
RAB Level 5	RAB.06.02.03.01.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN

692. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

ID	SUMSEL-DAB.06.02.03.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.



Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
Nilai IKU Target	0.6
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.03.01 HUBUNGAN INDUSTRIAL
RAB Level 5	RAB.06.02.03.01.03 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMPSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)

693. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.03.01.03-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Kebersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
Nilai IKU Target	0.6
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.03.01 HUBUNGAN INDUSTRIAL
RAB Level 5	RAB.06.02.03.01.03 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMPSP), UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK)

694. Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

ID	SUMSEL-DAB.06.02.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan norma kerja di perusahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.04.01 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
RAB Level 5	RAB.06.02.04.01.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

695. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan

ID	SUMSEL-DAB.06.02.04.01.01-002



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.04.01 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
RAB Level 5	RAB.06.02.04.01.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

696. Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

ID	SUMSEL-DAB.06.02.04.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Ketenagakerjaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya iklim ketenagakerjaan yang kondusif dalam hubungan kerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.02 KETENAGAKERJAAN
RAB Level 3	RAB.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RAB Level 4	RAB.06.02.04.01 PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
RAB Level 5	RAB.06.02.04.01.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

697. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

ID	SUMSEL-DAB.03.02.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.02 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JARINGAN KONEKTIVITAS INTRA KAWASAN TRANSMIGRASI, DAN ANTARA KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN KAWASAN SEKITAR
RAB Level 4	RAB.03.02.02.01 PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.02.01.01 PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI

698. Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan

ID	SUMSEL-DAB.03.02.02.01.01-002



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan advokasi dan musyawarah penetapan kawasan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.02 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JARINGAN KONEKTIVITAS INTRA KAWASAN TRANSMIGRASI, DAN ANTARA KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN KAWASAN SEKITAR
RAB Level 4	RAB.03.02.02.01 PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.02.01.01 PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI

699. Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

ID	SUMSEL-DAB.03.02.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.02 FASILITASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SERTA JARINGAN KONEKTIVITAS INTRA KAWASAN TRANSMIGRASI, DAN ANTARA KAWASAN TRANSMIGRASI DENGAN KAWASAN SEKITAR
RAB Level 4	RAB.03.02.02.01 PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.02.01.01 PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI

700. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi Bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

ID	SUMSEL-DAB.03.02.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 4	RAB.03.02.03.01 PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.03.01.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

**701. Pelatihan Transmigrasi**

ID	SUMSEL-DAB.03.02.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelatihan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 4	RAB.03.02.03.01 PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.03.01.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

702. Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi

ID	SUMSEL-DAB.03.02.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 4	RAB.03.02.03.01 PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.03.01.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

703. Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan

ID	SUMSEL-DAB.03.02.03.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian seleksi akhir pra pemberangkatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.03 FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 4	RAB.03.02.03.01 PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.03.01.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

**704. Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman**

ID	SUMSEL-DAB.03.02.07.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penguatan SDM dalam rangka pemantapan satuan pemukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.07 FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 4	RAB.03.02.07.01 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.07.01.01 PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP PEMANTAPAN

705. Monitoring Dan evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi

ID	SUMSEL-DAB.03.02.07.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transmigrasi.
Sasaran Strategis	Terciptanya pemantapan transmigran
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.02 TRANSMIGRASI
RAB Level 3	RAB.03.02.07 FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 4	RAB.03.02.07.01 PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAB Level 5	RAB.03.02.07.01.01 PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP PEMANTAPAN

32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan**706. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi**

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan kajian risiko bencana provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Menurunnya Risiko Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumsel
Nilai IKU Target	127,88
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA



RAB Level 5

RAB.04.02.06.02.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI

707. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (Per jenis ancaman) yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Pra Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA PROVINSI

708. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Pra Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Pra Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

709. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Pra Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Pra Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

710. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.02-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Pra Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Pra Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

711. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.02-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Pra Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Pra Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

712. Penyusunan Rencana Kontijensi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.02-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyusunan rencana kontijensi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

713. Respon Cepat Darurat Bencana Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.03-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan respon cepat darurat bencana provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

714. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.03-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

715. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.03-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

716. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.03-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.



Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

717. Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.04-001
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian koordinasi penanganan pascabencana provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Pasca Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

718. Penanganan Pasca Bencana Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.04-002
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penanganan pasca bencana provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Penanganan Pasca Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penanganan Pasca Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

719. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.04-003
Uraian Bisnis/Urutan	Uraian penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas Dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal



Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

720. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.04-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam penanganan keadaan darurat provinsi yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Upaya penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

721. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.04-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Upaya penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

722. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.04.02.06.02.04-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Sosial.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Upaya penanggulangan Bencana
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana



Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.02 SOSIAL
RAB Level 3	RAB.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 4	RAB.04.02.06.02 PENANGGULANGAN BENCANA
RAB Level 5	RAB.04.02.06.02.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

33. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

723. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Nilai IKU Target	94,19 - 94,29
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
RAB Level 4	RAB.04.03.01.01 PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 5	RAB.04.03.01.01.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI

724. Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Nilai IKU Target	416
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
RAB Level 4	RAB.04.03.01.01 PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 5	RAB.04.03.01.01.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI

725. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.01.01.02-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan
Nilai IKU Target	58,50%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
RAB Level 4	RAB.04.03.01.01 PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 5	RAB.04.03.01.01.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN PROVINSI

726. Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan kerja sama dalam para pihak dalam pencegahan ktP kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Perempuan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.
RAB Level 4	RAB.04.03.05.01 PERLINDUNGAN PEREMPUAN
RAB Level 5	RAB.04.03.05.01.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

727. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.04.03.05.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan layanan pengaduan atau penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Perempuan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.
RAB Level 4	RAB.04.03.05.01 PERLINDUNGAN PEREMPUAN

**RAB Level 5**

RAB.04.03.05.01.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

728. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.04.03.05.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan layanan pendampingan korban bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Perempuan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.
RAB Level 4	RAB.04.03.05.01 PERLINDUNGAN PEREMPUAN
RAB Level 5	RAB.04.03.05.01.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

729. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.05.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Perempuan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.
RAB Level 4	RAB.04.03.05.01 PERLINDUNGAN PEREMPUAN
RAB Level 5	RAB.04.03.05.01.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN KEWENANGAN PROVINSI

730. Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar

ID	SUMSEL-DAB.04.03.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan Anak



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Puspaga di Kab/Kota
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
RAB Level 4	RAB.04.03.01.02 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
RAB Level 5	RAB.04.03.01.02.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK KEWENANGAN PROVINSI

731. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.01.03.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan penyajian, dan pemanfaatan data gender dan anak provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan Anak
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan
Nilai IKU Target	58,00%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.01 KESETARAAN GENDER
RAB Level 4	RAB.04.03.01.03 PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
RAB Level 5	RAB.04.03.01.03.01 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH PROVINSI

732. Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pendampingan penyelenggaraan kebijakan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Nilai IKU Target	72,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.02 PEMENUHAN HAK ANAK
RAB Level 4	RAB.04.03.02.01 PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
RAB Level 5	RAB.04.03.02.01.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN PROVINSI

733. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.04.01.01-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urusan advokasi dan sosialisasi pencegahan ktA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.04 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
RAB Level 4	RAB.04.03.04.01 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
RAB Level 5	RAB.04.03.04.01.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA

734. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.04.03.05.02.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan layanan pengaduan atau penjangkauan bagi anak korban kekerasan tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.
RAB Level 4	RAB.04.03.05.02 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
RAB Level 5	RAB.04.03.05.02.01 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI

735. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.04.03.05.02.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAB Level 2	RAB.04.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAB Level 3	RAB.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.



RAB Level 4	RAB.04.03.05.02 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
RAB Level 5	RAB.04.03.05.02.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KAB/KOTA

34. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

736. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

ID	SUMSEL-DAB.02.03.23.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor Pola Pangan Harapan
Nilai IKU Target	95,3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
RAB Level 4	RAB.02.03.23.01 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.02.03.23.01.01 PROMOSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

737. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

ID	SUMSEL-DAB.02.03.23.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor Pola Pangan Harapan
Nilai IKU Target	95,3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
RAB Level 4	RAB.02.03.23.01 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.02.03.23.01.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN ADVOKASI, EDUKASI, DAN SOSIALISASI KONSUMSI PANGAN BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN (B2SA)

738. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

ID	SUMSEL-DAB.02.03.23.01.03-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari) dan Protein (gram/Kap/Hari)
Nilai IKU Target	2400 / 63
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
RAB Level 4	RAB.02.03.23.01 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
RAB Level 5	RAB.02.03.23.01.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN

739. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

ID	SUMSEL-DAB.02.03.19.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Ketahanan Pangan
Nilai IKU Target	86,69
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN
RAB Level 4	RAB.02.03.19.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
RAB Level 5	RAB.02.03.19.01.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA

740. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

ID	SUMSEL-DAB.02.03.04.01.01-009
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan ketahanan pangan keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Ketahanan Pangan
Nilai IKU Target	86,69
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
RAB Level 4	RAB.02.03.04.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
RAB Level 5	RAB.02.03.04.01.01 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA

741. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.03.20.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan stabilisasi pasokan dan harga pangan tingkat produsen dan konsumen di provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Harga Pangan Stabil
Nilai IKU Target	1



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN
RAB Level 4	RAB.02.03.20.01 KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN
RAB Level 5	RAB.02.03.20.01.01 STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI PROVINSI

742. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.03.23.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Cadangan Pangan
Nilai IKU Target	0.58
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
RAB Level 4	RAB.02.03.23.02 KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN
RAB Level 5	RAB.02.03.23.02.01 PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

743. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.03.21.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Nilai IKU Target	0.01
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
RAB Level 4	RAB.02.03.21.01 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
RAB Level 5	RAB.02.03.21.01.01 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI

744. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.02.03.21.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Nilai IKU Target	0.01



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
RAB Level 4	RAB.02.03.21.01 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
RAB Level 5	RAB.02.03.21.01.02 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KEWENANGAN PROVINSI

745. Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.05.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemberian bimbingan peningkatan produksi benih/Bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Peternakan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Produksi Daging (Ton)
Nilai IKU Target	213.795
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.05 PETERNAKAN
RAB Level 3	RAB.02.05.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
RAB Level 4	RAB.02.05.03.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.05.03.01.01 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI

746. Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner

ID	SUMSEL-DAB.02.05.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengembangan kapasitas petugas pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, paramedik veteriner, dan medik veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Peternakan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Produksi Telur (Ton)
Nilai IKU Target	317.204
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.05 PETERNAKAN
RAB Level 3	RAB.02.05.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
RAB Level 4	RAB.02.05.03.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.05.03.01.01 PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK, BAHAN PAKAN, SERTA PAKAN KEWENANGAN PROVINSI

747. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

ID	SUMSEL-DAB.02.05.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Peternakan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai Tukar Petani Peternak
Nilai IKU Target	105,46
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.05 PETERNAKAN
RAB Level 3	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK
RAB Level 4	RAB.02.05.01.01 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.05.01.01.01 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH PROVINSI LAIN

748. Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

ID	SUMSEL-DAB.02.05.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Peternakan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Menular Strategis (PHMS)
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.05 PETERNAKAN
RAB Level 3	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
RAB Level 4	RAB.02.05.05.01 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
RAB Level 5	RAB.02.05.05.01.01 PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

749. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

ID	SUMSEL-DAB.02.05.05.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas penerbitan sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Peternakan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat NKV
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.05 PETERNAKAN
RAB Level 3	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
RAB Level 4	RAB.02.05.05.01 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
RAB Level 5	RAB.02.05.05.01.02 PENGELOLAAN PENERBITAN SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

750. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

ID	SUMSEL-DAB.02.03.07.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai Tukar Petani Peternak
Nilai IKU Target	105,46
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN
RAB Level 4	RAB.02.03.07.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.07.01.01 PENGEMBANGAN KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

751. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

ID	SUMSEL-DAB.02.03.08.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam bidang Pertanian.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase SDM Pertanian yang Ditingkatkan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.03 PERTANIAN
RAB Level 3	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
RAB Level 4	RAB.02.03.08.01 PENYULUHAN PERTANIAN
RAB Level 5	RAB.02.03.08.01.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

35. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

752. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

ID	SUMSEL-DAB.07.05.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian dalam bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Nilai IKU Target	22,87%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 3	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
RAB Level 4	RAB.07.05.03.01 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 5	RAB.07.05.03.01.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

753. Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

ID	SUMSEL-DAB.07.05.03.01.01-002



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Nilai IKU Target	69,20
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 3	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
RAB Level 4	RAB.07.05.03.01 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 5	RAB.07.05.03.01.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

754. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

ID	SUMSEL-DAB.07.05.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Air (IKA)
Nilai IKU Target	76,28
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 3	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
RAB Level 4	RAB.07.05.03.01 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 5	RAB.07.05.03.01.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

755. Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi

ID	SUMSEL-DAB.07.05.03.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi dan sinkronisasi restorasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Nilai IKU Target	44,77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 3	RAB.07.05.03 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
RAB Level 4	RAB.07.05.03.01 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 5	RAB.07.05.03.01.02 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

756. Pengelolaan Taman Kehati diluar Kawasan Hutan

ID	SUMSEL-DAB.07.05.04.01.01-001



Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengelolaan atas taman kehati diluar kawasan hutan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)
Nilai IKU Target	0,38
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 3	RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
RAB Level 4	RAB.07.05.04.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
RAB Level 5	RAB.07.05.04.01.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PROVINSI

757. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.07.05.04.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Nilai IKU Target	38
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 3	RAB.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH
RAB Level 4	RAB.07.05.04.02 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
RAB Level 5	RAB.07.05.04.02.01 PENANGANAN SAMPAH DI TPA/TPST REGIONAL

758. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD

ID	SUMSEL-DAB.07.05.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Lingkungan Hidup.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.07 LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAB Level 2	RAB.07.05 LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 3	RAB.07.05.02 PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 4	RAB.07.05.02.01 PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
RAB Level 5	RAB.07.05.02.01.01 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PROVINSI

759. Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

ID	SUMSEL-DAB.03.06.05.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Pertanahan.



Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.06 PERTANAHAN
RAB Level 3	RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
RAB Level 4	RAB.03.06.05.01 PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
RAB Level 5	RAB.03.06.05.01.01 PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN DI WILAYAH PROVINSI

760. Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria

ID	SUMSEL-DAB.03.06.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dalam rangka penataan aset reforma agraria yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Pertanahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.06 PERTANAHAN
RAB Level 3	RAB.03.06.04 PENYELENGGARA REFORMA AGRARIA
RAB Level 4	RAB.03.06.04.01 REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
RAB Level 5	RAB.03.06.04.01.01 PENETAPAN SUBYEK DAN OBYEK REDISTRIBUSI TANAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

761. Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.06.05.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan mediasi penyelesaian kasus pertanahan lintas kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Pertanahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.06 PERTANAHAN
RAB Level 3	RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
RAB Level 4	RAB.03.06.05.02 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
RAB Level 5	RAB.03.06.05.02.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

762. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

ID	SUMSEL-DAB.03.06.08.01.01-001



Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan inventarisasi tanah kosong yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Pertanahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.06 PERTANAHAN
RAB Level 3	RAB.03.06.08 PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
RAB Level 4	RAB.03.06.08.01 PENGELOLAAN TANAH KOSONG
RAB Level 5	RAB.03.06.08.01.01 INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

763. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.06.05.03.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam bidang Pertanahan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.06 PERTANAHAN
RAB Level 3	RAB.03.06.05 PENGADAAN TANAH DAN PENCADANGAN TANAH
RAB Level 4	RAB.03.06.05.03 PENATAGUNAAN TANAH
RAB Level 5	RAB.03.06.05.03.01 PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

36. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan

764. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

ID	SUMSEL-DAB.03.07.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kependudukan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Nilai IKU Target	0.1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN
RAB Level 3	RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAB Level 4	RAB.03.07.01.01 PENDAFTARAN PENDUDUK
RAB Level 5	RAB.03.07.01.01.01 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

**765. Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk**

ID	SUMSEL-DAB.03.07.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas terkait pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kependudukan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Nilai IKU Target	58,11%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN
RAB Level 3	RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAB Level 4	RAB.03.07.01.01 PENDAFTARAN PENDUDUK
RAB Level 5	RAB.03.07.01.01.01 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

766. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

ID	SUMSEL-DAB.03.07.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kependudukan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Nilai IKU Target	0.1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.07 KEPENDUDUKAN
RAB Level 3	RAB.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAB Level 4	RAB.03.07.01.01 PENDAFTARAN PENDUDUK
RAB Level 5	RAB.03.07.01.01.02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

767. Fasilitas terkait Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAB.09.01.07.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas terkait pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Nilai IKU Target	990.63
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RAB Level 4	RAB.09.01.07.01 PENCATATAN SIPIL
RAB Level 5	RAB.09.01.07.01.01 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI

**768. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.07.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan sosialisasi terkait pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Nilai IKU Target	51,02%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RAB Level 4	RAB.09.01.07.01 PENCATATAN SIPIL
RAB Level 5	RAB.09.01.07.01.01 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI

769. Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAB.09.01.07.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Nilai IKU Target	53,15%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RAB Level 4	RAB.09.01.07.01 PENCATATAN SIPIL
RAB Level 5	RAB.09.01.07.01.01 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI

770. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAB.09.01.07.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan bimbingan teknis terkait pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Nilai IKU Target	53,71%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RAB Level 4	RAB.09.01.07.01 PENCATATAN SIPIL
RAB Level 5	RAB.09.01.07.01.01 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI

**771. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.03.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
RAB Level 4	RAB.09.01.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
RAB Level 5	RAB.09.01.03.01.01 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

772. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.09.01.03.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Pemanfaatan Data Kependudukan
Nilai IKU Target	7
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
RAB Level 4	RAB.09.01.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
RAB Level 5	RAB.09.01.03.01.01 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

773. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.03.01.01-007
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.03 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
RAB Level 4	RAB.09.01.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
RAB Level 5	RAB.09.01.03.01.01 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**774. Penyediaan Data Kependudukan Provinsi**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.07.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan data kependudukan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas profil kependudukan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RAB Level 4	RAB.09.01.07.02 PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
RAB Level 5	RAB.09.01.07.02.01 PENYEDIAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

775. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

ID	SUMSEL-DAB.09.01.07.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas profil kependudukan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RAB Level 4	RAB.09.01.07.02 PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
RAB Level 5	RAB.09.01.07.02.01 PENYEDIAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan**776. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Nilai IKU Target	0.4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.01 PENATAAN DESA



RAB Level 5

RAB.09.01.04.01.01 FASILITASI KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM RANGKA PENATAAN DESA

777. Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas kabupaten/Kota dan desa dalam rangka penataan desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Penataan Desa
Nilai IKU Target	0.4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.01 PENATAAN DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.01.01 FASILITASI KABUPATEN/KOTA DAN DESA DALAM RANGKA PENATAAN DESA

778. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa Desa yang Memiliki Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas kerja sama antar desa desa yang memiliki kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa
Nilai IKU Target	0.3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.02 PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.02.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA YANG MEMILIKI KEWENANGAN PROVINSI

779. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa
Nilai IKU Target	0.3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA



RAB Level 4	RAB.09.01.04.02 PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.02.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA YANG MEMILIKI KEWENANGAN PROVINSI

780. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.03.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.03 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.03.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

781. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.03.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan aparatur pemerintah desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya
Nilai IKU Target	0.58
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.03 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.03.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

782. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.03.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA



RAB Level 4	RAB.09.01.04.03 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.03.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

783. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.03.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitas pengelolaan aset desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.03 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.03.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

784. Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.03.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitas pengembangan inovasi desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa
Nilai IKU Target	0.8
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.03 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 5	RAB.09.01.04.03.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

785. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat...

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.05.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan...
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI



RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.05 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
RAB Level 5	RAB.09.01.04.05.01 PERMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN...

786. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan...

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.05.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan...
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.05 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN...
RAB Level 5	RAB.09.01.04.05.01 PERMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN...

787. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.05.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan...
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.05 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN...
RAB Level 5	RAB.09.01.04.05.01 PERMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN...

788. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

ID	SUMSEL-DAB.09.01.04.05.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Dalam Negeri.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan...
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM



RAB Level 2	RAB.09.01 DALAM NEGERI
RAB Level 3	RAB.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAB Level 4	RAB.09.01.04.05 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN...
RAB Level 5	RAB.09.01.04.05.01 PERMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN...

38. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

789. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.03.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
RAB Level 4	RAB.03.03.06.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.06.01.01 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI

790. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.03.06.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan prasarana jalan di jalan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal
Nilai IKU Target	0.53
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
RAB Level 4	RAB.03.03.06.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.06.01.01 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN PROVINSI

791. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

ID	SUMSEL-DAB.03.03.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI



RAB Level 3	RAB.03.03.02 PENGELOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.02.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.02.01.01 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN

792. Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.03.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penetapan dan sosialisasi rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Keselamatan Transportasi Provinsi
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.04.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.04.01.01 PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI

793. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.03.06.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	V/C Rasio Jalan Provinsi
Nilai IKU Target	382
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
RAB Level 4	RAB.03.03.06.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.06.01.02 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI

794. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.03.06.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (IKU)	V/C Rasio Jalan Provinsi
Nilai IKU Target	382
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI



RAB Level 3	RAB.03.03.06 MANAJEMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI NON APBN
RAB Level 4	RAB.03.03.06.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.06.01.02 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN PROVINSI

795. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.03.03.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Layanan Transportasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rata-rata load faktor angkutan umum
Nilai IKU Target	0.73
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.01.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.01.01.01 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

796. Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B

ID	SUMSEL-DAB.03.03.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengawasan terhadap operasional terminal penumpang tipe b yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Layanan Transportasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Simpul Transportasi Kewenangan Provinsi yang sesuai Standar
Nilai IKU Target	0.76
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.03.01 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
RAB Level 5	RAB.03.03.03.01.01 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B

797. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau...

ID	SUMSEL-DAB.03.03.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin angkutan sungai dan danau yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Layanan Transportasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio konektivitas transportasi
Nilai IKU Target	735
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.01.02 PENGELOLAAN PELAYARAN
RAB Level 5	RAB.03.03.01.02.01 PENERBITAN IZIN TRAYEK PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU...

798. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah...

ID	SUMSEL-DAB.03.03.03.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Layanan Transportasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio konektivitas transportasi
Nilai IKU Target	735
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.03.02 PENGELOLAAN PELAYARAN
RAB Level 5	RAB.03.03.03.02.01 PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU...

799. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah...

ID	SUMSEL-DAB.03.03.03.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Layanan Transportasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio konektivitas transportasi
Nilai IKU Target	735
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.03 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.03.02 PENGELOLAAN PELAYARAN
RAB Level 5	RAB.03.03.03.02.01 PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU...

800. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

ID	SUMSEL-DAB.03.03.04.02.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Layanan Transportasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio konektivitas transportasi
Nilai IKU Target	735
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.04.02 PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
RAB Level 5	RAB.03.03.04.02.01 PENETAPAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN

801. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian

ID	SUMSEL-DAB.03.03.04.02.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Transportasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cakupan/Persentase Perlindungan Kereta Api yang Ditangani
Nilai IKU Target	0.28
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAB Level 2	RAB.03.03 TRANSPORTASI
RAB Level 3	RAB.03.03.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
RAB Level 4	RAB.03.03.04.02 PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
RAB Level 5	RAB.03.03.04.02.01 PENETAPAN RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN

39. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

802. Relasi Media

ID	SUMSEL-DAB.09.03.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian relasi media yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks IPTK
Nilai IKU Target	6,80
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.03.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
RAB Level 5	RAB.09.03.03.01.01 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

803. Penyusunan Konten

ID	SUMSEL-DAB.09.03.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyusunan konten yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks IPTK
Nilai IKU Target	6,80
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.03.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
RAB Level 5	RAB.09.03.03.01.01 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

804. Disseminasi Informasi

ID	SUMSEL-DAB.09.03.03.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian disseminasi informasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks IPTK
Nilai IKU Target	6,80
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.03.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
RAB Level 5	RAB.09.03.03.01.01 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

805. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

ID	SUMSEL-DAB.09.03.03.01.01-004
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks IPTK
Nilai IKU Target	6,80
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.03.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
RAB Level 5	RAB.09.03.03.01.01 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

806. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

ID	SUMSEL-DAB.09.03.03.01.01-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks IPTK
Nilai IKU Target	6,80
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM



RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAB Level 4	RAB.09.03.03.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
RAB Level 5	RAB.09.03.03.01.01 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

807. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.03.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks SPBE
Nilai IKU Target	3,22
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 4	RAB.09.03.02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 5	RAB.09.03.02.01.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

808. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan

ID	SUMSEL-DAB.09.03.02.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks SPBE
Nilai IKU Target	3,22
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 4	RAB.09.03.02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 5	RAB.09.03.02.01.02 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

809. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.03.02.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks SPBE
Nilai IKU Target	3,22
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 4	RAB.09.03.02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 5	RAB.09.03.02.01.03 PENGELOLAAN E -GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

810. Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.03.02.01.03-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan keterhubungan jaringan intra pemerintah daerah kabupaten/kota ke jaringan intra pemerintah daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks SPBE
Nilai IKU Target	3,22
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 4	RAB.09.03.02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 5	RAB.09.03.02.01.03 PENGELOLAAN E -GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

811. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi

ID	SUMSEL-DAB.09.03.02.01.03-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks SPBE
Nilai IKU Target	3,22
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 4	RAB.09.03.02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 5	RAB.09.03.02.01.03 PENGELOLAAN E -GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

812. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

ID	SUMSEL-DAB.09.03.02.01.03-004
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks SPBE
Nilai IKU Target	3,22



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 4	RAB.09.03.02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 5	RAB.09.03.02.01.03 PENGELOLAAN E -GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

813. Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital

ID	SUMSEL-DAB.09.03.02.01.03-005
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Nilai IKU Target	56,08
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 4	RAB.09.03.02.01 PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
RAB Level 5	RAB.09.03.02.01.03 PENGELOLAAN E -GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

814. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor

ID	SUMSEL-DAB.09.03.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan kualitas data statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Nilai IKU Target	2,77
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
RAB Level 4	RAB.09.03.04.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
RAB Level 5	RAB.09.03.04.01.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI

815. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor

ID	SUMSEL-DAB.09.03.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Nilai IKU Target	2,77
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
RAB Level 4	RAB.09.03.04.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
RAB Level 5	RAB.09.03.04.01.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH PROVINSI

816. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.09.03.08.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Nilai IKU Target	382
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
RAB Level 4	RAB.09.03.08.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
RAB Level 5	RAB.09.03.08.01.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

817. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

ID	SUMSEL-DAB.09.03.08.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Informasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Nilai IKU Target	382
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.09 PEMERINTAHAN UMUM
RAB Level 2	RAB.09.03 INFORMASI
RAB Level 3	RAB.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
RAB Level 4	RAB.09.03.08.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
RAB Level 5	RAB.09.03.08.01.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

40. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

818. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

ID	SUMSEL-DAB.02.10.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan,



Sasaran Strategis	pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Usaha Kecil Dan Menengah.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah
Nilai IKU Target	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Nilai IKU Terealisasi	2,88
RAB Level 1 Nasional	-
RAB Level 2	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 3	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 5	RAB.02.10.02.01 PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
RAB Level 5	RAB.02.10.02.01.01 PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

819. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

ID	SUMSEL-DAB.02.10.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Usaha Kecil Dan Menengah.
Sasaran Strategis	Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Nilai IKU Target	2,88
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 3	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.02.10.02.01 PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
RAB Level 5	RAB.02.10.02.01.01 PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

820. Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha

ID	SUMSEL-DAB.02.10.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas sertifikasi dan standardisasi usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Usaha Kecil Dan Menengah.
Sasaran Strategis	Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Nilai IKU Target	2,88
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 3	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.02.10.02.01 PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)



RAB Level 5

RAB.02.10.02.01.01 PEMBERDAYAAN USAHA KECIL YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIJINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

821. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

ID	SUMSEL-DAB.02.10.02.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Usaha Kecil Dan Menengah.
Sasaran Strategis	Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Nilai IKU Target	42,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 3	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.02.10.02.02 PENGEMBANGAN UMKM
RAB Level 5	RAB.02.10.02.02.01 PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH

822. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

ID	SUMSEL-DAB.02.10.02.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Usaha Kecil Dan Menengah.
Sasaran Strategis	Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Nilai IKU Target	42,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 3	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 4	RAB.02.10.02.02 PENGEMBANGAN UMKM
RAB Level 5	RAB.02.10.02.02.01 PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH

823. Fasilitas Inkubator Usaha Kecil

ID	SUMSEL-DAB.02.10.02.02.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitas inkubator usaha kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Usaha Kecil Dan Menengah.
Sasaran Strategis	Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Nilai IKU Target	42,66
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 3	RAB.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH



RAB Level 4	RAB.02.10.02.02 PENGEMBANGAN UMKM
RAB Level 5	RAB.02.10.02.02.01 PENGEMBANGAN USAHA KECIL DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA MENENGAH

824. Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.10.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Usaha Kecil Dan Menengah.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam
Nilai IKU Target	28,71
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.10 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAB Level 3	RAB.02.10.01 USAHA MIKRO
RAB Level 4	RAB.02.10.01.01 PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
RAB Level 5	RAB.02.10.01.01.01 PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

825. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

ID	SUMSEL-DAB.02.09.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Koperasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Nilai IKU Target	9,96
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.09 KOPERASI
RAB Level 3	RAB.02.09.04 PENGAWASAN KOPERASI
RAB Level 4	RAB.02.09.04.01 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
RAB Level 5	RAB.02.09.04.01.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

826. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

ID	SUMSEL-DAB.02.09.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Koperasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase koperasi aktif
Nilai IKU Target	60,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI



RAB Level 2	RAB.02.09 KOPERASI
RAB Level 3	RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
RAB Level 4	RAB.02.09.01.01 PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
RAB Level 5	RAB.02.09.01.01.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

827. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

ID	SUMSEL-DAB.02.09.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Koperasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
Nilai IKU Target	15,10
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.09 KOPERASI
RAB Level 3	RAB.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI
RAB Level 4	RAB.02.09.01.02 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
RAB Level 5	RAB.02.09.01.02.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

828. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

ID	SUMSEL-DAB.02.09.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Koperasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Nilai IKU Target	17,22
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.09 KOPERASI
RAB Level 3	RAB.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
RAB Level 4	RAB.02.09.03.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
RAB Level 5	RAB.02.09.03.01.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

829. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.09.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pemberdayaan koperasi dengan keanggotaan lintas daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Koperasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Nilai IKU Target	17,22
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.09 KOPERASI
RAB Level 3	RAB.02.09.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
RAB Level 4	RAB.02.09.03.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
RAB Level 5	RAB.02.09.03.01.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI

41. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

830. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM

ID	SUMSEL-DAB.02.08.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penetapan kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan PM yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pertumbuhan Investasi
Nilai IKU Target	8,0%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.01.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.01.01.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITASI / INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

831. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.08.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pertumbuhan Investasi
Nilai IKU Target	8,0%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.01.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.01.01.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITASI / INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

832. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.08.01.01.02-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pertumbuhan Investasi
Nilai IKU Target	8,0%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.01.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.01.01.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI

833. Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.08.01.01.02-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penyusunan peta potensi investasi provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pertumbuhan Investasi
Nilai IKU Target	8,0%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.01.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.01.01.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI

834. Fasilitas Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur

ID	SUMSEL-DAB.02.08.01.01.03-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PMTB)
Nilai IKU Target	31,98%
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.01.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.01.01.03 FASILITASI RENCANA PROYEK PENANAMAN MODAL DI BIDANG INFRASTRUKTUR

835. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.08.03.01.01-001



Uraian Bisnis/Uraian	Urusan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)
Nilai IKU Target	1.3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.03.01 PROMOSI PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.03.01.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

836. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.08.03.01.01-002
Uraian Bisnis/Uraian	Urusan penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)
Nilai IKU Target	1.3
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.03.01 PROMOSI PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.03.01.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI

837. Pengawasan Penanaman Modal

ID	SUMSEL-DAB.02.08.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Urusan pengawasan terhadap penanaman modal yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.04.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.04.01.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

**838. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**

ID	SUMSEL-DAB.02.08.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.04.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.04.01.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

839. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

ID	SUMSEL-DAB.02.08.04.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan bimbingan teknis kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha
Nilai IKU Target	0.95
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.04.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.04.01.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

840. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

ID	SUMSEL-DAB.02.08.06.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



RAB Level 4	RAB.02.08.06.01 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.06.01.01 URUSAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH PROVINSI

841. Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.08.03.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pembinaan dan pendampingan optimalisasi pengelolaan data dan informasi penanaman modal di wilayah provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL
RAB Level 4	RAB.02.08.03.02 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.03.02.01 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL...

842. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAB.02.08.06.02.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin Sesuai Ketentuan
Nilai IKU Target	0.88
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
RAB Level 4	RAB.02.08.06.02 PELAYANAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.06.02.01 PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

843. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

ID	SUMSEL-DAB.02.08.06.02.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kepuasan Investor
Nilai IKU Target	88



Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
RAB Level 4	RAB.02.08.06.02 PELAYANAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.06.02.01 PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

844. Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ID	SUMSEL-DAB.02.08.06.02.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Dan Non Perizinan Berbasis Digital Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sesuai SOP
Nilai IKU Target	0.98
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
RAB Level 4	RAB.02.08.06.02 PELAYANAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.06.02.01 PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

845. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ID	SUMSEL-DAB.02.08.06.02.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang Investasi.
Sasaran Strategis	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Kepuasan Investor
Nilai IKU Target	88
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.08 INVESTASI
RAB Level 3	RAB.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
RAB Level 4	RAB.02.08.06.02 PELAYANAN PENANAMAN MODAL
RAB Level 5	RAB.02.08.06.02.01 PENANAMAN MODAL YANG RUANG LINGKUPNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

42. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan

846. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.01-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai IKU Target	61225
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI

847. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perencanaan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai IKU Target	61225
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI

848. Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai IKU Target	61225
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI

**849. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi**

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.01-004
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah/RAD tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai IKU Target	61225
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI

850. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.01-005
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan;
Nilai IKU Target	50
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI

851. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.01-006
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Pemuda
Nilai IKU Target	61225
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA



RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI

852. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.01-007
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio Wirausaha Pemuda
Nilai IKU Target	4,73
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI

853. Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan koordinasi sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan;
Nilai IKU Target	50
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.01 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.01.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI

854. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.04.02.02.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pemuda.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan
Nilai IKU Target	17,96
Nilai IKU Terealisasi	-



RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.04 PEMUDA
RAB Level 3	RAB.06.04.02 PENGEMBANGAN PEMUDA
RAB Level 4	RAB.06.04.02.02 PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
RAB Level 5	RAB.06.04.02.02.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

855. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha

ID	SUMSEL-DAB.06.05.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Nilai IKU Target	435
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.01.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.01.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

856. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus

ID	SUMSEL-DAB.06.05.01.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah dan khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Partisipasi Olahraga
Nilai IKU Target	375
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.01.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.01.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

857. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.05.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat provinsi



Sasaran Strategis	provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Nilai IKU Target	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Nilai IKU Terealisasi	435
RAB Level 1 Nasional	-
RAB Level 2	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 3	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAB Level 5	RAB.06.05.01.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 6	RAB.06.05.01.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI

858. Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga

ID	SUMSEL-DAB.06.05.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Nilai IKU Target	6,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.01.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.01.01.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

859. Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.05.01.01.02-002
Uraian Bisnis/Urusan	Urusan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Nilai IKU Target	6,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.01.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.01.01.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

860. Seleksi Atlet Daerah

ID	SUMSEL-DAB.06.05.02.01.01-001



Uraian Bisnis/Urutan	Urusan seleksi atlet daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Nilai IKU Target	6,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.02.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.02.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL

861. Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga

ID	SUMSEL-DAB.06.05.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Nilai IKU Target	6,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.02.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.02.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL

862. Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.05.02.01.01-003
Uraian Bisnis/Urutan	Urusan penyediaan data keolahragaan terpadu di provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Nilai IKU Target	435
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.02.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.02.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL

863. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.06.05.02.01.01-004



Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
Nilai IKU Target	6,00
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.02.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.02.01.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL

864. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait

ID	SUMSEL-DAB.06.05.02.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Olahraga.
Sasaran Strategis	Terwujudnya Masyarakat yang Bugar, Aktif, dan Berprestasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Nilai IKU Target	435
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.06 PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAB Level 2	RAB.06.05 OLAHRAGA
RAB Level 3	RAB.06.05.02 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
RAB Level 4	RAB.06.05.02.01 PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
RAB Level 5	RAB.06.05.02.01.02 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

43. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

865. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.01.01-003
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Nilai IKU Target	60,89
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.01 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.01.01.01 PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota

**866. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat**

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.01.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kumulatif Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan
Nilai IKU Target	957
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.01 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
RAB Level 5	RAB.08.02.01.01.02 PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

867. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.02.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni
Nilai IKU Target	53
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.02 PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
RAB Level 5	RAB.08.02.01.02.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

868. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.02.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni
Nilai IKU Target	53
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.02 PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
RAB Level 5	RAB.08.02.01.02.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

**869. Fasilitas Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal**

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.03.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan fasilitas peningkatan penulisan sejarah lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.03 PEMBINAAN SEJARAH
RAB Level 5	RAB.08.02.01.03.01 PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI

870. Penetapan Cagar Budaya

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.04.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penetapan cagar budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan
Nilai IKU Target	50
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.04 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
RAB Level 5	RAB.08.02.01.04.01 PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

871. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya

ID	SUMSEL-DAB.08.02.01.04.02-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestari cagar budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan
Nilai IKU Target	569
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAB Level 4	RAB.08.02.01.04 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
RAB Level 5	RAB.08.02.01.04.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

872. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-012



Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum
Nilai IKU Target	90.889
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI

873. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

ID	SUMSEL-DAB.08.02.05.01.01-013
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan revitalisasi sarana dan prasarana museum yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Kebudayaan.
Sasaran Strategis	Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum
Nilai IKU Target	90.889
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.08 BUDAYA DAN AGAMA
RAB Level 2	RAB.08.02 KEBUDAYAAN
RAB Level 3	RAB.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAB Level 4	RAB.08.02.05.01 PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
RAB Level 5	RAB.08.02.05.01.01 PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI

874. Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.11.02.01.01-001
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan perencanaan daya tarik wisata provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.
Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum
Nilai IKU Target	2,4
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.02.01 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 5	RAB.02.11.02.01.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI

875. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.11.02.01.01-002
Uraian Bisnis/Urutan	Urutan penetapan daya tarik wisata unggulan provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.



Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang ditetapkan
Nilai IKU Target	160
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.02.01 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 5	RAB.02.11.02.01.01 PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI

876. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.11.02.01.02-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi pariwisata provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.
Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nilai IKU Target	68.451
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.02.01 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 5	RAB.02.11.02.01.02 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

877. Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi

ID	SUMSEL-DAB.02.11.02.01.03-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian pengelolaan atas investasi pariwisata provinsi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.
Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Angka Kumulatif Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Rekomendasi Izin
Nilai IKU Target	63
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.02 DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.02.01 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
RAB Level 5	RAB.02.11.02.01.03 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

878. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

ID	SUMSEL-DAB.02.11.04.01.01-001
Uraian Bisnis/Uraian	Uraian penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.
Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Wisatawan Mancanegara / Nusantara
Nilai IKU Target	2.557 / 23.155.727
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.04.01 PEMASARAN PARIWISATA
RAB Level 5	RAB.02.11.04.01.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS

879. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

ID	SUMSEL-DAB.02.11.04.01.01-002
Uraian Bisnis/Urusan	Uraian fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.
Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
Nilai IKU Target	1
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.04 PEMASARAN PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.04.01 PEMASARAN PARIWISATA
RAB Level 5	RAB.02.11.04.01.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS

880. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula

ID	SUMSEL-DAB.02.11.03.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Uraian koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.
Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rupiah)
Nilai IKU Target	3.153.030.150
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.03 INDUSTRI PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.03.01 PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF...
RAB Level 5	RAB.02.11.03.01.01 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA KREATIF

881. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

ID	SUMSEL-DAB.02.11.01.01.01-001
Uraian Bisnis/Urusan	Uraian pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat lanjutan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang Pariwisata.



Sasaran Strategis	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah Tenaga Kerja Parekraf yang Tersertifikasi
Nilai IKU Target	35
Nilai IKU Terealisasi	-
RAB Level 1 Nasional	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI
RAB Level 2	RAB.02.11 PARIWISATA
RAB Level 3	RAB.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
RAB Level 4	RAB.02.11.01.01 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
RAB Level 5	RAB.02.11.01.01.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT LANJUTAN



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



METADATA ARSITEKTUR LAYANAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

2026





DOMAIN LAYANAN

Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2026

Register Lengkap Layanan Pemerintahan (Sheet Layanan-v1)

Total 386 layanan • 50 perangkat daerah

Elektronik 176 • Non Elektronik 210



6. DINAS SOSIAL

7 layanan — Elektronik: 2, Non Elektronik: 5

1. Layanan Pemulangan Orang Terlantar (OT)

ID	SUMSEL-DAL.01.26.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pemulangan Orang Terlantar (OT) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.26 SOSIAL
RAL Level 3	RAL.01.26.02 PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL
RAL Level 4	RAL.01.26.02.01 Layanan Pemulangan Orang Terlantar

2. Layanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan rekomendasi Izin.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)



2. Layanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.01 Layanan Izin Undian Gratis Skala Provinsi

3. Layanan Izin Pengangkatan Anak Antar WNI

ID	SUMSEL-DAL.01.26.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Pengangkatan Anak Antar WNI bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.26 SOSIAL
RAL Level 3	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAL Level 4	RAL.01.26.01.01 Layanan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

4. Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan rekomendasi izin.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.



4. Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional

Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.02 Layanan Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional

5. Layanan Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi

ID	SUMSEL-DAL.01.26.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.26 SOSIAL
RAL Level 3	RAL.01.26.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL
RAL Level 4	RAL.01.26.01.02 Layanan Izin Operasional Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Skala Provinsi

6. Layanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan data Kependudukan.



6. Layanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.03 Layanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

7. Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin Pengumpulan Uang/Barang.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.04 Layanan Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi



1. Badan Kepegawaian

48 layanan — Elektronik: 48, Non Elektronik: 0

8. Layanan Pengajuan Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.01-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengajuan Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.01 Layanan Tugas Belajar

9. Layanan Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.02-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Keterangan Tidak Dalam Proses Hukuman Disiplin.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.



9. Layanan Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi

Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.02 Layanan Proses Hukuman Disiplin

10. Layanan Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.01-002
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Pengembalian Tugas Belajar / SK Pengaktifan Kembali.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.01 Layanan Tugas Belajar

11. Layanan Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan surat Izin Mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik



11. Layanan Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.03 Layanan Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

12. Layanan Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.01-003
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.01 Layanan Tugas Belajar

13. Layanan Izin Perceraian PNS

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Perceraian PNS bagi aparatur dan unit pemerintah.



13. Layanan Izin Perceraian PNS

Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Pertimbangan Perceraian.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.04 Layanan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

14. Layanan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.05-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Keterangan Riwayat Disiplin.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.05 Layanan Hukuman Disiplin Sedang/Berat



15. Layanan Pengangkatan Pertama JFT Guru

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.06-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengangkatan Pertama JFT Guru bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.06 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu Guru

16. Layanan Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.07-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Pengangkatan JFT melalui Inpassing.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



16. Layanan Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing

RAL Level 4	RAL.02.04.03.07 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Penyesuaian/Inpassing

17. Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.08-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.08 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu

18. Layanan Pemberhentian dari JFT

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.08-002
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pemberhentian dari JFT bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.



18. Layanan Pemberhentian dari JFT

Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.08 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu

19. Layanan Pengangkatan Kembali Dalam JFT

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.08-003
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengangkatan Kembali Dalam JFT bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan SK Pengangkatan Kembali JFT.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.08 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu

20. Layanan Alih Jenjang dalam JFT

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.08-004
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan alih Jenjang dalam JFT bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik



20. Layanan Alih Jenjang dalam JFT

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.08 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu

21. Layanan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.09-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Penetapan/Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.09 Layanan Tunjangan Jabatan Fungsional

22. Layanan Penyesuaian JFT

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.08-005
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penyesuaian JFT bagi aparatur dan unit pemerintah.

**22. Layanan Penyesuaian JFT**

Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sK Penyesuaian Jabatan Fungsional.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.08 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu

23. Layanan Pengangkatan JFT Utama

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.10-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengangkatan JFT Utama bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.10 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu Utama

**24. Layanan Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT**

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.11-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Pengangkatan ke Jabatan Fungsional dari Jabatan Lain.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.11 Layanan Jabatan Lain Dalam Jabatan Fungsional Tertentu

25. Layanan Pengangkatan Pertama JFT NON Guru

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.12-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengangkatan Pertama JFT NON Guru bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



25. Layanan Pengangkatan Pertama JFT NON Guru

RAL Level 4	RAL.02.04.03.12 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu Non Guru

26. Layanan Usul Pensiun BUP

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.13-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan usul Pensiun BUP bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Pensiun Batas Usia Pensiun.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.13 Layanan Batas Usia Pensiun

27. Layanan Usul Pensiun Janda/Duda

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.14-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan usul Pensiun Janda/Duda bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Pensiun Janda/Duda.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.

**27. Layanan Usul Pensiun Janda/Duda**

Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.14 Layanan Janda/Duda

28. Layanan Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.15-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan SK Pensiun APS.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.15 Layanan Permintaan Sendiri

29. Layanan Usul Kebutuhan JFT (Formasi)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.08-006
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan usul Kebutuhan JFT (Formasi) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan penetapan Formasi Jabatan Fungsional.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik



29. Layanan Usul Kebutuhan JFT (Formasi)

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.08 Layanan Jabatan Fungsional Tertentu

30. Layanan Usul Uji Kompetensi JFT

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.16-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan usul Uji Kompetensi JFT bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sertifikat/hasil Uji Kompetensi JFT.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.16 Layanan Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu

31. Layanan Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.17-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan usul pemindahan PNS tenaga kependidikan bagi aparatur dan unit pemerintah.

**31. Layanan Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan**

Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sK Mutasi/Pemindahan PNS Tenaga Kependidikan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.17 Layanan Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kependidikan

32. Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.18-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan usul Penyesuaian Nomenklatur JFT bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sK Penyesuaian Nomenklatur JFT.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.18 Layanan Nomenklatur Jabatan Fungsional Tertentu



33. Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.19-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan usul Penyesuaian Nomenklatur JFU bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sK Penyesuaian Nomenklatur JFU.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.19 Layanan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum

34. Layanan Kenaikan gaji berkala Kepala OPD

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.20-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan kenaikan gaji berkala Kepala OPD bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan sK Kenaikan Gaji Berkala.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



34. Layanan Kenaikan gaji berkala Kepala OPD

RAL Level 4	RAL.02.04.03.20 Layanan Gaji Berkala Kepala Organisasi Perangkat Daerah

35. Layanan Peninjauan masa kerja

ID	SUMSEL-DAL.02.04.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan peninjauan masa kerja bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan SK Penetapan Peninjauan Masa Kerja.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
RAL Level 4	RAL.02.04.01.01 Layanan Masa Kerja

36. Layanan Pencantuman Gelar Akademik (PNS)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.21-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pencantuman Gelar Akademik (PNS) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Akademik).
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



36. Layanan Pencantuman Gelar Akademik (PNS)

Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.21 Layanan Gelar Akademik

37. Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PNS)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.22-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pencatuman Gelar Profesi (PNS) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK).
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.22 Layanan Gelar Profesi

38. Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pencatuman Gelar Profesi (PPPK) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK).
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik



38. Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
RAL Level 4	RAL.02.04.01.02 Layanan Gelar Profesi

39. Layanan Tugas Belajar PNS Secara Mandiri

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.23-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan tugas Belajar PNS Secara Mandiri bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Persetujuan Tugas Belajar Mandiri.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.23 Layanan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil

40. Layanan Izin Keluar Negeri

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.24-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Keluar Negeri bagi aparatur dan unit pemerintah.



40. Layanan Izin Keluar Negeri

Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan surat Izin Perjalanan Dinas/Izin Keluar Negeri.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.24 Layanan Keluar Negeri

41. Layanan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.25-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan SK Cuti di Luar Tanggungan Negara.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.25 Layanan Cuti Di Luar Tanggungan Negara



42. Layanan Tanda Kehormatan Satyalancana

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.26-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan tanda Kehormatan Satyalancana bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan piagam Tanda Kehormatan Satyalancana.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.26 Layanan Kehormatan Satyalancana

43. Layanan Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.27-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi aparaturnya dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan SK Pengaktifan Kembali dari CLTN.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

**43. Layanan Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara**

RAL Level 4	RAL.02.04.03.27 Layanan Cuti Diluar Tanggungan Negara

44. Layanan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.27-002
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan SK Perpanjangan CLTN.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.27 Layanan Cuti Diluar Tanggungan Negara

45. Layanan Cuti Tahunan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.28-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan cuti Tahunan bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Izin Cuti Tahunan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.



45. Layanan Cuti Tahunan

Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.28 Layanan Cuti Tahunan

46. Layanan Cuti Besar

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.29-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan cuti Besar bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Izin Cuti Besar.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.29 Layanan Cuti Besar

47. Layanan Cuti Karena Alasan Penting

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.30-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan cuti Karena Alasan Penting bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Izin Cuti Karena Alasan Penting.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik



47. Layanan Cuti Karena Alasan Penting

Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.30 Layanan Cuti Karena Alasan Penting

48. Layanan Cuti Sakit

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.31-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan cuti Sakit bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Izin Cuti Sakit.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.31 Layanan Cuti Sakit

49. Layanan Cuti Melahirkan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.32-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan cuti Melahirkan bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.



49. Layanan Cuti Melahirkan

Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan surat Izin Cuti Melahirkan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.32 Layanan Cuti Melahirkan

50. Layanan Perbaikan Nama PNS

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.33-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan perbaikan Nama PNS bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Perubahan Data Kepegawaian (Nama).
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.33 Layanan Perbaikan Nama Pegawai Negeri Sipil



51. Layanan Perbaikan NIP PNS

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.34-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan perbaikan NIP PNS bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Perbaikan Data NIP.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.34 Layanan Perbaikan Nomor Induk Pegawai Pegawai Negeri Sipil

52. Layanan Izin Mengajar PNS

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.35-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan izin Mengajar PNS bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan surat Izin Mengajar.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

**52. Layanan Izin Mengajar PNS**

RAL Level 4	RAL.02.04.03.35 Layanan Mengajar Pegawai Negeri Sipil

53. Layanan Permohonan Rekon SKP 2022

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.36-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Rekon SKP 2022 bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan hasil Rekonsiliasi SKP.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.36 Layanan Rekon Skp 2022

54. Layanan Perbaikan Nama PPPK

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.37-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan perbaikan Nama PPPK bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Nama).
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



54. Layanan Perbaikan Nama PPPK

Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.37 Layanan Perbaikan Nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

55. Layanan Peremajaan Pendidikan PPPK

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.38-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan peremajaan Pendidikan PPPK bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Pendidikan).
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.38 Layanan Peremajaan Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



10. DINAS KESEHATAN

3 layanan — Elektronik: 3, Non Elektronik: 0

56. Layanan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang

ID	SUMSEL-DAL.01.25.08.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan rekomtek Digital.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
RAL Level 4	RAL.01.25.08.01 Layanan Pedagang Besar Farmasi Cabang

57. Layanan Rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang

ID	SUMSEL-DAL.01.25.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan rekomtek Digital.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes / DPMPTSP
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pembangunan RS Beserta Sarana Pendukungnya



57. Layanan Rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.03.01 Layanan Distributor Alat Kesehatan Cabang

58. Layanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan dokumen Informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Komisi Informasi
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.01 Layanan Informasi Publik Dan Dokumentasi



11. DISKDUKCAPIL

6 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 6

59. Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

ID	SUMSEL-DAL.01.23.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN
RAL Level 3	RAL.01.23.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAL Level 4	RAL.01.23.01.01 Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

60. Layanan Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAL.01.23.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan



60. Layanan Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN
RAL Level 3	RAL.01.23.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAL Level 4	RAL.01.23.01.02 Layanan Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

61. Layanan Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik

ID	SUMSEL-DAL.02.01.07.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.01 DALAM NEGERI
RAL Level 3	RAL.02.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
RAL Level 4	RAL.02.01.07.01 Layanan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik

62. Layanan Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

ID	SUMSEL-DAL.01.23.01.03-001
Tujuan Layanan	Menyediakan pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.

62. Layanan Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN
RAL Level 3	RAL.01.23.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAL Level 4	RAL.01.23.01.03 Layanan Kerjasama Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

63. Layanan Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAL.01.23.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN
RAL Level 3	RAL.01.23.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAL Level 4	RAL.01.23.01.04 Layanan Kerjasama Layanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

64. Layanan Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan

ID	SUMSEL-DAL.01.23.01.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.



64. Layanan Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan

Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN
RAL Level 3	RAL.01.23.01 PENGENDALIAN PENDUDUK
RAL Level 4	RAL.01.23.01.05 Layanan Validasi Nomor Induk Kependudukan



12. DPMTSP

4 layanan — Elektronik: 3, Non Elektronik: 1

65. Layanan Media Promosi Investasi dan Kerja Sama

ID	SUMSEL-DAL.01.12.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan media Promosi Investasi dan Kerja Sama bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan informasi layanan perizinan dan non perizinan, informasi persyaratan dan Prosedur layanan, data dan statistik realisasi investasi PMA dan PMDN) Profil Investasi Daerah, berita Publikasi DPMTSP P{rov Sumsel.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.12 INVESTASI
RAL Level 3	RAL.01.12.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
RAL Level 4	RAL.01.12.02.01 Layanan Media Promosi Investasi Dan Kerja Sama

66. Layanan laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha

ID	SUMSEL-DAL.01.12.02.02-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha dari pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan data Realisasi Investasi PMA dan PMD N.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.



66. Layanan laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha

Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.12 INVESTASI
RAL Level 3	RAL.01.12.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
RAL Level 4	RAL.01.12.02.02 Layanan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Berisi Layanan

67. Layanan menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung promosi investasi dan pengambilan Keputusan

ID	SUMSEL-DAL.01.12.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung promosi investasi dan pengambilan Keputusan yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data peta Potensi Wilayah, data Realisasi PMA dan PMDN.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.12 INVESTASI
RAL Level 3	RAL.01.12.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
RAL Level 4	RAL.01.12.01.01 Layanan Menyediakan Informasi Mengenai Potensi

68. Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ID	SUMSEL-DAL.01.12.06.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan nIB, Sertifikat standar Perizinan Berusaha, izin Operasional/komersil, data Perizinan yang telah diterbitkan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI



68. Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.12 INVESTASI
RAL Level 3	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
RAL Level 4	RAL.01.12.06.01 Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



13. DINAS PENDIDIKAN

20 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 20

69. Layanan Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS). bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.06 Layanan Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar

70. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.07-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerimaan Peserta Didik Baru bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**70. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.07 Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru

71. Layanan Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

ID	SUMSEL-DAL.01.31.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.31 PENDIDIKAN
RAL Level 3	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.31.02.01 Layanan Bantuan Operasional Sekolah

72. Layanan Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah

ID	SUMSEL-DAL.01.31.02.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik

72. Layanan Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.31 PENDIDIKAN
RAL Level 3	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.31.02.02 Layanan Bantuan Pembangunan

73. Layanan Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.45-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.45 Layanan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan

74. Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

ID	SUMSEL-DAL.01.31.02.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) bagi masyarakat.

**74. Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)**

Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.31 PENDIDIKAN
RAL Level 3	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.31.02.03 Layanan Nomor Pokok Sekolah Nasional

75. Layanan Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah

ID	SUMSEL-DAL.01.31.02.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.31 PENDIDIKAN
RAL Level 3	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.31.02.04 Layanan Perubahan Nomenklatur Sekolah

**76. Layanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa**

ID	SUMSEL-DAL.01.31.02.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.31 PENDIDIKAN
RAL Level 3	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.31.02.05 Layanan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa

77. Layanan Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan

ID	SUMSEL-DAL.01.31.02.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.31 PENDIDIKAN
RAL Level 3	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH



77. Layanan Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan

RAL Level 4	RAL.01.31.02.06 Layanan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan

78. Layanan Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.08-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.08 Layanan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah

79. Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.09-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**79. Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah**

Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.09 Layanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

80. Layanan Pengajuan Tunjangan Profesi Guru

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.46-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Tunjangan Profesi Guru bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.46 Layanan Tunjangan Profesi Guru

81. Layanan Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.47-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan dokumen kepegawaian.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik

**81. Layanan Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru**

Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.47 Layanan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru

82. Layanan Pengajuan Usulan Pensiun Guru

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.48-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengajuan Usulan Pensiun Guru bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan dokumen kepegawaian.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.48 Layanan Usulan Pensiun Guru

83. Layanan Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.49-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru bagi aparatur dan unit pemerintah secara tertib dan akuntabel.



83. Layanan Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan dokumen kepegawaian.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.49 Layanan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

84. Layanan Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
RAL Level 4	RAL.02.04.01.04 Layanan Usulan Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

**85. Layanan Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah**

ID	SUMSEL-DAL.01.31.02.07-001
Tujuan Layanan	Menyelenggarakan pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah bagi masyarakat secara tertib dan akuntabel.
Fungsi Layanan	Memproses usulan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan dokumen kepegawaian.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat administrasi dan meningkatkan tertib administrasi ASN.
Potensi Ekonomi	Efisiensi waktu dan biaya administrasi internal pemerintah.
Potensi Risiko	Kesalahan data, keterlambatan penerbitan SK, atau manipulasi dokumen.
Mitigasi Risiko	Integrasi data kepegawaian, verifikasi berjenjang, dan jejak audit.
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.31 PENDIDIKAN
RAL Level 3	RAL.01.31.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.31.02.07 Layanan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah

86. Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.10-001
Tujuan Layanan	Menyediakan pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan yang akurat dan mudah diakses oleh aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

**86. Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan**

RAL Level 4	RAL.02.04.05.10 Layanan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

87. Layanan Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.11-001
Tujuan Layanan	Menyediakan permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan yang akurat dan mudah diakses oleh aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.11 Layanan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan

88. Layanan Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengajar

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.12-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengajar bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



88. Layanan Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja

Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.12 Layanan Penambahan Jumlah Jam Mengaja



14. DINAS PERDAGANGAN

3 layanan — Elektronik: 1, Non Elektronik: 2

89. Layanan Pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal)

ID	SUMSEL-DAL.01.06.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan surat keterangan Asal.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Perdagangan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.06 PERDAGANGAN
RAL Level 3	RAL.01.06.02 PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
RAL Level 4	RAL.01.06.02.01 Layanan Pembuatan Surat Keterangan Asal

90. Layanan Pengujian dan Sertifikasi

ID	SUMSEL-DAL.01.06.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pengujian dan Sertifikasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Perdagangan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya



90. Layanan Pengujian dan Sertifikasi

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.06 PERDAGANGAN
RAL Level 3	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAL Level 4	RAL.01.06.01.01 Layanan Pengujian Dan Sertifikasi

91. Layanan Jaminan Mutu dan Kalibrasi

ID	SUMSEL-DAL.01.06.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan jaminan Mutu dan Kalibrasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Perdagangan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.06 PERDAGANGAN
RAL Level 3	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
RAL Level 4	RAL.01.06.01.02 Layanan Jaminan Mutu Dan Kalibrasi



16. DINAS PERINDUSTRIAN

6 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 6

92. Layanan Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha

ID	SUMSEL-DAL.01.05.01.01-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha melalui pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.05 INDUSTRI
RAL Level 3	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAL Level 4	RAL.01.05.01.01 Layanan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha

93. Layanan Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.13-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

**93. Layanan Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk**

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.13 Layanan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk

94. Layanan Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.14-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.14 Layanan Sertifikasi Spp-irt

95. Layanan Pendaftaran Sertifikasi Halal

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.15-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pendaftaran Sertifikasi Halal bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.

95. Layanan Pendaftaran Sertifikasi Halal

Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.15 Layanan Sertifikasi Halal

96. Layanan Rekomendasi HALAL

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.16-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi HALAL bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.16 Layanan Halal

97. Layanan Verifikasi Pertek (Perusahaan)

ID	SUMSEL-DAL.01.05.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan verifikasi Pertek (Perusahaan) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.



97. Layanan Verifikasi Pertek (Perusahaan)

Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.05 INDUSTRI
RAL Level 3	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
RAL Level 4	RAL.01.05.01.02 Layanan Pertek



17. DINAS PERPUSTAKAAN

20 layanan — Elektronik: 9, Non Elektronik: 11

98. Layanan Anggota Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan anggota Perpustakaan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan kartu Anggota Perpustakaan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.01 Layanan Anggota Perpustakaan

99. Layanan Perpustakaan Keliling

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan perpustakaan Keliling bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi



99. Layanan Perpustakaan Keliling

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.02 Layanan Perpustakaan Keliling

100. Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) perpustakaan

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) perpustakaan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.03 Layanan Sirkulasi Perpustakaan

101. Layanan Membaca

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan membaca bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.



101. Layanan Membaca

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.04 Layanan Membaca

102. Layanan Story Telling

ID	SUMSEL-DAL.01.42.06.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan story Telling bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAL Level 4	RAL.01.42.06.01 Layanan Story Telling

103. Layanan Referensi

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan referensi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.

**103. Layanan Referensi**

Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.05 Layanan Referensi

104. Layanan Perpustakaan Anak

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan perpustakaan Anak bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.06 Layanan Perpustakaan Anak

**105. Layanan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)**

ID	SUMSEL-DAL.01.42.06.02-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi).
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAL Level 4	RAL.01.42.06.02 Layanan Multimedia/ Bioskop Mini

106. Layanan Internet

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.07-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan internet bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI



106. Layanan Internet

RAL Level 4	RAL.01.42.05.07 Layanan Internet

107. Layanan Peminjaman Ruang Diskusi

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.08-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan peminjaman Ruang Diskusi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.08 Layanan Peminjaman Ruang Diskusi

108. Layanan Kunjungan Edukasi Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAL.01.42.06.03-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui kunjungan Edukasi Perpustakaan.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.



108. Layanan Kunjungan Edukasi Perpustakaan

Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAL Level 4	RAL.01.42.06.03 Layanan Kunjungan Edukasi Perpustakaan

109. Layanan Bimbingan Pemustaka

ID	SUMSEL-DAL.01.42.06.04-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui bimbingan Pemustaka.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAL Level 4	RAL.01.42.06.04 Layanan Pemustaka

110. Layanan Diary Sumsel (Elektronik-Book)

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.09-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan diary Sumsel (Elektronik-Book) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik

110. Layanan Diary Sumsel (Elektronik-Book)

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.09 Layanan Diary Sumsel

111. Layanan Pojok Baca Digital/Publik

ID	SUMSEL-DAL.01.43.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pojok Baca Digital/Publik bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Relasi Media
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.43 INFORMASI
RAL Level 3	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAL Level 4	RAL.01.43.03.01 Layanan Pojok Baca Digital/Publik

112. Layanan Kerjasama Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.01.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan kerjasama Perpustakaan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.



112. Layanan Kerjasama Perpustakaan

Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
RAL Level 4	RAL.02.04.01.05 Layanan Kerjasama Perpustakaan

113. Layanan Bagi Kelompok Rentan

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.10-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan bagi Kelompok Rentan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.10 Layanan Bagi Kelompok Rentan



114. Layanan Kelas Asik Bahasa Isyarat

ID	SUMSEL-DAL.01.42.06.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan kelas Asik Bahasa Isyarat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN
RAL Level 4	RAL.01.42.06.05 Layanan Kelas Asik Bahasa Isyarat

115. Layanan Deposit

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.11-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan deposit bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan peminjaman Mandiri.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI



115. Layanan Deposit

RAL Level 4	RAL.01.42.05.11 Layanan Deposit

116. Layanan Galeri Naskah Kuno dan Alih Media

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.12-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan galeri Naskah Kuno dan Alih Media bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.12 Layanan Galeri Naskah Kuno Dan Alih Media

117. Layanan Perbaikan Bahan Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAL.01.42.05.13-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan perbaikan Bahan Perpustakaan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



panrb
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SERTA KEMENTERIAN
KULTUR, KEMASYARAKATAN,
KEAGAMAAN DAN HIMPUNAN
KEBUDAYAAN



117. Layanan Perbaikan Bahan Perpustakaan

Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI
RAL Level 4	RAL.01.42.05.13 Layanan Perbaikan Bahan Perpustakaan



18. INSPEKTORAT DAERAH

9 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 9

118. Layanan Permohonan Informasi Publik

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan permohonan Informasi Publik yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN
RAL Level 4	RAL.02.07.01.01 Layanan Informasi Publik

119. Layanan Fasilitasi Pelaporan LHKPN dan LHKAN

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.02-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti fasilitasi Pelaporan LHKPN dan LHKAN dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

**119. Layanan Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN**

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN
RAL Level 4	RAL.02.07.01.02 Layanan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Lhkan

120. Layanan Pelaksanaan Audit

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pelaksanaan Audit bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN
RAL Level 4	RAL.02.07.01.03 Layanan Pelaksanaan Audit

121. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

121. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN
RAL Level 4	RAL.02.07.01.04 Layanan Surat Keterangan Bebas Temuan

122. Layanan Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.05-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pelaporan dan Penanganan Gratifikasi dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN
RAL Level 4	RAL.02.07.01.05 Layanan Dan Penanganan Gratifikasi

123. Layanan Permohonan Penelitian Ijazah

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Penelitian Ijazah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.



123. Layanan Permohonan Penelitian Ijazah

Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN
RAL Level 4	RAL.02.07.01.06 Layanan Penelitian Ijazah

124. Layanan Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.07-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN
RAL Level 4	RAL.02.07.01.07 Layanan Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa



125. Layanan Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ID	SUMSEL-DAL.02.07.02.01-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.02 PENGAWASAN KINERJA
RAL Level 4	RAL.02.07.02.01 Layanan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

126. Layanan Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System

ID	SUMSEL-DAL.02.07.01.08-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 3	RAL.02.07.01 PEMBINAAN KEGIATAN PENGAWASAN



126. Layanan Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System

RAL Level 4

RAL.02.07.01.08 Layanan Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System



19. BADAN KESBANGPOL

3 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 3

127. Layanan Surat Keterangan Penelitian

ID	SUMSEL-DAL.01.29.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan surat Keterangan Penelitian bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.29 KEAMANAN
RAL Level 3	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAL Level 4	RAL.01.29.01.01 Layanan Penelitian

128. Layanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat

ID	SUMSEL-DAL.01.29.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pendaftaran Organisasi Masyarakat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat



128. Layanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.29 KEAMANAN
RAL Level 3	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAL Level 4	RAL.01.29.01.02 Layanan Organisasi Masyarakat

129. Layanan Pelaporan Organisasi Masyarakat

ID	SUMSEL-DAL.01.29.01.02-002
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pelaporan Organisasi Masyarakat dari masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.29 KEAMANAN
RAL Level 3	RAL.01.29.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
RAL Level 4	RAL.01.29.01.02 Layanan Organisasi Masyarakat



2. Badan Pendapatan

2 layanan — Elektronik: 2, Non Elektronik: 0

130. Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)

ID	SUMSEL-DAL.02.02.03.01-001
Tujuan Layanan	Memudahkan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal) secara tertib dan transparan.
Fungsi Layanan	Menghitung kewajiban, memproses pembayaran, dan menerbitkan kode Bayar.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Memudahkan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib bayar.
Potensi Ekonomi	Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan kebocoran.
Potensi Risiko	Kesalahan perhitungan, gagal bayar, atau kebocoran penerimaan.
Mitigasi Risiko	Rekonsiliasi otomatis, kanal pembayaran resmi, dan audit berkala.
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAL Level 4	RAL.02.02.03.01 Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

131. Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

ID	SUMSEL-DAL.02.02.03.02-001
Tujuan Layanan	Memudahkan masyarakat, pelaku usaha, aparaturnya pemerintah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara tertib dan transparan.
Fungsi Layanan	Menghitung kewajiban, memproses pembayaran, dan menerbitkan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Kementerian / Lembaga Terkait	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Target Layanan	Publik/Masyarakat, Internal Pemerintahan, Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Memudahkan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib bayar.
Potensi Ekonomi	Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan kebocoran.
Potensi Risiko	Kesalahan perhitungan, gagal bayar, atau kebocoran penerimaan.
Mitigasi Risiko	Rekonsiliasi otomatis, kanal pembayaran resmi, dan audit berkala.



131. Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA
RAL Level 4	RAL.02.02.03.02 Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

3 layanan — Elektronik: 1, Non Elektronik: 2

132. Layanan Gladi Kesiapsiagaan bencana

ID	SUMSEL-DAL.01.26.06.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan gladi Kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.26 SOSIAL
RAL Level 3	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAL Level 4	RAL.01.26.06.01 Layanan Gladi Kesiapsiagaan Bencana

133. Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana

ID	SUMSEL-DAL.01.26.06.02-001
Tujuan Layanan	Menyediakan komunikasi, Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi



133. Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.26 SOSIAL
RAL Level 3	RAL.01.26.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
RAL Level 4	RAL.01.26.06.02 Layanan Komunikasi

134. Layanan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.17-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan respon Cepat Penanganan Darurat Bencana bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan data Informasi Kejadian bencana.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.17 Layanan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana



21. BADAN PENGHUBUNG

5 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 5

135. Layanan Peminjaman Ruang Rapat

ID	SUMSEL-DAL.02.05.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan peminjaman Ruang Rapat bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.05.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
RAL Level 4	RAL.02.05.01.01 Layanan Peminjaman Ruang Rapat

136. Layanan Fasilitas Keprotokolan

ID	SUMSEL-DAL.02.05.05.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Keprotokolan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



136. Layanan Fasilitas Keprotokolan

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.05.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN
RAL Level 4	RAL.02.05.05.01 Layanan Keprotokolan

137. Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja

ID	SUMSEL-DAL.02.05.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Kunjungan Kerja bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.05.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
RAL Level 4	RAL.02.05.03.01 Layanan Kunjungan Kerja

138. Layanan Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu

ID	SUMSEL-DAL.02.05.05.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik



138. Layanan Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.05.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN
RAL Level 4	RAL.02.05.05.02 Layanan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu

139. Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD

ID	SUMSEL-DAL.02.05.03.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Kunjungan Kerja DPRD bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pangan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.05 KESEKRETARIATAN NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.05.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
RAL Level 4	RAL.02.05.03.02 Layanan Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



22. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUN

1 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 1

140. Layanan Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah	
ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.17-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.17 Layanan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Daerah



23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA

3 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 3

141. Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan

ID	SUMSEL-DAL.02.06.08.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Keprotokolan/kunjungan kerja pimpinan tidak ada di Probis-v1
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI
RAL Level 3	RAL.02.06.08 KEPROTOKOLAN
RAL Level 4	RAL.02.06.08.01 Layanan Kunjungan Kerja Pimpinan

142. Layanan Permohonan Audiensi

ID	SUMSEL-DAL.02.06.08.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Audiensi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Audiensi/keprotokolan tidak ada di Probis-v1



142. Layanan Permohonan Audiensi

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI
RAL Level 3	RAL.02.06.08 KEPROTOKOLAN
RAL Level 4	RAL.02.06.08.02 Layanan Audiensi

143. Layanan Fasilitas Petugas acara

ID	SUMSEL-DAL.02.06.08.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Petugas acara bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Petugas acara/keprotokolan tidak ada di Probis-v1
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI
RAL Level 3	RAL.02.06.08 KEPROTOKOLAN
RAL Level 4	RAL.02.06.08.03 Layanan Petugas Acara

24. BIRO HUKUM DAN HAM SETDA

1 layanan — Elektronik: 1, Non Elektronik: 0

144. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

ID	SUMSEL-DAL.01.28.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan produk Hukum (Perda, Pergub, SK) yang dicari/diinginkan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Hukum
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.28 HUKUM
RAL Level 3	RAL.01.28.01 PENYELENGGARAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
RAL Level 4	RAL.01.28.01.01 Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum



25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S

4 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 4

145. Layanan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.18-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.18 Layanan Seleksi Petugas Haji Daerah

146. Layanan Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, BKPRMI, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.02.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, BKPRMI, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess) bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**146. Layanan Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, BKPRMI, Lppesparawi, Lppersarani, Muslimat NU, Forpess)**

Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAL Level 4	RAL.02.04.02.02 Layanan Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan

147. Layanan Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.19-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K) bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.19 Layanan Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan

148. Layanan Bantuan Operasional Pondok Pesantren

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.20-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan bantuan Operasional Pondok Pesantren bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik



148. Layanan Bantuan Operasional Pondok Pesantren

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.20 Layanan Bantuan Operasional Pondok Pesantren



26. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONO

1 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 1

149. Layanan Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah

ID	SUMSEL-DAL.02.01.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.01 DALAM NEGERI
RAL Level 3	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAL Level 4	RAL.02.01.01.01 Layanan Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah



27. BIRO PEREKONOMIAN SETDA

1 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 1

150. Layanan Penyampaian Data dan Informasi

ID	SUMSEL-DAL.01.04.03.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan penyampaian Data dan Informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.04 EKONOMI
RAL Level 3	RAL.01.04.03 LITIGASI PEREKONOMIAN
RAL Level 4	RAL.01.04.03.01 Layanan Penyampaian Data Dan Informasi



28. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

2 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 2

151. Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan

ID	SUMSEL-DAL.02.06.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI
RAL Level 3	RAL.02.06.03 BANTUAN HUKUM
RAL Level 4	RAL.02.06.03.01 Layanan Kunjungan Kerja Pimpinan

152. Layanan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu

ID	SUMSEL-DAL.02.06.08.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Tidak Ada
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



panrb
KEMENTERIAN
PENINGKATAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BUREKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital



152. Layanan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu

Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Penerimaan tamu & jamuan (kerumahtanggaan) tidak ada di Probis-v1
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI
RAL Level 3	RAL.02.06.08 KEPROTOKOLAN
RAL Level 4	RAL.02.06.08.04 Layanan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu



29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

5 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 5

153. Layanan Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat

ID	SUMSEL-DAL.01.37.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.37 ENERGI
RAL Level 3	RAL.01.37.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAL Level 4	RAL.01.37.01.01 Layanan Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah

154. Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)

ID	SUMSEL-DAL.01.37.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.

**154. Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)**

Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.37 ENERGI
RAL Level 3	RAL.01.37.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAL Level 4	RAL.01.37.01.02 Layanan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

155. Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)

ID	SUMSEL-DAL.01.37.01.02-002
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.37 ENERGI
RAL Level 3	RAL.01.37.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAL Level 4	RAL.01.37.01.02 Layanan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

156. Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)

ID	SUMSEL-DAL.01.37.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat



156. Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)

Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.37 ENERGI
RAL Level 3	RAL.01.37.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU
RAL Level 4	RAL.01.37.01.03 Layanan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

157. Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.21-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.21 Layanan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



3. Badan Riset Daerah

4 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 4

158. Layanan Hak Kekayaan Intelektual

ID	SUMSEL-DAL.01.33.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan hak Kekayaan Intelektual bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAL Level 3	RAL.01.33.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI
RAL Level 4	RAL.01.33.03.01 Layanan Hak Kekayaan Intelektual

159. Layanan Kunjungan Wisata

ID	SUMSEL-DAL.01.15.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan kunjungan Wisata bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan

**159. Layanan Kunjungan Wisata**

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.01.01 Layanan Kunjungan Wisata

160. Layanan kunjungan Wisata Edukasi

ID	SUMSEL-DAL.01.15.01.02-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui kunjungan Wisata Edukasi.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.01.02 Layanan Kunjungan Wisata Edukasi

161. Layanan Sterilisasi dan pengemasan Makanan Lokal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAL.01.33.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan sterilisasi dan pengemasan Makanan Lokal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Perdagangan, "Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah"
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat akses pengguna terhadap layanan.



161. Layanan Sterilisasi dan pengemasan Makanan Lokal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAL Level 3	RAL.01.33.02 RISET DAN INOVASI
RAL Level 4	RAL.01.33.02.01 Layanan Sterilisasi Dan Pengemasan Makanan Lokal Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Selatan



30. DINAS KEARSIPAN

1 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 1

162. Layanan Kearsipan	
ID	SUMSEL-DAL.02.04.06.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan kearsipan yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Arsip Nasional Republik Indonesia
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Penyusunan Arsip Dinamis
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
RAL Level 4	RAL.02.04.06.01 Layanan Kearsipan

31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI

10 layanan — Elektronik: 3, Non Elektronik: 7

163. Layanan Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif

ID	SUMSEL-DAL.01.15.04.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan layanan Penyediaan Informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.04 PEMASARAN PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.04.01 Layanan Pusat Informasi Terpadu Pariwisata

164. Layanan Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah

ID	SUMSEL-DAL.01.42.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerjemah Bahasa Lokal/Daerah bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan layanan Transliterasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya



164. Layanan Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAL Level 4	RAL.01.42.01.01 Layanan Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah

165. Layanan Kunjungan Museum/Lokasi Pariwisata

ID	SUMSEL-DAL.01.15.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan kunjungan Museum/Lokasi Pariwisata bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.01.03 Layanan Kunjungan Museum/Lokasi Pariwisata

166. Layanan Informasi dan Edukasi Budaya/Pariwisata

ID	SUMSEL-DAL.01.15.01.04-001
Tujuan Layanan	Menyediakan informasi dan Edukasi Budaya/Pariwisata yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.

166. Layanan Informasi dan Edukasi Budaya/Pariwisata

Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.01.04 Layanan Informasi Dan Edukasi Budaya/Pariwisata

167. Layanan Pemandu (Guide)

ID	SUMSEL-DAL.01.15.01.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pemandu (Guide) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.01.05 Layanan Pemandu

168. Layanan Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo

ID	SUMSEL-DAL.01.15.01.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.

168. Layanan Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo

Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.01.06 Layanan Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo

169. Layanan Pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.22-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kebudayaan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.22 Layanan Pendaftaran Cagar Budaya



170. Layanan Pengajuan Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah

ID	SUMSEL-DAL.01.42.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pengajuan Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN
RAL Level 4	RAL.01.42.01.02 Layanan Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni Ke Luar Daerah

171. Layanan Pengajuan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian

ID	SUMSEL-DAL.01.42.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi"
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.42 KEBUDAYAAN
RAL Level 3	RAL.01.42.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN



171. Layanan Pengajuan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian

RAL Level 4	RAL.01.42.01.03 Layanan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian

172. Layanan Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

ID	SUMSEL-DAL.01.15.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.15 PARIWISATA
RAL Level 3	RAL.01.15.02 DESTINASI PARIWISATA
RAL Level 4	RAL.01.15.02.01 Layanan Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata



32. DINAS KEHUTANAN

13 layanan — Elektronik: 7, Non Elektronik: 6

173. Layanan Data dan Informasi Kawasan Hutan

ID	SUMSEL-DAL.01.38.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan data dan Informasi Kawasan Hutan yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAL Level 4	RAL.01.38.01.01 Layanan Data Dan Informasi Kawasan Hutan

174. Layanan Pengaduan terkait Kehutanan

ID	SUMSEL-DAL.01.38.02.01-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pengaduan terkait Kehutanan dari masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi



174. Layanan Pengaduan terkait Kehutanan

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
RAL Level 4	RAL.01.38.02.01 Layanan Pengaduan Terkait Kehutanan

175. Layanan pengendalian dan penanggulangan kebakaran didalam kawasan hutan

ID	SUMSEL-DAL.01.38.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengendalian dan penanggulangan kebakaran didalam kawasan hutan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan analisis dan informasi titik panas, serta visualisasi peta interaktif.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
RAL Level 4	RAL.01.38.03.01 Layanan Pengendalian Dan Penanggulangan Kebakaran Didalam Kawasan Hutan

176. Layanan Pembagian bibit pohon

ID	SUMSEL-DAL.01.38.03.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pembagian bibit pohon bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan peta sebaran penanaman bibit.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

176. Layanan Pembagian bibit pohon

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
RAL Level 4	RAL.01.38.03.02 Layanan Pembagian Bibit Pohon

177. Layanan Registrasi Kelompok Tani Hutan

ID	SUMSEL-DAL.01.38.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan registrasi Kelompok Tani Hutan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAL Level 4	RAL.01.38.01.02 Layanan Registrasi Kelompok Tani Hutan

178. Layanan proses surat-menyurat

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.23-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan proses surat-menyurat bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan dokumen surat keluar di tanda tangani secara digital.



178. Layanan proses surat-menyurat

Kementerian / Lembaga Terkait	Arsip Nasional Republik Indonesia
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyusunan Arsip Dinamis
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.23 Layanan Proses Surat-menyurat

179. Layanan Peningkatan Pengetahuan dan Akses Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAL.01.38.02.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan peningkatan Pengetahuan dan Akses Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan bagi masyarakat, aparatur pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan skema Perhutanan Sosial yang sesuai serta mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan skema perhutanan sosial.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Publik/Masyarakat, Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN
RAL Level 4	RAL.01.38.02.02 Layanan Peningkatan Pengetahuan Dan Akses Program Perhutanan Sosial Di Sumatera Selatan

180. Layanan akses data dan informasi mengenai implementasi perhutanan sosial di provinsi sumsel

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.24-001
Tujuan Layanan	Menyediakan akses data dan informasi mengenai implementasi perhutanan sosial di provinsi sumsel yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Statistik dan Data Tabular Kelompok PS baik itu KPS maupun KUPS.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.24 Layanan Implementasi Perhutanan Sosial Di Provinsi Sumsel

181. Layanan akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAL.01.38.06.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat, aparatur pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan analisis dan informasi titik panas, serta visualisasi peta interaktif.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia
Target Layanan	Publik/Masyarakat, Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK

181. Layanan akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan

RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAL Level 4	RAL.01.38.06.01 Layanan Titik Panas Di Dalam Kawasan Hutan Wilayah Sumatera Selatan

182. Layanan penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.25-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan pengimputan Data serta Barang Bukti yang sudah di verifikasi tim untuk perlombaan Wana lestari tingkat Nasional.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.25 Layanan Penilaian Peserta Calon Penerima Penghargaan Wana Lestari

183. Layanan Pendistribusian bibit

ID	SUMSEL-DAL.01.38.03.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pendistribusian bibit bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Dinas Kehutanan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.



183. Layanan Pendistribusian bibit

Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
RAL Level 4	RAL.01.38.03.03 Layanan Pendistribusian Bibit

184. Layanan Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan

ID	SUMSEL-DAL.01.38.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan bagi pelaku usaha, aparatur pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Internal Pemerintahan, Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN
RAL Level 4	RAL.01.38.01.03 Layanan Laporan Bulanan Dari Perusahaan

185. Layanan Laporan Insidentil terjadinya Kerusakan Hutan dalam kawasan Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan yang masuk dalam area ijin tersebut

ID	SUMSEL-DAL.01.38.06.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan laporan Insidentil terjadinya Kerusakan Hutan dalam kawasan Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan yang masuk dalam area ijin tersebut bagi pelaku usaha, aparatur pemerintah.



185. Layanan Laporan Insidentil terjadinya Kerusakan Hutan dalam kawasan Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan yang masuk dalam area ijin tersebut

Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kehutanan
Target Layanan	Internal Pemerintahan, Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.38 KEHUTANAN
RAL Level 3	RAL.01.38.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
RAL Level 4	RAL.01.38.06.02 Layanan Laporan Insidentil Terjadinya Kerusakan Hutan Dalam Kawasan Perusahaan

33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

15 layanan — Elektronik: 2, Non Elektronik: 13

186. Layanan Penerbitan e-SLO/HPK Kapal Perikanan	
ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan e-SLO/HPK Kapal Perikanan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan dokumen SLO.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.01 Layanan E-slo/Hari Pertama Kehidupan Kapal Perikanan

187. Layanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan	
ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan



187. Layanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.02 Layanan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan

188. Layanan Permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.03 Layanan Bantuan Sarana Perikanan

189. Layanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan SKP.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.

189. Layanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan

Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.04 Layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan

190. Layanan Uji Kimia

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan uji Kimia bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.05 Layanan Uji Kimia

191. Layanan Uji Mikrobiologi

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan uji Mikrobiologi bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.

**191. Layanan Uji Mikrobiologi**

Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.06 Layanan Uji Mikrobiologi

192. Layanan Uji Organoleptik

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.07-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan uji Organoleptik bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.07 Layanan Uji Organoleptik



193. Layanan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.08-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengadaan Bantuan Kapal Perikanan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.08 Layanan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan

194. Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.09-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP



panrb
KEMENTERIAN
PENYEDIAAN
INFORMASI
SISTEM
DAN
REKOMENDASI
SISTEM



Arsitektur Pemerintah Digital



194. Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

RAL Level 4	RAL.01.10.01.09 Layanan Bantuan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap

195. Layanan Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.10-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.10 Layanan Surat Izin Usaha Perikanan

196. Layanan Penerbitan Buku Kapal Perikanan

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.11-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerbitan Buku Kapal Perikanan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



196. Layanan Penerbitan Buku Kapal Perikanan

Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.11 Layanan Buku Kapal Perikanan

197. Layanan Permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.12-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.12 Layanan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

198. Layanan Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.13-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik



198. Layanan Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.13 Layanan Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan

199. Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.14-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.14 Layanan Bantuan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya

200. Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

ID	SUMSEL-DAL.01.10.01.15-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) bagi pelaku usaha.



200. Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.10 PERIKANAN
RAL Level 3	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
RAL Level 4	RAL.01.10.01.15 Layanan Sertifikat Cara Budidaya Ikan



34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

25 layanan — Elektronik: 4, Non Elektronik: 21

201. Layanan Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan gawat Darurat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.01 Layanan Gawat Darurat

202. Layanan Rawat Jalan

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rawat Jalan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

**202. Layanan Rawat Jalan**

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.02 Layanan Rawat Jalan

203. Layanan Laboratorium

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan laboratorium bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.03 Layanan Laboratorium

204. Layanan Farmasi

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan farmasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

204. Layanan Farmasi

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.04 Layanan Farmasi

205. Layanan Penjualan Semen Beku

ID	SUMSEL-DAL.01.09.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penjualan Semen Beku bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
RAL Level 4	RAL.01.09.03.01 Layanan Penjualan Semen Beku

206. Layanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.05.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sertifikat NKV.

**206. Layanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)**

Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
RAL Level 4	RAL.01.09.05.01 Layanan Publik Nomor Kontrol Veteriner

207. Layanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)

ID	SUMSEL-DAL.01.07.22.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Pangan Nasional
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.07 PERTANIAN
RAL Level 3	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN
RAL Level 4	RAL.01.07.22.01 Layanan Penerbitan Sertifikat Penanganan

**208. Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD)**

ID	SUMSEL-DAL.01.07.22.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Pangan Nasional
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.07 PERTANIAN
RAL Level 3	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN
RAL Level 4	RAL.01.07.22.02 Layanan Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam

209. Layanan Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT

ID	SUMSEL-DAL.01.07.22.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Pangan Nasional
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.07 PERTANIAN
RAL Level 3	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN



209. Layanan Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT

RAL Level 4	RAL.01.07.22.03 Layanan Izin Rumah Pengemasan Pangan Segar Asal Tumbuhan

210. Layanan Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT

ID	SUMSEL-DAL.01.07.22.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Pangan Nasional
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.07 PERTANIAN
RAL Level 3	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN
RAL Level 4	RAL.01.07.22.04 Layanan Sertifikat Prima 2 Dan Prima 3 Pangan Segar Asal Tumbuhan

211. Layanan Penerimaan Sampel

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerimaan Sampel bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**211. Layanan Penerimaan Sampel**

Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.05 Layanan Penerimaan Sampel

212. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.06 Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner

213. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.06-002
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik

**213. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza)**

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.06 Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner

214. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.06-003
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.06 Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner

215. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Feses)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.06-004
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Feses) bagi pelaku usaha.

**215. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Feses)**

Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.06 Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner

216. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Ulas Darah)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.06-005
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Ulas Darah) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.06 Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner

**217. Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Rabies Melalui Saliva)**

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.06-006
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Rabies Melalui Saliva) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.06 Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner

218. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Organoleptis)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Organoleptis) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

218. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Organoleptis)

RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet

219. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Formalin)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-002
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Formalin) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet

220. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Borax)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-003
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Borax) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**220. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Borax)**

Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet

221. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Cemarkan Microba/TPC)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-004
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Cemarkan Microba/TPC) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet

222. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Residu Antibiotik)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-005
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Residu Antibiotik) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik



222. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Residu Antibiotik)

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet

223. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Salmonella, Sp)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-006
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Salmonella, Sp) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet

224. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Escherechia coli)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-007
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Escherechia coli) bagi pelaku usaha.

224. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Escherechia coli)

Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet

225. Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Coliform)

ID	SUMSEL-DAL.01.09.04.07-008
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Coliform) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.09 PETERNAKAN
RAL Level 3	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
RAL Level 4	RAL.01.09.04.07 Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet



35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

7 layanan — Elektronik: 4, Non Elektronik: 3

226. Layanan Penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

ID	SUMSEL-DAL.01.13.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sertifikat.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Koperasi
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.13 KOPERASI
RAL Level 3	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
RAL Level 4	RAL.01.13.01.01 Layanan Sertifikat Nomor Induk Kependudukan

227. Layanan Data Tunggal UMKM

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.26-001
Tujuan Layanan	Menyediakan data Tunggal UMKM yang akurat dan mudah diakses oleh aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data UMKM.
Kementerian / Lembaga Terkait	"Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah"
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Pendataan/data tunggal UMKM tidak ada di Probis-v1



227. Layanan Data Tunggal UMKM

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.26 Layanan Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

228. Layanan Sultan Muda

ID	SUMSEL-DAL.01.14.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan sultan Muda bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Bank Indonesia
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAL Level 3	RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.14.02.01 Layanan Sultan Muda

229. Layanan Fasilitas Legislasi UMKM

ID	SUMSEL-DAL.01.14.02.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Legislasi UMKM bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Koperasi
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

229. Layanan Fasilitas Legislasi UMKM

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAL Level 3	RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAL Level 4	RAL.01.14.02.02 Layanan Legislasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

230. Layanan Implementasi OSS

ID	SUMSEL-DAL.01.13.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan implementasi OSS bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan izin NIB, SIB, Sertifikat Standar.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Koperasi
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.13 KOPERASI
RAL Level 3	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
RAL Level 4	RAL.01.13.01.02 Layanan Implementasi Online Single Submission

231. Layanan Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan

ID	SUMSEL-DAL.01.13.01.03-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha melalui pengembangan Aplikasi E-Pendampingan.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan recomteg.



231. Layanan Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan

Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Koperasi
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.13 KOPERASI
RAL Level 3	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
RAL Level 4	RAL.01.13.01.03 Layanan Pengembangan Aplikasi E-pendampingan

232. Layanan WAG Monitoring

ID	SUMSEL-DAL.01.13.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan WAG Monitoring bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan informasi dan Komunikasi WAG.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Koperasi
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.13 KOPERASI
RAL Level 3	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
RAL Level 4	RAL.01.13.01.04 Layanan WAG Monitoring

36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

16 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 16

233. Layanan Penanganan Sampah TPA

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.27-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penanganan Sampah TPA bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.27 Layanan Penanganan Sampah Tpa

234. Layanan Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

ID	SUMSEL-DAL.01.40.04.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Taman Kehati diluar Kawasan Hutan

**234. Layanan Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan**

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP
RAL Level 3	RAL.01.40.04 PENGELOLAAN SAMPAH
RAL Level 4	RAL.01.40.04.01 Layanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan

235. Layanan Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.28-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.28 Layanan Persetujuan Pembuangan Emisi

236. Layanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.29-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

**236. Layanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah**

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.29 Layanan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah

237. Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.30-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.30 Layanan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah

238. Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.31-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3 bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.

**238. Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3**

Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.31 Layanan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3

239. Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.32-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.32 Layanan Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Air



240. Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.33-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.33 Layanan Surat Kelayakan Operasional Pemenuhan Baku Mutu Emisi

241. Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.34-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3 bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA



241. Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3

RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.34 Layanan Surat Kelayakan Operasional Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3

242. Layanan Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.35-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.35 Layanan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

243. Layanan Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.36-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.

243. Layanan Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.36 Layanan Pemeliharaan/Penggantian Sarana Dan Prasarana Pengelolaan

244. Layanan Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAL.01.40.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akurat dan mudah diakses oleh pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP
RAL Level 3	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
RAL Level 4	RAL.01.40.01.01 Layanan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

245. Layanan Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.37-001
Tujuan Layanan	Menyediakan permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan



245. Layanan Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL

Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.37 Layanan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Dan Rkl

246. Layanan Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

ID	SUMSEL-DAL.01.40.01.02-001
Tujuan Layanan	Menyediakan permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang akurat dan mudah diakses oleh pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP
RAL Level 3	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
RAL Level 4	RAL.01.40.01.02 Layanan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup

247. Layanan Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

ID	SUMSEL-DAL.01.40.01.03-001

**247. Layanan Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)**

Tujuan Layanan	Menyediakan permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang akurat dan mudah diakses oleh pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP
RAL Level 3	RAL.01.40.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN
RAL Level 4	RAL.01.40.01.03 Layanan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

248. Layanan Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.38-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Uji Laboratorium Lingkungan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.38 Layanan Uji Laboratorium Lingkungan





37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK

7 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 7

249. Layanan Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa

ID	SUMSEL-DAL.02.01.04.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.01 DALAM NEGERI
RAL Level 3	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAL Level 4	RAL.02.01.04.01 Layanan Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

250. Layanan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

ID	SUMSEL-DAL.02.01.01.02-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturnya dan unit pemerintah melalui pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.

250. Layanan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.01 DALAM NEGERI
RAL Level 3	RAL.02.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
RAL Level 4	RAL.02.01.01.02 Layanan Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

251. Layanan Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

ID	SUMSEL-DAL.02.01.04.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.01 DALAM NEGERI
RAL Level 3	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAL Level 4	RAL.02.01.04.02 Layanan Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

252. Layanan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih

ID	SUMSEL-DAL.01.21.04.01-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik

**252. Layanan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih**

Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
RAL Level 3	RAL.01.21.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
RAL Level 4	RAL.01.21.04.01 Layanan Penataan

253. Layanan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa

ID	SUMSEL-DAL.01.21.01.01-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha melalui pendampingan Badan Usaha Milik Desa.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
RAL Level 3	RAL.01.21.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN
RAL Level 4	RAL.01.21.01.01 Layanan Badan Usaha Milik Desa

254. Layanan Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

ID	SUMSEL-DAL.02.01.04.03-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan unit pemerintah melalui fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa.

254. Layanan Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.01 DALAM NEGERI
RAL Level 3	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAL Level 4	RAL.02.01.04.03 Layanan Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

255. Layanan Fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa

ID	SUMSEL-DAL.02.01.04.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.01 DALAM NEGERI
RAL Level 3	RAL.02.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
RAL Level 4	RAL.02.01.04.04 Layanan Dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa





38. DPPPA

2 layanan — Elektronik: 1, Non Elektronik: 1

256. Layanan Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak

ID	SUMSEL-DAL.01.27.05.01-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti data Laporan Kekerasan Gender dan Anak dari masyarakat, aparat pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan statistik/Rekapitulasi/Laporan Bulanan dan Tahunan Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target Layanan	Publik/Masyarakat, Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAL Level 3	RAL.01.27.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL
RAL Level 4	RAL.01.27.05.01 Layanan Data Laporan Kekerasan Gender Dan Anak

257. Layanan Pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak

ID	SUMSEL-DAL.01.27.05.02-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak dari masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.



257. Layanan Pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Proses Bisnis	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAL Level 3	RAL.01.27.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL
RAL Level 4	RAL.01.27.05.02 Layanan Korban Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak



39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

14 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 14

258. Layanan Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan

ID	SUMSEL-DAL.01.34.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.34 PEMUDA
RAL Level 3	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
RAL Level 4	RAL.01.34.01.01 Layanan Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan Dan Kepramukaan

259. Layanan Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi

ID	SUMSEL-DAL.01.34.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi



259. Layanan Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.34 PEMUDA
RAL Level 3	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
RAL Level 4	RAL.01.34.01.02 Layanan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi

260. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.02.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAL Level 4	RAL.02.04.02.03 Layanan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan

261. Layanan Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan

ID	SUMSEL-DAL.01.34.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

**261. Layanan Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan**

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.34 PEMUDA
RAL Level 3	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
RAL Level 4	RAL.01.34.01.03 Layanan Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan

262. Layanan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda

ID	SUMSEL-DAL.01.34.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.34 PEMUDA
RAL Level 3	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
RAL Level 4	RAL.01.34.01.04 Layanan Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda

263. Layanan Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda

ID	SUMSEL-DAL.01.34.01.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.

**263. Layanan Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda**

Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.34 PEMUDA
RAL Level 3	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
RAL Level 4	RAL.01.34.01.05 Layanan Asistensi Kewirausahaan Pemuda

264. Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga

ID	SUMSEL-DAL.01.35.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.35 OLAHRAGA
RAL Level 3	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAL Level 4	RAL.01.35.01.01 Layanan Peminjaman Sarana Dan Prasarana Olahraga

**265. Layanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan**

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.39-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.39 Layanan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan

266. Layanan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga

ID	SUMSEL-DAL.01.35.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.35 OLAHRAGA
RAL Level 3	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

266. Layanan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga

RAL Level 4	RAL.01.35.01.02 Layanan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga

267. Layanan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga

ID	SUMSEL-DAL.01.35.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.35 OLAHRAGA
RAL Level 3	RAL.01.35.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
RAL Level 4	RAL.01.35.01.03 Layanan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga

268. Layanan Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAL.01.34.01.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Memper memudahkan dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

268. Layanan Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan

Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.34 PEMUDA
RAL Level 3	RAL.01.34.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA
RAL Level 4	RAL.01.34.01.06 Layanan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan

269. Layanan Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.02.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAL Level 4	RAL.02.04.02.04 Layanan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan

270. Layanan Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.02.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan



270. Layanan Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAL Level 4	RAL.02.04.02.05 Layanan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan

271. Layanan Rekrutmen Atlet dan Pelatih

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.40-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rekrutmen Atlet dan Pelatih bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Kepegawaian Negara
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.40 Layanan Rekrutmen Atlet Dan Pelatih

4. Badan Pengelolaan Keuangan d

15 layanan — Elektronik: 10, Non Elektronik: 5

272. Layanan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP)

ID	SUMSEL-DAL.02.02.09.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN
RAL Level 4	RAL.02.02.09.01 Layanan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

273. Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD

ID	SUMSEL-DAL.02.02.09.02-001
Tujuan Layanan	Menyediakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.

**273. Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD**

Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN
RAL Level 4	RAL.02.02.09.02 Layanan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah

274. Layanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAL.02.02.07.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan evaluasi APBD Kabupaten/Kota bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN
RAL Level 4	RAL.02.02.07.01 Layanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

275. Layanan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urat Perintah Membayar SPM

ID	SUMSEL-DAL.02.02.01.01-001



275. Layanan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urut Perintah Membayar SPM

Tujuan Layanan	Memudahkan aparaturnya dan unit pemerintah dalam pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urut Perintah Membayar SPM secara tertib dan transparan.
Fungsi Layanan	Menghitung kewajiban, memproses pembayaran, dan menerbitkan berkas.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Memudahkan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib bayar.
Potensi Ekonomi	Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan kebocoran.
Potensi Risiko	Kesalahan perhitungan, gagal bayar, atau kebocoran penerimaan.
Mitigasi Risiko	Rekonsiliasi otomatis, kanal pembayaran resmi, dan audit berkala.
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAL Level 4	RAL.02.02.01.01 Layanan Pelaksanaan Dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Dan Urut Perintah Membayar Surat Perintah Membayar

276. Layanan Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

ID	SUMSEL-DAL.02.02.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan berkas.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

276. Layanan Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

RAL Level 4	RAL.02.02.01.02 Layanan Pemrosesan

277. Layanan Penyediaan Anggaran Kas

ID	SUMSEL-DAL.02.02.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penyediaan Anggaran Kas bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAL Level 4	RAL.02.02.02.01 Layanan Penyediaan Anggaran Kas

278. Layanan Pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD)

ID	SUMSEL-DAL.02.02.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD) bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



278. Layanan Pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD)

Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAL Level 4	RAL.02.02.01.03 Layanan Pelaksanaan Penerbitan Surat Pencairan Dana

279. Layanan Pengelolaan kas daerah

ID	SUMSEL-DAL.02.02.02.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengelolaan kas daerah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAL Level 4	RAL.02.02.02.02 Layanan Pengelolaan Kas Daerah

280. Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah

ID	SUMSEL-DAL.02.02.08.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik

**280. Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah**

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAL Level 4	RAL.02.02.08.01 Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan Daerah

281. Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran daerah

ID	SUMSEL-DAL.02.02.08.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran daerah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAL Level 4	RAL.02.02.08.02 Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran Daerah

282. Layanan pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD

ID	SUMSEL-DAL.02.02.08.03-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD dari aparaturnya dan unit pemerintah.

282. Layanan pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD

Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAL Level 4	RAL.02.02.08.03 Layanan Pelaksanaan Konsolidasi Seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

283. Layanan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAL.02.02.08.04-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
RAL Level 4	RAL.02.02.08.04 Layanan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

284. Layanan Rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD

ID	SUMSEL-DAL.02.02.02.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA
RAL Level 4	RAL.02.02.02.03 Layanan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

285. Layanan Merencanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah

ID	SUMSEL-DAL.02.02.02.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan merencanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA



285. Layanan Merencanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah

RAL Level 4	RAL.02.02.02.04 Layanan Merencanakan Penetapan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

286. Layanan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan

ID	SUMSEL-DAL.02.02.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
RAL Level 4	RAL.02.02.01.04 Layanan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Perencanaan Pemeliharaan



40. DINAS PERKEBUNAN

4 layanan — Elektronik: 2, Non Elektronik: 2

287. Layanan Pelatihan/Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman

ID	SUMSEL-DAL.01.08.01.01-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui pelatihan/Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan mencatat hasilnya.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.08 PERKEBUNAN
RAL Level 3	RAL.01.08.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
RAL Level 4	RAL.01.08.01.01 Layanan Pelatihan/Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman

288. Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

ID	SUMSEL-DAL.01.08.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan iUP-B.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian



288. Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.08 PERKEBUNAN
RAL Level 3	RAL.01.08.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
RAL Level 4	RAL.01.08.01.02 Layanan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

289. Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan

ID	SUMSEL-DAL.01.08.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan iUP-B.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.08 PERKEBUNAN
RAL Level 3	RAL.01.08.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
RAL Level 4	RAL.01.08.01.03 Layanan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan

290. Layanan Permohonan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan

ID	SUMSEL-DAL.01.08.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.



290. Layanan Permohonan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.08 PERKEBUNAN
RAL Level 3	RAL.01.08.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
RAL Level 4	RAL.01.08.01.04 Layanan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan

41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA

4 layanan — Elektronik: 4, Non Elektronik: 0

291. Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Pangan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.41-001
Tujuan Layanan	Menyediakan informasi dan Data Produksi Tanaman Pangan yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.41 Layanan Informasi Dan Data Produksi Tanaman Pangan

292. Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.42-001
Tujuan Layanan	Menyediakan informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah).
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.

**292. Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura**

Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.42 Layanan Informasi Dan Data Produksi Tanaman Hortikultura

293. Layanan Informasi dan Data Alat dan Mesin Pertanian

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.43-001
Tujuan Layanan	Menyediakan informasi dan Data Alat dan Mesin Pertanian yang akurat dan mudah diakses oleh aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan alokasi Alat dan mesin Pertanian, Peta Digital LBS, Laporan (Alsintan, Penyaluran Pupuk, KUR).
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.43 Layanan Informasi Dan Data Alat Dan Mesin Pertanian

294. Layanan Informasi Perbenihan

ID	SUMSEL-DAL.02.08.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan informasi Perbenihan yang akurat dan mudah diakses oleh aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan layanan Sertifikasi Benih.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pertanian
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik



294. Layanan Informasi Perbenihan

Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA
RAL Level 3	RAL.02.08.01 PENGAWASAN FUNGSI ORGANISASI
RAL Level 4	RAL.02.08.01.01 Layanan Informasi Perbenihan



42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

3 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 3

295. Layanan Program Kawasan Permukiman

ID	SUMSEL-DAL.01.20.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan program Kawasan Permukiman bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.20 PERUMAHAN
RAL Level 3	RAL.01.20.02 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
RAL Level 4	RAL.01.20.02.01 Layanan Program Kawasan Permukiman

296. Layanan Permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi

ID	SUMSEL-DAL.01.20.04.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota



296. Layanan Permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.20 PERUMAHAN
RAL Level 3	RAL.01.20.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
RAL Level 4	RAL.01.20.04.01 Layanan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi

297. Layanan Permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana

ID	SUMSEL-DAL.01.20.04.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.20 PERUMAHAN
RAL Level 3	RAL.01.20.04 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
RAL Level 4	RAL.01.20.04.02 Layanan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana

43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT

4 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 4

298. Layanan Standar Pelayanan Peminjaman Jembatan Bailey

ID	SUMSEL-DAL.01.17.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan standar Pelayanan Peminjaman Jembatan Bailey bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM
RAL Level 3	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAL Level 4	RAL.01.17.01.01 Layanan Standar Pelayanan Peminjaman Jembatan Bailey

299. Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan

ID	SUMSEL-DAL.01.17.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan



299. Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM
RAL Level 3	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAL Level 4	RAL.01.17.01.02 Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan

300. Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Guna Jalan

ID	SUMSEL-DAL.01.17.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Guna Jalan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan izin/rekomendasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM
RAL Level 3	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAL Level 4	RAL.01.17.01.03 Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin

301. Layanan Standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat

ID	SUMSEL-DAL.01.17.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.



301. Layanan Standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM
RAL Level 3	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
RAL Level 4	RAL.01.17.01.04 Layanan Standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat

44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER

5 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 5

302. Layanan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.50-001
Tujuan Layanan	Menyediakan penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa yang akurat dan mudah diakses oleh aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.50 Layanan Penyusunan Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup

303. Layanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.51-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**303. Layanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan**

Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.51 Layanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

304. Layanan Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.44-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.44 Layanan Pembangunan Sumur Air Tanah

305. Layanan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.52-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik

305. Layanan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.52 Layanan Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Rawa

306. Layanan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.04.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pekerjaan Umum
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA
RAL Level 4	RAL.02.04.04.01 Layanan Pengelolaan Sistem Hidrologi Dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN

8 layanan — Elektronik: 5, Non Elektronik: 3

307. Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) lintas Kab/ Kota dalam wilayah Sumatera Selatan.

ID	SUMSEL-DAL.01.32.03.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) lintas Kab/ Kota dalam wilayah Sumatera Selatan. bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Keputusan Peraturan Perusahaan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Ketenagakerjaan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN
RAL Level 3	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAL Level 4	RAL.01.32.03.01 Layanan Peraturan Perusahaan Lintas Kab/ Kota Dalam Wilayah Sumatera Selatan.

308. Layanan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan

ID	SUMSEL-DAL.01.32.03.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat keputusan Perjanjian Kerja Bersama.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Ketenagakerjaan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

**308. Layanan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan**

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN
RAL Level 3	RAL.01.32.03 PENGEMBANGAN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
RAL Level 4	RAL.01.32.03.02 Layanan Perjanjian Kerja Bersama Lintas Kab/Kota Dalam Wilayah Sumatera Selatan

309. Layanan Rekomendasi Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

ID	SUMSEL-DAL.01.32.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan rekomendasi Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan surat Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Ketenagakerjaan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN
RAL Level 3	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAL Level 4	RAL.01.32.02.01 Layanan Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

310. Layanan Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel

ID	SUMSEL-DAL.01.32.02.02-001
Tujuan Layanan	Memudahkan pelaku usaha dalam pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel secara tertib dan transparan.
Fungsi Layanan	Menghitung kewajiban, memproses pembayaran, dan menerbitkan surat.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Ketenagakerjaan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Memudahkan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib bayar.

310. Layanan Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel

Potensi Ekonomi	Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan kebocoran.
Potensi Risiko	Kesalahan perhitungan, gagal bayar, atau kebocoran penerimaan.
Mitigasi Risiko	Rekonsiliasi otomatis, kanal pembayaran resmi, dan audit berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN
RAL Level 3	RAL.01.32.02 PENINGKATAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
RAL Level 4	RAL.01.32.02.02 Layanan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel

311. Layanan Pengurusan Surat Keterangan Keselamatan , kesehatan Kerja (K3)

ID	SUMSEL-DAL.01.32.04.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengurusan Surat Keterangan Keselamatan , kesehatan Kerja (K3) bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Ketenagakerjaan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN
RAL Level 3	RAL.01.32.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
RAL Level 4	RAL.01.32.04.01 Layanan Pengurusan Surat Keterangan Keselamatan

312. Layanan dan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAL.01.18.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan dan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.

312. Layanan dan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan

Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Transmigrasi
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.18 TRANSMIGRASI
RAL Level 3	RAL.01.18.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAL Level 4	RAL.01.18.01.01 Layanan Dan Penempatan Transmigrasi Di Provinsi Sumatera Selatan

313. Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi

ID	SUMSEL-DAL.01.32.01.01-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui pelatihan Berbasis Kompetensi.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan sertifikat Pelatihan Berbasis Kompetensi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Ketenagakerjaan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN
RAL Level 3	RAL.01.32.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
RAL Level 4	RAL.01.32.01.01 Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi



314. Layanan Pengujian Lingkungan Kerja

ID	SUMSEL-DAL.01.18.05.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengujian Lingkungan Kerja bagi pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Ketenagakerjaan
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.18 TRANSMIGRASI
RAL Level 3	RAL.01.18.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
RAL Level 4	RAL.01.18.05.01 Layanan Pengujian Lingkungan Kerja



47. RS KHUSUS MATA

3 layanan — Elektronik: 3, Non Elektronik: 0

315. Layanan Jasa (Kesehatan Mata)

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan jasa (Kesehatan Mata) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan resume Medis Digital.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.02 Layanan Jasa

316. Layanan Barang (Obat & Alkes Mata)

ID	SUMSEL-DAL.01.25.08.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan barang (Obat & Alkes Mata) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan Penggunaan Obat.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK



316. Layanan Barang (Obat & Alkes Mata)

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
RAL Level 4	RAL.01.25.08.02 Layanan Barang

317. Layanan Administrasi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan administrasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan bukti Pembayaran / Billing.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.03 Layanan Administrasi



48. RSJ ERNALDI BAHAR

11 layanan — Elektronik: 11, Non Elektronik: 0

318. Layanan Pendaftaran Rawat Jalan

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.04-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pendaftaran Rawat Jalan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan bukti Registrasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.04 Layanan Rawat Jalan

319. Layanan Pendaftaran Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pendaftaran Gawat Darurat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan kartu Berobat.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan



319. Layanan Pendaftaran Gawat Darurat

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.05 Layanan Gawat Darurat

320. Layanan Pendaftaran Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.06-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pendaftaran Rawat Inap bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan berkas Admisi.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.06 Layanan Rawat Inap

321. Layanan Rawat Jalan Jiwa & Spesialis

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.07-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rawat Jalan Jiwa & Spesialis bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan e-Resep.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

**321. Layanan Rawat Jalan Jiwa & Spesialis**

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.07 Layanan Rawat Jalan Jiwa & Spesialis

322. Layanan Terapi Wicara & Okupasi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.08-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan terapi Wicara & Okupasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan surat Kontrol Terapi.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.08 Layanan Terapi Wicara & Okupasi

323. Layanan Fisioterapi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.09-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fisioterapi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan bukti Tindakan.



323. Layanan Fisioterapi

Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.09 Layanan Fisioterapi

324. Layanan Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.05-002
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan gawat Darurat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan lembar Observasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.05 Layanan Gawat Darurat



325. Layanan Farmasi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.08.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan farmasi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan label Obat.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
RAL Level 4	RAL.01.25.08.03 Layanan Farmasi

326. Layanan Laboratorium

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.10-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan laboratorium bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan hasil Ekspertisi.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



326. Layanan Laboratorium

RAL Level 4	RAL.01.25.01.10 Layanan Laboratorium

327. Layanan Radiologi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.11-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan radiologi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan foto & Ekspertisi.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.11 Layanan Radiologi

328. Layanan Gizi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.12-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan gizi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan form Gizi.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS Kesehatan
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.



328. Layanan Gizi

Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.12 Layanan Gizi



49. RSUD SITI FATIMAH

19 layanan — Elektronik: 18, Non Elektronik: 1

329. Layanan Instalasi Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.13-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan instalasi Gawat Darurat bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan resume Medis.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.13 Layanan Instalasi Gawat Darurat

330. Layanan Obstetri Neonatal Komprehensif

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.14-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan obstetri Neonatal Komprehensif bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan PONEK.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan



330. Layanan Obstetri Neonatal Komprehensif

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.14 Layanan Obstetri Neonatal Komprehensif

331. Layanan Instalasi Jantung Terpadu

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.15-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan instalasi Jantung Terpadu bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan hasil Angiografi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.15 Layanan Instalasi Jantung Terpadu

332. Layanan Instalasi Bedah Sentral

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.16-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan instalasi Bedah Sentral bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan Operasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.

332. Layanan Instalasi Bedah Sentral

Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.16 Layanan Instalasi Bedah Sentral

333. Layanan Pasien Poliklinik

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.17-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pasien Poliklinik bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan resep & Surat Kontrol.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.17 Layanan Pasien Poliklinik

334. Layanan Kamar Bersalin

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.18-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan kamar Bersalin bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan partograph Digital.



334. Layanan Kamar Bersalin

Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.18 Layanan Kamar Bersalin

335. Layanan Kamar Bayi Baru Lahir (KBBL)

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.19-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan kamar Bayi Baru Lahir (KBBL) bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan pengantar SKL.
Kementerian / Lembaga Terkait	Disdukcapil
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.19 Layanan Kamar Bayi Baru Lahir



336. Layanan Hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.20-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan billing HD.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.20 Layanan Hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan

337. Layanan Hemodialisis Pasien Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.21-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan hemodialisis Pasien Rawat Inap bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan billing HD.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

**337. Layanan Hemodialisis Pasien Rawat Inap**

RAL Level 4	RAL.01.25.01.21 Layanan Hemodialisis Pasien Rawat Inap

338. Layanan Instalasi Medical Check Up

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.22-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan instalasi Medical Check Up bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sertifikat MCU.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.22 Layanan Instalasi Medical Check Up

339. Layanan Gizi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.12-002
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan gizi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan form Edukasi Gizi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**339. Layanan Gizi**

Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.12 Layanan Gizi

340. Layanan Laboratorium

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.10-002
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan laboratorium bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan hasil Lab Digital.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.10 Layanan Laboratorium

341. Layanan Radiologi

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.11-002
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan radiologi bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan hasil Ekspertisi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik

341. Layanan Radiologi

Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.11 Layanan Radiologi

342. Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.23-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rehabilitasi Medik Rawat Jalan bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan lembar Terapi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.23 Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan

343. Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.24-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rehabilitasi Medik Rawat Inap bagi masyarakat.

343. Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap

Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan billing Terapi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.24 Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap

344. Layanan Instalasi Farmasi Rawat Jalan dan IGD

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.25-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan instalasi Farmasi Rawat Jalan dan IGD bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan etiket & Obat.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.25 Layanan Instalasi Farmasi Rawat Jalan Dan Instalasi Gawat Darurat



345. Layanan Instalasi Farmasi Rawat Inap, ICU, NICU, dan PICU

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.26-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan instalasi Farmasi Rawat Inap, ICU, NICU, dan PICU bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan obat Sistem UDD.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kemenkes
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.26 Layanan Instalasi Farmasi Rawat Inap

346. Layanan Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.06-002
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rawat Inap bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan resume Medis RI.
Kementerian / Lembaga Terkait	BPJS
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



346. Layanan Rawat Inap

RAL Level 4	RAL.01.25.01.06 Layanan Rawat Inap

347. Layanan Instalasi Kamar Jenazah

ID	SUMSEL-DAL.01.25.01.27-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan instalasi Kamar Jenazah bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan sertifikat SKK.
Kementerian / Lembaga Terkait	Disdukcapil
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.25 KESEHATAN
RAL Level 3	RAL.01.25.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
RAL Level 4	RAL.01.25.01.27 Layanan Instalasi Kamar Jenazah

5. Badan Pengembangan Sumber Da

7 layanan — Elektronik: 7, Non Elektronik: 0

348. Layanan Sertifikasi kompetensi

ID	SUMSEL-DAL.02.04.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan kepastian dan kemudahan sertifikasi kompetensi bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima permohonan, memverifikasi persyaratan, dan menerbitkan data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempercepat proses perizinan dan memberi kepastian hukum bagi pemohon.
Potensi Ekonomi	Mendorong iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan.
Potensi Risiko	Penyalahgunaan dokumen, pungutan tidak resmi, atau keterlambatan proses.
Mitigasi Risiko	Verifikasi berlapis, jejak audit digital, dan SOP waktu layanan yang jelas.
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN
RAL Level 4	RAL.02.04.02.01 Layanan Kompetensi

349. Layanan Pelatihan Teknis

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.39-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan unit pemerintah melalui pelatihan Teknis.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.



349. Layanan Pelatihan Teknis

Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.39 Layanan Pelatihan Teknis

350. Layanan Pelatihan Teknis Fungsional

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.40-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan unit pemerintah melalui pelatihan Teknis Fungsional.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.40 Layanan Pelatihan Teknis Fungsional

351. Layanan Pelatihan Dasar CPNS

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.41-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan unit pemerintah melalui pelatihan Dasar CPNS.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan



351. Layanan Pelatihan Dasar CPNS

Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.41 Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

352. Layanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.42-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan unit pemerintah melalui pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.42 Layanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II



353. Layanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.43-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan unit pemerintah melalui pelatihan Kepemimpinan Administrator.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.43 Layanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator

354. Layanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

ID	SUMSEL-DAL.02.04.03.44-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur dan unit pemerintah melalui pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA



panrb
KEMENTERIAN
PENATAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BUREKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital



354. Layanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

RAL Level 3	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
RAL Level 4	RAL.02.04.03.44 Layanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas



50. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 1

355. Layanan pengaduan kebakaran

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.45-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pengaduan kebakaran dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.45 Layanan Pengaduan Kebakaran



51. SEKRETARIAT DPRD

3 layanan — Elektronik: 0, Non Elektronik: 3

356. Layanan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

ID	SUMSEL-DAL.01.24.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH
RAL Level 3	RAL.01.24.01 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
RAL Level 4	RAL.01.24.01.01 Layanan Pembentukan Perda Dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

357. Layanan Fasilitasi Agenda DPRD

ID	SUMSEL-DAL.01.24.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan fasilitasi Agenda DPRD bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan



357. Layanan Fasilitasi Agenda DPRD

RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH
RAL Level 3	RAL.01.24.01 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
RAL Level 4	RAL.01.24.01.02 Layanan Fasilitasi Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

358. Layanan Fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat (Reses)

ID	SUMSEL-DAL.01.24.01.03-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat (Reses) dari masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tindak lanjut.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH
RAL Level 3	RAL.01.24.01 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
RAL Level 4	RAL.01.24.01.03 Layanan Fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat



52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

6 layanan — Elektronik: 4, Non Elektronik: 2

359. Layanan Informasi Publik melalui PPID

ID	SUMSEL-DAL.01.43.03.02-001
Tujuan Layanan	Menyediakan informasi Publik melalui PPID yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan surat pemberitahuan tertulis, dokumen informasi publik, tanda bukti permohonan, surat penolakan informasi, register permohonan informasi, dan laporan layanan PPID.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Relasi Media
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.43 INFORMASI
RAL Level 3	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAL Level 4	RAL.01.43.03.02 Layanan Informasi Publik Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

360. Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!

ID	SUMSEL-DAL.01.43.03.03-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! dari pelaku usaha.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan tiket laporan pengaduan, disposisi laporan, jawaban tindak lanjut OPD, status penyelesaian, dan rekapitulasi pengaduan masyarakat.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Target Layanan	Pelaku Usaha
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.



360. Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!

Proses Bisnis	Relasi Media
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.43 INFORMASI
RAL Level 3	RAL.01.43.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
RAL Level 4	RAL.01.43.03.03 Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Sp4n-lapor!

361. Layanan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM

ID	SUMSEL-DAL.01.44.02.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan data profil KIM, laporan kegiatan kemitraan, dokumentasi kegiatan, bahan informasi publik, dan rekapitulasi pembinaan KIM.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Komunikasi dan Digital
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Relasi Media
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.44 KOMUNIKASI
RAL Level 3	RAL.01.44.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
RAL Level 4	RAL.01.44.02.01 Layanan Kemitraan Komunikasi Publik Melalui Kelompok Informasi Masyarakat

362. Layanan Keamanan Informasi dan TTE

ID	SUMSEL-DAL.02.09.01.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan keamanan Informasi dan TTE yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data/informasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Komunikasi dan Digital
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik



362. Layanan Keamanan Informasi dan TTE

Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN
RAL Level 3	RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
RAL Level 4	RAL.02.09.01.01 Layanan Keamanan Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik

363. Layanan Statistik Sektoral

ID	SUMSEL-DAL.01.43.04.01-001
Tujuan Layanan	Menyediakan statistik Sektoral yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan informasi data statistik sektoral yang bisa diunduh dalam bentuk excel dan pdf.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, Badan Pusat Statistik
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.43 INFORMASI
RAL Level 3	RAL.01.43.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK
RAL Level 4	RAL.01.43.04.01 Layanan Statistik Sektoral

364. Layanan E-Government

ID	SUMSEL-DAL.02.09.01.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan e-Government bagi aparatur dan unit pemerintah.



364. Layanan E-Government

Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Komunikasi dan Digital
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN
RAL Level 3	RAL.02.09.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA
RAL Level 4	RAL.02.09.01.02 Layanan E-government



7. BIRO ORGANISASI SETDA

2 layanan — Elektronik: 1, Non Elektronik: 1

365. Layanan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ID	SUMSEL-DAL.02.04.05.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima, memproses, dan menyelesaikan permohonan layanan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Non Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Orientasi DPRD
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
RAL Level 4	RAL.02.04.05.05 Layanan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

366. Layanan Survei Kepuasan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAL.02.04.01.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan survei Kepuasan Masyarakat bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan hasil rekap SKM.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik



panrb
KEMENTERIAN
PENATAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BUREKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital



366. Layanan Survei Kepuasan Masyarakat

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.04 APARATUR NEGARA
RAL Level 3	RAL.02.04.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA
RAL Level 4	RAL.02.04.01.03 Layanan Kepuasan Masyarakat

8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA

3 layanan — Elektronik: 3, Non Elektronik: 0

367. Layanan Registrasi dan Verifikasi Akun

ID	SUMSEL-DAL.02.02.11.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan registrasi dan Verifikasi Akun bagi masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan iD yang Sudah Aktif.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAL Level 4	RAL.02.02.11.01 Layanan Registrasi Dan Verifikasi Akun

368. Layanan Rencana Umum Pengadaan

ID	SUMSEL-DAL.02.02.11.02-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan rencana Umum Pengadaan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan iD yang Sudah Aktif.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa



368. Layanan Rencana Umum Pengadaan

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAL Level 4	RAL.02.02.11.02 Layanan Rencana Umum Pengadaan

369. Layanan Verifikasi Role Pengguna

ID	SUMSEL-DAL.02.02.11.03-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan verifikasi Role Pengguna bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan akun yang Sudah Aktif.
Kementerian / Lembaga Terkait	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.02 KEUANGAN
RAL Level 3	RAL.02.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RAL Level 4	RAL.02.02.11.03 Layanan Role Pengguna

9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

17 layanan — Elektronik: 17, Non Elektronik: 0

370. Layanan Konsultasi/Koordinasi;

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.01-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan konsultasi/Koordinasi; bagi aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan lembar Pelayanan dalam Bentuk Email.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.01 Layanan Konsultasi/Koordinasi;

371. Layanan Informasi/Permintaan Data;

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.02-001
Tujuan Layanan	Menyediakan informasi/Permintaan Data; yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan lembar Pelayanan dalam Bentuk Email.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih



371. Layanan Informasi/Permintaan Data;

RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.02 Layanan Informasi/Permintaan Data;

372. Layanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.03-001
Tujuan Layanan	Menyediakan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan lembar Pelayanan dalam Bentuk Email.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.03 Layanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

373. Layanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.04-001
Tujuan Layanan	Menyediakan monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan lembar Pelayanan dalam Bentuk Email.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.

373. Layanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.04 Layanan Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

374. Layanan Buku Tamu Digital

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.05-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan buku Tamu Digital bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan lembar Bukti Kunjungan, Rekapitulasi Kunjungan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.05 Layanan Buku Tamu Digital

375. Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RPJPD,RKPD)

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.06-001
Tujuan Layanan	Menyediakan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RPJPD,RKPD) yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah.



375. Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RPJPD,RKPD)

Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.06 Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah

376. Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran (RENJA Perangkat Daerah)

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.07-001
Tujuan Layanan	Menyediakan penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran (RENJA Perangkat Daerah) yang akurat dan mudah diakses oleh aparatur dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan renja Perangkat Daerah.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.07 Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran



377. Layanan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.08-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.08 Layanan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah

378. Layanan Pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan Kab/Kota

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.09-001
Tujuan Layanan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturnya dan unit pemerintah melalui pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan Kab/Kota.
Fungsi Layanan	Menyelenggarakan kegiatan, melakukan pendampingan, dan menerbitkan evaluasi Kinerja Pembangunan Pemerintah Kab/Kota.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas penerima layanan.
Potensi Ekonomi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing penerima manfaat.
Potensi Risiko	Materi kurang relevan, peserta tidak aktif, atau hasil tidak terukur.
Mitigasi Risiko	Kurikulum berbasis kebutuhan, evaluasi pasca-kegiatan, dan sertifikasi.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

**378. Layanan Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan Kab/Kota**

RAL Level 4	RAL.02.03.01.09 Layanan Dan Fasilitas Perencanaan Kab/Kota

379. Layanan Pengenterian RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.10-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan pengenterian RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.10 Layanan Pengenterian Rencana Kerja dan Anggaran Induk Dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan

380. Layanan Memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.11-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan laporan Data Program.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Sosial
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.

**380. Layanan Memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan**

Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.11 Layanan Memantau

381. Layanan Pelaporan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD, RAT Laporan Oppkpke

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.12-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pelaporan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD, RAT Laporan Oppkpke dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan laporan Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.12 Layanan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD

382. Layanan Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.13-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting dari aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan laporan Analisis Situasi.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan

382. Layanan Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting

Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.13 Layanan Sistem Pelaporan

383. Layanan Pusat Data, Pemantauan dan Pelaporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) di Wilayah Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAL.01.24.04.01-001
Tujuan Layanan	Menampung dan menindaklanjuti pusat Data, Pemantauan dan Pelaporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) di Wilayah Sumatera Selatan dari masyarakat.
Fungsi Layanan	Menerima aduan, melakukan disposisi, dan menyampaikan laporan Data Capaian 17 Goals SDGs.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Publik/Masyarakat
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Meningkatkan responsivitas dan kepercayaan publik terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya penanganan keluhan dan perbaikan kualitas layanan.
Potensi Risiko	Aduan tidak tertangani, kebocoran data pengadu, atau penyalahgunaan kanal.
Mitigasi Risiko	SLA tindak lanjut, kerahasiaan identitas pengadu, dan monitoring status.
Proses Bisnis	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
RAL Level 1	RAL.01 LAYANAN PUBLIK
RAL Level 2	RAL.01.24 PEMERINTAHAN DAERAH
RAL Level 3	RAL.01.24.04 PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
RAL Level 4	RAL.01.24.04.01 Layanan Pusat Data

384. Layanan Penyediaan Data dan Informasi Geospasial

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.14-001



384. Layanan Penyediaan Data dan Informasi Geospasial

Tujuan Layanan	Menyediakan penyediaan Data dan Informasi Geospasial yang akurat dan mudah diakses oleh aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menghimpun, mengolah, dan menyajikan peta Informasi geospasial Tematik (IGT) Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.
Kementerian / Lembaga Terkait	Badan Informasi Geospasial
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan keterbukaan informasi.
Potensi Ekonomi	Menghemat biaya pengumpulan data dan membuka peluang pemanfaatan data.
Potensi Risiko	Data tidak akurat/kedaluwarsa, duplikasi, atau kebocoran data.
Mitigasi Risiko	Tata kelola satu data, validasi berkala, dan pengamanan hak akses.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.14 Layanan Penyediaan Data Dan Informasi Geospasial

385. Layanan Perencanaan DAK, Pengusulan Kewilayahan pada Pramusrenbang

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.15-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan perencanaan DAK, Pengusulan Kewilayahan pada Pramusrenbang bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan dokumen RK dan RPD.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.15 Layanan Perencanaan Dana Alokasi Khusus



386. Layanan Disposisi Online

ID	SUMSEL-DAL.02.03.01.16-001
Tujuan Layanan	Memberikan pelayanan disposisi Online bagi aparaturnya dan unit pemerintah.
Fungsi Layanan	Menerima dan memproses permohonan, lalu menerbitkan lembar Disposisi Online.
Kementerian / Lembaga Terkait	Kementerian Dalam Negeri
Target Layanan	Internal Pemerintahan
Metode Layanan	Elektronik
Potensi Manfaat	Mempermudah dan mempercepat akses pengguna terhadap layanan.
Potensi Ekonomi	Efisiensi biaya dan waktu pelayanan publik maupun internal.
Potensi Risiko	Keterlambatan layanan, kesalahan administrasi, atau ketidakpuasan pengguna.
Mitigasi Risiko	Standar layanan (SOP), digitalisasi proses, dan evaluasi berkala.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
RAL Level 1	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
RAL Level 2	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAL Level 3	RAL.02.03.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RAL Level 4	RAL.02.03.01.16 Layanan Disposisi Online



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



METADATA

ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

— • 2026 • —





DOMAIN DATA DAN INFORMASI

Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2026

Register Lengkap Entitas Data (Sheet Data-v1)

Total 753 entitas data • 50 perangkat daerah



6. DINAS SOSIAL

13 entitas data

1. Data Dari Masyarakat yang terlanter	
ID	SUMSEL-DAD.04.02.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi dari Masyarakat yang terlanter, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemulangan Orang Terlanter (OT) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kepala Seksi Bencana Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Dari Masyarakat yang terlanter
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Transport Ke Daerah Asal
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Layanan	Layanan Pemulangan Orang Terlanter (OT)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL

2. Data Bantuan Transport Ke Daerah Asal	
ID	SUMSEL-DAD.04.02.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi bantuan Transport Ke Daerah Asal, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemulangan Orang Terlanter (OT) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kepala Seksi Bencana Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Dari Masyarakat yang terlanter
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Transport Ke Daerah Asal



2. Data Bantuan Transport Ke Daerah Asal

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Layanan	Layanan Pemulangan Orang Terlantar (OT)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL

3. Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-045
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pemberdayaan Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

4. Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-046
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



4. Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pemberdayaan Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

5. Data Izin Pengangkatan Anak Antar WNI

ID	SUMSEL-DAD.04.02.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Pengangkatan Anak Antar WNI, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Pengangkatan Anak Antar WNI serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang Rehabilitasi Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Pengangkatan Anak Antar WNI
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar WNI
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Layanan	Layanan Izin Pengangkatan Anak Antar WNI
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL



6. Data Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar WNI

ID	SUMSEL-DAD.04.02.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar WNI, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Pengangkatan Anak Antar WNI serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang Rehabilitasi Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Pengangkatan Anak Antar WNI
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar WNI
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Layanan	Layanan Izin Pengangkatan Anak Antar WNI
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL

7. Data Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-047
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pemberdayaan Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional



7. Data Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

8. Data Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-048
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pemberdayaan Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

9. Data Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi

ID	SUMSEL-DAD.04.02.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi, bersifat terbatas. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang Rehabilitasi Sosial

**9. Data Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi**

Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemulangan dan Pendampingan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Operasional Kegiatan LKS/LKSA Skala Provinsi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.01 PENYELENGGARAAN REHABILITAS SOSIAL

10. Data DTSEN

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-049
Uraian Data	Data yang memuat informasi dTSEN, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	DTSEN
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data DTSEN
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Usaha
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

11. Data Bantuan Usaha

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-050



11. Data Bantuan Usaha

Uraian Data	Data yang memuat informasi bantuan Usaha, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	DTSN
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data DTSN
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Usaha
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

12. Data Bidang Pemberdayaan Sosial

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-051
Uraian Data	Data yang memuat informasi bidang Pemberdayaan Sosial, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Permohonan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Bidang Pemberdayaan Sosial
Informasi Terkait (Output)	Data Izin Pengumpulan Uang dan Barang
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



12. Data Bidang Pemberdayaan Sosial

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

13. Data Izin Pengumpulan Uang dan Barang

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-052
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Pengumpulan Uang dan Barang, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Permohonan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	6. DINAS SOSIAL
Informasi Terkait (Input)	Data Bidang Pemberdayaan Sosial
Informasi Terkait (Output)	Data Izin Pengumpulan Uang dan Barang
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TKSK)
Layanan	Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



1. Badan Kepegawaian

95 entitas data

14. Data Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi tugas Belajar Yang Dibiayai Negara, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengajuan Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

15. Data Surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar



15. Data Surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengajuan Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

16. Data Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Hukuman Disiplin
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

17. Data Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Hukuman Disiplin

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan Tidak Dalam Proses Hukuman Disiplin, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



17. Data Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Hukuman Disiplin

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Hukuman Disiplin
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

18. Data Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Pengembalian Tugas Belajar / SK Pengaktifan Kembali
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



19. Data Surat Pengembalian Tugas Belajar / SK Pengaktifan Kembali

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Pengembalian Tugas Belajar / SK Pengaktifan Kembali, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Pengembalian Tugas Belajar / SK Pengaktifan Kembali
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

20. Data Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi



20. Data Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

21. Data Surat Izin Mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

22. Data Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar, bersifat terbatas. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD



22. Data Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar

Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

23. Data Izin Perceraian PNS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Perceraian PNS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Perceraian PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Perceraian PNS
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Pertimbangan Perceraian
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Perceraian PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

24. Data Surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Pertimbangan Perceraian

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-004



24. Data Surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Pertimbangan Perceraian

Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Pertimbangan Perceraian, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Perceraian PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Perceraian PNS
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Pertimbangan Perceraian
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Perceraian PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

25. Data Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Riwayat Disiplin
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



25. Data Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

26. Data Surat Keterangan Riwayat Disiplin

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan Riwayat Disiplin, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Riwayat Disiplin
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

27. Data Pengangkatan Pertama JFT Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengangkatan Pertama JFT Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Pertama JFT Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian



27. Data Pengangkatan Pertama JFT Guru

Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Pertama JFT Guru
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Pertama JFT Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

28. Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Pertama JFT Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Pertama JFT Guru
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Pertama JFT Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

29. Data Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing, bersifat terbatas.



29. Data Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan JFT melalui Inpassing
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

30. Data SK Pengangkatan JFT melalui Inpassing

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pengangkatan JFT melalui Inpassing, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan JFT melalui Inpassing
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA



30. Data SK Pengangkatan JFT melalui Inpassing

RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

31. Data Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu
Informasi Terkait (Output)	Data SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

32. Data SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu



32. Data SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional

Informasi Terkait (Output)	Data SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

33. Data Pemberhentian dari JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi pemberhentian dari JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemberhentian dari JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pemberhentian dari JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pemberhentian dari JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

34. Data SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemberhentian dari JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



34. Data SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pemberhentian dari JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pemberhentian dari JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

35. Data Pengangkatan Kembali Dalam JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengangkatan Kembali Dalam JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Kembali Dalam JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Kembali Dalam JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Kembali JFT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Kembali Dalam JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



36. Data SK Pengangkatan Kembali JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-013
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pengangkatan Kembali JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Kembali Dalam JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Kembali Dalam JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Kembali JFT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Kembali Dalam JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

37. Data Alih Jenjang dalam JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-014
Uraian Data	Data yang memuat informasi alih Jenjang dalam JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan alih Jenjang dalam JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Alih Jenjang dalam JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

**37. Data Alih Jenjang dalam JFT**

Layanan	Layanan Alih Jenjang dalam JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

38. Data SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan alih Jenjang dalam JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Alih Jenjang dalam JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Alih Jenjang dalam JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

39. Data Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



39. Data Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional

Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Penetapan/Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

40. Data Surat Penetapan/Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-013
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Penetapan/Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Penetapan/Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



41. Data Penyesuaian JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-015
Uraian Data	Data yang memuat informasi penyesuaian JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyesuaian JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Penyesuaian JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penyesuaian Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Penyesuaian JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

42. Data SK Penyesuaian Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-014
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Penyesuaian Jabatan Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyesuaian JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Penyesuaian JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penyesuaian Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Penyesuaian JFT



42. Data SK Penyesuaian Jabatan Fungsional

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

43. Data Pengangkatan JFT Utama

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-016
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengangkatan JFT Utama, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan JFT Utama serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan JFT Utama
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan JFT Utama
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

44. Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-015
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan JFT Utama serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD



44. Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama

Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan JFT Utama
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan JFT Utama
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

45. Data Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-016
Uraian Data	Data yang memuat informasi perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan ke Jabatan Fungsional dari Jabatan Lain
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

46. Data SK Pengangkatan ke Jabatan Fungsional dari Jabatan Lain

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-017



46. Data SK Pengangkatan ke Jabatan Fungsional dari Jabatan Lain

Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pengangkatan ke Jabatan Fungsional dari Jabatan Lain, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan ke Jabatan Fungsional dari Jabatan Lain
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

47. Data Pengangkatan Pertama JFT NON Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-017
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengangkatan Pertama JFT NON Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Pertama JFT NON Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Pertama JFT NON Guru
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Pertama JFT NON Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



47. Data Pengangkatan Pertama JFT NON Guru

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

48. Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-018
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengangkatan Pertama JFT NON Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengangkatan Pertama JFT NON Guru
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengangkatan Pertama JFT NON Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

49. Data Usul Pensiun BUP

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-019
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul Pensiun BUP, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Pensiun BUP serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian



49. Data Usul Pensiun BUP

Informasi Terkait (Input)	Data Usul Pensiun BUP
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pensiun Batas Usia Pensiun
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Pensiun BUP
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

50. Data SK Pensiun Batas Usia Pensiun

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-020
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pensiun Batas Usia Pensiun, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Pensiun BUP serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Pensiun BUP
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pensiun Batas Usia Pensiun
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Pensiun BUP
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

51. Data Usul Pensiun Janda/Duda

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-021
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul Pensiun Janda/Duda, bersifat terbatas.



51. Data Usul Pensiun Janda/Duda

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Pensiun Janda/Duda serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Pensiun Janda/Duda
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pensiun Janda/Duda
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Pensiun Janda/Duda
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

52. Data SK Pensiun Janda/Duda

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-022
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pensiun Janda/Duda, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Pensiun Janda/Duda serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Pensiun Janda/Duda
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pensiun Janda/Duda
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Pensiun Janda/Duda
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA



52. Data SK Pensiun Janda/Duda

RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

53. Data Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-023
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pensiun APS
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

54. Data SK Pensiun APS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-024
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pensiun APS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)



54. Data SK Pensiun APS

Informasi Terkait (Output)	Data SK Pensiun APS
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

55. Data Usul Kebutuhan JFT (Formasi)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-025
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul Kebutuhan JFT (Formasi), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Kebutuhan JFT (Formasi) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Kebutuhan JFT (Formasi)
Informasi Terkait (Output)	Data Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Kebutuhan JFT (Formasi)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

56. Data Penetapan Formasi Jabatan Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-026
Uraian Data	Data yang memuat informasi penetapan Formasi Jabatan Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Kebutuhan JFT (Formasi) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



56. Data Penetapan Formasi Jabatan Fungsional

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Kebutuhan JFT (Formasi)
Informasi Terkait (Output)	Data Penetapan Formasi Jabatan Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Kebutuhan JFT (Formasi)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

57. Data Usul Uji Kompetensi JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-027
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul Uji Kompetensi JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Uji Kompetensi JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Uji Kompetensi JFT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat/hasil Uji Kompetensi JFT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Uji Kompetensi JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



58. Data Sertifikat/hasil Uji Kompetensi JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-028
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat/hasil Uji Kompetensi JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Uji Kompetensi JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Uji Kompetensi JFT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat/hasil Uji Kompetensi JFT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Uji Kompetensi JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

59. Data Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-029
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul pemindahan PNS tenaga kependidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul pemindahan PNS tenaga kependidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan
Informasi Terkait (Output)	Data SK Mutasi/Pemindahan PNS Tenaga Kependidikan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK



59. Data Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan

Layanan	Layanan Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

60. Data SK Mutasi/Pemindahan PNS Tenaga Kependidikan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-030
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Mutasi/Pemindahan PNS Tenaga Kependidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul pemindahan PNS tenaga kependidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan
Informasi Terkait (Output)	Data SK Mutasi/Pemindahan PNS Tenaga Kependidikan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

61. Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-018
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul Penyesuaian Nomenklatur JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Penyesuaian Nomenklatur JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



61. Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT

Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

62. Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-019
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Penyesuaian Nomenklatur JFT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Penyesuaian Nomenklatur JFT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



63. Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-020
Uraian Data	Data yang memuat informasi usul Penyesuaian Nomenklatur JFU, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Penyesuaian Nomenklatur JFU serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFU
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

64. Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFU

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-021
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Penyesuaian Nomenklatur JFU, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan usul Penyesuaian Nomenklatur JFU serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFU
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU



64. Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFU

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

65. Data Kenaikan gaji berkala Kepala OPD

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-031
Uraian Data	Data yang memuat informasi kenaikan gaji berkala Kepala OPD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kenaikan gaji berkala Kepala OPD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Kenaikan gaji berkala Kepala OPD
Informasi Terkait (Output)	Data SK Kenaikan Gaji Berkala
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Kenaikan gaji berkala Kepala OPD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

66. Data SK Kenaikan Gaji Berkala

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-032
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Kenaikan Gaji Berkala, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kenaikan gaji berkala Kepala OPD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD



66. Data SK Kenaikan Gaji Berkala

Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Kenaikan gaji berkala Kepala OPD
Informasi Terkait (Output)	Data SK Kenaikan Gaji Berkala
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Kenaikan gaji berkala Kepala OPD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

67. Data Peninjauan masa kerja

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-022
Uraian Data	Data yang memuat informasi peninjauan masa kerja, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peninjauan masa kerja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Peninjauan masa kerja
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penetapan Peninjauan Masa Kerja
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Peninjauan masa kerja
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

68. Data SK Penetapan Peninjauan Masa Kerja

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-023



68. Data SK Penetapan Peninjauan Masa Kerja

Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Penetapan Peninjauan Masa Kerja, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peninjauan masa kerja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Peninjauan masa kerja
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penetapan Peninjauan Masa Kerja
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Peninjauan masa kerja
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

69. Data Pencantuman Gelar Akademik (PNS)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-033
Uraian Data	Data yang memuat informasi pencantuman Gelar Akademik (PNS), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pencantuman Gelar Akademik (PNS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pencantuman Gelar Akademik (PNS)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Akademik)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pencantuman Gelar Akademik (PNS)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM

**69. Data Pencantuman Gelar Akademik (PNS)**

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

70. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Akademik)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-034
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Akademik), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pencantuman Gelar Akademik (PNS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pencantuman Gelar Akademik (PNS)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Akademik)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pencantuman Gelar Akademik (PNS)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

71. Data Pencatuman Gelar Profesi (PNS)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-035
Uraian Data	Data yang memuat informasi pencatuman Gelar Profesi (PNS), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pencatuman Gelar Profesi (PNS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pengajuan mandiri
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian



71. Data Pencatuman Gelar Profesi (PNS)

Informasi Terkait (Input)	Data Pencatuman Gelar Profesi (PNS)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PNS)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PNS)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

72. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PNS)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-036
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PNS), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pencatuman Gelar Profesi (PNS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pengajuan mandiri
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pencatuman Gelar Profesi (PNS)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PNS)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PNS)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

73. Data Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-024
Uraian Data	Data yang memuat informasi pencatuman Gelar Profesi (PPPK), bersifat terbatas.



73. Data Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pencatuman Gelar Profesi (PPPK) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

74. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-037
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pencatuman Gelar Profesi (PPPK) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PPPK)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA



74. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK)

RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

75. Data Tugas Belajar PNS Secara Mandiri

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-038
Uraian Data	Data yang memuat informasi tugas Belajar PNS Secara Mandiri, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan tugas Belajar PNS Secara Mandiri serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Tugas Belajar PNS Secara Mandiri
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Tugas Belajar Mandiri
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Tugas Belajar PNS Secara Mandiri
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

76. Data Surat Persetujuan Tugas Belajar Mandiri

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-039
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Persetujuan Tugas Belajar Mandiri, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan tugas Belajar PNS Secara Mandiri serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Tugas Belajar PNS Secara Mandiri



76. Data Surat Persetujuan Tugas Belajar Mandiri

Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Tugas Belajar Mandiri
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Tugas Belajar PNS Secara Mandiri
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

77. Data Izin Keluar Negeri

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-025
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Keluar Negeri, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Keluar Negeri serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Keluar Negeri
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Perjalanan Dinas/Izin Keluar Negeri
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Keluar Negeri
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

78. Data Surat Izin Perjalanan Dinas/Izin Keluar Negeri

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-026
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Perjalanan Dinas/Izin Keluar Negeri, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Keluar Negeri serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



78. Data Surat Izin Perjalanan Dinas/Izin Keluar Negeri

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Keluar Negeri
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Perjalanan Dinas/Izin Keluar Negeri
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Keluar Negeri
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

79. Data Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-040
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Cuti di Luar Tanggungan Negara, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Cuti di Luar Tanggungan Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara
Informasi Terkait (Output)	Data SK Cuti di Luar Tanggungan Negara
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



80. Data SK Cuti di Luar Tanggungan Negara

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-041
Uraian Data	Data yang memuat informasi sK Cuti di Luar Tanggungan Negara, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Cuti di Luar Tanggungan Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara
Informasi Terkait (Output)	Data SK Cuti di Luar Tanggungan Negara
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

81. Data Tanda Kehormatan Satyalancana

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-027
Uraian Data	Data yang memuat informasi tanda Kehormatan Satyalancana, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan tanda Kehormatan Satyalancana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Tanda Kehormatan Satyalancana
Informasi Terkait (Output)	Data Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

**81. Data Tanda Kehormatan Satyalancana**

Layanan	Layanan Tanda Kehormatan Satyalancana
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

82. Data Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-028
Uraian Data	Data yang memuat informasi piagam Tanda Kehormatan Satyalancana, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan tanda Kehormatan Satyalancana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Tanda Kehormatan Satyalancana
Informasi Terkait (Output)	Data Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Tanda Kehormatan Satyalancana
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

83. Data Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-042
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



83. Data Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara

Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengaktifan Kembali dari CLTN
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

84. Data SK Pengaktifan Kembali dari CLTN

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-043
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Pengaktifan Kembali dari CLTN, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara
Informasi Terkait (Output)	Data SK Pengaktifan Kembali dari CLTN
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



85. Data Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-044
Uraian Data	Data yang memuat informasi perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara
Informasi Terkait (Output)	Data SK Perpanjangan CLTN
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

86. Data SK Perpanjangan CLTN

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-045
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Perpanjangan CLTN, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara
Informasi Terkait (Output)	Data SK Perpanjangan CLTN
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara

**86. Data SK Perpanjangan CLTN**

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

87. Data Cuti Tahunan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-046
Uraian Data	Data yang memuat informasi cuti Tahunan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Tahunan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Tahunan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Tahunan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Tahunan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

88. Data Surat Izin Cuti Tahunan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-047
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Cuti Tahunan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Tahunan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD

**88. Data Surat Izin Cuti Tahunan**

Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Tahunan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Tahunan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Tahunan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

89. Data Cuti Besar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-048
Uraian Data	Data yang memuat informasi cuti Besar, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Besar serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Besar
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Besar
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Besar
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

90. Data Surat Izin Cuti Besar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-049



90. Data Surat Izin Cuti Besar

Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Cuti Besar, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Besar serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Besar
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Besar
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Besar
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

91. Data Cuti Karena Alasan Penting

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-050
Uraian Data	Data yang memuat informasi cuti Karena Alasan Penting, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Karena Alasan Penting serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Karena Alasan Penting
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Karena Alasan Penting
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



91. Data Cuti Karena Alasan Penting

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

92. Data Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-051
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Cuti Karena Alasan Penting, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Karena Alasan Penting serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Karena Alasan Penting
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Karena Alasan Penting
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

93. Data Cuti Sakit

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-052
Uraian Data	Data yang memuat informasi cuti Sakit, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Sakit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian



93. Data Cuti Sakit

Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Sakit
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Sakit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Sakit
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

94. Data Surat Izin Cuti Sakit

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-053
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Cuti Sakit, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Sakit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Sakit
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Sakit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Sakit
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

95. Data Cuti Melahirkan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-054
Uraian Data	Data yang memuat informasi cuti Melahirkan, bersifat terbatas.



95. Data Cuti Melahirkan

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Melahirkan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Melahirkan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Melahirkan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Melahirkan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

96. Data Surat Izin Cuti Melahirkan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-055
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Cuti Melahirkan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan cuti Melahirkan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Cuti Melahirkan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Cuti Melahirkan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Cuti Melahirkan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA



96. Data Surat Izin Cuti Melahirkan

RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

97. Data Perbaikan Nama PNS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-056
Uraian Data	Data yang memuat informasi perbaikan Nama PNS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan Nama PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perbaikan Nama PNS
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Nama)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perbaikan Nama PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

98. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Nama)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-057
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Perubahan Data Kepegawaian (Nama), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan Nama PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perbaikan Nama PNS



98. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Nama)

Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Nama)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perbaikan Nama PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

99. Data Perbaikan NIP PNS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-058
Uraian Data	Data yang memuat informasi perbaikan NIP PNS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan NIP PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perbaikan NIP PNS
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perbaikan Data NIP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perbaikan NIP PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

100. Data Surat Perbaikan Data NIP

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-059
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Perbaikan Data NIP, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan NIP PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



100. Data Surat Perbaikan Data NIP

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perbaikan NIP PNS
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perbaikan Data NIP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perbaikan NIP PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

101. Data Izin Mengajar PNS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-060
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Mengajar PNS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Mengajar PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Mengajar PNS
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Mengajar
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Mengajar PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



102. Data Surat Izin Mengajar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-061
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Mengajar, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan izin Mengajar PNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Mengajar PNS
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Mengajar
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Izin Mengajar PNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

103. Data Permohonan Rekon SKP 2022

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-029
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Rekon SKP 2022, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Rekon SKP 2022 serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Rekon SKP 2022
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekonsiliasi SKP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK



103. Data Permohonan Rekon SKP 2022

Layanan	Layanan Permohonan Rekon SKP 2022
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

104. Data Hasil Rekonsiliasi SKP

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-030
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Rekonsiliasi SKP, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Rekon SKP 2022 serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Rekon SKP 2022
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekonsiliasi SKP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Permohonan Rekon SKP 2022
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

105. Data Perbaikan Nama PPPK

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-031
Uraian Data	Data yang memuat informasi perbaikan Nama PPPK, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan Nama PPPK serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



105. Data Perbaikan Nama PPPK

Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perbaikan Nama PPPK
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Nama)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perbaikan Nama PPPK
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

106. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Nama)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-062
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Nama), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan Nama PPPK serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Perbaikan Nama PPPK
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Nama)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Perbaikan Nama PPPK
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



107. Data Peremajaan Pendidikan PPPK

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-032
Uraian Data	Data yang memuat informasi peremajaan Pendidikan PPPK, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peremajaan Pendidikan PPPK serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Peremajaan Pendidikan PPPK
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Pendidikan)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Peremajaan Pendidikan PPPK
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

108. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Pendidikan)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-063
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Pendidikan), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peremajaan Pendidikan PPPK serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	1. Badan Kepegawaian
Informasi Terkait (Input)	Data Peremajaan Pendidikan PPPK
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Pendidikan)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Layanan	Layanan Peremajaan Pendidikan PPPK



108. Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Pendidikan)

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



10. DINAS KESEHATAN

6 entitas data

109. Data Perusahaan PBF

ID	SUMSEL-DAD.04.01.08-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi perusahaan PBF, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	10. DINAS KESEHATAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan PBF
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi PBF Cabang
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Layanan	Layanan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

110. Data Rekomendasi PBF Cabang

ID	SUMSEL-DAD.04.01.08-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi PBF Cabang, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	10. DINAS KESEHATAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan PBF
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi PBF Cabang

110. Data Rekomendasi PBF Cabang

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Layanan	Layanan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

111. Data Distributor Alkes

ID	SUMSEL-DAD.04.01.03-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi distributor Alkes, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	10. DINAS KESEHATAN
Informasi Terkait (Input)	Data Distributor Alkes
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Distributor Alkes
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembangunan RS Beserta Sarana Pendukungnya
Layanan	Layanan Rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN

112. Data Rekomendasi Izin Distributor Alkes

ID	SUMSEL-DAD.04.01.03-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Izin Distributor Alkes, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



112. Data Rekomendasi Izin Distributor Alkes

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	10. DINAS KESEHATAN
Informasi Terkait (Input)	Data Distributor Alkes
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Izin Distributor Alkes
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembangunan RS Beserta Sarana Pendukungnya
Layanan	Layanan Rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.03 PENGELOLAAN ALAT KESEHATAN

113. Data Pemohon Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pemohon Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon Informasi
Penanggung Jawab / Wali Data	10. DINAS KESEHATAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemohon Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi
Informasi Terkait (Output)	Data Informasi Publik dan Dokumentasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



114. Data Informasi Publik dan Dokumentasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi informasi Publik dan Dokumentasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon Informasi
Penanggung Jawab / Wali Data	10. DINAS KESEHATAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemohon Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi
Informasi Terkait (Output)	Data Informasi Publik dan Dokumentasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



11. DISKDUKCAPIL

12 entitas data

115. Data Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

116. Data Hasil Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)



116. Data Hasil Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

117. Data Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

118. Data Hasil Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



118. Data Hasil Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Pilih Semua Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

119. Data Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik

ID	SUMSEL-DAD.09.01.07-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Layanan	Layanan Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



120. Data Hasil Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik

ID	SUMSEL-DAD.09.01.07-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Layanan	Layanan Pengajuan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.07 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

121. Data Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan



121. Data Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

122. Data Hasil Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Pengajuan Kerjasama Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

123. Data Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD



123. Data Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

124. Data Hasil Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Pengajuan Kerjasama Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

125. Data Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-009



125. Data Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan

Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK

126. Data Hasil Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan

ID	SUMSEL-DAD.03.07.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	11. DISKDUKCAPIL
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Layanan	Layanan Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



panrb
KEMENTERIAN
PENATAKRUFAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital



126. Data Hasil Permohonan Validasi Nomor Induk Kependudukan

RAD Level 2	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN
RAD Level 3	RAD.03.07.01 PENGENDALIAN PENDUDUK



12. DPMTSP

8 entitas data

127. Data Promosi Investasi dan Kerja Sama

ID	SUMSEL-DAD.02.08.02-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi promosi Investasi dan Kerja Sama, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan media Promosi Investasi dan Kerja Sama serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat/Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Promosi Investasi dan Kerja Sama
Informasi Terkait (Output)	Data Informasi Promosi Investasi dan Kerja Sama
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Media Promosi Investasi dan Kerja Sama
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI
RAD Level 3	RAD.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

128. Data Informasi Promosi Investasi dan Kerja Sama

ID	SUMSEL-DAD.02.08.02-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi informasi Promosi Investasi dan Kerja Sama, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan media Promosi Investasi dan Kerja Sama serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat/Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Promosi Investasi dan Kerja Sama
Informasi Terkait (Output)	Data Informasi Promosi Investasi dan Kerja Sama

**128. Data Informasi Promosi Investasi dan Kerja Sama**

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Media Promosi Investasi dan Kerja Sama
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI
RAD Level 3	RAD.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

129. Data Realisasi Investasi

ID	SUMSEL-DAD.02.08.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi realisasi Investasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Realisasi Investasi
Informasi Terkait (Output)	Data Realisasi investasi PMDN dan PMA, data Perkembangan Proyek Investasi, rekapitulasi dan statistik relaisasi investasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Layanan	Layanan laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI
RAD Level 3	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

130. Data Realisasi investasi PMDN dan PMA, data Perkembangan Proyek Investasi, rekapitulasi dan statistik relaisasi investasi

ID	SUMSEL-DAD.02.08.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi realisasi investasi PMDN dan PMA, data Perkembangan Proyek Investasi, rekapitulasi dan statistik relaisasi investasi, bersifat terbatas.



130. Data Realisasi investasi PMDN dan PMA, data Perkembangan Proyek Investasi, rekapitulasi dan statistik relaisasi investasi

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Realisasi Investasi
Informasi Terkait (Output)	Data Realisasi investasi PMDN dan PMA, data Perkembangan Proyek Investasi, rekapitulasi dan statistik relaisasi investasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Layanan	Layanan laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI
RAD Level 3	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

131. Data Menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan

ID	SUMSEL-DAD.02.08.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat/Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan
Informasi Terkait (Output)	Data Peta sebaran investasi, satatistik dan tren investasi, data realisasi investasi(PMA dan PMDN)
Interoperabilitas	Tidak



131. Data Menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan

Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Layanan	Layanan menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI
RAD Level 3	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

132. Data Peta sebaran investasi, statistik dan tren investasi, data realisasi investasi(PMA dan PMDN)

ID	SUMSEL-DAD.02.08.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi peta sebaran investasi, statistik dan tren investasi, data realisasi investasi(PMA dan PMDN), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat/Pelaku Usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan
Informasi Terkait (Output)	Data Peta sebaran investasi, statistik dan tren investasi, data realisasi investasi(PMA dan PMDN)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Layanan	Layanan menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI
RAD Level 3	RAD.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

133. Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ID	SUMSEL-DAD.02.08.06-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bersifat tertutup.



133. Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Informasi Terkait (Output)	Data Perizinan Berusaha yang Diterbitkan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Layanan	Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI
RAD Level 3	RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

134. Data Perizinan Berusaha yang Diterbitkan

ID	SUMSEL-DAD.02.08.06-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi perizinan Berusaha yang Diterbitkan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha
Penanggung Jawab / Wali Data	12. DPMTSP
Informasi Terkait (Input)	Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Informasi Terkait (Output)	Data Perizinan Berusaha yang Diterbitkan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Layanan	Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.08 DATA INVESTASI



134. Data Perizinan Berusaha yang Diterbitkan

RAD Level 3

RAD.02.08.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



13. DINAS PENDIDIKAN

40 entitas data

135. Data Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-055
Uraian Data	Data yang memuat informasi legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS). serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

136. Data Hasil Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-056
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS). serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD



136. Data Hasil Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)

Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Legalisasi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN), Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

137. Data Penerimaan Peserta Didik Baru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-057
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerimaan Peserta Didik Baru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerimaan Peserta Didik Baru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



138. Data Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-058
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerimaan Peserta Didik Baru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerimaan Peserta Didik Baru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

139. Data Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

**139. Data Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

140. Data Hasil Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

141. Data Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD

**141. Data Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah**

Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

142. Data Hasil Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Bantuan Pembangunan, Rehab dan Sarana Sekolah
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

143. Data Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-066



143. Data Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK

Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

144. Data Hasil Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-067
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



144. Data Hasil Pengajuan Izin Penambahan Jurusan/Kompetensi Keahlian SMK

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

145. Data Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

146. Data Hasil Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN



146. Data Hasil Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

147. Data Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

148. Data Hasil Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah, bersifat terbatas.



148. Data Hasil Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Perubahan Nomenklatur Sekolah
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

149. Data Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN



149. Data Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa

RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

150. Data Hasil Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Rekomendasi Mutasi Masuk/Keluar Siswa
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

151. Data Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan



151. Data Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan

Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

152. Data Hasil Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Rekomendasi Beasiswa Pendidikan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

153. Data Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-059
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



153. Data Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

154. Data Hasil Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-060
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Pengajuan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



155. Data Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-061
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

156. Data Hasil Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-062
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA



156. Data Hasil Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Layanan	Layanan Pengajuan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

157. Data Pengajuan Tunjangan Profesi Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-068
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Tunjangan Profesi Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Tunjangan Profesi Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Tunjangan Profesi Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Tunjangan Profesi Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Tunjangan Profesi Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

158. Data Hasil Pengajuan Tunjangan Profesi Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-069
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Tunjangan Profesi Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Tunjangan Profesi Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



158. Data Hasil Pengajuan Tunjangan Profesi Guru

Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Tunjangan Profesi Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Tunjangan Profesi Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Tunjangan Profesi Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

159. Data Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-070
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



160. Data Hasil Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-071
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

161. Data Pengajuan Usulan Pensiun Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-072
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Usulan Pensiun Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Pensiun Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Pensiun Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Pensiun Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Pensiun Guru



161. Data Pengajuan Usulan Pensiun Guru

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

162. Data Hasil Pengajuan Usulan Pensiun Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-073
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Usulan Pensiun Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Pensiun Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Pensiun Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Pensiun Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Pensiun Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

163. Data Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-074
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD



163. Data Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

164. Data Hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-075
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

165. Data Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-063

165. Data Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

166. Data Hasil Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-064
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)



166. Data Hasil Pengajuan Usulan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

167. Data Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-013
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

168. Data Hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah

ID	SUMSEL-DAD.06.01.02-014
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD



168. Data Hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah

Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penguatan Pendidikan Vokasi (Link and Match) dengan Dunia Kerja
Layanan	Layanan Pengajuan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan Pengawas Sekolah
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN
RAD Level 3	RAD.06.01.02 PENDIDIKAN FORMAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

169. Data Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-065
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

170. Data Hasil Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-066

**170. Data Hasil Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan**

Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Pengesahan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

171. Data Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-067
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM

**171. Data Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan**

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

172. Data Hasil Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-068
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Permohonan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

173. Data Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-069
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN



173. Data Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja

Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

174. Data Hasil Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-070
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	13. DINAS PENDIDIKAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA
Layanan	Layanan Permohonan Penambahan Jumlah Jam Mengaja
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



14. DINAS PERDAGANGAN

6 entitas data

175. Data Dari Perusahaan

ID	SUMSEL-DAD.02.02.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi dari Perusahaan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dari Perusahaan
Penanggung Jawab / Wali Data	14. DINAS PERDAGANGAN
Informasi Terkait (Input)	Data Dari Perusahaan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Asal
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
RAD Level 3	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

176. Data Surat Keterangan Asal

ID	SUMSEL-DAD.02.02.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan Asal, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dari Perusahaan
Penanggung Jawab / Wali Data	14. DINAS PERDAGANGAN
Informasi Terkait (Input)	Data Dari Perusahaan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Asal



176. Data Surat Keterangan Asal

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
RAD Level 3	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

177. Data Pengujian

ID	SUMSEL-DAD.02.02.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengujian, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian dan Sertifikasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dari masyarakat/pelaku Usaha dan IMKM
Penanggung Jawab / Wali Data	14. DINAS PERDAGANGAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengujian
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat/Laporan Hasil analisa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pengujian dan Sertifikasi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
RAD Level 3	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

178. Data Sertifikat/Laporan Hasil analisa

ID	SUMSEL-DAD.02.02.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat/Laporan Hasil analisa, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian dan Sertifikasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka



178. Data Sertifikat/Laporan Hasil analisa

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dari masyarakat/pelaku Usaha dan IMKM
Penanggung Jawab / Wali Data	14. DINAS PERDAGANGAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengujian
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat/Laporan Hasil analisa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pengujian dan Sertifikasi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
RAD Level 3	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

179. Data Kalibrasi

ID	SUMSEL-DAD.02.02.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi kalibrasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan jaminan Mutu dan Kalibrasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan dan Instansi
Penanggung Jawab / Wali Data	14. DINAS PERDAGANGAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kalibrasi
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Jaminan Mutu dan Kalibrasi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
RAD Level 3	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI



180. Data Sertifikat

ID	SUMSEL-DAD.02.02.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan jaminan Mutu dan Kalibrasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan dan Instansi
Penanggung Jawab / Wali Data	14. DINAS PERDAGANGAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kalibrasi
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Jaminan Mutu dan Kalibrasi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
RAD Level 3	RAD.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI



16. DINAS PERINDUSTRIAN

12 entitas data

181. Data Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha

ID	SUMSEL-DAD.02.01.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
RAD Level 3	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI

182. Data Hasil Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha

ID	SUMSEL-DAD.02.01.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha

**182. Data Hasil Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha**

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
RAD Level 3	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI

183. Data Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-071
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

184. Data Hasil Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-072
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



184. Data Hasil Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Rekomendasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual / Merk
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

185. Data Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-073
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



186. Data Hasil Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-074
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendaftaran Sertifikasi SPP-IRT
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

187. Data Pendaftaran Sertifikasi Halal

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-075
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendaftaran Sertifikasi Halal, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Sertifikasi Halal serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendaftaran Sertifikasi Halal
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendaftaran Sertifikasi Halal
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendaftaran Sertifikasi Halal



187. Data Pendaftaran Sertifikasi Halal

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

188. Data Hasil Pendaftaran Sertifikasi Halal

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-076
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pendaftaran Sertifikasi Halal, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Sertifikasi Halal serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendaftaran Sertifikasi Halal
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendaftaran Sertifikasi Halal
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendaftaran Sertifikasi Halal
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

189. Data Rekomendasi HALAL

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-077
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi HALAL, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi HALAL serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD



189. Data Rekomendasi HALAL

Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi HALAL
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekomendasi HALAL
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Rekomendasi HALAL
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

190. Data Hasil Rekomendasi HALAL

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-078
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Rekomendasi HALAL, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi HALAL serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi HALAL
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekomendasi HALAL
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Rekomendasi HALAL
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

191. Data Verifikasi Pertek (Perusahaan)

ID	SUMSEL-DAD.02.01.01-003



191. Data Verifikasi Pertek (Perusahaan)

Uraian Data	Data yang memuat informasi verifikasi Pertek (Perusahaan), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan verifikasi Pertek (Perusahaan) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Verifikasi Pertek (Perusahaan)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Verifikasi Pertek (Perusahaan)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Verifikasi Pertek (Perusahaan)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
RAD Level 3	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI

192. Data Hasil Verifikasi Pertek (Perusahaan)

ID	SUMSEL-DAD.02.01.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Verifikasi Pertek (Perusahaan), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan verifikasi Pertek (Perusahaan) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	16. DINAS PERINDUSTRIAN
Informasi Terkait (Input)	Data Verifikasi Pertek (Perusahaan)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Verifikasi Pertek (Perusahaan)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Verifikasi Pertek (Perusahaan)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI



192. Data Hasil Verifikasi Pertek (Perusahaan)

RAD Level 2	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
RAD Level 3	RAD.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI



17. DINAS PERPUSTAKAAN

40 entitas data

193. Data Pengunjung Anggota Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Anggota Perpustakaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam anggota Perpustakaan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Anggota Perpustakaan
Informasi Terkait (Output)	Data Kartu Anggota Perpustakaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Anggota Perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

194. Data Kartu Anggota Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kartu Anggota Perpustakaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam anggota Perpustakaan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Anggota Perpustakaan
Informasi Terkait (Output)	Data Kartu Anggota Perpustakaan



194. Data Kartu Anggota Perpustakaan

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Anggota Perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

195. Data Buku

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi buku, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perpustakaan Keliling serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Staf Bidang Layanan
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Buku
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Perpustakaan Keliling
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

196. Data Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perpustakaan Keliling serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



196. Data Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Staf Bidang Layanan
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Buku
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pengunjung Layanan Perpustakaan Keliling
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Perpustakaan Keliling
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

197. Data Statistik Peminjaman dan Pengembalian

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-005
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi statistik Peminjaman dan Pengembalian, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) perpustakaan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Statistik Peminjaman dan Pengembalian
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Buku Yang di Pinjam dan dikembalikan pemustaka
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI



198. Data Jumlah Buku Yang di Pinjam dan dikembalikan pemustaka

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-006
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Buku Yang di Pinjam dan dikembalikan pemustaka, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) perpustakaan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Statistik Peminjaman dan Pengembalian
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Buku Yang di Pinjam dan dikembalikan pemustaka
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

199. Data Pengunjung Membaca

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-007
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Membaca, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam membaca.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Membaca
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Membaca
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Membaca



199. Data Pengunjung Membaca

RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

200. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Membaca

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-008
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi buku yang Dibaca oleh Pemustaka Membaca, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam membaca.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Membaca
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Membaca
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Membaca
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

201. Data Sekolah/Publik Story Telling

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sekolah/Publik Story Telling, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam story Telling.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik



201. Data Sekolah/Publik Story Telling

Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Story Telling
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Story Telling
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Story Telling
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

202. Data Jumlah Kunjungan Story Telling

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Kunjungan Story Telling, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam story Telling.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Story Telling
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Story Telling
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Story Telling
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

203. Data Pengunjung Referensi

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-009



203. Data Pengunjung Referensi

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Referensi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam referensi.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Referensi
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Referensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Referensi
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

204. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Referensi

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-010
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi buku yang Dibaca oleh Pemustaka Referensi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam referensi.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Referensi
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Referensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Referensi
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA



204. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Referensi

RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

205. Data Pengunjung Perpustakaan Anak

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-011
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Perpustakaan Anak, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam perpustakaan Anak.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Perpustakaan Anak
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Perpustakaan Anak
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Perpustakaan Anak
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

206. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Perpustakaan Anak

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-012
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi buku yang Dibaca oleh Pemustaka Perpustakaan Anak, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam perpustakaan Anak.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN



206. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Perpustakaan Anak

Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Perpustakaan Anak
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Perpustakaan Anak
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Perpustakaan Anak
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

207. Data Sekolah/Publik Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-003
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sekolah/Publik Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi).
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

208. Data Jumlah Kunjungan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-004
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Kunjungan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi), bersifat terbatas.



208. Data Jumlah Kunjungan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)

Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi).
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Multimedia/ Bioskop Mini (Pemutaran Film Edukasi)
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

209. Data Pengunjung Internet

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-013
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Internet, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam internet.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Internet
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pengunjung
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Internet
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN



209. Data Pengunjung Internet

RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

210. Data Jumlah Pengunjung

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-014
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Pengunjung, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam internet.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Internet
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pengunjung
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Internet
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

211. Data Peminjaman

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-015
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi peminjaman, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam peminjaman Ruang Diskusi.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman



211. Data Peminjaman

Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pinjaman
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Peminjaman Ruang Diskusi
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

212. Data Jumlah Pinjaman

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-016
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Pinjaman, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam peminjaman Ruang Diskusi.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pinjaman
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Peminjaman Ruang Diskusi
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

213. Data Sekolah/Publik Kunjungan Edukasi Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-005
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sekolah/Publik Kunjungan Edukasi Perpustakaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Edukasi Perpustakaan.

213. Data Sekolah/Publik Kunjungan Edukasi Perpustakaan

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Kunjungan Edukasi Perpustakaan
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Edukasi Perpustakaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Kunjungan Edukasi Perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

214. Data Jumlah Kunjungan Edukasi Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-006
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Kunjungan Edukasi Perpustakaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Edukasi Perpustakaan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Kunjungan Edukasi Perpustakaan
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Edukasi Perpustakaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Kunjungan Edukasi Perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

215. Data Sekolah/Publik Bimbingan Pemustaka

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-007
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sekolah/Publik Bimbingan Pemustaka, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam bimbingan Pemustaka.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Bimbingan Pemustaka
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Bimbingan Pemustaka
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Bimbingan Pemustaka
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

216. Data Jumlah Kunjungan Bimbingan Pemustaka

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-008
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Kunjungan Bimbingan Pemustaka, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam bimbingan Pemustaka.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Bimbingan Pemustaka
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Bimbingan Pemustaka
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan



216. Data Jumlah Kunjungan Bimbingan Pemustaka

Layanan	Layanan Bimbingan Pemustaka
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

217. Data Pengunjung Diary Sumsel (Elektronik-Book)

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-017
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Diary Sumsel (Elektronik-Book), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam diary Sumsel (Elektronik-Book).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Diary Sumsel (Elektronik-Book)
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Diary Sumsel (Elektronik-Book)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Diary Sumsel (Elektronik-Book)
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

218. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Diary Sumsel (Elektronik-Book)

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-018
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi buku yang Dibaca oleh Pemustaka Diary Sumsel (Elektronik-Book), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam diary Sumsel (Elektronik-Book).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian



218. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Diary Sumsel (Elektronik-Book)

Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Diary Sumsel (Elektronik-Book)
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Diary Sumsel (Elektronik-Book)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Diary Sumsel (Elektronik-Book)
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

219. Data Pengunjung Pojok Baca Digital/Publik

ID	SUMSEL-DAD.09.03.03-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Pojok Baca Digital/Publik, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pojok Baca Digital/Publik.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Pojok Baca Digital/Publik
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Pojok Baca Digital/Publik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Pojok Baca Digital/Publik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



220. Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Pojok Baca Digital/Publik

ID	SUMSEL-DAD.09.03.03-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi buku yang Dibaca oleh Pemustaka Pojok Baca Digital/Publik, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pojok Baca Digital/Publik.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Pojok Baca Digital/Publik
Informasi Terkait (Output)	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Pojok Baca Digital/Publik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Pojok Baca Digital/Publik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

221. Data MOU/PKS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-079
Uraian Data	Data yang memuat informasi mOU/PKS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kerjasama Perpustakaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Satuan OPD atau yang terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data MOU/PKS
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Kerjasama Perpustakaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Kerjasama Perpustakaan

**221. Data MOU/PKS**

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

222. Data Hasil Kerjasama Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-080
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Kerjasama Perpustakaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kerjasama Perpustakaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Satuan OPD atau yang terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data MOU/PKS
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Kerjasama Perpustakaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Kerjasama Perpustakaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

223. Data Pengunjung Bagi Kelompok Rentan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-019
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengunjung Bagi Kelompok Rentan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam bagi Kelompok Rentan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat

**223. Data Pengunjung Bagi Kelompok Rentan**

Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Bagi Kelompok Rentan
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pengunjung Kelompok Rentan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Bagi Kelompok Rentan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

224. Data Jumlah Pengunjung Kelompok Rentan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-020
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Pengunjung Kelompok Rentan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam bagi Kelompok Rentan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Bagi Kelompok Rentan
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Pengunjung Kelompok Rentan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Bagi Kelompok Rentan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

225. Data Sekolah/Publik Kelas Asik Bahasa Isyarat

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-009



225. Data Sekolah/Publik Kelas Asik Bahasa Isyarat

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sekolah/Publik Kelas Asik Bahasa Isyarat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kelas Asik Bahasa Isyarat.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Kelas Asik Bahasa Isyarat
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Kelas Asik Bahasa Isyarat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Kelas Asik Bahasa Isyarat
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

226. Data Jumlah Kunjungan Kelas Asik Bahasa Isyarat

ID	SUMSEL-DAD.08.02.06-010
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Kunjungan Kelas Asik Bahasa Isyarat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kelas Asik Bahasa Isyarat.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah/Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sekolah/Publik Kelas Asik Bahasa Isyarat
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Kelas Asik Bahasa Isyarat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Layanan	Layanan Kelas Asik Bahasa Isyarat
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA



226. Data Jumlah Kunjungan Kelas Asik Bahasa Isyarat

RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.06 PENINGKATAN KUALITAS PERPUSTAKAAN

227. Data Pengunjung Deposit

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-021
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengunjung Deposit, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan deposit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah dan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Deposit
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Deposit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Deposit
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

228. Data Jumlah Kunjungan Deposit

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-022
Uraian Data	Data yang memuat informasi jumlah Kunjungan Deposit, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan deposit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah dan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN



228. Data Jumlah Kunjungan Deposit

Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Deposit
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah Kunjungan Deposit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Deposit
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

229. Data Pengunjung Galeri Naskah Kuno dan Alih Media

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-023
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengunjung Galeri Naskah Kuno dan Alih Media, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan galeri Naskah Kuno dan Alih Media serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Sekolah dan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Galeri Naskah Kuno dan Alih Media
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah pengunjung di galeri naskah kuno
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Galeri Naskah Kuno dan Alih Media
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

230. Data Jumlah pengunjung di galeri naskah kuno

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-024
Uraian Data	Data yang memuat informasi jumlah pengunjung di galeri naskah kuno, bersifat terbatas.



230. Data Jumlah pengunjung di galeri naskah kuno

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan galeri Naskah Kuno dan Alih Media serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Sekolah dan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Galeri Naskah Kuno dan Alih Media
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah pengunjung di galeri naskah kuno
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Galeri Naskah Kuno dan Alih Media
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

231. Data Pengunjung Perbaikan Bahan Perpustakaan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-025
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengunjung Perbaikan Bahan Perpustakaan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan Bahan Perpustakaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah dan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Perbaikan Bahan Perpustakaan
Informasi Terkait (Output)	Data Peserta yang di latih cara perawatan bahan perpustakaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Perbaikan Bahan Perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN

**231. Data Pengunjung Perbaikan Bahan Perpustakaan**

RAD Level 3

RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI

232. Data Peserta yang di latih cara perawatan bahan perpustakaan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.05-026
Uraian Data	Data yang memuat informasi peserta yang di latih cara perawatan bahan perpustakaan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan perbaikan Bahan Perpustakaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Sekolah dan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengunjung Perbaikan Bahan Perpustakaan
Informasi Terkait (Output)	Data Peserta yang di latih cara perawatan bahan perpustakaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Perbaikan Bahan Perpustakaan
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.05 PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN AKSES INFORMASI



18. INSPEKTORAT DAERAH

18 entitas data

233. Data Permohonan Informasi Publik

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Informasi Publik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Informasi Publik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Informasi Publik
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Informasi Publik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Permohonan Informasi Publik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

234. Data Hasil Permohonan Informasi Publik

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Informasi Publik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Informasi Publik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Informasi Publik
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Informasi Publik

**234. Data Hasil Permohonan Informasi Publik**

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Permohonan Informasi Publik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

235. Data Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

236. Data Hasil Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



236. Data Hasil Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Fasilitas Pelaporan LHKPN dan LHKAN
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

237. Data Pelaksanaan Audit

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelaksanaan Audit, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaksanaan Audit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaksanaan Audit
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pelaksanaan Audit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Pelaksanaan Audit
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA



238. Data Hasil Pelaksanaan Audit

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pelaksanaan Audit, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaksanaan Audit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaksanaan Audit
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pelaksanaan Audit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Pelaksanaan Audit
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

239. Data Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan



239. Data Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

240. Data Hasil Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

241. Data Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelaporan dan Penanganan Gratifikasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaporan dan Penanganan Gratifikasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD



241. Data Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi

Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

242. Data Hasil Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaporan dan Penanganan Gratifikasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Pelaporan dan Penanganan Gratifikasi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

243. Data Permohonan Penelitian Ijazah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-011



243. Data Permohonan Penelitian Ijazah

Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Penelitian Ijazah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Penelitian Ijazah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Penelitian Ijazah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Penelitian Ijazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Permohonan Penelitian Ijazah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

244. Data Hasil Permohonan Penelitian Ijazah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Penelitian Ijazah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Penelitian Ijazah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Penelitian Ijazah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Penelitian Ijazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Permohonan Penelitian Ijazah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



244. Data Hasil Permohonan Penelitian Ijazah

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

245. Data Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-013
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

246. Data Hasil Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-014
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH



246. Data Hasil Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa

Informasi Terkait (Input)	Data Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Pelaksanaan Probit Audit Pengadaan Barang/Jasa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

247. Data Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-015
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

248. Data Hasil Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-016
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersifat terbatas.



248. Data Hasil Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Permohonan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

249. Data Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-017
Uraian Data	Data yang memuat informasi penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA



249. Data Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System

RAD Level 3

RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

250. Data Hasil Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-018
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	18. INSPEKTORAT DAERAH
Informasi Terkait (Input)	Data Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Layanan	Layanan Penanganan Aduan Melalui Whistleblowing System
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA



19. BADAN KESBANGPOL

5 entitas data

251. Data Pengajuan Surat Izin Penelitian

ID	SUMSEL-DAD.05.02.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Surat Izin Penelitian, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan surat Keterangan Penelitian serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Mahasiswa Penelitian
Penanggung Jawab / Wali Data	19. BADAN KESBANGPOL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Surat Izin Penelitian
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Penelitian
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Layanan	Layanan Surat Keterangan Penelitian
RAD Level 1	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAD Level 2	RAD.05.02 DATA KEAMANAN
RAD Level 3	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

252. Data Surat Izin Penelitian

ID	SUMSEL-DAD.05.02.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Penelitian, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan surat Keterangan Penelitian serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Mahasiswa Penelitian
Penanggung Jawab / Wali Data	19. BADAN KESBANGPOL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Surat Izin Penelitian
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Penelitian



252. Data Surat Izin Penelitian

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Layanan	Layanan Surat Keterangan Penelitian
RAD Level 1	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAD Level 2	RAD.05.02 DATA KEAMANAN
RAD Level 3	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

253. Data Pengajuan pendaftaran Ormas

ID	SUMSEL-DAD.05.02.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan pendaftaran Ormas, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Organisasi Masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat yang akan mendaftar Ormas
Penanggung Jawab / Wali Data	19. BADAN KESBANGPOL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan pendaftaran Ormas
Informasi Terkait (Output)	Data Pendaftaran Ormas
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Layanan	Layanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat
RAD Level 1	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAD Level 2	RAD.05.02 DATA KEAMANAN
RAD Level 3	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

254. Data Pendaftaran Ormas

ID	SUMSEL-DAD.05.02.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendaftaran Ormas, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Organisasi Masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka



254. Data Pendaftaran Ormas

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat yang akan mendaftar Ormas
Penanggung Jawab / Wali Data	19. BADAN KESBANGPOL
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan pendaftaran Ormas
Informasi Terkait (Output)	Data Pendaftaran Ormas
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Layanan	Layanan Pendaftaran Organisasi Masyarakat
RAD Level 1	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAD Level 2	RAD.05.02 DATA KEAMANAN
RAD Level 3	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

255. Data Laporan Ormas

ID	SUMSEL-DAD.05.02.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Ormas, bersifat terbuka. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaporan Organisasi Masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Peserta Ormas
Penanggung Jawab / Wali Data	19. BADAN KESBANGPOL
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Ormas
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Layanan	Layanan Pelaporan Organisasi Masyarakat
RAD Level 1	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAD Level 2	RAD.05.02 DATA KEAMANAN
RAD Level 3	RAD.05.02.01 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUATAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BINGKRADE



Arsitektur Pemerintah Digital





2. Badan Pendapatan

4 entitas data

256. Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)

ID	SUMSEL-DAD.09.02.03-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kepolisian RI
Penanggung Jawab / Wali Data	2. Badan Pendapatan
Informasi Terkait (Input)	Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Layanan	Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

257. Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)

ID	SUMSEL-DAD.09.02.03-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kepolisian RI
Penanggung Jawab / Wali Data	2. Badan Pendapatan
Informasi Terkait (Input)	Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)



257. Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)

Informasi Terkait (Output)	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Layanan	Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

258. Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

ID	SUMSEL-DAD.09.02.03-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kepolisian RI
Penanggung Jawab / Wali Data	2. Badan Pendapatan
Informasi Terkait (Input)	Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Layanan	Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

259. Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

ID	SUMSEL-DAD.09.02.03-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, bersifat tertutup.



259. Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kepolisian RI
Penanggung Jawab / Wali Data	2. Badan Pendapatan
Informasi Terkait (Input)	Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Layanan	Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA



20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

6 entitas data

260. Data Perencanaan Gladi Kesiapsiagaan

ID	SUMSEL-DAD.04.02.06-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi perencanaan Gladi Kesiapsiagaan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan gladi Kesiapsiagaan bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	BPBD PROV. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Informasi Terkait (Input)	Data Perencanaan Gladi Kesiapsiagaan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Apel dan Simulasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Layanan	Layanan Gladi Kesiapsiagaan bencana
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

261. Data Laporan Apel dan Simulasi

ID	SUMSEL-DAD.04.02.06-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Apel dan Simulasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan gladi Kesiapsiagaan bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	BPBD PROV. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Informasi Terkait (Input)	Data Perencanaan Gladi Kesiapsiagaan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Apel dan Simulasi



261. Data Laporan Apel dan Simulasi

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Layanan	Layanan Gladi Kesiapsiagaan bencana
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

262. Data Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana (Sumber Kajian Risiko Bencana)

ID	SUMSEL-DAD.04.02.06-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana (Sumber Kajian Risiko Bencana), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan komunikasi, Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	BPBD PROV. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Informasi Terkait (Input)	Data Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana (Sumber Kajian Risiko Bencana)
Informasi Terkait (Output)	Data Papan Informasi, Sekolah Tangguh Bencana
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Layanan	Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

263. Data Papan Informasi, Sekolah Tangguh Bencana

ID	SUMSEL-DAD.04.02.06-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi papan Informasi, Sekolah Tangguh Bencana, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan komunikasi, Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka



263. Data Papan Informasi, Sekolah Tangguh Bencana

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	BPBD PROV. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Informasi Terkait (Input)	Data Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana (Sumber Kajian Risiko Bencana)
Informasi Terkait (Output)	Data Papan Informasi, Sekolah Tangguh Bencana
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Layanan	Layanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Daerah Rawan Bencana
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.02 DATA SOSIAL
RAD Level 3	RAD.04.02.06 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

264. Data Kejadian Bencana

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-081
Uraian Data	Data yang memuat informasi kejadian Bencana, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan respon Cepat Penanganan Darurat Bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	BPBD PROV. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
Informasi Terkait (Input)	Data Kejadian Bencana
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kejadian Bencana
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Layanan	Layanan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



265. Data Laporan Kejadian Bencana

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-082
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Kejadian Bencana, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan respon Cepat Penanganan Darurat Bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	BPBD PROV. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kejadian Bencana
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kejadian Bencana
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Layanan	Layanan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



21. BADAN PENGHUBUNG

10 entitas data

266. Data Pemohon Peminjaman Ruang Rapat

ID	SUMSEL-DAD.09.07.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pemohon Peminjaman Ruang Rapat, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peminjaman Ruang Rapat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Pemohon Peminjaman Ruang Rapat
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Peminjaman
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Peminjaman Ruang Rapat
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

267. Data Surat Izin Peminjaman

ID	SUMSEL-DAD.09.07.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Peminjaman, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peminjaman Ruang Rapat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Pemohon Peminjaman Ruang Rapat
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Peminjaman



267. Data Surat Izin Peminjaman

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Peminjaman Ruang Rapat
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

268. Data Pejabat

ID	SUMSEL-DAD.09.07.05-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pejabat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Keprotokolan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Pejabat
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Fasilitasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Layanan	Layanan Fasilitasi Keprotokolan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN

269. Data Laporan Fasilitasi

ID	SUMSEL-DAD.09.07.05-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Fasilitasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Keprotokolan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



269. Data Laporan Fasilitas

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Pejabat
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Fasilitas
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Layanan	Layanan Fasilitas Keptokolan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAH TANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN

270. Data Kunjungan

ID	SUMSEL-DAD.09.07.03-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi kunjungan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Kunjungan Kerja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Kunjungan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kunjungan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI



271. Data Laporan Kunjungan

ID	SUMSEL-DAD.09.07.03-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Kunjungan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Kunjungan Kerja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Kunjungan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kunjungan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitasi Kunjungan Kerja
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

272. Data Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu

ID	SUMSEL-DAD.09.07.05-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu
Interoperabilitas	Tidak



272. Data Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu

Proses Bisnis	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Layanan	Layanan Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN

273. Data Hasil Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu

ID	SUMSEL-DAD.09.07.05-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Layanan	Layanan Penerimaan Tamu dan Penyediaan Jamuan Tamu
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN

274. Data Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD

ID	SUMSEL-DAD.09.07.03-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Kunjungan Kerja DPRD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Kunjungan Kerja DPRD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



274. Data Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

275. Data Hasil Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD

ID	SUMSEL-DAD.09.07.03-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Kunjungan Kerja DPRD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Pemohon
Penanggung Jawab / Wali Data	21. BADAN PENGHUBUNG
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja DPRD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUATAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BINGKRADE



Arsitektur Pemerintah Digital





22. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUN

2 entitas data

276. Data Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-031
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	22. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

277. Data Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-032
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	22. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah



277. Data Hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pendampingan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN



23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA

6 entitas data

278. Data Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Humas dan Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan
Informasi Terkait (Output)	Data Jadwal Acara Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Keprotokolan/kunjungan kerja pimpinan tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

279. Data Jadwal Acara Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi jadwal Acara Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Humas dan Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan
Informasi Terkait (Output)	Data Jadwal Acara Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan

279. Data Jadwal Acara Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Keprotokolan/kunjungan kerja pimpinan tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Fasilitas Kunjungan Kerja Pimpinan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

280. Data Permohonan Audiensi

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Audiensi, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Audiensi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Biro Humas dan Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Audiensi
Informasi Terkait (Output)	Data Jadwal Acara Permohonan Audiensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Audiensi/keprotokolan tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Permohonan Audiensi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

281. Data Jadwal Acara Permohonan Audiensi

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi jadwal Acara Permohonan Audiensi, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Audiensi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup



281. Data Jadwal Acara Permohonan Audiensi

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Biro Humas dan Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Audiensi
Informasi Terkait (Output)	Data Jadwal Acara Permohonan Audiensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Audiensi/keprotokolan tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Permohonan Audiensi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

282. Data Fasilitas Petugas acara

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Petugas acara, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Petugas acara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Biro Humas dan Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Petugas acara
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan hasil pelaksanaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Petugas acara/keprotokolan tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Fasilitas Petugas acara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

283. Data Laporan hasil pelaksanaan

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan hasil pelaksanaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Petugas acara serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Biro Humas dan Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	23. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitasi Petugas acara
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan hasil pelaksanaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Petugas acara/keprotokolan tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Fasilitasi Petugas acara
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



24. BIRO HUKUM DAN HAM SETDA

2 entitas data

284. Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

ID	SUMSEL-DAD.05.01.02-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
Penanggung Jawab / Wali Data	24. BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Informasi Terkait (Output)	Data Produk hukum (Perda, Pergub dan SK Provinsi)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Layanan	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
RAD Level 1	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAD Level 2	RAD.05.01 DATA HUKUM
RAD Level 3	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM

285. Data Produk hukum (Perda, Pergub dan SK Provinsi)

ID	SUMSEL-DAD.05.01.02-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi produk hukum (Perda, Pergub dan SK Provinsi), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
Penanggung Jawab / Wali Data	24. BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Informasi Terkait (Output)	Data Produk hukum (Perda, Pergub dan SK Provinsi)



285. Data Produk hukum (Perda, Pergub dan SK Provinsi)

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Layanan	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
RAD Level 1	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN
RAD Level 2	RAD.05.01 DATA HUKUM
RAD Level 3	RAD.05.01.02 ADMINISTRASI HUKUM UMUM



25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S

8 entitas data

286. Data Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-083
Uraian Data	Data yang memuat informasi seleksi Petugas Haji Daerah (PHD), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S
Informasi Terkait (Input)	Data Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Layanan	Layanan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

287. Data Hasil Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-084
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S
Informasi Terkait (Input)	Data Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)



287. Data Hasil Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Layanan	Layanan Seleksi Petugas Haji Daerah (PHD)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

288. Data Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, BKPRMI, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S
Informasi Terkait (Input)	Data Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, Bkprmi, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, BKPRMI, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN

289. Data Hasil Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, Bkprmi, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, Bkprmi, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess), bersifat terbatas.



289. Data Hasil Hibah Organisasi/lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, Bkprmi, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess)

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, BKPRMI, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S
Informasi Terkait (Input)	Data Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Hibah Organisasi/lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, Bkprmi, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Hibah Organisasi/Lembaga Keagamaan (MUI, LPTQ, Muhammadiyah, Baznas, BKPRMI, Lpppesparawi, Lpppersarani, Muslimat NU, Forpess)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN

290. Data Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-085
Uraian Data	Data yang memuat informasi honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S
Informasi Terkait (Input)	Data Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Layanan	Layanan Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



290. Data Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

291. Data Hasil Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-086
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S
Informasi Terkait (Input)	Data Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
Layanan	Layanan Honorarium Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

292. Data Bantuan Operasional Pondok Pesantren

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-087
Uraian Data	Data yang memuat informasi bantuan Operasional Pondok Pesantren, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Operasional Pondok Pesantren serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S

292. Data Bantuan Operasional Pondok Pesantren

Informasi Terkait (Input)	Data Bantuan Operasional Pondok Pesantren
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Bantuan Operasional Pondok Pesantren
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Layanan	Layanan Bantuan Operasional Pondok Pesantren
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

293. Data Hasil Bantuan Operasional Pondok Pesantren

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-088
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Bantuan Operasional Pondok Pesantren, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Operasional Pondok Pesantren serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	25. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT S
Informasi Terkait (Input)	Data Bantuan Operasional Pondok Pesantren
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Bantuan Operasional Pondok Pesantren
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Layanan	Layanan Bantuan Operasional Pondok Pesantren
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



26. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONO

2 entitas data

294. Data Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	26. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONO
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

295. Data Hasil Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	26. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONO
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah



295. Data Hasil Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitasi Penyusunan Naskah Kerja Sama Daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



27. BIRO PEREKONOMIAN SETDA

2 entitas data

296. Data Penyampaian Data dan Informasi

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penyampaian Data dan Informasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyampaian Data dan Informasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kepala Bagian Sarana Perkonomian
Penanggung Jawab / Wali Data	27. BIRO PEREKONOMIAN SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Penyampaian Data dan Informasi
Informasi Terkait (Output)	Data Format terlampir dari pemohon terkait data yang diminta
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Penyampaian Data dan Informasi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

297. Data Format terlampir dari pemohon terkait data yang diminta

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi format terlampir dari pemohon terkait data yang diminta, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyampaian Data dan Informasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kepala Bagian Sarana Perkonomian
Penanggung Jawab / Wali Data	27. BIRO PEREKONOMIAN SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Penyampaian Data dan Informasi
Informasi Terkait (Output)	Data Format terlampir dari pemohon terkait data yang diminta



297. Data Format terlampir dari pemohon terkait data yang diminta

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Penyampaian Data dan Informasi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



28. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN

4 entitas data

298. Data Agenda Harian Dari Biro Humas Dan Protokol	
ID	SUMSEL-DAD.09.07.03-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi agenda Harian Dari Biro Humas Dan Protokol, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Umum Dan Perlengkapan
Penanggung Jawab / Wali Data	28. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
Informasi Terkait (Input)	Data Agenda Harian Dari Biro Humas Dan Protokol
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Layanan	Layanan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

299. Data Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan	
ID	SUMSEL-DAD.09.07.03-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Umum Dan Perlengkapan
Penanggung Jawab / Wali Data	28. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
Informasi Terkait (Input)	Data Agenda Harian Dari Biro Humas Dan Protokol



299. Data Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan

Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Layanan	Layanan Fasilitasi Kunjungan Kerja Pimpinan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.03 PENYELENGGARAAN KOORDINASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI DAN PENANGANAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

300. Data Agenda Harian Dari Biro Umum Dan Perlengkapan

ID	SUMSEL-DAD.09.07.05-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi agenda Harian Dari Biro Umum Dan Perlengkapan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Umum Dan Perlengkapan
Penanggung Jawab / Wali Data	28. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
Informasi Terkait (Input)	Data Agenda Harian Dari Biro Umum Dan Perlengkapan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kegiatan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu Pimpinan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Penerimaan tamu & jamuan (kerumahtanggaan) tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN

301. Data Laporan Kegiatan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu Pimpinan

ID	SUMSEL-DAD.09.07.05-006



301. Data Laporan Kegiatan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu Pimpinan

Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Kegiatan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu Pimpinan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Umum Dan Perlengkapan
Penanggung Jawab / Wali Data	28. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
Informasi Terkait (Input)	Data Agenda Harian Dari Biro Umum Dan Perlengkapan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kegiatan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu Pimpinan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Penerimaan tamu & jamuan (kerumahtanggaan) tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Penerimaan Tamu Dan Penyediaan Jamuan Tamu
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI DUKUNGAN KERUMAHTANGGAAN, KEPROTOKOLAN, PERS MEDIA, DOKUMENTASI DAN DISEMINASI INFORMASI, SERTA KOORDINASI PENGAMANAN



29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

10 entitas data

302. Data Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

303. Data Hasil Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat

303. Data Hasil Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah untuk Kelompok Masyarakat
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

304. Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

305. Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu), bersifat terbatas.



305. Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Iuptlu)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

306. Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)

306. Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)

RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

307. Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (Iuptls)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

308. Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya

**308. Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)**

Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU

309. Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)

ID	SUMSEL-DAD.07.02.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan Aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah
Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis / Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Iujptl)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.02 DATA ENERGI
RAD Level 3	RAD.07.02.01 PENGELOLAAN ENERGI BARU



310. Data Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-089
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

311. Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-090
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	29. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah



panrb
KEMENTERIAN
PENATAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital



311. Data Hasil Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Layanan	Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Wilayah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



3. Badan Riset Daerah

8 entitas data

312. Data Pengajuan HKI

ID	SUMSEL-DAD.06.03.03-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan HKI, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan hak Kekayaan Intelektual serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Analisis Pemanfaatan IPTEK
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan HKI
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keputusan (SK) HKI
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Layanan	Layanan Hak Kekayaan Intelektual
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAD Level 3	RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI

313. Data Surat Keputusan (SK) HKI

ID	SUMSEL-DAD.06.03.03-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keputusan (SK) HKI, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan hak Kekayaan Intelektual serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Analisis Pemanfaatan IPTEK
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan HKI
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keputusan (SK) HKI



313. Data Surat Keputusan (SK) HKI

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Layanan	Layanan Hak Kekayaan Intelektual
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAD Level 3	RAD.06.03.03 PENGUATAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI

314. Data Survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Wisata.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasi Jasa dan Informasi
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata
Informasi Terkait (Output)	Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Kunjungan Wisata
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

315. Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi perda Retribusi Kunjungan Wisata, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Wisata.
Sifat Data	Terbuka



315. Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata

Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasi Jasa dan Informasi
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata
Informasi Terkait (Output)	Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Kunjungan Wisata
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

316. Data Survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata Edukasi

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-003
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata Edukasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Wisata Edukasi.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasi Jasa dan Informasi
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata Edukasi
Informasi Terkait (Output)	Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata Edukasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan kunjungan Wisata Edukasi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA



317. Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata Edukasi

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-004
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi perda Retribusi Kunjungan Wisata Edukasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Wisata Edukasi.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasi Jasa dan Informasi
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata Edukasi
Informasi Terkait (Output)	Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata Edukasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan kunjungan Wisata Edukasi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

318. Data Pengajuan dari Pelaku Usaha

ID	SUMSEL-DAD.06.03.02-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan dari Pelaku Usaha, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan sterilisasi dan pengemasan Makanan Lokal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Analisis Pemanfaatan IPTEK
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan dari Pelaku Usaha
Informasi Terkait (Output)	Data Izin Edar Produk
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Layanan	Layanan Sterilisasi dan pengemasan Makanan Lokal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan



318. Data Pengajuan dari Pelaku Usaha

RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAD Level 3	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI

319. Data Izin Edar Produk

ID	SUMSEL-DAD.06.03.02-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Edar Produk, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan sterilisasi dan pengemasan Makanan Lokal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Analisis Pemanfaatan IPTEK
Penanggung Jawab / Wali Data	3. Badan Riset Daerah
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan dari Pelaku Usaha
Informasi Terkait (Output)	Data Izin Edar Produk
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Layanan	Layanan Sterilisasi dan pengemasan Makanan Lokal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
RAD Level 3	RAD.06.03.02 RISET DAN INOVASI



30. DINAS KEARSIPAN

2 entitas data

320. Data Peminjaman/pengkopian Arsip

ID	SUMSEL-DAD.09.06.06-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi peminjaman/pengkopian Arsip, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kearsipan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengelolaan Arsip
Penanggung Jawab / Wali Data	30. DINAS KEARSIPAN
Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman/pengkopian Arsip
Informasi Terkait (Output)	Data Peminjaman Arsip Statis
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Arsip Dinamis
Layanan	Layanan Kearsipan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

321. Data Peminjaman Arsip Statis

ID	SUMSEL-DAD.09.06.06-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi peminjaman Arsip Statis, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan kearsipan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengelolaan Arsip
Penanggung Jawab / Wali Data	30. DINAS KEARSIPAN
Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman/pengkopian Arsip
Informasi Terkait (Output)	Data Peminjaman Arsip Statis



321. Data Peminjaman Arsip Statis	
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Arsip Dinamis
Layanan	Layanan Kearsipan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN



31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI

20 entitas data

322. Data Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi data terkait kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

323. Data Rekapitulasi data terkait kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekapitulasi data terkait kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi data terkait kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif

**323. Data Rekapitulasi data terkait kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif**

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

324. Data Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah

ID	SUMSEL-DAD.08.02.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerjemah Bahasa Lokal/Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerjemah Bahasa Lokal/Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Varian Aksara Ulu
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

325. Data Rekapitulasi Varian Aksara Ulu

ID	SUMSEL-DAD.08.02.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekapitulasi Varian Aksara Ulu, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerjemah Bahasa Lokal/Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka



325. Data Rekapitulasi Varian Aksara Ulu

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Varian Aksara Ulu
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

326. Data Jumlah Kunjungan Museum yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel dan BPS Prov. Sumsel

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-007
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jumlah Kunjungan Museum yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel dan BPS Prov. Sumsel, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Museum/Lokasi Pariwisata.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Jumlah Kunjungan Museum yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel dan BPS Prov. Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Kunjungan Museum
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Kunjungan Museum/Lokasi Pariwisata
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA



327. Data Rekapitulasi Kunjungan Museum

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-008
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi rekapitulasi Kunjungan Museum, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kunjungan Museum/Lokasi Pariwisata.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Jumlah Kunjungan Museum yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel dan BPS Prov. Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Kunjungan Museum
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Kunjungan Museum/Lokasi Pariwisata
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

328. Data Informasi dan Edukasi tentang koleksi museum dan lokasi pariwisata

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi informasi dan Edukasi tentang koleksi museum dan lokasi pariwisata, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi dan Edukasi Budaya/Pariwisata serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Informasi dan Edukasi tentang koleksi museum dan lokasi pariwisata
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi jumlah koleksi museum dan data informasi museum/pariwisata
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Informasi dan Edukasi Budaya/Pariwisata



328. Data Informasi dan Edukasi tentang koleksi museum dan lokasi pariwisata

RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

329. Data Rekapitulasi jumlah koleksi museum dan data informasi museum/pariwisata

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekapitulasi jumlah koleksi museum dan data informasi museum/pariwisata, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi dan Edukasi Budaya/Pariwisata serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Informasi dan Edukasi tentang koleksi museum dan lokasi pariwisata
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi jumlah koleksi museum dan data informasi museum/pariwisata
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Informasi dan Edukasi Budaya/Pariwisata
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

330. Data Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemandu (Guide) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan



330. Data Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel

Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Pemandu (Guide)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

331. Data Rekapitulasi Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekapitulasi Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemandu (Guide) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Panduan (Guide) Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumsel
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Pemandu (Guide)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

332. Data Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-013



332. Data Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo

Uraian Data	Data yang memuat informasi penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo
Informasi Terkait (Output)	Data 1. Persetujuan/Izin Penyewaan Gedung Kesenian/gazebo;, 2. Perjanjian penggunaan gedung kesenian/gazebo
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

333. Data 1. Persetujuan/Izin Penyewaan Gedung Kesenian/gazebo;, 2. Perjanjian penggunaan gedung kesenian/gazebo

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-014
Uraian Data	Data yang memuat informasi 1. Persetujuan/Izin Penyewaan Gedung Kesenian/gazebo;, 2. Perjanjian penggunaan gedung kesenian/gazebo, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo
Informasi Terkait (Output)	Data 1. Persetujuan/Izin Penyewaan Gedung Kesenian/gazebo;, 2. Perjanjian penggunaan gedung kesenian/gazebo
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Penyewaan Gedung Kesenian/Gazebo
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI



333. Data 1. Persetujuan/Izin Penyewaan Gedung Kesenian/gazebo,, 2. Perjanjian penggunaan gedung kesenian/gazebo

RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

334. Data Pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-091
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya
Informasi Terkait (Output)	Data • Surat keputusan penetapan cagar budaya, atau, • Surat keterangan hasil kajian (diterima/ditolak/ditunda), • Data objek yang terdaftar dalam sistem registrasi cagar budaya
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

335. Data • Surat keputusan penetapan cagar budaya, atau, • Surat keterangan hasil kajian (diterima/ditolak/ditunda), • Data objek yang terdaftar dalam sistem registrasi cagar budaya

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-092
Uraian Data	Data yang memuat informasi • Surat keputusan penetapan cagar budaya, atau, • Surat keterangan hasil kajian (diterima/ditolak/ditunda), • Data objek yang terdaftar dalam sistem registrasi cagar budaya, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



335. Data • Surat keputusan penetapan cagar budaya, atau, • Surat keterangan hasil kajian (diterima/ditolak/ditunda), • Data objek yang terdaftar dalam sistem registrasi cagar budaya

Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya
Informasi Terkait (Output)	Data • Surat keputusan penetapan cagar budaya, atau, • Surat keterangan hasil kajian (diterima/ditolak/ditunda), • Data objek yang terdaftar dalam sistem registrasi cagar budaya
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Pengajuan Pendaftaran Cagar Budaya
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

336. Data Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah

ID	SUMSEL-DAD.08.02.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata prov. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar daerah dan Surat penolakan disertai alasan yang jelas
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Pengajuan Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN



337. Data Surat Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar daerah dan Surat penolakan disertai alasan yang jelas

ID	SUMSEL-DAD.08.02.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar daerah dan Surat penolakan disertai alasan yang jelas, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata prov. Sumsel
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar daerah dan Surat penolakan disertai alasan yang jelas
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Pengajuan Rekomendasi Pementasan Sanggar Seni ke Luar Daerah
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

338. Data Sanggar Kesenian

ID	SUMSEL-DAD.08.02.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi sanggar Kesenian, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Sanggar Kesenian
Informasi Terkait (Output)	Data • Surat keterangan terdaftar sanggar kesenian, atau, • Surat rekomendasi pendirian sanggar kesenian, atau, • Surat penolakan disertai alasan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Pengajuan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian



338. Data Sanggar Kesenian

RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

339. Data • Surat keterangan terdaftar sanggar kesenian, atau, • Surat rekomendasi pendirian sanggar kesenian, atau, • Surat penolakan disertai alasan

ID	SUMSEL-DAD.08.02.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi • Surat keterangan terdaftar sanggar kesenian, atau, • Surat rekomendasi pendirian sanggar kesenian, atau, • Surat penolakan disertai alasan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Sanggar Kesenian
Informasi Terkait (Output)	Data • Surat keterangan terdaftar sanggar kesenian, atau, • Surat rekomendasi pendirian sanggar kesenian, atau, • Surat penolakan disertai alasan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Layanan	Layanan Pengajuan Permohonan Pendirian Sanggar Kesenian
RAD Level 1	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA
RAD Level 2	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN
RAD Level 3	RAD.08.02.01 PENGELOLAAN PROGRAM KEBUDAYAAN

340. Data Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-015
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



340. Data Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

341. Data Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

ID	SUMSEL-DAD.02.11.01-016
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekapitulasi Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
Informasi Terkait (Output)	Data Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Layanan	Layanan Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
RAD Level 3	RAD.02.11.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA



32. DINAS KEHUTANAN

26 entitas data

342. Data Kawasan Hutan dan Informasi

ID	SUMSEL-DAD.07.03.06-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kawasan Hutan dan Informasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam data dan Informasi Kawasan Hutan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kawasan Hutan dan Informasi
Informasi Terkait (Output)	Data Statistik Kehutanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan Data dan Informasi Kawasan Hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

343. Data Statistik Kehutanan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.06-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi statistik Kehutanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam data dan Informasi Kawasan Hutan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kawasan Hutan dan Informasi
Informasi Terkait (Output)	Data Statistik Kehutanan

343. Data Statistik Kehutanan

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan Data dan Informasi Kawasan Hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

344. Data Kawasan Hutan Pengaduan Terkait Kehutanan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.06-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi kawasan Hutan Pengaduan Terkait Kehutanan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaduan terkait Kehutanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kawasan Hutan Pengaduan Terkait Kehutanan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan pengangan pengaduan kehutanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan Pengaduan terkait Kehutanan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

345. Data Laporan pengangan pengaduan kehutanan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan pengangan pengaduan kehutanan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaduan terkait Kehutanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



345. Data Laporan pengangan pengaduan kehutanan

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kawasan Hutan Pengaduan Terkait Kehutanan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan pengangan pengaduan kehutanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan Pengaduan terkait Kehutanan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

346. Data Pemantauan titik panas kebakaran hutan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.03-001
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi pemantauan titik panas kebakaran hutan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran didalam kawasan hutan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Seksi Pengendalian Kebakaran hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemantauan titik panas kebakaran hutan
Informasi Terkait (Output)	Data Lokasi titik panas
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Layanan	Layanan pengendalian dan penanggulangan kebakaran didalam kawasan hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



347. Data Lokasi titik panas

ID	SUMSEL-DAD.07.03.03-002
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi lokasi titik panas, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam pengendalian dan penanggulangan kebakaran didalam kawasan hutan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Seksi Pengendalian Kebakaran hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemantauan titik panas kebakaran hutan
Informasi Terkait (Output)	Data Lokasi titik panas
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
Layanan	Layanan pengendalian dan penanggulangan kebakaran didalam kawasan hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

348. Data Sebaran pembagian bibit

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi sebaran pembagian bibit, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembagian bibit pohon serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang PDAS RHL
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sebaran pembagian bibit
Informasi Terkait (Output)	Data Lokasi Penanaman Pembagian Bibit Pohon
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Pembagian bibit pohon



348. Data Sebaran pembagian bibit

RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

349. Data Lokasi Penanaman Pembagian Bibit Pohon

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi lokasi Penanaman Pembagian Bibit Pohon, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembagian bibit pohon serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang PDAS RHL
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sebaran pembagian bibit
Informasi Terkait (Output)	Data Lokasi Penanaman Pembagian Bibit Pohon
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Pembagian bibit pohon
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

350. Data Kelompok Tani Hutan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi kelompok Tani Hutan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan registrasi Kelompok Tani Hutan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat



350. Data Kelompok Tani Hutan

Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kelompok Tani Hutan
Informasi Terkait (Output)	Data Nomor registrasi Kelompok tani hutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Registrasi Kelompok Tani Hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

351. Data Nomor registrasi Kelompok tani hutan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi nomor registrasi Kelompok tani hutan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan registrasi Kelompok Tani Hutan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kelompok Tani Hutan
Informasi Terkait (Output)	Data Nomor registrasi Kelompok tani hutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Registrasi Kelompok Tani Hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

352. Data Arsip surat masuk/keluar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.06-003



352. Data Arsip surat masuk/keluar

Uraian Data	Data yang memuat informasi arsip surat masuk/keluar, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan proses surat-menyurat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbaagian Umum dan kepegawaian
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Arsip surat masuk/keluar
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen surat masuk/keluar
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Arsip Dinamis
Layanan	Layanan proses surat-menyurat
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

353. Data Dokumen surat masuk/keluar

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-093
Uraian Data	Data yang memuat informasi dokumen surat masuk/keluar, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan proses surat-menyurat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Subbaagian Umum dan kepegawaian
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Arsip surat masuk/keluar
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen surat masuk/keluar
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Arsip Dinamis
Layanan	Layanan proses surat-menyurat
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM

**353. Data Dokumen surat masuk/keluar**

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

354. Data Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Data Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial dari Dinas Kehutanan dan Balai Perhutanan Sosial

ID	SUMSEL-DAD.07.03.02-001
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Data Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial dari Dinas Kehutanan dan Balai Perhutanan Sosial, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam peningkatan Pengetahuan dan Akses Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Seksi Perhutanan Sosial Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Data Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial dari Dinas Kehutanan dan Balai Perhutanan Sosial
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi pengajuan Skema Perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
Layanan	Layanan Peningkatan Pengetahuan dan Akses Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

355. Data Rekomendasi pengajuan Skema Perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

ID	SUMSEL-DAD.07.03.02-002
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi rekomendasi pengajuan Skema Perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam peningkatan Pengetahuan dan Akses Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Realtime

355. Data Rekomendasi pengajuan Skema Perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Penghasil / Produsen Data	Seksi Perhutanan Sosial Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Data Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial dari Dinas Kehutanan dan Balai Perhutanan Sosial
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi pengajuan Skema Perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
Layanan	Layanan Peningkatan Pengetahuan dan Akses Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.02 PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

356. Data Kelompok PS (KPS) dan Data Kelompok PS (KUPS) di Sumsel

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-094
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kelompok PS (KPS) dan Data Kelompok PS (KUPS) di Sumsel, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam akses data dan informasi mengenai implementasi perhutanan sosial di provinsi sumsel.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kelompok PS (KPS) dan Data Kelompok PS (KUPS) di Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Statistik dan Data Tabular Kelompok PS baik itu KPS maupun KUPS
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan akses data dan informasi mengenai implementasi perhutanan sosial di provinsi sumsel
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



357. Data Statistik dan Data Tabular Kelompok PS baik itu KPS maupun KUPS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-095
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi statistik dan Data Tabular Kelompok PS baik itu KPS maupun KUPS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam akses data dan informasi mengenai implementasi perhutanan sosial di provinsi sumsel.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kelompok PS (KPS) dan Data Kelompok PS (KUPS) di Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Statistik dan Data Tabular Kelompok PS baik itu KPS maupun KUPS
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan akses data dan informasi mengenai implementasi perhutanan sosial di provinsi sumsel
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

358. Data Pemantauan titik panas dalam kawasan hutan Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.06-004
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi pemantauan titik panas dalam kawasan hutan Sumatera Selatan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Sipongi Kementerian Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemantauan titik panas dalam kawasan hutan Sumatera Selatan
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah titik Panas dan lokasi dalam kawasan hutan Sumatera Selatan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan



358. Data Pemantauan titik panas dalam kawasan hutan Sumatera Selatan

RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

359. Data Jumlah titik Panas dan lokasi dalam kawasan hutan Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.06-005
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi jumlah titik Panas dan lokasi dalam kawasan hutan Sumatera Selatan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Sipongi Kementerian Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemantauan titik panas dalam kawasan hutan Sumatera Selatan
Informasi Terkait (Output)	Data Jumlah titik Panas dan lokasi dalam kawasan hutan Sumatera Selatan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

360. Data Penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-096
Uraian Data	Data yang memuat informasi penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan



360. Data Penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif

Penghasil / Produsen Data	Dinas Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif
Informasi Terkait (Output)	Data Pemenang Tingkat Provisin Berdasarkan Kategori seperti penyuluh kehutanan, KTH, HKM, HA dan HD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

361. Data Pemenang Tingkat Provisin Berdasarkan Kategori seperti penyuluh kehutanan, KTH, HKM, HA dan HD

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-097
Uraian Data	Data yang memuat informasi pemenang Tingkat Provisin Berdasarkan Kategori seperti penyuluh kehutanan, KTH, HKM, HA dan HD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Kehutanan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif
Informasi Terkait (Output)	Data Pemenang Tingkat Provisin Berdasarkan Kategori seperti penyuluh kehutanan, KTH, HKM, HA dan HD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



362. Data Lokasi Penanaman Pendistribusian Bibit

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi lokasi Penanaman Pendistribusian Bibit, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendistribusian bibit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Bidang PDAS RHL
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Lokasi Penanaman Pendistribusian Bibit
Informasi Terkait (Output)	Data Rekap stok Bibit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Pendistribusian bibit
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

363. Data Rekap stok Bibit

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekap stok Bibit, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendistribusian bibit serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Bidang PDAS RHL
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Lokasi Penanaman Pendistribusian Bibit
Informasi Terkait (Output)	Data Rekap stok Bibit
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Pendistribusian bibit



363. Data Rekapitulasi stok Bibit

RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

364. Data Kerusakan Hutan dalam waktu 1 Bulan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.01-008
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kerusakan Hutan dalam waktu 1 Bulan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai ijin pengelolaan Hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kerusakan Hutan dalam waktu 1 Bulan
Informasi Terkait (Output)	Data Soft File Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.01 PERENCANAAN KEHUTANAN YANG BERKELANJUTAN

365. Data Soft File Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.03-003
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi soft File Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan



365. Data Soft File Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan

Penghasil / Produsen Data	Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai ijin pengelolaan Hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kerusakan Hutan dalam waktu 1 Bulan
Informasi Terkait (Output)	Data Soft File Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Layanan	Layanan Laporan Bulanan dari Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

366. Data Kerusakan Hutan yang saat itu terjadi

ID	SUMSEL-DAD.07.03.06-006
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kerusakan Hutan yang saat itu terjadi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laporan Insidentil terjadinya Kerusakan Hutan dalam kawasan Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan yang masuk dalam area ijin tersebut.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai ijin pengelolaan Hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kerusakan Hutan yang saat itu terjadi
Informasi Terkait (Output)	Data Soft File Laporan Insidentil dari Perusahaan, Organisasi atau lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan Laporan Insidentil terjadinya Kerusakan Hutan dalam kawasan Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan yang masuk dalam area ijin tersebut
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.06 PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

367. Data Soft File Laporan Insiden dari Perusahaan, Organisasi atau lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan

ID	SUMSEL-DAD.07.03.03-004
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi soft File Laporan Insiden dari Perusahaan, Organisasi atau lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laporan Insidentil terjadinya Kerusakan Hutan dalam kawasan Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan yang masuk dalam area ijin tersebut.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai ijin pengelolaan Hutan
Penanggung Jawab / Wali Data	32. DINAS KEHUTANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kerusakan Hutan yang saat itu terjadi
Informasi Terkait (Output)	Data Soft File Laporan Insiden dari Perusahaan, Organisasi atau lembaga, Data Statistik, koordinat dan luas kerusakan lahan jika terjadinya kerusakan hutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Layanan	Layanan Laporan Insidentil terjadinya Kerusakan Hutan dalam kawasan Perusahaan, Organisasi atau Lembaga yang mempunyai Izin Pengelolaan Hutan yang masuk dalam area ijin tersebut
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN
RAD Level 3	RAD.07.03.03 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN



33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

29 entitas data

368. Data Pengajuan SLO

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan SLO, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan e-SLO/HPK Kapal Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Fungsional Pengawas Perikanan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan SLO
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen Standar Laik Operasi (SLO)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan e-SLO/HPK Kapal Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

369. Data Dokumen Standar Laik Operasi (SLO)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi dokumen Standar Laik Operasi (SLO), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan e-SLO/HPK Kapal Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Fungsional Pengawas Perikanan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan SLO
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen Standar Laik Operasi (SLO)



369. Data Dokumen Standar Laik Operasi (SLO)

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan e-SLO/HPK Kapal Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

370. Data Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

371. Data Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka



371. Data Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

372. Data Permohonan Bantuan Sarana Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Bantuan Sarana Perikanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Bantuan Sarana Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Proposal Permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP



373. Data Proposal Permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi proposal Permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Bantuan Sarana Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Proposal Permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Permohonan Bantuan Sarana Perikanan (Kelompok Pengolahan dan Pemasaran)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

374. Data Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan, bersifat terbatas. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan



374. Data Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan

RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

375. Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Kimia

ID	SUMSEL-DAD.02.06.03-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Kimia, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan uji Kimia serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Kimia
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Hasil Uji Kimia
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Layanan	Layanan Uji Kimia
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

376. Data Sertifikat Hasil Uji Kimia

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Hasil Uji Kimia, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan uji Kimia serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan



376. Data Sertifikat Hasil Uji Kimia

Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Kimia
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Hasil Uji Kimia
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Layanan	Layanan Uji Kimia
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

377. Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Mikrobiologi

ID	SUMSEL-DAD.02.06.03-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Mikrobiologi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan uji Mikrobiologi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Mikrobiologi
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Hasil Uji Mikrobiologi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Layanan	Layanan Uji Mikrobiologi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN



378. Data Sertifikat Hasil Uji Mikrobiologi

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Hasil Uji Mikrobiologi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan uji Mikrobiologi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Mikrobiologi
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Hasil Uji Mikrobiologi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Layanan	Layanan Uji Mikrobiologi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

379. Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Organoleptik

ID	SUMSEL-DAD.02.06.03-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Organoleptik, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan uji Organoleptik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Organoleptik
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Hasil Uji Organoleptik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

**379. Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Organoleptik**

Layanan	Layanan Uji Organoleptik
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN

380. Data Sertifikat Hasil Uji Organoleptik

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Hasil Uji Organoleptik, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan uji Organoleptik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pengujian Produk Perikanan Uji Organoleptik
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Hasil Uji Organoleptik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
Layanan	Layanan Uji Organoleptik
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

381. Data Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengadaan Bantuan Kapal Perikanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengadaan Bantuan Kapal Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime



381. Data Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan

Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kapal Perikanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

382. Data Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kapal Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kapal Perikanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengadaan Bantuan Kapal Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Proposal Permohonan Bantuan Pengadaan Kapal Perikanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Pengadaan Bantuan Kapal Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

**383. Data Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap**

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-013
Uraian Data	Data yang memuat informasi bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Saprass Penangkapan Ikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

384. Data Bantuan Saprass Penangkapan Ikan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-014
Uraian Data	Data yang memuat informasi bantuan Saprass Penangkapan Ikan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Saprass Penangkapan Ikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap



384. Data Bantuan Sapras Penangkapan Ikan

RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

385. Data Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-015
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Surat Izin Usaha Perikanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

386. Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-016
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan



386. Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan
Informasi Terkait (Output)	Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

387. Data Pemilik dan pemohon (pelaku usaha)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-017
Uraian Data	Data yang memuat informasi pemilik dan pemohon (pelaku usaha), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Buku Kapal Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemilik dan pemohon (pelaku usaha)
Informasi Terkait (Output)	Data Buku Kapal Perikanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan Buku Kapal Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

388. Data Buku Kapal Perikanan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-018



388. Data Buku Kapal Perikanan

Uraian Data	Data yang memuat informasi buku Kapal Perikanan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Buku Kapal Perikanan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemilik dan pemohon (pelaku usaha)
Informasi Terkait (Output)	Data Buku Kapal Perikanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan Buku Kapal Perikanan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

389. Data Surat pernyataan bermaterai (pernyataan kebenaran data dan informasi)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-019
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat pernyataan bermaterai (pernyataan kebenaran data dan informasi), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Surat pernyataan bermaterai (pernyataan kebenaran data dan informasi)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Kapal Pengangkut IKAN (SIKPI)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI



389. Data Surat pernyataan bermaterai (pernyataan kebenaran data dan informasi)

RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

390. Data Surat Izin Kapal Pengangkut IKAN (SIKPI)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-020
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Kapal Pengangkut IKAN (SIKPI), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Surat pernyataan bermaterai (pernyataan kebenaran data dan informasi)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Kapal Pengangkut IKAN (SIKPI)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

391. Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-021
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



391. Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan

Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Penangkapan IKAN (SIPI)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

392. Data Surat Izin Penangkapan IKAN (SIPI)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-022
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Izin Penangkapan IKAN (SIPI), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha / Nelayan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Izin Penangkapan IKAN (SIPI)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Rekomendasi Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

393. Data Proposal bantuan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-023
Uraian Data	Data yang memuat informasi proposal bantuan, bersifat terbuka.



393. Data Proposal bantuan

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Proposal bantuan
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Sapras Pembudidayaan Ikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

394. Data Bantuan Sapras Pembudidayaan Ikan

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-024
Uraian Data	Data yang memuat informasi bantuan Sapras Pembudidayaan Ikan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Proposal bantuan
Informasi Terkait (Output)	Data Bantuan Sapras Pembudidayaan Ikan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN



394. Data Bantuan Sapras Pembudidayaan Ikan

RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

395. Data Penerbitan Sertifikat, Cara Budidaya Ikan Yang Baik

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-025
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Sertifikat, Cara Budidaya Ikan Yang Baik, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha/Pembudidaya Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Sertifikat, Cara Budidaya Ikan Yang Baik
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat, CARA Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

396. Data Sertifikat, CARA Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

ID	SUMSEL-DAD.02.06.01-026
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat, CARA Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Usaha/Pembudidaya Ikan
Penanggung Jawab / Wali Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Sertifikat, Cara Budidaya Ikan Yang Baik



396. Data Sertifikat, CARA Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat, CARA Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Layanan	Layanan Penerbitan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
RAD Level 3	RAD.02.06.01 PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP



34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

35 entitas data

397. Data Pelayanan Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Gawat Darurat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan gawat Darurat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Gawat Darurat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

398. Data Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Gawat Darurat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan gawat Darurat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Gawat Darurat

398. Data Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Gawat Darurat

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

399. Data Pelayanan Rawat jalan

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Rawat jalan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rawat Jalan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Rawat jalan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Rawat Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

400. Data Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Rawat Jalan

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pengobatannya Rawat Jalan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rawat Jalan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup



400. Data Hasil Pemeriksaan dan Tindakanlanjutan Pengobatannya Rawat Jalan

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Rawat jalan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pemeriksaan dan Tindakanlanjutan Pengobatannya Rawat Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

401. Data Pelayanan Laboratorium

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Laboratorium, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan laboratorium serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Laboratorium
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pemeriksaan laboratorium
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Laboratorium
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK



402. Data Hasil Pemeriksaan laboratorium

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pemeriksaan laboratorium, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan laboratorium serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Laboratorium
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pemeriksaan laboratorium
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Laboratorium
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

403. Data Pelayanan Farmasi

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Farmasi, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan farmasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Farmasi
Informasi Terkait (Output)	Data Obat yang telah di Proses/diracik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Farmasi

**403. Data Pelayanan Farmasi**

RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

404. Data Obat yang telah di Proses/diracik

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi obat yang telah di Proses/diracik, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan farmasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pemilik Hewan
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Farmasi
Informasi Terkait (Output)	Data Obat yang telah di Proses/diracik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Farmasi
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

405. Data Penjualan Semen Beku Sapi

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi penjualan Semen Beku Sapi, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penjualan Semen Beku serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Peternak



405. Data Penjualan Semen Beku Sapi

Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penjualan Semen Beku Sapi
Informasi Terkait (Output)	Data Semen Beku Sapi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Penjualan Semen Beku
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

406. Data Semen Beku Sapi

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi semen Beku Sapi, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penjualan Semen Beku serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Peternak
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penjualan Semen Beku Sapi
Informasi Terkait (Output)	Data Semen Beku Sapi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Penjualan Semen Beku
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

407. Data Pelayanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-003



407. Data Pelayanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Informasi Terkait (Output)	Data Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

408. Data Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi nomor Kontrol Veteriner (NKV), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Informasi Terkait (Output)	Data Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI



408. Data Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

409. Data Sertifikat Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)

ID	SUMSEL-DAD.02.03.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sertifikat Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat SPPB PSAT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

410. Data Sertifikat SPPB PSAT

ID	SUMSEL-DAD.02.03.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat SPPB PSAT, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)



410. Data Sertifikat SPPB PSAT

Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Sertifikat Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat SPPB PSAT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

411. Data Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, Produk dalam (PSAT PD)

ID	SUMSEL-DAD.02.03.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, Produk dalam (PSAT PD), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, Produk dalam (PSAT PD)
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

412. Data Sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD)

ID	SUMSEL-DAD.02.03.01-004

**412. Data Sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD)**

Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, Produk dalam (PSAT PD)
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

413. Data Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT

ID	SUMSEL-DAD.02.03.18-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI



413. Data Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT

RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

414. Data Sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT

ID	SUMSEL-DAD.02.03.18-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Izin Rumah Pengemasan PSAT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Rumah Pengemasan PSAT
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

415. Data Pelayanan, Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT

ID	SUMSEL-DAD.02.03.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan, Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN



415. Data Pelayanan, Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT

Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan, Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Sertifikat PRIMA 2 dan Prima 3 PSAT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

416. Data Sertifikat Sertifikat PRIMA 2 dan Prima 3 PSAT

ID	SUMSEL-DAD.02.03.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Sertifikat PRIMA 2 dan Prima 3 PSAT, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan, Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Sertifikat PRIMA 2 dan Prima 3 PSAT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penerbitan Sertifikat Prima 2 dan Prima 3 PSAT
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
RAD Level 3	RAD.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

417. Data Laporan Hasil Uji Penerimaan Sampel

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Penerimaan Sampel, bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).



417. Data Laporan Hasil Uji Penerimaan Sampel

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerimaan Sampel serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Penerimaan Sampel
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Penerimaan Sampel
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

418. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN

**418. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Pullorum)**

RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

419. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi HA-HI Avian Influenza)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

420. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN



420. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test)

Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Serologi Rose Bengal Test)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

421. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Parasitologi Feses)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Parasitologi Feses), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Feses) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Parasitologi Feses)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Feses)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

422. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Parasitologi Ulas Darah)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-009



422. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Parasitologi Ulas Darah)

Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Parasitologi Ulas Darah), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Ulas Darah) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Parasitologi Ulas Darah)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Parasitologi Ulas Darah)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

423. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Rabies melalui Saliva)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.04-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Rabies melalui Saliva), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Rabies Melalui Saliva) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Rabies melalui Saliva)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Veteriner (Uji Rabies Melalui Saliva)

**423. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Veteriner Rabies melalui Saliva)**

RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN

424. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Organoleptis)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Organoleptis), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Organoleptis) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Organoleptis)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Organoleptis)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

425. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Formalin)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Formalin), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Formalin) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan



425. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Formalin)

Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Formalin)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Formalin)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

426. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Borax)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Borax), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Borax) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Borax)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Borax)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK



427. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Cemar Microba/TPC)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-013
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Cemar Microba/TPC), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Cemar Microba/TPC) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Cemar Microba/TPC)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Cemar Microba/TPC)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

428. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Residu Antibiotik)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-014
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Residu Antibiotik), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Residu Antibiotik) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Residu Antibiotik)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

**428. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Residu Antibiotik)**

Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Residu Antibiotik)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

429. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Salmonella, Sp)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-015
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Salmonella, Sp), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Salmonella, Sp) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Salmonella, Sp)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Salmonella, Sp)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

430. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Escherechia Coli)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-016
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Escherechia Coli), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Escherechia coli) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya

**430. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Escherechia Coli)**

Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Escherechia Coli)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Escherechia coli)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK

431. Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Coliform)

ID	SUMSEL-DAD.02.05.01-017
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Coliform), bersifat tertutup. Pass-through (tidak menghasilkan data baru).
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Coliform) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Penanggung Jawab / Wali Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Hasil Uji Pengujian Laboratorium Kesmavet Mikrobiologi Coliform)
Informasi Terkait (Output)	—
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
Layanan	Layanan Pengujian Laboratorium Kesmavet (Uji Mikrobiologi Coliform)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN
RAD Level 3	RAD.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUATAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BINGKRADE



Arsitektur Pemerintah Digital





35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

14 entitas data

432. Data Laporan RAT

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi laporan RAT, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Gerakan Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan RAT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan Penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI

433. Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi sertifikat Nomor Induk Koperasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Gerakan Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan RAT
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi



433. Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan Penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI

434. Data Profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Tunggal

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-098
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Tunggal, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada data Tunggal UMKM.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Enumerator
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Tunggal
Informasi Terkait (Output)	Data UMKM Tunggal
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Pendataan/data tunggal UMKM tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Data Tunggal UMKM
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

435. Data UMKM Tunggal

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-099
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi uMKM Tunggal, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada data Tunggal UMKM.
Sifat Data	Terbatas



435. Data UMKM Tunggal

Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Enumerator
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Tunggal
Informasi Terkait (Output)	Data UMKM Tunggal
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD — Pendataan/data tunggal UMKM tidak ada di Probis-v1
Layanan	Layanan Data Tunggal UMKM
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

436. Data Profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Sultan Muda

ID	SUMSEL-DAD.02.10.02-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Sultan Muda, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada sultan Muda.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pemda dan Pegusaha UMKM
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Sultan Muda
Informasi Terkait (Output)	Data UMKM Sultan Muda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
Layanan	Layanan Sultan Muda
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAD Level 3	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH



437. Data UMKM Sultan Muda

ID	SUMSEL-DAD.02.10.02-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi UMKM Sultan Muda, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada sultan Muda.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pemda dan Pegusaha UMKM
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Sultan Muda
Informasi Terkait (Output)	Data UMKM Sultan Muda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
Layanan	Layanan Sultan Muda
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAD Level 3	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH

438. Data Fasilitas Legislasi UMKM

ID	SUMSEL-DAD.02.10.02-003
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi fasilitas Legislasi UMKM, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada fasilitas Legislasi UMKM.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Legislasi UMKM
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Legislasi UMKM
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan



438. Data Fasilitas Legislasi UMKM

Layanan	Layanan Fasilitas Legislasi UMKM
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAD Level 3	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH

439. Data Hasil Fasilitas Legislasi UMKM

ID	SUMSEL-DAD.02.10.02-004
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi hasil Fasilitas Legislasi UMKM, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada fasilitas Legislasi UMKM.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Legislasi UMKM
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Legislasi UMKM
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
Layanan	Layanan Fasilitas Legislasi UMKM
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH
RAD Level 3	RAD.02.10.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH

440. Data Profil Legalitas Koperasi Implementasi OSS

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-003
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi profil Legalitas Koperasi Implementasi OSS, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam implementasi OSS.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan



440. Data Profil Legalitas Koperasi Implementasi OSS

Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profil Legalitas Koperasi Implementasi OSS
Informasi Terkait (Output)	Data NIB, SIB, Sertifikat Standar
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan Implementasi OSS
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI

441. Data NIB, SIB, Sertifikat Standar

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-004
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi NIB, SIB, Sertifikat Standar, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam implementasi OSS.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profil Legalitas Koperasi Implementasi OSS
Informasi Terkait (Output)	Data NIB, SIB, Sertifikat Standar
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan Implementasi OSS
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI



442. Data Profil Legalitas Koperasi Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-005
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi profil Legalitas Koperasi Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pengembangan Aplikasi E-Pendampingan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profil Legalitas Koperasi Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
Informasi Terkait (Output)	Data NIB, SIB Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI

443. Data NIB, SIB Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-006
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi NIB, SIB Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pengembangan Aplikasi E-Pendampingan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profil Legalitas Koperasi Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
Informasi Terkait (Output)	Data NIB, SIB Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan



443. Data NIB, SIB Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan

RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI

444. Data Profil Legalitas Koperasi WAG Monitoring

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-007
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi profil Legalitas Koperasi WAG Monitoring, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam wAG Monitoring.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi
Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profil Legalitas Koperasi WAG Monitoring
Informasi Terkait (Output)	Data NIB, SIB WAG Monitoring
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan WAG Monitoring
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI

445. Data NIB, SIB WAG Monitoring

ID	SUMSEL-DAD.02.09.01-008
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi NIB, SIB WAG Monitoring, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam wAG Monitoring.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Pelaku Koperasi



445. Data NIB, SIB WAG Monitoring

Penanggung Jawab / Wali Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
Informasi Terkait (Input)	Data Profil Legalitas Koperasi WAG Monitoring
Informasi Terkait (Output)	Data NIB, SIB WAG Monitoring
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan WAG Monitoring
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.09 DATA KOPERASI
RAD Level 3	RAD.02.09.01 PEMBINAAN KOPERASI



36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN

32 entitas data

446. Data Penanganan Sampah TPA

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-100
Uraian Data	Data yang memuat informasi penanganan Sampah TPA, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penanganan Sampah TPA serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penanganan Sampah TPA
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penanganan Sampah TPA
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penanganan Sampah TPA
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

447. Data Hasil Penanganan Sampah TPA

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-101
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penanganan Sampah TPA, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penanganan Sampah TPA serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penanganan Sampah TPA
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penanganan Sampah TPA



447. Data Hasil Penanganan Sampah TPA

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penanganan Sampah TPA
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

448. Data Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

ID	SUMSEL-DAD.07.05.04-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Taman Kehati diluar Kawasan Hutan
Layanan	Layanan Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP
RAD Level 3	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH

449. Data Hasil Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

ID	SUMSEL-DAD.07.05.04-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



449. Data Hasil Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Taman Kehati diluar Kawasan Hutan
Layanan	Layanan Pendaftaran Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP
RAD Level 3	RAD.07.05.04 PENGELOLAAN SAMPAH

450. Data Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-102
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



panrb
KEMENTERIAN
PENCEGAHAN DAN
KONTROL
PENCEMARAN LINGKUNGAN



Arsitektur Pemerintah Digital



451. Data Hasil Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-103
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Persetujuan Pembuangan Emisi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

452. Data Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-104
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah



452. Data Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

453. Data Hasil Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-105
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan/Pemanfaatan Air Limbah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

454. Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-106
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD



454. Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah

Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

455. Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-107
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Usaha Pengelolaan Sampah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

456. Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-108

456. Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3

Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3 serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

457. Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-109
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3 serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



457. Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Teknis Penyimpanan Limbah B3

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

458. Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-110
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

459. Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-111
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN



459. Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air

Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

460. Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-112
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

461. Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-113
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi, bersifat terbatas.



461. Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

462. Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-114
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3 serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



462. Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

463. Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-115
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3 serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pengumpulan/Penggunaan Limbah B3
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

464. Data Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-116
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN



464. Data Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

465. Data Hasil Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-117
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

466. Data Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-118
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan, bersifat terbatas.



466. Data Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

467. Data Hasil Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-119
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



467. Data Hasil Permohonan Pemeliharaan/Penggantian Sarana dan Prasarana Pengelolaan

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

468. Data Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAD.07.05.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP
RAD Level 3	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

469. Data Hasil Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

ID	SUMSEL-DAD.07.05.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN



469. Data Hasil Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP
RAD Level 3	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

470. Data Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-120
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

471. Data Hasil Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-121
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL, bersifat terbatas.



471. Data Hasil Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

472. Data Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

ID	SUMSEL-DAD.07.05.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP



472. Data Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

RAD Level 3	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

473. Data Hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

ID	SUMSEL-DAD.07.05.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP
RAD Level 3	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

474. Data Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

ID	SUMSEL-DAD.07.05.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)



474. Data Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP
RAD Level 3	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

475. Data Hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

ID	SUMSEL-DAD.07.05.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
RAD Level 1	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM
RAD Level 2	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP
RAD Level 3	RAD.07.05.01 PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BERKELANJUTAN

476. Data Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-122
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Uji Laboratorium Lingkungan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Uji Laboratorium Lingkungan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



476. Data Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

477. Data Hasil Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-123
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Uji Laboratorium Lingkungan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	36. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Layanan	Layanan Permohonan Uji Laboratorium Lingkungan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



Arsitektur Pemerintah Digital





37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK

14 entitas data

478. Data Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

479. Data Hasil Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa



479. Data Hasil Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa

Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

480. Data Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

481. Data Hasil Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



481. Data Hasil Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Layanan	Layanan Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

482. Data Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA



483. Data Hasil Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

484. Data Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih

ID	SUMSEL-DAD.03.05.04-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih

**484. Data Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih**

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
RAD Level 3	RAD.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN

485. Data Hasil Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih

ID	SUMSEL-DAD.03.05.04-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa Koperasi Desa Merah Putih
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
RAD Level 3	RAD.03.05.04 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN

486. Data Pendampingan Badan Usaha Milik Desa

ID	SUMSEL-DAD.03.05.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pendampingan Badan Usaha Milik Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Badan Usaha Milik Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.

**486. Data Pendampingan Badan Usaha Milik Desa**

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Badan Usaha Milik Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Badan Usaha Milik Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL
RAD Level 3	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN

487. Data Hasil Pendampingan Badan Usaha Milik Desa

ID	SUMSEL-DAD.03.05.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pendampingan Badan Usaha Milik Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendampingan Badan Usaha Milik Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Pendampingan Badan Usaha Milik Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pendampingan Badan Usaha Milik Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL



487. Data Hasil Pendampingan Badan Usaha Milik Desa

RAD Level 3	RAD.03.05.01 PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN DESA BERKEMBANG DAN DESA MANDIRI SERTA KAWASAN PERDESAAN SERTA KAWASAN PERDESAAN

488. Data Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

489. Data Hasil Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa



489. Data Hasil Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa

Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitas Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

490. Data Fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA

491. Data Hasil Fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa

ID	SUMSEL-DAD.09.01.04-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa, bersifat terbatas.



491. Data Hasil Fasilitasi dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	37. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAK
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitasi dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitasi dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Layanan	Layanan Fasilitasi dan Konsultasi Proses Pemutakhiran Indeks Desa untuk Penetapan Status Desa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.04 PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA



38. DPPPA

4 entitas data

492. Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak	
ID	SUMSEL-DAD.04.03.05-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi laporan Kekerasan Gender dan Anak, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam data Laporan Kekerasan Gender dan Anak.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan, Bulanan
Penghasil / Produsen Data	UPTD PPA di Dinas Pengampu dan OPD dan K/L terkait di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan via kanal pengaduan berupa Pengaduan Langsung, Hotline Daerah, SAPA 129, Pelimpahan, Rujukan dan Penjangkauan Kasus.
Penanggung Jawab / Wali Data	38. DPPPA
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Kerjasama para pihak dalam pencegahan Ktp Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAD Level 3	RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.

493. Data Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	
ID	SUMSEL-DAD.04.03.05-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam data Laporan Kekerasan Gender dan Anak.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan, Bulanan
Penghasil / Produsen Data	UPTD PPA di Dinas Pengampu dan OPD dan K/L terkait di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan via kanal pengaduan berupa Pengaduan Langsung, Hotline Daerah, SAPA 129, Pelimpahan, Rujukan dan Penjangkauan Kasus.
Penanggung Jawab / Wali Data	38. DPPPA



493. Data Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAD Level 3	RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.

494. Data Pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak

ID	SUMSEL-DAD.04.03.05-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian, Bulanan, Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Laporan Korban/Pelapor Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan via kanal pengaduan berupa Pengaduan Langsung, Hotline Daerah, SAPA 129, Pelimpahan, Rujukan dan Penjangkauan Kasus.
Penanggung Jawab / Wali Data	38. DPPPA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan/Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAD Level 3	RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.



495. Data Laporan/Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

ID	SUMSEL-DAD.04.03.05-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan/Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian, Bulanan, Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Laporan Korban/Pelapor Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan via kanal pengaduan berupa Pengaduan Langsung, Hotline Daerah, SAPA 129, Pelimpahan, Rujukan dan Penjangkauan Kasus.
Penanggung Jawab / Wali Data	38. DPPPA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan/Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi
Layanan	Layanan Pelaporan Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
RAD Level 3	RAD.04.03.05 PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI LINTAS PROVINSI, TINGKAT NASIONAL, DAN INTERNASIONAL.



39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

28 entitas data

496. Data Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

497. Data Hasil Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan



497. Data Hasil Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Pengajuan Dana Hibah Kepemudaan dan Kepramukaan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

498. Data Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

499. Data Hasil Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



499. Data Hasil Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

500. Data Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN



501. Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Organisasi Kepemudaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN

502. Data Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan



502. Data Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan

RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

503. Data Hasil Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

504. Data Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD



504. Data Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda

Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

505. Data Hasil Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Kewirausahaan Pemuda
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

506. Data Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-009

**506. Data Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda**

Uraian Data	Data yang memuat informasi fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

507. Data Hasil Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



507. Data Hasil Fasilitas Asistensi Kewirausahaan Pemuda

RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

508. Data Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga

ID	SUMSEL-DAD.06.05.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Layanan	Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA
RAD Level 3	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

509. Data Hasil Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga

ID	SUMSEL-DAD.06.05.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



509. Data Hasil Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga

Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Layanan	Layanan Peminjaman Sarana dan Prasarana Olahraga
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA
RAD Level 3	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

510. Data Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-124
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

511. Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-125
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan, bersifat terbatas.



511. Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Pendirian Lembaga Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

512. Data Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga

ID	SUMSEL-DAD.06.05.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA



512. Data Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga

RAD Level 3	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

513. Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga

ID	SUMSEL-DAD.06.05.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Event Olahraga
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA
RAD Level 3	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

514. Data Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga

ID	SUMSEL-DAD.06.05.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga



514. Data Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga

Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Layanan	Layanan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA
RAD Level 3	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

515. Data Hasil Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga

ID	SUMSEL-DAD.06.05.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
Layanan	Layanan Pengajuan Izin Penyelenggaraan Event Olahraga
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA
RAD Level 3	RAD.06.05.01 PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

516. Data Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, bersifat terbatas.



516. Data Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

517. Data Hasil Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAD.06.04.01-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



517. Data Hasil Pengajuan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Keolahragaan

RAD Level 2	RAD.06.04 DATA PEMUDA
RAD Level 3	RAD.06.04.01 PEMBERDAYAAN PEMUDA

518. Data Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN

519. Data Hasil Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan



519. Data Hasil Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Pengajuan Perubahan Rencana Penggunaan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN

520. Data Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN



521. Data Hasil Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.02-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Layanan	Layanan Permohonan Pencairan Dana Hibah Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Keolahragaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.02 PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN

522. Data Rekrutmen Atlet dan Pelatih

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-126
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekrutmen Atlet dan Pelatih, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekrutmen Atlet dan Pelatih serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Rekrutmen Atlet dan Pelatih
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekrutmen Atlet dan Pelatih
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Rekrutmen Atlet dan Pelatih



522. Data Rekrutmen Atlet dan Pelatih

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

523. Data Hasil Rekrutmen Atlet dan Pelatih

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-127
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Rekrutmen Atlet dan Pelatih, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekrutmen Atlet dan Pelatih serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Kepegawaian tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	39. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Informasi Terkait (Input)	Data Rekrutmen Atlet dan Pelatih
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rekrutmen Atlet dan Pelatih
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Layanan	Layanan Rekrutmen Atlet dan Pelatih
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



4. Badan Pengelolaan Keuangan d

30 entitas data

524. Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov SumselDa

ID	SUMSEL-DAD.09.02.09-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov SumselDa, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP).
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Perencanaan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov SumselDa
Informasi Terkait (Output)	Data Buku KUA dan PPAS dan/atau KUPA dan PPASP
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Layanan	Layanan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN

525. Data Buku KUA dan PPAS dan/atau KUPA dan PPASP

ID	SUMSEL-DAD.09.02.09-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi buku KUA dan PPAS dan/atau KUPA dan PPASP, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP).
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Perencanaan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d

**525. Data Buku KUA dan PPAS dan/atau KUPA dan PPASP**

Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov SumselDa
Informasi Terkait (Output)	Data Buku KUA dan PPAS dan/atau KUPA dan PPASP
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Layanan	Layanan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN

526. Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov Sumsel

ID	SUMSEL-DAD.09.02.09-003
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov Sumsel, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Perencanaan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Buku RKA dan DPA dan/atau RKAP dan DPPA
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Layanan	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN



527. Data Buku RKA dan DPA dan/atau RKAP dan DPPA

ID	SUMSEL-DAD.09.02.09-004
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi buku RKA dan DPA dan/atau RKAP dan DPPA, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Perencanaan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Buku RKA dan DPA dan/atau RKAP dan DPPA
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Layanan	Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.09 PERUBAHAN APBN DAN REVISI ANGGARAN

528. Data Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAD.09.02.07-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/Kota, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada evaluasi APBD Kabupaten/Kota.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	17 Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/Kota
Informasi Terkait (Output)	Data SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro



528. Data Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/Kota

Layanan	Layanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

529. Data SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAD.09.02.07-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada evaluasi APBD Kabupaten/Kota.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	17 Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/Kota
Informasi Terkait (Output)	Data SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota APBD Kabupaten/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
Layanan	Layanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

530. Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Urat Perintah Membayar

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Urat Perintah Membayar, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urat Perintah Membayar SPM.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan



530. Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Urat Perintah Membayar

Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Keuangan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Urat Perintah Membayar
Informasi Terkait (Output)	Data Verifikasi SPM dari tiap OPD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urat Perintah Membayar SPM
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

531. Data Verifikasi SPM dari tiap OPD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi verifikasi SPM dari tiap OPD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urat Perintah Membayar SPM.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Keuangan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Urat Perintah Membayar
Informasi Terkait (Output)	Data Verifikasi SPM dari tiap OPD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urat Perintah Membayar SPM
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN



532. Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-003
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Keuangan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Informasi Terkait (Output)	Data Verifikasi SP2D dari tiap OPD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

533. Data Verifikasi SP2D dari tiap OPD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-004
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi verifikasi SP2D dari tiap OPD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Keuangan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Informasi Terkait (Output)	Data Verifikasi SP2D dari tiap OPD



533. Data Verifikasi SP2D dari tiap OPD

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

534. Data Pengajuan anggaran dari Tiap OPD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.02-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan anggaran dari Tiap OPD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyediaan Anggaran Kas.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Perencanaan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan anggaran dari Tiap OPD
Informasi Terkait (Output)	Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW, TW 4 Penyediaan Kas
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Layanan	Layanan Penyediaan Anggaran Kas
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA

535. Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW, TW 4 Penyediaan Kas

ID	SUMSEL-DAD.09.02.02-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW, TW 4 Penyediaan Kas, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyediaan Anggaran Kas.
Sifat Data	Tertutup



535. Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Penyediaan Kas

Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Perencanaan tiap OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan anggaran dari Tiap OPD
Informasi Terkait (Output)	Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Penyediaan Kas
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Layanan	Layanan Penyediaan Anggaran Kas
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA

536. Data Pengajuan Laporan DPA/DPPA dari tiap OPD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-005
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan Laporan DPA/DPPA dari tiap OPD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD).
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kepala Badan/ Dinas selaku Pengguna Anggaran
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Laporan DPA/DPPA dari tiap OPD
Informasi Terkait (Output)	Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Pelaksanaan Penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN



537. Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW, TW 4 Pelaksanaan Penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD)

ID	SUMSEL-DAD.09.02.07-003
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW, TW 4 Pelaksanaan Penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD), bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD).
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kepala Badan/ Dinas selaku Pengguna Anggaran
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Laporan DPA/DPPA dari tiap OPD
Informasi Terkait (Output)	Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW, TW 4 Pelaksanaan Penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

538. Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengelolaan Kas

ID	SUMSEL-DAD.09.02.02-003
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan Anggaran Daerah Pengelolaan Kas, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pengelolaan kas daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Penatausahaan
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengelolaan Kas
Informasi Terkait (Output)	Data Saldo RKUD Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Layanan	Layanan Pengelolaan kas daerah

**538. Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengelolaan Kas**

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA

539. Data Saldo RKUD Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.02.02-004
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi saldo RKUD Daerah, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pengelolaan kas daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Penatausahaan
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengelolaan Kas
Informasi Terkait (Output)	Data Saldo RKUD Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Layanan	Layanan Pengelolaan kas daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.02 PENGELOLAAN KAS NEGARA

540. Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan

ID	SUMSEL-DAD.09.02.03-005
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Penatausahaan



540. Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan

Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan
Informasi Terkait (Output)	Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Layanan	Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

541. Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan

ID	SUMSEL-DAD.09.02.03-006
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi rKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Penatausahaan
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan
Informasi Terkait (Output)	Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Layanan	Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA

542. Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran

ID	SUMSEL-DAD.09.02.04-001



542. Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran

Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Penatausahaan
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran
Informasi Terkait (Output)	Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Layanan	Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA

543. Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran

ID	SUMSEL-DAD.09.02.04-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi rKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Penatausahaan
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran
Informasi Terkait (Output)	Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Layanan	Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



543. Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran

RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.04 PENGELOLAAN PENGELUARAN DAN BELANJA NEGARA

544. Data Pengajuan Anggaran Daerah Pelaksanaan Konsolidasi Seluruh Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.07-004
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan Anggaran Daerah Pelaksanaan Konsolidasi Seluruh Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pelaksanaan Konsolidasi Seluruh Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD
Informasi Terkait (Output)	Data (dokumen, jurnal, laporan, atau sub-laporan)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
Layanan	Layanan pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

545. Data (dokumen, jurnal, laporan, atau sub-laporan)

ID	SUMSEL-DAD.09.02.08-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi (dokumen, jurnal, laporan, atau sub-laporan), bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d



545. Data (dokumen, jurnal, laporan, atau sub-laporan)

Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Pelaksanan Konsolidasi Seluruh Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD
Informasi Terkait (Output)	Data (dokumen, jurnal, laporan, atau sub-laporan)
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
Layanan	Layanan pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.08 AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

546. Data Pengajuan Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/kota

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-006
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/kota, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	17 Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/kota
Informasi Terkait (Output)	Data SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Layanan	Layanan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

547. Data SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota

ID	SUMSEL-DAD.09.02.07-005
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota, bersifat tertutup.



547. Data SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota

Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	17 Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Raperda dan Rapergub 17 Kabupaten/kota
Informasi Terkait (Output)	Data SK Evaluasi 17 Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Layanan	Layanan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

548. Data Pengajuan Anggaran Daerah Rekonsiliasi Barang Milik pada SKPD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.07-006
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan Anggaran Daerah Rekonsiliasi Barang Milik pada SKPD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag umum dan kepegawaian
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Rekonsiliasi Barang Milik pada SKPD
Informasi Terkait (Output)	Data BA Rekon dari tiap OPD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
Layanan	Layanan Rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN



548. Data Pengajuan Anggaran Daerah Rekonsiliasi Barang Milik pada SKPD

RAD Level 3	RAD.09.02.07 MONITORING DAN EVALUASI ANGGARAN

549. Data BA Rekon dari tiap OPD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.11-001
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi BA Rekon dari tiap OPD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag umum dan kepegawaian
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Anggaran Daerah Rekonsiliasi Barang Milik pada SKPD
Informasi Terkait (Output)	Data BA Rekon dari tiap OPD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
Layanan	Layanan Rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

550. Data Permendagri No 47 Tahun 2021

ID	SUMSEL-DAD.09.02.11-002
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi permendagri No 47 Tahun 2021, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada merencanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Mitra/Pihak Ketiga
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Permendagri No 47 Tahun 2021



550. Data Permendagri No 47 Tahun 2021

Informasi Terkait (Output)	Data Hasil fisik atau berkas digital yang dicetak
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan	Layanan Merencanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

551. Data Hasil fisik atau berkas digital yang dicetak

ID	SUMSEL-DAD.09.02.11-003
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi hasil fisik atau berkas digital yang dicetak, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada merencanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Data Mitra/Pihak Ketiga
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Permendagri No 47 Tahun 2021
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil fisik atau berkas digital yang dicetak
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan	Layanan Merencanakan penetapan pemanfaatan barang milik daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

552. Data Pengajuan RKBD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-007
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pengajuan RKBD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan.



552. Data Pengajuan RKBD

Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kassubag umum dan kepegawaian
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan RKBD
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penetapan RKBD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN

553. Data SK Penetapan RKBD

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-008
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi SK Penetapan RKBD, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kassubag umum dan kepegawaian
Penanggung Jawab / Wali Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan RKBD
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penetapan RKBD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Layanan	Layanan Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan pemeliharaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN



panrb
KEMENTERIAN
PENATAKRULAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital





40. DINAS PERKEBUNAN

8 entitas data

554. Data Kelompok tani yang mengajukan permohonan	
ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi kelompok tani yang mengajukan permohonan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan/Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Perkebunan
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kelompok tani yang mengajukan permohonan
Informasi Terkait (Output)	Data Petani/ Kelompok tani yang terlatih dan data luas serangan OPT
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Pelatihan/Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

555. Data Petani/ Kelompok tani yang terlatih dan data luas serangan OPT	
ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi petani/ Kelompok tani yang terlatih dan data luas serangan OPT, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan/Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Dinas Perkebunan
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Kelompok tani yang mengajukan permohonan
Informasi Terkait (Output)	Data Petani/ Kelompok tani yang terlatih dan data luas serangan OPT



555. Data Petani/ Kelompok tani yang terlatih dan data luas serangan OPT

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Pelatihan/Pendampingan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

556. Data Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPSBTP
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Rekom IUP-B
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

557. Data Surat Keterangan Rekom IUP-B

ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan Rekom IUP-B, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



557. Data Surat Keterangan Rekom IUP-B

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPSBTP
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Rekom IUP-B
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

558. Data Pelaku usaha yang mengajukan permohonan

ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelaku usaha yang mengajukan permohonan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Bidang kelembagaan usaha perkebunan dan penyuluhan
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaku usaha yang mengajukan permohonan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Rekomendasi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN



559. Data Surat Rekomendasi

ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Rekomendasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Bidang kelembagaan usaha perkebunan dan penyuluhan
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pelaku usaha yang mengajukan permohonan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Rekomendasi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

560. Data Pemohon identifikasi/diagnosis OPT

ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi pemohon identifikasi/diagnosis OPT, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	UPTD BPTP
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemohon identifikasi/diagnosis OPT
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil identifikasi/ Diagnosis OPT dari Laboratorium
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Permohonan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan



560. Data Pemohon identifikasi/diagnosis OPT

RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

561. Data Hasil identifikasi/ Diagnosis OPT dari Laboratorium

ID	SUMSEL-DAD.02.04.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil identifikasi/ Diagnosis OPT dari Laboratorium, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	UPTD BPTP
Penanggung Jawab / Wali Data	40. DINAS PERKEBUNAN
Informasi Terkait (Input)	Data Pemohon identifikasi/diagnosis OPT
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil identifikasi/ Diagnosis OPT dari Laboratorium
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Permohonan Identifikasi/Diagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan
RAD Level 1	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI
RAD Level 2	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN
RAD Level 3	RAD.02.04.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN



41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA

8 entitas data

562. Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Pangan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-019
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi capaian Kinerja Pertanian Tanaman Pangan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam informasi dan Data Produksi Tanaman Pangan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kabid Tanaman Pangan
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Pangan
Informasi Terkait (Output)	Data Capaian Produksi Tanaman Pangan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Layanan	Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Pangan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

563. Data Capaian Produksi Tanaman Pangan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-128
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi capaian Produksi Tanaman Pangan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam informasi dan Data Produksi Tanaman Pangan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kabid Tanaman Pangan
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Pangan
Informasi Terkait (Output)	Data Capaian Produksi Tanaman Pangan



563. Data Capaian Produksi Tanaman Pangan

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Layanan	Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Pangan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

564. Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Hortikultura

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-020
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi capaian Kinerja Pertanian Tanaman Hortikultura, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kabid Tanaman Hortikultura
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Hortikultura
Informasi Terkait (Output)	Data Capaian Produksi Tanaman Hortikultura
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Layanan	Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

565. Data Capaian Produksi Tanaman Hortikultura

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-129
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi capaian Produksi Tanaman Hortikultura, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura.
Sifat Data	Terbuka



565. Data Capaian Produksi Tanaman Hortikultura

Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kabid Tanaman Hortikultura
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Hortikultura
Informasi Terkait (Output)	Data Capaian Produksi Tanaman Hortikultura
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Layanan	Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

566. Data Alat dan mesin Pertanian. Peta Digital LBS (Luas Baku Sawah), Laporan Data Penyaluran Pupuk

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-130
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi alat dan mesin Pertanian. Peta Digital LBS (Luas Baku Sawah), Laporan Data Penyaluran Pupuk, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam informasi dan Data Alat dan Mesin Pertanian.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kabid Sarana dan Prasarana
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Alat dan mesin Pertanian. Peta Digital LBS (Luas Baku Sawah), Laporan Data Penyaluran Pupuk
Informasi Terkait (Output)	Data Alat dan mesin Pertanian dan Laporan Data Penyaluran Pupuk
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Informasi dan Data Alat dan Mesin Pertanian
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



567. Data Alat dan mesin Pertanian dan Laporan Data Penyaluran Pupuk

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-131
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi alat dan mesin Pertanian dan Laporan Data Penyaluran Pupuk, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam informasi dan Data Alat dan Mesin Pertanian.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kabid Sarana dan Prasarana
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Alat dan mesin Pertanian. Peta Digital LBS (Luas Baku Sawah), Laporan Data Penyaluran Pupuk
Informasi Terkait (Output)	Data Alat dan mesin Pertanian dan Laporan Data Penyaluran Pupuk
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Layanan	Layanan Informasi dan Data Alat dan Mesin Pertanian
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

568. Data Prosedur Sistem informasi Perbenihan

ID	SUMSEL-DAD.09.07.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi prosedur Sistem informasi Perbenihan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi Perbenihan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Prosedur Sistem informasi Perbenihan
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikasi Benih
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Layanan	Layanan Informasi Perbenihan



568. Data Prosedur Sistem informasi Perbenihan

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

569. Data Sertifikasi Benih

ID	SUMSEL-DAD.09.07.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikasi Benih, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi Perbenihan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Penanggung Jawab / Wali Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
Informasi Terkait (Input)	Data Prosedur Sistem informasi Perbenihan
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikasi Benih
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Layanan	Layanan Informasi Perbenihan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIATAN NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.07.01 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERIAN ANALISIS KEBIJAKAN PADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

6 entitas data

570. Data Program Kawasan Permukiman

ID	SUMSEL-DAD.03.04.08-001
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi program Kawasan Permukiman, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam program Kawasan Permukiman.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Informasi Terkait (Input)	Data Program Kawasan Permukiman
Informasi Terkait (Output)	Data Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Layanan	Layanan Program Kawasan Permukiman
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN
RAD Level 3	RAD.03.04.08 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

571. Data Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman

ID	SUMSEL-DAD.03.04.08-002
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi penetapan Lokasi Kawasan Permukiman, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam program Kawasan Permukiman.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Informasi Terkait (Input)	Data Program Kawasan Permukiman
Informasi Terkait (Output)	Data Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman

**571. Data Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman**

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Layanan	Layanan Program Kawasan Permukiman
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN
RAD Level 3	RAD.03.04.08 PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

572. Data Permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi

ID	SUMSEL-DAD.03.04.10-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penerima Bantuan Rumah Relokasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Layanan	Layanan Permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN
RAD Level 3	RAD.03.04.10 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

573. Data SK Penerima Bantuan Rumah Relokasi

ID	SUMSEL-DAD.03.04.10-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Penerima Bantuan Rumah Relokasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



573. Data SK Penerima Bantuan Rumah Relokasi

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penerima Bantuan Rumah Relokasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Layanan	Layanan Permohonan Bantuan Rumah Terdampak Relokasi
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN
RAD Level 3	RAD.03.04.10 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

574. Data Permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana

ID	SUMSEL-DAD.03.04.10-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Layanan	Layanan Permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN
RAD Level 3	RAD.03.04.10 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN



575. Data SK Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana

ID	SUMSEL-DAD.03.04.10-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi SK Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Internal OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	42. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana
Informasi Terkait (Output)	Data SK Penerima Bantuan Rumah Korban Bencana
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Layanan	Layanan Permohonan Bantuan Rumah Masyarakat Korban Bencana
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN
RAD Level 3	RAD.03.04.10 PENYELENGGARAAN PERUMAHAN



43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT

8 entitas data

576. Data Peminjaman Jebatan Bailey

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi peminjaman Jebatan Bailey, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Peminjaman Jembatan Bailey serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengendalian Peralatan dan BMD
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman Jebatan Bailey
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman jembatan Bailey
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Peminjaman Jembatan Bailey
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

577. Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman jembatan Bailey

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman jembatan Bailey, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Peminjaman Jembatan Bailey serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengendalian Peralatan dan BMD
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Peminjaman Jebatan Bailey
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman jembatan Bailey



577. Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman jembatan Bailey

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Peminjaman Jembatan Bailey
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

578. Data Rekomendasi Data Jalan Provinsi Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekomendasi Data Jalan Provinsi Sumatera Selatan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang Jalan
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Data Jalan Provinsi Sumatera Selatan
Informasi Terkait (Output)	Data Proses Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Izin Guna Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

579. Data Proses Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Izin Guna Jalan

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi proses Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Izin Guna Jalan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



579. Data Proses Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Izin Guna Jalan

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bidang Jalan
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Rekomendasi Data Jalan Provinsi Sumatera Selatan
Informasi Terkait (Output)	Data Proses Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Izin Guna Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Dispensasi Jalan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

580. Data Izin Guna Jalan

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi izin Guna Jalan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Guna Jalan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Guna Jalan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk Izin Guna Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Guna Jalan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

**581. Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk Izin Guna Jalan**

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk Izin Guna Jalan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Guna Jalan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Izin Guna Jalan
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk Izin Guna Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Guna Jalan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

582. Data Penyewaan Alat Berat

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi penyewaan Alat Berat, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengendalian Peralatan dan BMD
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Penyewaan Alat Berat
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman Alat Berat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat



582. Data Penyewaan Alat Berat

RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

583. Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman Alat Berat

ID	SUMSEL-DAD.03.01.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman Alat Berat, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengendalian Peralatan dan BMD
Penanggung Jawab / Wali Data	43. DINAS PU BINA MARGA DAN TAT
Informasi Terkait (Input)	Data Penyewaan Alat Berat
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Persetujuan Dari Kepala Dinas PUBMTR untuk peminjaman Alat Berat
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Rehabilitasi Jalan
Layanan	Layanan Standar Pelayanan Permohonan Penyewaan Alat Berat
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM
RAD Level 3	RAD.03.01.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR



44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER

10 entitas data

584. Data Permen PUPR 14 TAHUN 2015 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-076
Uraian Data	Data yang memuat informasi permen PUPR 14 TAHUN 2015 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Desain Irigasi dan Rawa
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Permen PUPR 14 TAHUN 2015 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

585. Data Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-077
Uraian Data	Data yang memuat informasi dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Desain Irigasi dan Rawa
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER



585. Data Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa

Informasi Terkait (Input)	Data Permen PUPR 14 TAHUN 2015 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

586. Data Desain dari Bidang Rekayasa Teknis

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-078
Uraian Data	Data yang memuat informasi desain dari Bidang Rekayasa Teknis, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Irigasi dan Rawa
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Desain dari Bidang Rekayasa Teknis
Informasi Terkait (Output)	Data Hektar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

587. Data Hektar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-079
Uraian Data	Data yang memuat informasi hektar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, bersifat terbatas.



587. Data Hektar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Irigasi dan Rawa
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Desain dari Bidang Rekayasa Teknis
Informasi Terkait (Output)	Data Hektar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

588. Data Usulan Proposal

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-132
Uraian Data	Data yang memuat informasi usulan Proposal, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Kerjasama
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Usulan Proposal
Informasi Terkait (Output)	Data Liter/detik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Layanan	Layanan Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA



588. Data Usulan Proposal

RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

589. Data Liter/detik

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-133
Uraian Data	Data yang memuat informasi liter/detik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Kerjasama
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Usulan Proposal
Informasi Terkait (Output)	Data Liter/detik
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
Layanan	Layanan Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

590. Data Permen PUPR 14 TAHUN 2015 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-080
Uraian Data	Data yang memuat informasi permen PUPR 14 TAHUN 2015 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Pemeliharaan
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Permen PUPR 14 TAHUN 2015 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

590. Data Permen PUPR 14 TAHUN 2015 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

Informasi Terkait (Output)	Data Hektar Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

591. Data Hektar Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-081
Uraian Data	Data yang memuat informasi hektar Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Pemeliharaan
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Permen PUPR 14 TAHUN 2015 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa
Informasi Terkait (Output)	Data Hektar Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Layanan	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

592. Data Pos Hidroklimatologi WS Musi dan WS Sugihan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-021
Uraian Data	Data yang memuat informasi pos Hidroklimatologi WS Musi dan WS Sugihan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



592. Data Pos Hidroklimatologi WS Musi dan WS Sugihan

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Hidrologi
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Pos Hidroklimatologi WS Musi dan WS Sugihan
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Layanan	Layanan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

593. Data Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.04-022
Uraian Data	Data yang memuat informasi dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasi Hidrologi
Penanggung Jawab / Wali Data	44. DINAS PU PENGELOLAAN SUMBER
Informasi Terkait (Input)	Data Pos Hidroklimatologi WS Musi dan WS Sugihan
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Layanan	Layanan Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA



panrb
KEMENTERIAN
PENATAKRULAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital





45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN

16 entitas data

594. Data Perusahaan Yang Mengajukan Peraturan Perusahaan (PP)

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi perusahaan Yang Mengajukan Peraturan Perusahaan (PP), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) lintas Kab/ Kota dalam wilayah Sumatera Selatan. serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Dua Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan Yang Mengajukan Peraturan Perusahaan (PP)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) lintas Kab/ Kota dalam wilayah Sumatera Selatan.
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

595. Data Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP)

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) lintas Kab/ Kota dalam wilayah Sumatera Selatan. serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Dua Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan Yang Mengajukan Peraturan Perusahaan (PP)



595. Data Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP)

Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) lintas Kab/ Kota dalam wilayah Sumatera Selatan.
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

596. Data Perusahaan Yang Mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi perusahaan Yang Mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Dua Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan Yang Mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

597. Data Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), bersifat terbatas.



597. Data Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Dua Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan Yang Mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

598. Data Perusahaan yang Mengajukan Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

ID	SUMSEL-DAD.06.02.05-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi perusahaan yang Mengajukan Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Pekerja Migran Indonesia
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan yang Mengajukan Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Rekomendasi izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



598. Data Perusahaan yang Mengajukan Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

599. Data Surat Rekomendasi izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

ID	SUMSEL-DAD.06.02.05-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Rekomendasi izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rekomendasi Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Lima Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Pekerja Migran Indonesia
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan yang Mengajukan Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Rekomendasi izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.05 PENGELOLAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

600. Data Rekap Retribusi yang diterima Disnakertrans Prov Sumsel

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekap Retribusi yang diterima Disnakertrans Prov Sumsel, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan TKA yang Bersangkutan



600. Data Rekap Retribusi yang diterima Disnakertrans Prov Sumsel

Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekap Retribusi yang diterima Disnakertrans Prov Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Rekap Restribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

601. Data Rekap Restribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekap Restribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan TKA yang Bersangkutan
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rekap Retribusi yang diterima Disnakertrans Prov Sumsel
Informasi Terkait (Output)	Data Rekap Restribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

602. Data Perusahaan yang mengajukan K3

ID	SUMSEL-DAD.06.02.04-001



602. Data Perusahaan yang mengajukan K3

Uraian Data	Data yang memuat informasi perusahaan yang mengajukan K3, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Keselamatan , kesehatan Kerja (K3) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Dua Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Bersangkutan
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan yang mengajukan K3
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan K3
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
Layanan	Layanan Pengurusan Surat Keterangan Keselamatan , kesehatan Kerja (K3)
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

603. Data Surat Keterangan K3

ID	SUMSEL-DAD.06.02.04-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan K3, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Keselamatan , kesehatan Kerja (K3) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Dua Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Bersangkutan
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan yang mengajukan K3
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan K3
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
Layanan	Layanan Pengurusan Surat Keterangan Keselamatan , kesehatan Kerja (K3)
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA



603. Data Surat Keterangan K3

RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.04 PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

604. Data Rencana / Peluang pembukaan Lahan Transmigrasi Baru

ID	SUMSEL-DAD.03.02.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi rencana / Peluang pembukaan Lahan Transmigrasi Baru, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan dan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Disnakertrans Kab/Kota yang mempunyai wilayah transmigrasi
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Rencana / Peluang pembukaan Lahan Transmigrasi Baru
Informasi Terkait (Output)	Data Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Disnakertrans Kab/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan dan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.02 DATA TRANSMIGRASI
RAD Level 3	RAD.03.02.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI

605. Data Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Disnakertrans Kab/Kota

ID	SUMSEL-DAD.03.02.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi penempatan Transmigrasi yang berasal dari Disnakertrans Kab/Kota, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan dan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Disnakertrans Kab/Kota yang mempunyai wilayah transmigrasi
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN



605. Data Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Disnakertrans Kab/Kota

Informasi Terkait (Input)	Data Rencana / Peluang pembukaan Lahan Transmigrasi Baru
Informasi Terkait (Output)	Data Penempatan Transmigrasi yang berasal dari Disnakertrans Kab/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan dan Penempatan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.02 DATA TRANSMIGRASI
RAD Level 3	RAD.03.02.01 FASILITASI PERENCANAAN TEKNIS PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI

606. Data Siswa/siswi yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi siswa/siswi yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Berbasis Kompetensi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Siswa Lulusan SMA/SMK yang berminat Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Siswa/siswi yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat pelatihan Berbasis Kompetensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

607. Data Sertifikat pelatihan Berbasis Kompetensi

ID	SUMSEL-DAD.06.02.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat pelatihan Berbasis Kompetensi, bersifat terbatas.



607. Data Sertifikat pelatihan Berbasis Kompetensi

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Berbasis Kompetensi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Siswa Lulusan SMA/SMK yang berminat Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Siswa/siswi yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat pelatihan Berbasis Kompetensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi
RAD Level 1	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA
RAD Level 2	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN
RAD Level 3	RAD.06.02.01 PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

608. Data Perusahaan yang mengajukan Pengujian Lingkungan Kerja

ID	SUMSEL-DAD.03.02.05-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi perusahaan yang mengajukan Pengujian Lingkungan Kerja, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Lingkungan Kerja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan yang mengajukan Pengujian Lingkungan Kerja
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Pengujian Lingkungan Kerja
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pengujian Lingkungan Kerja
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.02 DATA TRANSMIGRASI



608. Data Perusahaan yang mengajukan Pengujian Lingkungan Kerja

RAD Level 3	RAD.03.02.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

609. Data Surat Keterangan Pengujian Lingkungan Kerja

ID	SUMSEL-DAD.03.02.05-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi surat Keterangan Pengujian Lingkungan Kerja, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengujian Lingkungan Kerja serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perusahaan Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
Informasi Terkait (Input)	Data Perusahaan yang mengajukan Pengujian Lingkungan Kerja
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Keterangan Pengujian Lingkungan Kerja
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Layanan	Layanan Pengujian Lingkungan Kerja
RAD Level 1	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
RAD Level 2	RAD.03.02 DATA TRANSMIGRASI
RAD Level 3	RAD.03.02.05 FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN KAWASAN TRANSMIGRASI



47. RS KHUSUS MATA

6 entitas data

610. Data Rekam Medis Mata

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi rekam Medis Mata, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan jasa (Kesehatan Mata) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	47. RS KHUSUS MATA
Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Mata
Informasi Terkait (Output)	Data Resume Medis / Laporan Medik
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Jasa (Kesehatan Mata)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

611. Data Resume Medis / Laporan Medik

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi resume Medis / Laporan Medik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan jasa (Kesehatan Mata) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	47. RS KHUSUS MATA
Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Mata
Informasi Terkait (Output)	Data Resume Medis / Laporan Medik



611. Data Resume Medis / Laporan Medik

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Jasa (Kesehatan Mata)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

612. Data Inventori

ID	SUMSEL-DAD.04.01.08-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi inventori, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan barang (Obat & Alkes Mata) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Apoteker
Penanggung Jawab / Wali Data	47. RS KHUSUS MATA
Informasi Terkait (Input)	Data Inventori
Informasi Terkait (Output)	Data Etiket / Bukti Serah Barang
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Layanan	Layanan Barang (Obat & Alkes Mata)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

613. Data Etiket / Bukti Serah Barang

ID	SUMSEL-DAD.04.01.08-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi etiket / Bukti Serah Barang, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan barang (Obat & Alkes Mata) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



613. Data Etiket / Bukti Serah Barang

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Apoteker
Penanggung Jawab / Wali Data	47. RS KHUSUS MATA
Informasi Terkait (Input)	Data Inventori
Informasi Terkait (Output)	Data Etiket / Bukti Serah Barang
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Layanan	Layanan Barang (Obat & Alkes Mata)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

614. Data Pasien Administrasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-005
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi pasien Administrasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada administrasi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Petugas Admisi
Penanggung Jawab / Wali Data	47. RS KHUSUS MATA
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Administrasi
Informasi Terkait (Output)	Data Kuitansi / Bukti Registrasi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Administrasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



615. Data Kuitansi / Bukti Registrasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-006
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi kuitansi / Bukti Registrasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada administrasi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Petugas Admisi
Penanggung Jawab / Wali Data	47. RS KHUSUS MATA
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Administrasi
Informasi Terkait (Output)	Data Kuitansi / Bukti Registrasi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Administrasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



48. RSJ ERNALDI BAHAR

22 entitas data

616. Data Pasien Pendaftaran Rawat Jalan

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-007
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pasien Pendaftaran Rawat Jalan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pendaftaran Rawat Jalan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Pendaftaran Rawat Jalan
Informasi Terkait (Output)	Data Lembar Registrasi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pendaftaran Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

617. Data Lembar Registrasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-008
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi lembar Registrasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pendaftaran Rawat Jalan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Pendaftaran Rawat Jalan
Informasi Terkait (Output)	Data Lembar Registrasi



617. Data Lembar Registrasi

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pendaftaran Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

618. Data Pasien Pendaftaran Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-009
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pasien Pendaftaran Gawat Darurat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pendaftaran Gawat Darurat.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Pendaftaran Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Lembar Registrasi IGD
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pendaftaran Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

619. Data Lembar Registrasi IGD

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-010
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi lembar Registrasi IGD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pendaftaran Gawat Darurat.
Sifat Data	Terbatas



619. Data Lembar Registrasi IGD

Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Pendaftaran Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Lembar Registrasi IGD
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pendaftaran Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

620. Data Pasien Pendaftaran Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-011
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pasien Pendaftaran Rawat Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pendaftaran Rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Pendaftaran Rawat Inap
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perintah Rawat Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pendaftaran Rawat Inap
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



621. Data Surat Perintah Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-012
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi surat Perintah Rawat Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pendaftaran Rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Pasien Pendaftaran Rawat Inap
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Perintah Rawat Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pendaftaran Rawat Inap
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

622. Data Rekam Medis Rawat Jalan Jiwa & Spesialis

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-013
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi rekam Medis Rawat Jalan Jiwa & Spesialis, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rawat Jalan Jiwa & Spesialis.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perawat/Dokter
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Rawat Jalan Jiwa & Spesialis
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Kontrol & Resep
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rawat Jalan Jiwa & Spesialis



622. Data Rekam Medis Rawat Jalan Jiwa & Spesialis

RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

623. Data Surat Kontrol & Resep

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-014
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi surat Kontrol & Resep, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rawat Jalan Jiwa & Spesialis.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perawat/Dokter
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Rawat Jalan Jiwa & Spesialis
Informasi Terkait (Output)	Data Surat Kontrol & Resep
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rawat Jalan Jiwa & Spesialis
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

624. Data Terapi Wicara & Okupasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-015
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi terapi Wicara & Okupasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam terapi Wicara & Okupasi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Terapis



624. Data Terapi Wicara & Okupasi

Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Terapi Wicara & Okupasi
Informasi Terkait (Output)	Data Catatan Perkembangan Terapi Wicara & Okupasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Terapi Wicara & Okupasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

625. Data Catatan Perkembangan Terapi Wicara & Okupasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-016
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi catatan Perkembangan Terapi Wicara & Okupasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam terapi Wicara & Okupasi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Terapis
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Terapi Wicara & Okupasi
Informasi Terkait (Output)	Data Catatan Perkembangan Terapi Wicara & Okupasi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Terapi Wicara & Okupasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

626. Data Terapi Fisioterapi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-017



626. Data Terapi Fisioterapi

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi terapi Fisioterapi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam fisioterapi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Fisioterapis
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Terapi Fisioterapi
Informasi Terkait (Output)	Data Catatan Perkembangan Fisioterapi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Fisioterapi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

627. Data Catatan Perkembangan Fisioterapi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-018
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi catatan Perkembangan Fisioterapi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam fisioterapi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Fisioterapis
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Terapi Fisioterapi
Informasi Terkait (Output)	Data Catatan Perkembangan Fisioterapi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Fisioterapi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN



627. Data Catatan Perkembangan Fisioterapi

RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

628. Data Klinis Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-019
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi klinis Gawat Darurat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam gawat Darurat.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dokter IGD
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Klinis Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Status RI/RJ/Rujuk
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

629. Data Status RI/RJ/Rujuk

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-020
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi status RI/RJ/Rujuk, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam gawat Darurat.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dokter IGD
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR



629. Data Status RI/RJ/Rujuk

Informasi Terkait (Input)	Data Klinis Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Status RI/RJ/Rujuk
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

630. Data Resep

ID	SUMSEL-DAD.04.01.08-005
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi resep, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam farmasi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Apoteker
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Resep
Informasi Terkait (Output)	Data Etiket & Obat
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Layanan	Layanan Farmasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

631. Data Etiket & Obat

ID	SUMSEL-DAD.04.01.08-006
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi etiket & Obat, bersifat terbatas.



631. Data Etiket & Obat

Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam farmasi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Apoteker
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Resep
Informasi Terkait (Output)	Data Etiket & Obat
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Layanan	Layanan Farmasi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.08 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

632. Data Sampel Laboratorium RSJ ERNALDI BAHAR

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-021
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sampel Laboratorium RSJ ERNALDI BAHAR, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laboratorium.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Analisis Lab
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Sampel Laboratorium RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Lab Digital
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Laboratorium
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN



632. Data Sampel Laboratorium RSJ ERNALDI BAHAR

RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

633. Data Hasil Lab Digital

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-022
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi hasil Lab Digital, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laboratorium.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Analisis Lab
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Sampel Laboratorium RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Lab Digital
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Laboratorium
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

634. Data Image Medis Radiologi RSJ ERNALDI BAHAR

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-023
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi image Medis Radiologi RSJ ERNALDI BAHAR, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam radiologi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Radiografer
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Image Medis Radiologi RSJ ERNALDI BAHAR



634. Data Image Medis Radiologi RSJ ERNALDI BAHAR

Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rontgen
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Radiologi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

635. Data Hasil Rontgen

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-024
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi hasil Rontgen, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam radiologi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Radiografer
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Image Medis Radiologi RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rontgen
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Radiologi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

636. Data Diet

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-025
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi diet, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam gizi.



636. Data Diet

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Dietisien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Diet
Informasi Terkait (Output)	Data Label Makanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Gizi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

637. Data Label Makanan

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-026
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi label Makanan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam gizi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Dietisien
Penanggung Jawab / Wali Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
Informasi Terkait (Input)	Data Diet
Informasi Terkait (Output)	Data Label Makanan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Gizi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



panrb
KEMENTERIAN
PENATAURUTAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital





49. RSUD SITI FATIMAH

38 entitas data

638. Data Rekam Medis Instalasi Gawat Darurat

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-027
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi rekam Medis Instalasi Gawat Darurat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Gawat Darurat.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Instalasi Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan IGD
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

639. Data Produk Layanan IGD

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-028
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan IGD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Gawat Darurat.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Instalasi Gawat Darurat
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan IGD



639. Data Produk Layanan IGD

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Gawat Darurat
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

640. Data Ibu/Bayi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-029
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi ibu/Bayi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam obstetri Neonatal Komprehensif.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Ibu/Bayi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan PONEK
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Obstetri Neonatal Komprehensif
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

641. Data Produk Layanan PONEK

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-030
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan PONEK, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam obstetri Neonatal Komprehensif.
Sifat Data	Terbatas



641. Data Produk Layanan PONEK

Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Ibu/Bayi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan PONEK
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Obstetri Neonatal Komprehensif
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

642. Data Kardiologi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-031
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kardiologi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Jantung Terpadu.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dokter Sp.JP
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Kardiologi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan IJT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Jantung Terpadu
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



643. Data Produk Layanan IJT

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-032
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan IJT, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Jantung Terpadu.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dokter Sp.JP
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Kardiologi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan IJT
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Jantung Terpadu
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

644. Data Jadwal Operasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-033
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi jadwal Operasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Bedah Sentral.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dokter Spesialis
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Jadwal Operasi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan IBS
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Bedah Sentral



644. Data Jadwal Operasi

RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

645. Data Produk Layanan IBS

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-034
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan IBS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Bedah Sentral.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Dokter Spesialis
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Jadwal Operasi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan IBS
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Bedah Sentral
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

646. Data Nomor RM

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-035
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi nomor RM, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pasien Poliklinik.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien



646. Data Nomor RM

Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Nomor RM
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Poliklinik
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pasien Poliklinik
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

647. Data Produk Layanan Poliklinik

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-036
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Poliklinik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pasien Poliklinik.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Nomor RM
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Poliklinik
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Pasien Poliklinik
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

648. Data Persalinan

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-037



648. Data Persalinan

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi persalinan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kamar Bersalin.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidan
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Persalinan
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Kamar Bersalin
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Kamar Bersalin
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

649. Data Produk Layanan Kamar Bersalin

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-038
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Kamar Bersalin, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kamar Bersalin.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidan
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Persalinan
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Kamar Bersalin
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Kamar Bersalin
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN

**649. Data Produk Layanan Kamar Bersalin**

RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

650. Data Kelahiran

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-039
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kelahiran, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kamar Bayi Baru Lahir (KBBL).
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Petugas Medis
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Kelahiran
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan KBBL
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Kamar Bayi Baru Lahir (KBBL)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

651. Data Produk Layanan KBBL

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-040
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan KBBL, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kamar Bayi Baru Lahir (KBBL).
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Petugas Medis
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH



651. Data Produk Layanan KBBL

Informasi Terkait (Input)	Data Kelahiran
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan KBBL
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Kamar Bayi Baru Lahir (KBBL)
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

652. Data Profil HD

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-041
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi profil HD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Profil HD
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan HD Jalan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

653. Data Produk Layanan HD Jalan

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-042
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan HD Jalan, bersifat terbatas.



653. Data Produk Layanan HD Jalan

Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pasien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Profil HD
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan HD Jalan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

654. Data Klinis Hemodialisis Pasien Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-043
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi klinis Hemodialisis Pasien Rawat Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam hemodialisis Pasien Rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perawat RI
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Klinis Hemodialisis Pasien Rawat Inap
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan HD Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Hemodialisis Pasien Rawat Inap
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN



654. Data Klinis Hemodialisis Pasien Rawat Inap

RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

655. Data Produk Layanan HD Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-044
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan HD Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam hemodialisis Pasien Rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perawat RI
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Klinis Hemodialisis Pasien Rawat Inap
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan HD Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Hemodialisis Pasien Rawat Inap
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

656. Data Paket MCU

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-045
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi paket MCU, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Medical Check Up.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Klien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Paket MCU



656. Data Paket MCU

Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan MCU
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Medical Check Up
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

657. Data Produk Layanan MCU

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-046
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan MCU, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Medical Check Up.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Klien
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Paket MCU
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan MCU
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Medical Check Up
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

658. Data Antropometri

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-047
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi antropometri, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam gizi.



658. Data Antropometri

Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Ahli Gizi
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Antropometri
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Gizi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Gizi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

659. Data Produk Layanan Gizi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-048
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Gizi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam gizi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Ahli Gizi
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Antropometri
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Gizi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Gizi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



660. Data Sampel Laboratorium RSUD SITI FATIMAH

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-049
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sampel Laboratorium RSUD SITI FATIMAH, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laboratorium.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Analisis Lab
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Sampel Laboratorium RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Laboratorium
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Laboratorium
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

661. Data Produk Layanan Laboratorium

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-050
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Laboratorium, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam laboratorium.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Analisis Lab
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Sampel Laboratorium RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Laboratorium
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan



661. Data Produk Layanan Laboratorium

Layanan	Layanan Laboratorium
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

662. Data Image Medis Radiologi RSUD SITI FATIMAH

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-051
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi image Medis Radiologi RSUD SITI FATIMAH, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam radiologi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Radiografer
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Image Medis Radiologi RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Radiologi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Radiologi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

663. Data Produk Layanan Radiologi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-052
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Radiologi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam radiologi.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian



663. Data Produk Layanan Radiologi

Penghasil / Produsen Data	Radiografer
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Image Medis Radiologi RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Radiologi
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Radiologi
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

664. Data Program Terapi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-053
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi program Terapi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rehabilitasi Medik Rawat Jalan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Dokter Sp.KFR
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Program Terapi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Rehab Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



665. Data Produk Layanan Rehab Jalan

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-054
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Rehab Jalan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rehabilitasi Medik Rawat Jalan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Dokter Sp.KFR
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Program Terapi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Rehab Jalan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

666. Data Konsultasi

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-055
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi konsultasi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rehabilitasi Medik Rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Perawat RI
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Konsultasi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Rehab Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap

**666. Data Konsultasi**

RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

667. Data Produk Layanan Rehab Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-056
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Rehab Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rehabilitasi Medik Rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Perawat RI
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Konsultasi
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Rehab Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

668. Data Resep Digital

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-057
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi resep Digital, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Farmasi Rawat Jalan dan IGD.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Apoteker



668. Data Resep Digital

Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Resep Digital
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Farmasi Jalan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Farmasi Rawat Jalan dan IGD
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

669. Data Produk Layanan Farmasi Jalan

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-058
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Farmasi Jalan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Farmasi Rawat Jalan dan IGD.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Apoteker
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Resep Digital
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Farmasi Jalan
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Farmasi Rawat Jalan dan IGD
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

670. Data Resep UDD

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-059



670. Data Resep UDD

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi resep UDD, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Farmasi Rawat Inap, ICU, NICU, dan PICU.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Petugas Farmasi
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Resep UDD
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Farmasi Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Farmasi Rawat Inap, ICU, NICU, dan PICU
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

671. Data Produk Layanan Farmasi Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-060
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Farmasi Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Farmasi Rawat Inap, ICU, NICU, dan PICU.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Petugas Farmasi
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Resep UDD
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Farmasi Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Farmasi Rawat Inap, ICU, NICU, dan PICU
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN



671. Data Produk Layanan Farmasi Inap

RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

672. Data Rekam Medis Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-061
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi rekam Medis Rawat Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perawat
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Rawat Inap
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Rawat Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rawat Inap
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

673. Data Produk Layanan Rawat Inap

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-062
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Rawat Inap, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam rawat Inap.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Perawat
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH



673. Data Produk Layanan Rawat Inap

Informasi Terkait (Input)	Data Rekam Medis Rawat Inap
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Rawat Inap
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Rawat Inap
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

674. Data Kematian

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-063
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kematian, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Kamar Jenazah.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Admin Jenazah
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Kematian
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Kamar Jenazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Kamar Jenazah
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

675. Data Produk Layanan Kamar Jenazah

ID	SUMSEL-DAD.04.01.01-064
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi produk Layanan Kamar Jenazah, bersifat terbatas.



675. Data Produk Layanan Kamar Jenazah

Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam instalasi Kamar Jenazah.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Admin Jenazah
Penanggung Jawab / Wali Data	49. RSUD SITI FATIMAH
Informasi Terkait (Input)	Data Kematian
Informasi Terkait (Output)	Data Produk Layanan Kamar Jenazah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan	Layanan Instalasi Kamar Jenazah
RAD Level 1	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN
RAD Level 2	RAD.04.01 DATA KESEHATAN
RAD Level 3	RAD.04.01.01 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



5. Badan Pengembangan Sumber Da

14 entitas data

676. Data Layanan Sertifikasi Kompetensi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-064
Uraian Data	Data yang memuat informasi layanan Sertifikasi Kompetensi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang sertifikasi dan pengelolaan kelembagaan
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Sertifikasi Kompetensi
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Sertifikasi Kompetensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Sertifikasi kompetensi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

677. Data Sertifikat Pelatihan Sertifikasi Kompetensi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.03-065
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Pelatihan Sertifikasi Kompetensi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan sertifikasi kompetensi serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang sertifikasi dan pengelolaan kelembagaan
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Sertifikasi Kompetensi



677. Data Sertifikat Pelatihan Sertifikasi Kompetensi

Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Sertifikasi Kompetensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Sertifikasi kompetensi
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

678. Data Layanan Pelatihan Teknis

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-033
Uraian Data	Data yang memuat informasi layanan Pelatihan Teknis, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Teknis serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Teknis Inti
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Pelatihan Teknis
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Teknis
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Teknis
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

679. Data Sertifikat Pelatihan Teknis

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-034
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Pelatihan Teknis, bersifat terbatas.



679. Data Sertifikat Pelatihan Teknis

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Teknis serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Teknis Inti
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Pelatihan Teknis
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Teknis
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Teknis
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

680. Data Layanan Pelatihan Teknis Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-035
Uraian Data	Data yang memuat informasi layanan Pelatihan Teknis Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Teknis Fungsional serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Teknis Fungsional
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Pelatihan Teknis Fungsional
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Teknis Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Teknis Fungsional
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



680. Data Layanan Pelatihan Teknis Fungsional

RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

681. Data Sertifikat Pelatihan Teknis Fungsional

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-036
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Pelatihan Teknis Fungsional, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Teknis Fungsional serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Teknis Fungsional
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Pelatihan Teknis Fungsional
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Teknis Fungsional
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Teknis Fungsional
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

682. Data Pelatihan Dasar CPNS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-037
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelatihan Dasar CPNS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Dasar CPNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da



682. Data Pelatihan Dasar CPNS

Informasi Terkait (Input)	Data Pelatihan Dasar CPNS
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Dasar CPNS
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Dasar CPNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

683. Data Sertifikat Pelatihan Dasar CPNS

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-038
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Pelatihan Dasar CPNS, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Dasar CPNS serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Pelatihan Dasar CPNS
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Dasar CPNS
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Dasar CPNS
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

684. Data Layanan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-039



684. Data Layanan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Uraian Data	Data yang memuat informasi layanan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

685. Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-040
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

**685. Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II**

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

686. Data Layanan Kepemimpinan Administrator

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-041
Uraian Data	Data yang memuat informasi layanan Kepemimpinan Administrator, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Administrator serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Kepemimpinan Administrator
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

687. Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-042
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Administrator serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial



687. Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Kepemimpinan Administrator
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

688. Data Layanan Kepemimpinan Pengawas

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-043
Uraian Data	Data yang memuat informasi layanan Kepemimpinan Pengawas, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Pengawas serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Kepemimpinan Pengawas
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



689. Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-044
Uraian Data	Data yang memuat informasi sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelatihan Kepemimpinan Pengawas serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Penanggung Jawab / Wali Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
Informasi Terkait (Input)	Data Layanan Kepemimpinan Pengawas
Informasi Terkait (Output)	Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Layanan	Layanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



50. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2 entitas data

690. Data Laporan Pengaduan Kejadian/Penyelamatan

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-134
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Pengaduan Kejadian/Penyelamatan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaduan kebakaran serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pegawai/Masyarakat di Lingkungan Kantor/Gedung milik Pemprov
Penanggung Jawab / Wali Data	50. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Pengaduan Kejadian/Penyelamatan
Informasi Terkait (Output)	Data Telaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Layanan	Layanan pengaduan kebakaran
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

691. Data Telaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-135
Uraian Data	Data yang memuat informasi telaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaduan kebakaran serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Pegawai/Masyarakat di Lingkungan Kantor/Gedung milik Pemprov
Penanggung Jawab / Wali Data	50. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Informasi Terkait (Input)	Data Laporan Pengaduan Kejadian/Penyelamatan
Informasi Terkait (Output)	Data Telaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran



panrb
KEMENTERIAN
PENATAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BUREKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital



691. Data Telaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Layanan	Layanan pengaduan kebakaran
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



51. SEKRETARIAT DPRD

6 entitas data

692. Data Gambaran Umum Perda dan Peraturan DPRD

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi gambaran Umum Perda dan Peraturan DPRD, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Legislasi dan Hukum
Penanggung Jawab / Wali Data	51. SEKRETARIAT DPRD
Informasi Terkait (Input)	Data Gambaran Umum Perda dan Peraturan DPRD
Informasi Terkait (Output)	Data Perda dan Peraturan DPRD
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

693. Data Perda dan Peraturan DPRD

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi perda dan Peraturan DPRD, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pembentukan Perda dan Peraturan DPRD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Legislasi dan Hukum
Penanggung Jawab / Wali Data	51. SEKRETARIAT DPRD
Informasi Terkait (Input)	Data Gambaran Umum Perda dan Peraturan DPRD
Informasi Terkait (Output)	Data Perda dan Peraturan DPRD

**693. Data Perda dan Peraturan DPRD**

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

694. Data Hasil Rapat Badan Musyawarah

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Rapat Badan Musyawarah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Agenda DPRD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Persidangan dan Kasubbag Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	51. SEKRETARIAT DPRD
Informasi Terkait (Input)	Data Hasil Rapat Badan Musyawarah
Informasi Terkait (Output)	Data Jadwal Kegiatan Anggota Dewan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Fasilitasi Agenda DPRD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

695. Data Jadwal Kegiatan Anggota Dewan

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi jadwal Kegiatan Anggota Dewan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitasi Agenda DPRD serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas



695. Data Jadwal Kegiatan Annggota Dewan

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Persidangan dan Kasubbag Protokol
Penanggung Jawab / Wali Data	51. SEKRETARIAT DPRD
Informasi Terkait (Input)	Data Hasil Rapat Badan Musyawarah
Informasi Terkait (Output)	Data Jadwal Kegiatan Annggota Dewan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Fasilitasi Agenda DPRD
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

696. Data Aspirasi Masyarakat

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-011
Uraian Data	Data yang memuat informasi aspirasi Masyarakat, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat (Reses) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	51. SEKRETARIAT DPRD
Informasi Terkait (Input)	Data Aspirasi Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rapat Anggota Dewan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat (Reses)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



697. Data Hasil Rapat Anggota Dewan

ID	SUMSEL-DAD.09.01.01-012
Uraian Data	Data yang memuat informasi hasil Rapat Anggota Dewan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat (Reses) serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kasubbag Aspirasi dan Pelayanan Masyarakat
Penanggung Jawab / Wali Data	51. SEKRETARIAT DPRD
Informasi Terkait (Input)	Data Aspirasi Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Rapat Anggota Dewan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
Layanan	Layanan Fasilitas Layanan Aspirasi Masyarakat (Reses)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.01 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM

12 entitas data

698. Data Permohonan Informasi Publik melalui PPID

ID	SUMSEL-DAD.09.03.03-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Informasi Publik melalui PPID, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi Publik melalui PPID serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	OPD Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Informasi Publik melalui PPID
Informasi Terkait (Output)	Data Layanan Informasi Publik PPID
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Informasi Publik melalui PPID
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

699. Data Layanan Informasi Publik PPID

ID	SUMSEL-DAD.09.03.03-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi layanan Informasi Publik PPID, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi Publik melalui PPID serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	OPD Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Informasi Publik melalui PPID
Informasi Terkait (Output)	Data Layanan Informasi Publik PPID

699. Data Layanan Informasi Publik PPID

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Informasi Publik melalui PPID
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.03 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

700. Data Pengaduan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAD.09.03.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengaduan Masyarakat, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat, Pelaku Usaha, OPD Terkait, Admin Instansi, dan Pejabat Penghubung
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Pengaduan Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data Pengaduan dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA

701. Data Pengaduan dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAD.09.03.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengaduan dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR! serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka



701. Data Pengaduan dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Masyarakat, Pelaku Usaha, OPD Terkait, Admin Instansi, dan Pejabat Penghubung
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Pengaduan Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data Pengaduan dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA

702. Data Kemitraan Komunikasi Publik KIM

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-007
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kemitraan Komunikasi Publik KIM, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	KIM, Masyarakat, OPD Terkait, dan Pengelola Komunikasi Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Kemitraan Komunikasi Publik KIM
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



703. Data Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM

ID	SUMSEL-DAD.09.04.02-008
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Mingguan
Penghasil / Produsen Data	KIM, Masyarakat, OPD Terkait, dan Pengelola Komunikasi Publik
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Kemitraan Komunikasi Publik KIM
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Relasi Media
Layanan	Layanan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI
RAD Level 3	RAD.09.04.02 PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

704. Data Keamanan Informasi dan TTE

ID	SUMSEL-DAD.09.03.08-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi keamanan Informasi dan TTE, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam keamanan Informasi dan TTE.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Keamanan Informasi dan TTE
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Keamanan Informasi dan TTE
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Keamanan Informasi dan TTE



704. Data Keamanan Informasi dan TTE

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

705. Data Hasil Keamanan Informasi dan TTE

ID	SUMSEL-DAD.09.03.08-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi hasil Keamanan Informasi dan TTE, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam keamanan Informasi dan TTE.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Terkait
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Keamanan Informasi dan TTE
Informasi Terkait (Output)	Data Hasil Keamanan Informasi dan TTE
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
Layanan	Layanan Keamanan Informasi dan TTE
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.08 MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

706. Data Statistik Sektor

ID	SUMSEL-DAD.09.03.04-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi statistik Sektor, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam statistik Sektor.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Produsen data dari seluruh OPD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan



706. Data Statistik Sektoral

Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Statistik Sektoral
Informasi Terkait (Output)	Data Tertuang pada SK Gubernur Sumsel Daftar Data
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Layanan	Layanan Statistik Sektoral
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK

707. Data Tertuang pada SK Gubernur Sumsel Daftar Data

ID	SUMSEL-DAD.09.03.04-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi tertuang pada SK Gubernur Sumsel Daftar Data, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam statistik Sektoral.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Produsen data dari seluruh OPD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Statistik Sektoral
Informasi Terkait (Output)	Data Tertuang pada SK Gubernur Sumsel Daftar Data
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Layanan	Layanan Statistik Sektoral
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.04 PENGELOLAAN DATA STATISTIK

708. Data Pengajuan Permohonan Layanan

ID	SUMSEL-DAD.09.03.01-003



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUATAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI Birokrasi



Arsitektur Pemerintah Digital



708. Data Pengajuan Permohonan Layanan

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi pengajuan Permohonan Layanan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam e-Government.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Semua OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Permohonan Layanan
Informasi Terkait (Output)	Data Persetujuan/Pendaftaran Layanan E-Government
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan E-Government
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA

709. Data Persetujuan/Pendaftaran Layanan E-Government

ID	SUMSEL-DAD.09.03.01-004
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi persetujuan/Pendaftaran Layanan E-Government, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam e-Government.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Semua OPD
Penanggung Jawab / Wali Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Permohonan Layanan
Informasi Terkait (Output)	Data Persetujuan/Pendaftaran Layanan E-Government
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Layanan	Layanan E-Government
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



709. Data Persetujuan/Pendaftaran Layanan E-Government

RAD Level 2	RAD.09.03 DATA INFORMASI
RAD Level 3	RAD.09.03.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA



7. BIRO ORGANISASI SETDA

4 entitas data

710. Data Permohonan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ID	SUMSEL-DAD.09.06.05-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi permohonan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Organisasi
Penanggung Jawab / Wali Data	7. BIRO ORGANISASI SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Informasi Terkait (Output)	Data Berita Acara Asistensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Orientasi DPRD
Layanan	Layanan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

711. Data Berita Acara Asistensi

ID	SUMSEL-DAD.09.06.05-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi berita Acara Asistensi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Biro Organisasi
Penanggung Jawab / Wali Data	7. BIRO ORGANISASI SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Permohonan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Informasi Terkait (Output)	Data Berita Acara Asistensi



711. Data Berita Acara Asistensi

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Orientasi DPRD
Layanan	Layanan Asistensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

712. Data Survei Kepuasan Masyarakat

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-053
Uraian Data	Data yang memuat informasi survei Kepuasan Masyarakat, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah
Penanggung Jawab / Wali Data	7. BIRO ORGANISASI SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Survei Kepuasan Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data 5.1. Berita Acara Verifikasi SKM, 5.2. Catatan Hasil Reviu, 5.3. Rekomendasi Perbaikan Laporan SKM, 5.4. Pernyataan Validasi (Jika Memenuhi Standar SKM)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
Layanan	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA

713. Data 5.1. Berita Acara Verifikasi SKM, 5.2. Catatan Hasil Reviu, 5.3. Rekomendasi Perbaikan Laporan SKM, 5.4. Pernyataan Validasi (Jika Memenuhi Standar SKM)

ID	SUMSEL-DAD.09.06.01-054
Uraian Data	Data yang memuat informasi 5.1. Berita Acara Verifikasi SKM, 5.2. Catatan Hasil Reviu, 5.3. Rekomendasi Perbaikan Laporan SKM, 5.4. Pernyataan Validasi (Jika Memenuhi Standar SKM), bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.



713. Data 5.1. Berita Acara Verifikasi SKM, 5.2. Catatan Hasil Reviu, 5.3. Rekomendasi Perbaikan Laporan SKM, 5.4. Pernyataan Validasi (Jika Memenuhi Standar SKM)

Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah
Penanggung Jawab / Wali Data	7. BIRO ORGANISASI SETDA
Informasi Terkait (Input)	Data Survei Kepuasan Masyarakat
Informasi Terkait (Output)	Data 5.1. Berita Acara Verifikasi SKM, 5.2. Catatan Hasil Reviu, 5.3. Rekomendasi Perbaikan Laporan SKM, 5.4. Pernyataan Validasi (Jika Memenuhi Standar SKM)
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
Layanan	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA
RAD Level 3	RAD.09.06.01 PENATAAN SISTEM TATA LAKSANA



8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA

6 entitas data

714. Data Registrasi dan Verifikasi Akun

ID	SUMSEL-DAD.09.02.11-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi registrasi dan Verifikasi Akun, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan registrasi dan Verifikasi Akun serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Penanggung Jawab / Wali Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
Informasi Terkait (Input)	Data Registrasi dan Verifikasi Akun
Informasi Terkait (Output)	Data Pengguna Aktif
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan	Layanan Registrasi dan Verifikasi Akun
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

715. Data Pengguna Aktif

ID	SUMSEL-DAD.09.02.11-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengguna Aktif, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan registrasi dan Verifikasi Akun serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Penanggung Jawab / Wali Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
Informasi Terkait (Input)	Data Registrasi dan Verifikasi Akun
Informasi Terkait (Output)	Data Pengguna Aktif



715. Data Pengguna Aktif

Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan	Layanan Registrasi dan Verifikasi Akun
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

716. Data Rencana Umum Pengadaan

ID	SUMSEL-DAD.09.02.11-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi rencana Umum Pengadaan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rencana Umum Pengadaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Penanggung Jawab / Wali Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
Informasi Terkait (Input)	Data Rencana Umum Pengadaan
Informasi Terkait (Output)	Data Pengguna SIRUP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan	Layanan Rencana Umum Pengadaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

717. Data Pengguna SIRUP

ID	SUMSEL-DAD.09.02.11-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengguna SIRUP, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan rencana Umum Pengadaan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup



717. Data Pengguna SIRUP

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Penanggung Jawab / Wali Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
Informasi Terkait (Input)	Data Rencana Umum Pengadaan
Informasi Terkait (Output)	Data Pengguna SIRUP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan	Layanan Rencana Umum Pengadaan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.11 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

718. Data Verifikasi Role Pengguna

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi verifikasi Role Pengguna, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan verifikasi Role Pengguna serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Penanggung Jawab / Wali Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
Informasi Terkait (Input)	Data Verifikasi Role Pengguna
Informasi Terkait (Output)	Data Pengguna Katalog
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Layanan	Layanan Verifikasi Role Pengguna
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN



719. Data Pengguna Katalog

ID	SUMSEL-DAD.09.02.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengguna Katalog, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan verifikasi Role Pengguna serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Realtime
Penghasil / Produsen Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Penanggung Jawab / Wali Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
Informasi Terkait (Input)	Data Verifikasi Role Pengguna
Informasi Terkait (Output)	Data Pengguna Katalog
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Layanan	Layanan Verifikasi Role Pengguna
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.02 DATA KEUANGAN
RAD Level 3	RAD.09.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN



9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

34 entitas data

720. Data Pengajuan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-001
Uraian Data	Data yang memuat informasi pengajuan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan konsultasi/Koordinasi; serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Konsultasi/Koordinasi;
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

721. Data Kegiatan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-002
Uraian Data	Data yang memuat informasi kegiatan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan konsultasi/Koordinasi; serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pengajuan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah



721. Data Kegiatan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Konsultasi/Koordinasi;
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

722. Data Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-003
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi/Permintaan Data; serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Konsultasi/Koordinasi Permintaan Data
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Informasi/Permintaan Data;
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

723. Data Kegiatan Konsultasi/Koordinasi Permintaan Data

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-004
Uraian Data	Data yang memuat informasi kegiatan Konsultasi/Koordinasi Permintaan Data, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan informasi/Permintaan Data; serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka



723. Data Kegiatan Konsultasi/Koordinasi Permintaan Data

Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Konsultasi/Koordinasi Permintaan Data
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Informasi/Permintaan Data;
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

724. Data Pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-005
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN



725. Data Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-006
Uraian Data	Data yang memuat informasi asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

726. Data Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-007
Uraian Data	Data yang memuat informasi pelayanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



726. Data Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

727. Data Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-008
Uraian Data	Data yang memuat informasi monitoring dan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

728. Data Statistik Jumlah Pengunjung

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-009
Uraian Data	Data yang memuat informasi statistik Jumlah Pengunjung, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan buku Tamu Digital serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Seluruh Pengunjung Bappeda

728. Data Statistik Jumlah Pengunjung

Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Statistik Jumlah Pengunjung
Informasi Terkait (Output)	Data Statistik Kunjungan Tamu pada Bappeda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Buku Tamu Digital
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

729. Data Statistik Kunjungan Tamu pada Bappeda

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-010
Uraian Data	Data yang memuat informasi statistik Kunjungan Tamu pada Bappeda, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan buku Tamu Digital serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	Seluruh Pengunjung Bappeda
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Statistik Jumlah Pengunjung
Informasi Terkait (Output)	Data Statistik Kunjungan Tamu pada Bappeda
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Buku Tamu Digital
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

730. Data Perencanaan Pembangunan Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-011



730. Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi perencanaan Pembangunan Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RPJPD,RKPD).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah Bappeda Kab/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Perda RPJPD, Perda RPJMD, Perkada Renstra, Perkada RKPD, Perkada Renja
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RPJPD,RKPD)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

731. Data Perda RPJPD, Perda RPJMD, Perkada Renstra, Perkada RKPD, Perkada Renja

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-012
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi perda RPJPD, Perda RPJMD, Perkada Renstra, Perkada RKPD, Perkada Renja, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RPJPD,RKPD).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah Bappeda Kab/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Perencanaan Pembangunan Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Perda RPJPD, Perda RPJMD, Perkada Renstra, Perkada RKPD, Perkada Renja
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD,RPJPD,RKPD)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



731. Data Perda RPJPD, Perda RPJMD, Perkada Renstra, Perkada RKPD, Perkada Renja

RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

732. Data Perencanaan Penggaran

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-013
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi perencanaan Penggaran, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran (RENJA Perangkat Daerah).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah Bappeda Kab/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Perencanaan Penggaran
Informasi Terkait (Output)	Data Renja Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran (RENJA Perangkat Daerah)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

733. Data Renja Perangkat Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-014
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi renja Perangkat Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran (RENJA Perangkat Daerah).
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah Bappeda Kab/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA



733. Data Renja Perangkat Daerah

Informasi Terkait (Input)	Data Perencanaan Penggaran
Informasi Terkait (Output)	Data Renja Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran (RENJA Perangkat Daerah)
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

734. Data Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah triwulan

ID	SUMSEL-DAD.09.05.03-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi realisasi Kinerja Pembangunan Daerah triwulan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah triwulan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

735. Data Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan

ID	SUMSEL-DAD.09.05.03-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan, bersifat terbuka.



735. Data Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan

Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tiga Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Perangkat Daerah
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah triwulan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

736. Data Dokumen Perencanaan Kab/Kota

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-015
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi dokumen Perencanaan Kab/Kota, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan Kab/Kota.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bappeda Kab/kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Dokumen Perencanaan Kab/Kota
Informasi Terkait (Output)	Data SK Hasil Fasilitasi Dokumen Perencanaan Kab/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan Kab/Kota
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



736. Data Dokumen Perencanaan Kab/Kota

RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

737. Data SK Hasil Fasilitas Dokumen Perencanaan Kab/Kota

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-016
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sK Hasil Fasilitas Dokumen Perencanaan Kab/Kota, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pembinaan dan Fasilitas Perencanaan Kab/Kota.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Bappeda Kab/kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Dokumen Perencanaan Kab/Kota
Informasi Terkait (Output)	Data SK Hasil Fasilitas Dokumen Perencanaan Kab/Kota
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pembinaan dan Fasilitas Perencanaan Kab/Kota
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

738. Data RKA/DPA Perangkat Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-017
Uraian Data	Data yang memuat informasi rKA/DPA Perangkat Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengenterian RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Seluruh Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data RKA/DPA Perangkat Daerah



738. Data RKA/DPA Perangkat Daerah

Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pengenterian RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

739. Data Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-018
Uraian Data	Data yang memuat informasi dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pengenterian RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	Seluruh Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data RKA/DPA Perangkat Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pengenterian RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

740. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-019
Uraian Data	Data yang memuat informasi terpadu Kesejahteraan Sosial, bersifat terbatas.



740. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Informasi Terkait (Output)	Data Program Penanggulangan Kemiskinan yang diintervensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

741. Data Program Penanggulangan Kemiskinan yang diintervensi

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-020
Uraian Data	Data yang memuat informasi program Penanggulangan Kemiskinan yang diintervensi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Informasi Terkait (Output)	Data Program Penanggulangan Kemiskinan yang diintervensi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM



741. Data Program Penanggulangan Kemiskinan yang diintervensi

RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

742. Data Dokumen RPKD, RAT dan Oppkpke

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-021
Uraian Data	Data yang memuat informasi dokumen RPKD, RAT dan Oppkpke, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaporan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD, RAT Laporan Oppkpke serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Seluruh Kab/kota dan Provinsi
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Dokumen RPKD, RAT dan Oppkpke
Informasi Terkait (Output)	Data Kemiskinan Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pelaporan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD, RAT Laporan Oppkpke
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

743. Data Kemiskinan Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-022
Uraian Data	Data yang memuat informasi kemiskinan Daerah, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan pelaporan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD, RAT Laporan Oppkpke serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Seluruh Kab/kota dan Provinsi



743. Data Kemiskinan Daerah

Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Dokumen RPKD, RAT dan Oppkpke
Informasi Terkait (Output)	Data Kemiskinan Daerah
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Pelaporan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD, RAT Laporan Oppkpke
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

744. Data Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-023
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kecamatan, Puskesmas, dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Analisis Situasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

745. Data Laporan Analisis Situasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-024

**745. Data Laporan Analisis Situasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi**

Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi laporan Analisis Situasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Enam Bulanan
Penghasil / Produsen Data	Kecamatan, Puskesmas, dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Analisis Situasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

746. Data 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

ID	SUMSEL-DAD.09.01.05-001
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pusat Data, Pemantauan dan Pelaporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) di Wilayah Sumatera Selatan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	OPD Kab/Kota, Provinsi dan BPS
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Capaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Layanan	Layanan Pusat Data, Pemantauan dan Pelaporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) di Wilayah Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM

**746. Data 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

747. Data Laporan Capaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

ID	SUMSEL-DAD.09.01.05-002
Uraian Data	Data statistik yang memuat informasi laporan Capaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bersifat terbuka.
Tujuan Data	Menjadi dasar analisis dan pelaporan dalam pusat Data, Pemantauan dan Pelaporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) di Wilayah Sumatera Selatan.
Sifat Data	Terbuka
Jenis Data	Data Statistik
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	OPD Kab/Kota, Provinsi dan BPS
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Capaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Layanan	Layanan Pusat Data, Pemantauan dan Pelaporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) di Wilayah Sumatera Selatan
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.01 DATA DALAM NEGERI
RAD Level 3	RAD.09.01.05 PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

748. Data Informasi Geospasial Tematik Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-025
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi informasi Geospasial Tematik Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam penyediaan Data dan Informasi Geospasial.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA



748. Data Informasi Geospasial Tematik Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Informasi Terkait (Input)	Data Informasi Geospasial Tematik Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Informasi Terkait (Output)	Data Spasial dalam Format SHP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penyediaan Data dan Informasi Geospasial
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

749. Data Spasial dalam Format SHP

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-026
Uraian Data	Data geospasial yang memuat informasi spasial dalam Format SHP, bersifat tertutup.
Tujuan Data	Menjadi acuan pemetaan dan analisis spasial dalam penyediaan Data dan Informasi Geospasial.
Sifat Data	Tertutup
Jenis Data	Data Geospasial
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	OPD Provinsi
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Informasi Geospasial Tematik Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Informasi Terkait (Output)	Data Spasial dalam Format SHP
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Penyediaan Data dan Informasi Geospasial
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

750. Data Mengenai Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Daerah

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-027
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi mengenai Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Daerah, bersifat terbatas.



750. Data Mengenai Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Daerah

Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada perencanaan DAK, Pengusulan Kewilayahan pada Pramusrenbang.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	K/L, OPD Provinsi, dan OPD Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Mengenai Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Usulan yang diAkomodir
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Perencanaan DAK, Pengusulan Kewilayahan pada Pramusrenbang
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

751. Data Kegiatan Usulan yang diAkomodir

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-028
Uraian Data	Data keuangan yang memuat informasi kegiatan Usulan yang diAkomodir, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Menjadi dasar penatausahaan dan pelaporan keuangan pada perencanaan DAK, Pengusulan Kewilayahan pada Pramusrenbang.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Keuangan
Validitas Data	Tahunan
Penghasil / Produsen Data	K/L, OPD Provinsi, dan OPD Kabupaten/Kota
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Mengenai Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Daerah
Informasi Terkait (Output)	Data Kegiatan Usulan yang diAkomodir
Interoperabilitas	Ya
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Perencanaan DAK, Pengusulan Kewilayahan pada Pramusrenbang
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



751. Data Kegiatan Usulan yang diAkomodir

RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

752. Data Disposisi Online

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-029
Uraian Data	Data yang memuat informasi disposisi Online, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan disposisi Online serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Perangkat Daerah
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Disposisi Online
Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Disposisi yang telah di perintahkan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Disposisi Online
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

753. Data Laporan Disposisi yang telah di perintahkan

ID	SUMSEL-DAD.09.05.01-030
Uraian Data	Data yang memuat informasi laporan Disposisi yang telah di perintahkan, bersifat terbatas.
Tujuan Data	Mendukung pelaksanaan disposisi Online serta menjadi bahan dokumentasi dan pelaporan.
Sifat Data	Terbatas
Jenis Data	Data Lainnya
Validitas Data	Harian
Penghasil / Produsen Data	OPD Perangkat Daerah
Penanggung Jawab / Wali Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
Informasi Terkait (Input)	Data Disposisi Online



753. Data Laporan Disposisi yang telah di perintahkan

Informasi Terkait (Output)	Data Laporan Disposisi yang telah di perintahkan
Interoperabilitas	Tidak
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Layanan	Layanan Disposisi Online
RAD Level 1	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM
RAD Level 2	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RAD Level 3	RAD.09.05.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



METADATA

ARSITEKTUR APLIKASI

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

— 2026 —



DOMAIN APLIKASI

Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2026

Register Lengkap Aplikasi (Sheet Aplikasi-v1)

Total 63 aplikasi inti • 4 kategori RAA Level 2



RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK

6 aplikasi

1. E-SKM (Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.01.01-001
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) elektronik untuk mengukur kualitas pelayanan publik.
Fungsi Aplikasi	Pengisian kuesioner SKM daring; rekapitulasi hasil; pelaporan indeks kepuasan.
Instansi	7. BIRO ORGANISASI SETDA

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan Survei Kepuasan Masyarakat
Proses Bisnis	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
Luaran	Hasil rekap SKM
Inputan Data	Data Survei Kepuasan Masyarakat
Supplier Data	Perangkat Daerah
Luaran Data	Data 5.1. Berita Acara Verifikasi SKM, 5.2. Catatan Hasil Reviu, 5.3. Rekomendasi Perbaikan Laporan SKM, 5.4. Pernyataan Validasi (Jika Memenuhi Standar SKM)
Customer Data	7. BIRO ORGANISASI SETDA

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pihak Ke 3
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	BIRO ORGANISASI SETDA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK



2. SDGs (Sustainable Development Goals) Provinsi Sumatera Selatan

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.01-002
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi pemantauan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) provinsi.
Fungsi Aplikasi	Input capaian 17 goals; monitoring indikator; pelaporan SDGs.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pusat Data, Pemantauan dan Pelaporan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP/SDGs) di Wilayah Sumatera Selatan
Proses Bisnis	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
Luaran	Laporan Data Capaian 17 Goals SDGs
Inputan Data	Data 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Supplier Data	OPD Kab/Kota, Provinsi dan BPS
Luaran Data	Data Laporan Capaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK



3. GEOPORTAL (Portal Informasi Geospasial Daerah)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.01.01-003
Modul	-
Uraian Aplikasi	Geoportal simpul jaringan informasi geospasial provinsi.
Fungsi Aplikasi	Penyajian peta tematik (IGT); berbagi data geospasial; layanan informasi geospasial.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan Penyediaan Data dan Informasi Geospasial
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Peta Informasi geospasial Tematik (IGT) Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan
Inputan Data	Data Informasi Geospasial Tematik Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Supplier Data	OPD Provinsi
Luaran Data	Data Spasial dalam Format SHP
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK

4. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

IDENTITAS APLIKASI

**4. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**

ID	SUMSEL-DAA.01.01-004
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi PPID Dinas Kesehatan untuk layanan keterbukaan informasi publik.
Fungsi Aplikasi	Permohonan informasi; pengelolaan dokumen; publikasi informasi publik.
Instansi	10. DINAS KESEHATAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi; Layanan Informasi Publik melalui PPID
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Relasi Media
Luaran	Dokumen Informasi
Inputan Data	Data Pemohon Permohonan Informasi Publik dan Dokumentasi; Data Permohonan Informasi Publik melalui PPID
Supplier Data	Pemohon Informasi; OPD Terkait
Luaran Data	Data Informasi Publik dan Dokumentasi; Data Layanan Informasi Publik PPID
Customer Data	10. DINAS KESEHATAN; 52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	DINAS KESEHATAN
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK

5. SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.01-005



5. SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)

Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).
Fungsi Aplikasi	Penerimaan pengaduan; disposisi & tindak lanjut; pelaporan.
Instansi	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N-LAPOR!
Proses Bisnis	Relasi Media
Luaran	Tiket laporan pengaduan, disposisi laporan, jawaban tindak lanjut OPD, status penyelesaian, dan rekapitulasi pengaduan masyarakat
Inputan Data	Data Pengaduan Masyarakat
Supplier Data	Masyarakat, Pelaku Usaha, OPD Terkait, Admin Instansi, dan Pejabat Penghubung
Luaran Data	Data Pengaduan dan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
Customer Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	SP4N-LAPOR!
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK

6. PORTAL SATU DATA SUMSEL (Portal Peta Tematik dan Visual Statistik)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.01-006
Modul	-



6. PORTAL SATU DATA SUMSEL (Portal Peta Tematik dan Visual Statistik)

Uraian Aplikasi	Portal Satu Data Sumsel untuk publikasi data statistik sektoral dan peta tematik.
Fungsi Aplikasi	Walidata & berbagi pakai data; visualisasi statistik; peta tematik.
Instansi	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Statistik Sektoral
Proses Bisnis	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
Luaran	Informasi data statistik sektoral yang bisa diunduh dalam bentuk excel dan pdf
Inputan Data	Data Statistik Sektoral
Supplier Data	Produsen data dari seluruh OPD pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Luaran Data	Data Tertuang pada SK Gubernur Sumsel Daftar Data
Customer Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	SPLP Geospasial : https://geoportal.sumselprov.go.id/ Metadata Statistik BPS : https://indah.bps.go.id/ Berita Sumsel : https://www.sumselprov.go.id/
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.01 APLIKASI LAYANAN PUBLIK



RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

11 aplikasi

7. SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.01.02-001
Modul	Penganggaran; Penatausahaan; Akuntansi dan Pelaporan; E-BMD; E-Dalev; Penganggaran Bappeda
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kemendagri untuk pengelolaan keuangan dan pelaporan daerah.
Fungsi Aplikasi	Penatausahaan APBD; konsolidasi data keuangan; penyusunan laporan.
Instansi	4. Badan Pengelolaan Keuangan d

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP); Layanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/ DPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (RKAP/DPPA) SKPD; Layanan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan urut Perintah Membayar SPM; Layanan Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Layanan Penyediaan Anggaran Kas; Layanan Pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD); Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan daerah; Layanan Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran daerah; Layanan pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD; Layanan Rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD; Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RPJPD, RKPD); Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran (RENJA Perangkat Daerah); Layanan Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah; Layanan Pembinaan dan Fasilitasi Perencanaan Kab/Kota; Layanan Pengenterian RKA Induk dan RKA Perubahan, DPA Induk dan DPA Perubahan
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya; Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah; Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha; Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Laporan
Inputan Data	Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov SumselDa; Data Pengajuan anggaran Daerah tiap OPD Pemprov Sumsel; Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Urat Perintah Membayar; Data Pengajuan SPP dan SPM dari Tiap OPD Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Data Pengajuan anggaran dari Tiap OPD; Data Pengajuan Laporan DPA/DPPA dari tiap OPD; Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan; Data Pengajuan Anggaran Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran; Data Pengajuan Anggaran Daerah Pelaksanaan Konsolidasi Seluruh Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD; Data Pengajuan Anggaran Daerah Rekonsiliasi Barang Milik pada SKPD; Data Perencanaan Pembangunan Daerah; Data Perencanaan Penggaran; Data Realisasi Kinerja Pembangunan Daerah triwulan; Data Dokumen Perencanaan Kab/Kota; Data RKA/DPA Perangkat Daerah
Supplier Data	Kasubbag Perencanaan tiap OPD; Kasubbag Keuangan tiap OPD; Kepala Badan/ Dinas selaku Pengguna Anggaran; SIPD RI Penatausahaan; SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan; Kasubbag umum dan kepegawaian; Perangkat Daerah Bappeda Kab/Kota; Perangkat Daerah; Bappeda Kab/kota; Seluruh Bidang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Luaran Data	Data Buku KUA dan PPAS dan/atau KUPA dan PPASP; Data Buku RKA dan DPA dan/atau RKAP dan DPPA; Data Verifikasi SPM dari tiap OPD; Data Verifikasi SP2D dari tiap OPD; Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Penyediaan Kas; Data Anggaran Per Triwulan Anggaran Daerah dari TW 1, TW 2, TW 3, TW 4 Pelaksanaan Penerbitan Surat Pencairan Dana (SPD); Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Penerimaan; Data RKUD Daerah Pengkoordinasian Akuntansi Pengeluaran; Data (dokumen, jurnal, laporan, atau sub-laporan); Data BA Rekon dari tiap



7. SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia)

	OPD; Data Perda RPJPD, Perda RPJMD, Perkada Renstra, Perkada RKPD, Perkada Renja; Data Renja Perangkat Daerah; Data Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Triwulan; Data SK Hasil Fasilitasi Dokumen Perencanaan Kab/Kota; Data Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah
Customer Data	4. Badan Pengelolaan Keuangan d; 9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	Badan Pengelolaan Keuangan d
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

8. E-LEARNING LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-002
Modul	-
Uraian Aplikasi	Platform pembelajaran daring LKPP untuk pelatihan pengadaan barang/jasa.
Fungsi Aplikasi	Penyelenggaraan pelatihan daring; manajemen peserta; penerbitan sertifikat.
Instansi	5. Badan Pengembangan Sumber Da
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Sertifikasi kompetensi
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Luaran	Data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan
Inputan Data	Data Layanan Sertifikasi Kompetensi

**8. E-LEARNING LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**

Supplier Data	Bidang sertifikasi dan pengelolaan kelembagaan
Luaran Data	Data Sertifikat Pelatihan Sertifikasi Kompetensi
Customer Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pihak Ke 3
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	Badan Pengembangan Sumber Da
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

9. E-DIKLAT (Elektronik Pendidikan dan Pelatihan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-003
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi kediklatan BPSDMD: basis data diklat, e-learning, dan e-library.
Fungsi Aplikasi	Basis data peserta diklat; pembelajaran daring; publikasi hasil diklat; sertifikasi.
Instansi	5. Badan Pengembangan Sumber Da
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pelatihan Teknis; Layanan Pelatihan Teknis Fungsional; Layanan Pelatihan Dasar CPNS; Layanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; Layanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator; Layanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Proses Bisnis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Luaran	Data Peserta Pelatihan BPSDMD dan Sertifikat Pelatihan

**9. E-DIKLAT (Elektronik Pendidikan dan Pelatihan)**

Inputan Data	Data Layanan Pelatihan Teknis; Data Layanan Pelatihan Teknis Fungsional; Data Pelatihan Dasar CPNS; Data Layanan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; Data Layanan Kepemimpinan Administrator; Data Layanan Kepemimpinan Pengawas
Supplier Data	Bidang Teknis Inti; Bidang Teknis Fungsional; Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Luaran Data	Data Sertifikat Pelatihan Teknis; Data Sertifikat Pelatihan Teknis Fungsional; Data Sertifikat Pelatihan Dasar CPNS; Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II; Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Administrator; Data Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
Customer Data	5. Badan Pengembangan Sumber Da
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pihak Ke 3
Sistem Penghubung Layanan	E-diklat (database diklat), e-learning (pembelajaran), e-library (publikasi hasil diklat)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	Badan Pengembangan Sumber Da
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

10. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-004
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE/Inaproc) untuk tender pengadaan barang/jasa.
Fungsi Aplikasi	Pengelolaan tender daring; pendaftaran penyedia; aktivasi akun penyedia.
Instansi	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Registrasi dan Verifikasi Akun
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa



10. SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

Luaran	ID yang Sudah Aktif
Inputan Data	Data Registrasi dan Verifikasi Akun
Supplier Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Luaran Data	Data Pengguna Aktif
Customer Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	1. SIRUP 2. SPSE 3. SIKAP 4. Katalog Inaproc
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

11. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-005
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) untuk perencanaan pengadaan.
Fungsi Aplikasi	Penyusunan & pengumuman RUP; identifikasi paket; aktivasi ID paket.
Instansi	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Rencana Umum Pengadaan
Proses Bisnis	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
Luaran	ID yang Sudah Aktif



11. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Inputan Data	Data Rencana Umum Pengadaan
Supplier Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Luaran Data	Data Pengguna SIRUP
Customer Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	1. SPSE 2. Katalog Inaproc
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

12. E-KATALOG (Katalog Elektronik Inaproc)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-006
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi e-Katalog LKPP (Katalog Inaproc) untuk pembelian via katalog elektronik.
Fungsi Aplikasi	Etalase produk; e-purchasing; aktivasi akun pengguna.
Instansi	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Verifikasi Role Pengguna
Proses Bisnis	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Luaran	Akun yang Sudah Aktif
Inputan Data	Data Verifikasi Role Pengguna



12. E-KATALOG (Katalog Elektronik Inaproc)

Supplier Data	Kasubag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Luaran Data	Data Pengguna Katalog
Customer Data	8. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	1. SIRUP
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

13. KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-007
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Kolaborasi Perencanaan & Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Bappenas.
Fungsi Aplikasi	Sinkronisasi RK/RPD; usulan kegiatan; integrasi perencanaan pusat-daerah.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Perencanaan DAK, Pengusulan Kewilayahan pada Pramusrenbang
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Dokumen RK dan RPD
Inputan Data	Data Mengenai Usulan Kegiatan yang diusulkan oleh Daerah
Supplier Data	K/L, OPD Provinsi, dan OPD Kabupaten/Kota

**13. KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran)**

Luaran Data	Data Kegiatan Usulan yang diAkomodir
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Dapodik,SIPDJD,E-Planing, SAKTI, Aplikasi RKA K/L, Satu DJA, Sirup, E-Sakip
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

14. E-KEPEGAWAIAN (Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-008
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi administrasi kepegawaian internal Bappeda.
Fungsi Aplikasi	Disposisi online; pengelolaan data pegawai; administrasi surat.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Disposisi Online
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Lembar Disposisi Online
Inputan Data	Data Disposisi Online
Supplier Data	OPD Perangkat Daerah
Luaran Data	Data Laporan Disposisi yang telah di perintahkan

**14. E-KEPEGAWAIAN (Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik)**

Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

15. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-009
Modul	-
Uraian Aplikasi	Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) untuk publikasi produk hukum daerah.
Fungsi Aplikasi	Dokumentasi produk hukum; pencarian Perda/Pergub/SK; publikasi.
Instansi	24. BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Proses Bisnis	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Luaran	Produk Hukum (Perda, Pergub, SK) yang dicari/diinginkan
Inputan Data	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Supplier Data	Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum
Luaran Data	Data Produk hukum (Perda, Pergub dan SK Provinsi)
Customer Data	24. BIRO HUKUM DAN HAM SETDA



15. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Seumur Hidup
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

16. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.01.02-010
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Srikandi (ANRI) untuk persuratan dan kearsipan dinamis terintegrasi.
Fungsi Aplikasi	Persuratan elektronik; tanda tangan digital; pengelolaan arsip dinamis.
Instansi	32. DINAS KEHUTANAN

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan proses surat-menyurat
Proses Bisnis	Penyusunan Arsip Dinamis
Luaran	Dokumen surat keluar di tanda tangani secara digital
Inputan Data	Data Arsip surat masuk/keluar
Supplier Data	Subbaagian Umum dan kepegawaian
Luaran Data	Data Dokumen surat masuk/keluar
Customer Data	32. DINAS KEHUTANAN

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

**16. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)**

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Seumur Hidup
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEHUTANAN
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

17. E-SKP (Elektronik Sertifikat Kelayakan Pengolahan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.01.02-011
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) hasil perikanan.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan SKP; penilaian kelayakan; penerbitan sertifikat.
Instansi	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Luaran	SKP
Inputan Data	Data Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan Perikanan
Supplier Data	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan
Luaran Data	—
Customer Data	—
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web



17. E-SKP (Elektronik Sertifikat Kelayakan Pengolahan)

Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Periodik
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAA Level 1	RAA.01 APLIKASI UMUM
RAA Level 2	RAA.01.02 APLIKASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

30 aplikasi

18. SIGNAL (Samsat Digital Nasional)	
IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-001
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan daring.
Fungsi Aplikasi	Pengesahan STNK tahunan; pembayaran PKB & SWDKLLJ; penerbitan kode bayar.
Instansi	2. Badan Pendapatan
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Luaran	Kode Bayar
Inputan Data	Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
Supplier Data	Kepolisian RI
Luaran Data	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor Tahunan secara Online (E-Signal)
Customer Data	2. Badan Pendapatan
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Mobile
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Melalui aplikasi layanan pada Platform Digital seperti : 1. Bank dan Mobile Banking (BCA, BRI, BNI, Mandiri, BSI dan Bank Pembangunan Daerah Tertentu) 2. Dompet Digital (LinkAja, GoPay, OVO dan DANA) 3. Marketplace dan Payment Gateway (Tokopedia, Blibli dan Gerai pembayaran modern dan payment gateway yang terhubung dengan sistem virtual account Signal)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	Badan Pendapatan
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS



18. SIGNAL (Samsat Digital Nasional)

RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

19. SOS (Samsat Online Sumsel)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.02.01-002
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Samsat daring Sumsel (SOS) untuk layanan pajak kendaraan bermotor.
Fungsi Aplikasi	Penetapan pajak (SKPD); pembayaran PKB daring; informasi objek pajak kendaraan.
Instansi	2. Badan Pendapatan

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Proses Bisnis	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Luaran	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Inputan Data	Data Electronic Registration Identification (ERI) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Supplier Data	Kepolisian RI
Luaran Data	Data Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pembayaran Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Customer Data	2. Badan Pendapatan

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD dan Pihak Ketiga
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	Badan Pendapatan
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU



20. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-003
Modul	-
Uraian Aplikasi	Dukungan pembayaran nontunai berbasis QRIS untuk layanan pada Badan Riset Daerah.
Fungsi Aplikasi	Pembayaran retribusi/layanan nontunai melalui QRIS.
Instansi	3. Badan Riset Daerah
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Kunjungan Wisata
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Luaran	Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata
Inputan Data	Data Survei Kepuasan Masyarakat Kunjungan Wisata
Supplier Data	Kasi Jasa dan Informasi
Luaran Data	Data Perda Retribusi Kunjungan Wisata
Customer Data	3. Badan Riset Daerah
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Mobile
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	—
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Belum Ada Keterangan
Unit Operasional Teknologi	Badan Riset Daerah
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU



21. OSS (Online Single Submission)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-004
Modul	Terintegrasi SIMPONI; RBA; Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi
Uraian Aplikasi	Sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha sektor kesehatan.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan perizinan berusaha; penerbitan rekomendasi teknis; integrasi data.
Instansi	10. DINAS KESEHATAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang; Layanan Rekomendasi Distributor Alat Kesehatan Cabang; Layanan laporan kegiatan Penanaman Modal berisi layanan untuk pelaporan perkembangan kegiatan usaha dan kegiatan realisasi investasi yang dibutuhkan pelaku usaha; Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Layanan Pemberian Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; Layanan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan; Layanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT); Layanan Rekomendasi Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD); Layanan Implementasi OSS; Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan; Layanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan; Layanan Rekomendasi Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Proses Bisnis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK; Pembangunan RS Beserta Sarana Pendukungnya; Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM; Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan; Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan; Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian; Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Luaran	Rekomtek Digital
Inputan Data	Data Perusahaan PBF; Data Distributor Alkes; Data Realisasi Investasi; Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Data Pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; Data Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan; Data Sertifikat Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT); Data Penerbitan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan, Produk dalam (PSAT PD); Data Profil Legalitas Koperasi Implementasi OSS; Data Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan; Data Pelaku usaha yang mengajukan permohonan; Data Perusahaan yang Mengajukan Izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Supplier Data	Pelaku Usaha; Pelaku usaha; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan; Pelaku Usaha Pengolahan Ikan; Pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); Pelaku Koperasi; Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPSBTP; Bidang kelembagaan usaha perkebunan dan penyuluhan; Perusahaan Pekerja Migran Indonesia
Luaran Data	Data Rekomendasi PBF Cabang; Data Rekomendasi Izin Distributor Alkes; Data Realisasi investasi PMDN dan PMA, data Perkembangan Proyek Investasi, rekapitulasi dan statistik relaisasi investasi; Data Perizinan Berusaha yang Diterbitkan; Data Rekapitulasi Rekomendasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; Data Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha Perikanan; Data Sertifikat SPPB PSAT; Data Sertifikat Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk dalam (PSAT PD); Data NIB, SIB, Sertifikat Standar; Data Surat Keterangan Rekom IUP-B; Data Surat Rekomendasi; Data Surat Rekomendasi izin Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Customer Data	10. DINAS KESEHATAN; 12. DPMTSP; 31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI; 33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN; 34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN ; 35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL; 40. DINAS PERKEBUNAN; 45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan



21. OSS (Online Single Submission)

Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	OSS
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KESEHATAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

22. WEB DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-005
Modul	-
Uraian Aplikasi	Situs web DPMPSTP sebagai kanal informasi perizinan dan penanaman modal.
Fungsi Aplikasi	Informasi layanan perizinan/nonperizinan; pengaduan; diseminasi.
Instansi	12. DPMPSTP
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Media Promosi Investasi dan Kerja Sama
Proses Bisnis	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Luaran	Informasi layanan perizinan dan non perizinan, informasi persyaratan dan Prosedur layanan, data dan statistik realisasi investasi PMA dan PMDN) Profil Investasi Daerah, berita Publikasi DPMPSTP P{rov Sumsel
Inputan Data	Data Promosi Investasi dan Kerja Sama
Supplier Data	Masyarakat/Pelaku Usaha
Luaran Data	Data Informasi Promosi Investasi dan Kerja Sama
Customer Data	12. DPMPSTP
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan

22. WEB DPMTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Seumur Hidup
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DPMTSP
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

23. SAI (Sistem Aplikasi Informasi) DPMTSP

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-006
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Aplikasi Informasi DPMTSP untuk data potensi dan realisasi investasi.
Fungsi Aplikasi	Pemetaan potensi wilayah; pencatatan realisasi investasi; pelaporan.
Instansi	12. DPMTSP
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Luaran	Dat peta Potensi Wilayah, data Realisasi PMA dan PMDN
Inputan Data	Data Menyediakan informasi mengenai potensi, peluang investasi, sumber daya, dan kondisi wilayah secara geografis untuk mendukung ppromosi investasi dan pengambilan Keputusan
Supplier Data	Masyarakat/Pelaku Usaha
Luaran Data	Data Peta sebaran investasi, satatistik dan tren investasi, data realisasi investasi(PMA dan PMDN)
Customer Data	12. DPMTSP
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web



23. SAI (Sistem Aplikasi Informasi) DPMPTSP

Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Periodik, Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	DPMPTSP
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

24. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-007
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA/Certificate of Origin) ekspor.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan SKA; verifikasi dokumen; penerbitan SKA.
Instansi	14. DINAS PERDAGANGAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pembuatan SKA (Surat Keterangan Asal)
Proses Bisnis	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
Luaran	Surat keterangan Asal
Inputan Data	Data Dari Perusahaan
Supplier Data	Dari Perusahaan
Luaran Data	Data Surat Keterangan Asal
Customer Data	14. DINAS PERDAGANGAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan

24. E-SKA (Elektronik Surat Keterangan Asal)

Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Tidak
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERDAGANGAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

25. INLISLITE (Integrated Library System)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-008
Modul	Portal Daerah
Uraian Aplikasi	Integrated Library System (INLISLite) Perpustakaan untuk otomatisasi perpustakaan.
Fungsi Aplikasi	Keanggotaan; sirkulasi peminjaman/pengembalian; katalog & basis data koleksi.
Instansi	17. DINAS PERPUSTAKAAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Anggota Perpustakaan; Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian) perpustakaan; Layanan Deposit
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Luaran	Kartu Anggota Perpustakaan
Inputan Data	Data Pengunjung Anggota Perpustakaan; Data Statistik Peminjaman dan Pengembalian; Data Pengunjung Deposit
Supplier Data	Masyarakat; Sekolah dan Masyarakat
Luaran Data	Data Kartu Anggota Perpustakaan; Data Jumlah Buku Yang di Pinjam dan dikembalikan pemustaka; Data Jumlah Kunjungan Deposit
Customer Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD

**25. INLISLITE (Integrated Library System)**

Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERPUSTAKAAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

26. DIARY SUMSEL (Digital Library Sumatera Selatan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-009
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi perpustakaan digital Diary Sumsel untuk akses bahan bacaan.
Fungsi Aplikasi	Peminjaman e-book; baca daring; koleksi digital.
Instansi	17. DINAS PERPUSTAKAAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Membaca; Layanan Referensi; Layanan Perpustakaan Anak; Layanan Diary Sumsel (Elektronik-Book); Layanan Pojok Baca Digital/Publik
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Relasi Media
Luaran	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Membaca; Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Referensi; Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Perpustakaan Anak; Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Diary Sumsel (Elektronik-Book) dst.
Inputan Data	Data Pengunjung Membaca; Data Pengunjung Referensi; Data Pengunjung Perpustakaan Anak; Data Pengunjung Diary Sumsel (Elektronik-Book); Data Pengunjung Pojok Baca Digital/Publik
Supplier Data	Masyarakat
Luaran Data	Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Membaca; Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Referensi; Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Perpustakaan Anak; Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Diary Sumsel (Elektronik-Book); Data Buku yang Dibaca oleh Pemustaka Pojok Baca Digital/Publik
Customer Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Mobile

**26. DIARY SUMSEL (Digital Library Sumatera Selatan)**

Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pihak Ke 3
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERPUSTAKAAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

27. SUMSEL MENAWAN (Website Dinas Perpustakaan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-010
Modul	-
Uraian Aplikasi	Situs web Dinas Perpustakaan (Sumsel Menawan) sebagai kanal informasi dan layanan.
Fungsi Aplikasi	Publikasi informasi; layanan daring; diseminasi koleksi & kegiatan.
Instansi	17. DINAS PERPUSTAKAAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Galeri Naskah Kuno dan Alih Media
Proses Bisnis	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
Luaran	Data Jumlah pengunjung di galeri naskah kuno
Inputan Data	Data Pengunjung Galeri Naskah Kuno dan Alih Media
Supplier Data	Sekolah dan Masyarakat
Luaran Data	Data Jumlah pengunjung di galeri naskah kuno
Customer Data	17. DINAS PERPUSTAKAAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan



27. SUMSEL MENAWAN (Website Dinas Perpustakaan)

Perangkat Keras Server	—
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Belum Ada Keterangan
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERPUSTAKAAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

28. GIWANG SUMSEL (Gerbang Informasi Wisata dan Budaya Sumatera Selatan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-011
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi informasi kebudayaan dan pariwisata Giwang Sumsel.
Fungsi Aplikasi	Penyediaan informasi budaya/wisata; promosi destinasi; layanan informasi.
Instansi	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
Proses Bisnis	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Luaran	Layanan Penyediaan Informasi
Inputan Data	Data Pusat Informasi Terpadu Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif
Supplier Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Luaran Data	Data Rekapitulasi data terkait kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
Customer Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Mobile
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pihak Ke 3

**28. GIWANG SUMSEL (Gerbang Informasi Wisata dan Budaya Sumatera Selatan)**

Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

29. AKAS (Aksara Ulu Sumatera Selatan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-012
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi transliterasi aksara Ulu Sumatera Selatan (AKAS).
Fungsi Aplikasi	Transliterasi aksara; pelestarian naskah; layanan alih aksara.
Instansi	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah
Proses Bisnis	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Luaran	Layanan Transliterasi
Inputan Data	Data Penerjemah Bahasa Lokal/Daerah
Supplier Data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Sumatera Selatan
Luaran Data	Data Rekapitulasi Varian Aksara Ulu
Customer Data	31. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pihak Ke 3
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan

29. AKAS (Aksara Ulu Sumatera Selatan)

Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWI
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

30. SONGKET (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-013
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Fungsi Aplikasi	Deteksi titik panas (hotspot); analisis & peringatan dini; pelaporan.
Instansi	32. DINAS KEHUTANAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan pengendalian dan penanggulangan kebakaran didalam kawasan hutan; Layanan akses data dan informasi mengenai Titik Panas (Hot Spot) di dalam kawasan hutan wilayah Sumatera Selatan
Proses Bisnis	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
Luaran	Analisis dan informasi titik panas, serta visualisasi peta interaktif
Inputan Data	Data Pemantauan titik panas kebakaran hutan; Data Pemantauan titik panas dalam kawasan hutan Sumatera Selatan
Supplier Data	Seksi Pengendalian Kebakaran hutan; Sipongi Kementerian Kehutanan
Luaran Data	Data Lokasi titik panas; Data Jumlah titik Panas dan lokasi dalam kawasan hutan Sumatera Selatan
Customer Data	32. DINAS KEHUTANAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	SiPongi+, MODIS, VIIRS

**30. SONGKET (Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu)**

Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEHUTANAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

31. ARCGIS (Aplikasi Sistem Informasi Geografis)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-014
Modul	-
Uraian Aplikasi	Perangkat lunak SIG (ArcGIS) untuk pemetaan kehutanan.
Fungsi Aplikasi	Pemetaan sebaran tanaman; analisis spasial; penyajian peta tematik.
Instansi	32. DINAS KEHUTANAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pembagian bibit pohon
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Luaran	Peta sebaran penanaman bibit
Inputan Data	Data Sebaran pembagian bibit
Supplier Data	Bidang PDAS RHL
Luaran Data	Data Lokasi Penanaman Pembagian Bibit Pohon
Customer Data	32. DINAS KEHUTANAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Desktop
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	—
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan

**31. ARCGIS (Aplikasi Sistem Informasi Geografis)**

Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Belum Ada Keterangan
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEHUTANAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

32. SI-ALAM (Sistem Informasi Perhutanan Sosial)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-015
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi perhutanan sosial (Si-Alam).
Fungsi Aplikasi	Pengusulan skema perhutanan sosial; verifikasi; penerbitan persetujuan.
Instansi	32. DINAS KEHUTANAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Peningkatan Pengetahuan dan Akses Program Perhutanan Sosial di Sumatera Selatan
Proses Bisnis	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
Luaran	Skema Perhutanan Sosial yang sesuai serta mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan skema perhutanan sosial
Inputan Data	Data Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Data Pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial dari Dinas Kehutanan dan Balai Perhutanan Sosial
Supplier Data	Seksi Perhutanan Sosial Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Luaran Data	Data Rekomendasi pengajuan Skema Perhutanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
Customer Data	32. DINAS KEHUTANAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Si-Pops (https://sips.lahanuntukkehidupan.id/)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan

**32. SI-ALAM (Sistem Informasi Perhutanan Sosial)**

Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEHUTANAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

33. E-SLO (Elektronik Surat Laik Operasi)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-016
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan SLO; verifikasi; penerbitan dokumen SLO.
Instansi	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Penerbitan e-SLO/HPK Kapal Perikanan
Proses Bisnis	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Luaran	Dokumen SLO
Inputan Data	Data Pengajuan SLO
Supplier Data	Fungsional Pengawas Perikanan
Luaran Data	Data Dokumen Standar Laik Operasi (SLO)
Customer Data	33. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Periodik

**33. E-SLO (Elektronik Surat Laik Operasi)**

Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

34. SISNAS NKV (Sistem Nasional Nomor Kontrol Veteriner)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-017
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem nasional Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk sertifikasi unit usaha produk hewan.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan NKV; penilaian unit usaha; penerbitan sertifikat NKV.
Instansi	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Proses Bisnis	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Luaran	Sertifikat NKV
Inputan Data	Data Pelayanan Publik Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Supplier Data	Pelaku usaha Pangan Asal Hewan (PAH)
Luaran Data	Data Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
Customer Data	34. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Https://oss.go.id/id
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan



34. SISNAS NKV (Sistem Nasional Nomor Kontrol Veteriner)

Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

35. ODS (Online Data System)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-018
Modul	-
Uraian Aplikasi	Online Data System (ODS) untuk legalitas dan sertifikasi koperasi & UMKM.
Fungsi Aplikasi	Pendaftaran data; verifikasi; penerbitan sertifikat.
Instansi	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Penerbitan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Luaran	Sertifikat
Inputan Data	Data Laporan RAT
Supplier Data	Gerakan Koperasi
Luaran Data	Data Sertifikat Nomor Induk Koperasi
Customer Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	NIB, AHU Kementerian Hukum.
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan



35. ODS (Online Data System)

Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

36. E-PENDAMPINGAN (Elektronik Pendampingan Koperasi dan UMKM)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-019
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi pendampingan koperasi dan UMKM daring (E-Pendampingan).
Fungsi Aplikasi	Penjadwalan pendampingan; rekomendasi teknis; monitoring.
Instansi	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Luaran	Recomteg
Inputan Data	Data Profil Legalitas Koperasi Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
Supplier Data	Pelaku Koperasi
Luaran Data	Data NIB, SIB Pengembangan Aplikasi E-Pendampingan
Customer Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD dan Masyarakat
Sistem Penghubung Layanan	Diskop UKM
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan



36. E-PENDAMPINGAN (Elektronik Pendampingan Koperasi dan UMKM)

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

37. WAG (WhatsApp Group)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.02.01-020
Modul	-
Uraian Aplikasi	Kanal komunikasi WhatsApp Group untuk informasi dan koordinasi UMKM.
Fungsi Aplikasi	Penyebaran informasi; komunikasi; koordinasi binaan.
Instansi	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan WAG Monitoring
Proses Bisnis	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
Luaran	Informasi dan Komunikasi WAG
Inputan Data	Data Profil Legalitas Koperasi WAG Monitoring
Supplier Data	Pelaku Koperasi
Luaran Data	Data NIB, SIB WAG Monitoring
Customer Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Mobile
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD dan Masyarakat
Sistem Penghubung Layanan	Diskop UKM
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

**37. WAG (WhatsApp Group)**

Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

38. SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-021
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan & Anak (Simfoni PPA).
Fungsi Aplikasi	Pencatatan kasus kekerasan; rekap/statistik; pelaporan layanan.
Instansi	38. DPPP
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak
Proses Bisnis	Kerjasama para pihak dalam pencegahan Ktp Kewenangan Provinsi
Luaran	Statistik/Rekapitulasi/Laporan Bulanan dan Tahunan Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Di Provinsi Sumatera Selatan
Inputan Data	Data Laporan Kekerasan Gender dan Anak
Supplier Data	UPTD PPA di Dinas Pengampu dan OPD dan K/L terkait di 17 Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan via kanal pengaduan berupa Pengaduan Langsung, Hotline Daerah, SAPA 129, Pelimpahan, Rujukan dan Penjangkauan Kasus.
Luaran Data	Data Laporan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Customer Data	38. DPPP
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	

**38. SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)**

Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DPPPA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

39. SIAPKERJA (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-022
Modul	-
Uraian Aplikasi	Platform Kemnaker (SiapKerja) untuk layanan ketenagakerjaan.
Fungsi Aplikasi	Pengesahan peraturan perusahaan; layanan hubungan industrial; informasi ketenagakerjaan.
Instansi	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) lintas Kab/ Kota dalam wilayah Sumatera Selatan.; Layanan Pendaftaran Perjanjian kerja Bersama (PKB) lintas Kab/Kota dalam wilayah Sumatera selatan; Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Luaran	Surat Keputusan Peraturan Perusahaan
Inputan Data	Data Perusahaan Yang Mengajukan Peraturan Perusahaan (PP); Data Perusahaan Yang Mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Data Siswa/siswi yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
Supplier Data	Perusahaan Terkait; Siswa Lulusan SMA/SMK yang berminat Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi
Luaran Data	Data Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP); Data Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Data Sertifikat pelatihan Berbasis Kompetensi
Customer Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan



39. SIAPKERJA (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

40. TKA DAERAH (Tenaga Kerja Asing Daerah)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.02.01-023
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA) daerah.
Fungsi Aplikasi	Rekomendasi/notifikasi TKA; pengawasan; penerbitan surat.
Instansi	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan Pembayaran Retribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel
Proses Bisnis	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
Luaran	Surat
Inputan Data	Data Rekap Retribusi yang diterima Disnakertrans Prov Sumsel
Supplier Data	Perusahaan TKA yang Bersangkutan
Luaran Data	Data Rekap Restribusi Penggunaan TKA Bidang Pentakerja Disnakertrans Prov Sumsel
Customer Data	45. DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

**40. TKA DAERAH (Tenaga Kerja Asing Daerah)**

Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS TENAGA KERJA DAN TRAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

41. SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-024
Modul	RSKMM; Farmasi; Billing; Terintegrasi PACS
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RS Khusus Mata.
Fungsi Aplikasi	Rekam medis elektronik; pelayanan pasien; resume medis.
Instansi	47. RS KHUSUS MATA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Jasa (Kesehatan Mata); Layanan Barang (Obat & Alkes Mata); Layanan Administrasi; Layanan Farmasi; Layanan Radiologi; Layanan Instalasi Gawat Darurat; Layanan Obstetri Neonatal Komprehensif; Layanan Instalasi Jantung Terpadu; Layanan Instalasi Bedah Sentral; Layanan Kamar Bersalin; Layanan Kamar Bayi Baru Lahir (KBBL); Layanan Hemodialisis Pasien Rutin Rawat Jalan; Layanan Hemodialisis Pasien Rawat Inap; Layanan Instalasi Medical Check Up; Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan; Layanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap; Layanan Rawat Inap; Layanan Instalasi Kamar Jenazah
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
Luaran	Resume Medis Digital
Inputan Data	Data Rekam Medis Mata; Data Inventori; Data Pasien Administrasi; Data Resep; Data Image Medis Radiologi RSJ ERNALDI BAHAR; Data Rekam Medis Instalasi Gawat Darurat; Data Ibu/Bayi; Data Kardiologi; Data Jadwal Operasi; Data Persalinan; Data Kelahiran; Data Profil HD; Data Klinis Hemodialisis Pasien Rawat Inap; Data Paket MCU; Data Program Terapi; Data Konsultasi; Data Rekam Medis Rawat Inap; Data Kematian
Supplier Data	Pasien; Apoteker; Petugas Admisi; Radiografer; Dokter Sp.JP; Dokter Spesialis; Bidan; Petugas Medis; Perawat RI; Klien; Dokter Sp.KFR; Perawat; Admin Jenazah
Luaran Data	Data Resume Medis / Laporan Medik; Data Etiket / Bukti Serah Barang; Data Kuitansi / Bukti Registrasi; Data Etiket & Obat; Data Hasil Rontgen; Data Produk Layanan IGD; Data Produk Layanan PONEK; Data Produk Layanan IJT; Data Produk Layanan IBS; Data Produk Layanan Kamar Bersalin; Data Produk Layanan KBBL; Data Produk Layanan HD Jalan; Data Produk Layanan HD Inap; Data Produk Layanan MCU; Data Produk Layanan Rehab Jalan; Data Produk Layanan Rehab Inap; Data Produk Layanan Rawat Inap; Data Produk Layanan Kamar Jenazah
Customer Data	47. RS KHUSUS MATA; 48. RSJ ERNALDI BAHAR ; 49. RSUD SITI FATIMAH
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD

**41. SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)**

Sistem Penghubung Layanan	BPJS Bridge
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	RS KHUSUS MATA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

42. RME (Rekam Medis Elektronik)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-025
Modul	Terintegrasi Mobile JKN
Uraian Aplikasi	Aplikasi rekam medis elektronik terintegrasi Mobile JKN.
Fungsi Aplikasi	Registrasi/pendaftaran; rekam medis; integrasi JKN.
Instansi	48. RSJ ERNALDI BAHAR
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pendaftaran Rawat Jalan; Layanan Pendaftaran Gawat Darurat; Layanan Pendaftaran Rawat Inap; Layanan Rawat Jalan Jiwa & Spesialis; Layanan Terapi Wicara & Okupasi; Layanan Fisioterapi; Layanan Gawat Darurat
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Luaran	Bukti Registrasi
Inputan Data	Data Pasien Pendaftaran Rawat Jalan; Data Pasien Pendaftaran Gawat Darurat; Data Pasien Pendaftaran Rawat Inap; Data Rekam Medis Rawat Jalan Jiwa & Spesialis; Data Terapi Wicara & Okupasi; Data Terapi Fisioterapi; Data Klinis Gawat Darurat
Supplier Data	Pasien; Perawat/Dokter; Terapis; Fisioterapis; Dokter IGD
Luaran Data	Data Lembar Registrasi; Data Lembar Registrasi IGD; Data Surat Perintah Rawat Inap; Data Surat Kontrol & Resep; Data Catatan Perkembangan Terapi Wicara & Okupasi; Data Catatan Perkembangan Fisioterapi; Data Status RI/RJ/Rujuk
Customer Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web/Mobile
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan



42. RME (Rekam Medis Elektronik)

Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Frista / Fingerprint
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source, Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	RSJ ERNALDI BAHAR
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

43. LIS (Laboratory Information System)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-026
Modul	Terintegrasi RME; Terintegrasi SIMRS
Uraian Aplikasi	Laboratory Information System (LIS) terintegrasi RME.
Fungsi Aplikasi	Order pemeriksaan lab; hasil & ekspertisi; integrasi rekam medis.
Instansi	48. RSJ ERNALDI BAHAR
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Laboratorium
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Luaran	Hasil Ekspertisi
Inputan Data	Data Sampel Laboratorium RSJ ERNALDI BAHAR; Data Sampel Laboratorium RSUD SITI FATIMAH
Supplier Data	Analisis Lab
Luaran Data	Data Hasil Lab Digital; Data Produk Layanan Laboratorium
Customer Data	48. RSJ ERNALDI BAHAR ; 49. RSUD SITI FATIMAH
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat

**43. LIS (Laboratory Information System)**

Sistem Penghubung Layanan	LIS-RME Bridge
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source, Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	RSJ ERNALDI BAHAR
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

44. MOBILE JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-027
Modul	Terintegrasi SIMRS
Uraian Aplikasi	Aplikasi Mobile JKN terintegrasi SIMRS untuk layanan pasien JKN.
Fungsi Aplikasi	Pendaftaran daring; resep & surat kontrol; integrasi JKN.
Instansi	49. RSUD SITI FATIMAH
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pasien Poliklinik
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Luaran	Resep & Surat Kontrol
Inputan Data	Data Nomor RM
Supplier Data	Pasien
Luaran Data	Data Produk Layanan Poliklinik
Customer Data	49. RSUD SITI FATIMAH
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web/Mobile
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	BPJS Bridge

**44. MOBILE JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)**

Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source, Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	RSUD SITI FATIMAH
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

45. PACS (Picture Archiving and Communication System)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-028
Modul	Terintegrasi SIMRS
Uraian Aplikasi	PACS radiologi terintegrasi SIMRS.
Fungsi Aplikasi	Penyimpanan citra; ekspertisi; distribusi hasil.
Instansi	49. RSUD SITI FATIMAH
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Radiologi
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Luaran	Hasil Ekspertisi
Inputan Data	Data Image Medis Radiologi RSUD SITI FATIMAH
Supplier Data	Radiografer
Luaran Data	Data Produk Layanan Radiologi
Customer Data	49. RSUD SITI FATIMAH
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	PACS Bridge
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan

**45. PACS (Picture Archiving and Communication System)**

Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source, Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	RSUD SITI FATIMAH
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

46. E-PRESCRIBING (Peresepan Elektronik)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-029
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi peresepan elektronik (E-Prescribing).
Fungsi Aplikasi	Penulisan resep digital; verifikasi farmasi; penyiapan etiket & obat.
Instansi	49. RSUD SITI FATIMAH
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Instalasi Farmasi Rawat Jalan dan IGD; Layanan Instalasi Farmasi Rawat Inap, ICU, NICU, dan PICU
Proses Bisnis	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Luaran	Etiket & Obat
Inputan Data	Data Resep Digital; Data Resep UDD
Supplier Data	Apoteker; Petugas Farmasi
Luaran Data	Data Produk Layanan Farmasi Jalan; Data Produk Layanan Farmasi Inap
Customer Data	49. RSUD SITI FATIMAH
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	SIMRS
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source, Proprietary/Private



46. E-PRESCRIBING (Pereseapan Elektronik)

Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	RSUD SITI FATIMAH
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU

47. KIM.ID (Kelompok Informasi Masyarakat)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.01-030
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM.id).
Fungsi Aplikasi	Profil KIM; pelaporan kegiatan; kemitraan informasi.
Instansi	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM
Proses Bisnis	Relasi Media
Luaran	Data profil KIM, laporan kegiatan kemitraan, dokumentasi kegiatan, bahan informasi publik, dan rekapitulasi pembinaan KIM
Inputan Data	Data Kemitraan Komunikasi Publik KIM
Supplier Data	KIM, Masyarakat, OPD Terkait, dan Pengelola Komunikasi Publik
Luaran Data	Data Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik melalui KIM
Customer Data	52. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan



47. KIM.ID (Kelompok Informasi Masyarakat)

Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORM
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.01 APLIKASI MISI TERTENTU



RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

16 aplikasi

48. E-LAYANAN (Layanan Kepegawaian Elektronik)	
IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-001
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi layanan kepegawaian daring BKD untuk pengelolaan administrasi ASN.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan tugas/izin belajar; penerbitan SK kepegawaian; pengelolaan berkas layanan ASN.
Instansi	1. Badan Kepegawaian
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pengajuan Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara; Layanan Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi; Layanan Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara; Layanan Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi; Layanan Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar; Layanan Izin Perceraian PNS; Layanan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun; Layanan Pengangkatan Pertama JFT Guru; Layanan Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing; Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu; Layanan Pemberhentian dari JFT; Layanan Pengangkatan Kembali Dalam JFT; Layanan Alih Jenjang dalam JFT; Layanan Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional; Layanan Penyesuaian JFT; Layanan Pengangkatan JFT Utama; Layanan Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT; Layanan Pengangkatan Pertama JFT NON Guru; Layanan Usul Pensiun BUP; Layanan Usul Pensiun Janda/Duda; Layanan Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS); Layanan Usul Kebutuhan JFT (Formasi); Layanan Usul Uji Kompetensi JFT; Layanan Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan; Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT; Layanan Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU; Layanan Kenaikan gaji berkala Kepala OPD; Layanan Peninjauan masa kerja; Layanan Pencantuman Gelar Akademik (PNS); Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PNS); Layanan Pencatuman Gelar Profesi (PPPK); Layanan Tugas Belajar PNS Secara Mandiri; Layanan Izin Keluar Negeri; Layanan Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara; Layanan Tanda Kehormatan Satyalancana; Layanan Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara; Layanan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara; Layanan Cuti Tahunan; Layanan Cuti Besar; Layanan Cuti Karena Alasan Penting; Layanan Cuti Sakit; Layanan Cuti Melahirkan; Layanan Perbaikan Nama PNS; Layanan Perbaikan NIP PNS; Layanan Izin Mengajar PNS; Layanan Permohonan Rekon SKP 2022; Layanan Perbaikan Nama PPPK; Layanan Peremajaan Pendidikan PPPK
Proses Bisnis	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Luaran	Surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar
Inputan Data	Data Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara; Data Surat Keterangan tidak dalam proses Hukuman Disiplin untuk Mutasi; Data Pengembalian Tugas Belajar Yang Dibiayai Negara; Data Izin Seleksi Masuk Perguruan Tinggi; Data Surat Keterangan Tidak Sedang Tugas Belajar; Data Izin Perceraian PNS; Data Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat untuk Pensiun; Data Pengangkatan Pertama JFT Guru; Data Pengangkatan Dalam JFT Melalui Penyesuaian/Inpassing; Data Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu; Data Pemberhentian dari JFT; Data Pengangkatan Kembali Dalam JFT; Data Alih Jenjang dalam JFT; Data Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional; Data Penyesuaian JFT; Data Pengangkatan JFT Utama; Data Perpindahan Dari Jabatan Lain dalam JFT; Data Pengangkatan Pertama JFT NON Guru; Data Usul Pensiun BUP; Data Usul Pensiun Janda/Duda; Data Usul Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS); Data Usul Kebutuhan JFT (Formasi); Data Usul Uji Kompetensi JFT; Data Usul pemindahan PNS tenaga kependidikan; Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFT; Data Usul Penyesuaian Nomenklatur JFU; Data Kenaikan gaji berkala Kepala OPD; Data Peninjauan masa kerja; Data Pencantuman Gelar Akademik (PNS); Data Pencatuman Gelar Profesi (PNS); Data Pencatuman Gelar Profesi (PPPK); Data Tugas Belajar PNS Secara Mandiri; Data Izin Keluar Negeri; Data Izin Cuti di Luar Tanggungan Negara; Data Tanda Kehormatan Satyalancana; Data Pengaktifan Kembali Cuti Diluar Tanggungan Negara; Data Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara; Data Cuti Tahunan; Data Cuti Besar; Data Cuti Karena Alasan Penting; Data Cuti Sakit; Data Cuti Melahirkan; Data Perbaikan Nama PNS; Data Perbaikan NIP PNS; Data Izin Mengajar PNS; Data Permohonan Rekon SKP 2022; Data Perbaikan Nama PPPK; Data Peremajaan Pendidikan PPPK
Supplier Data	Subbag Kepegawaian tiap OPD; Pengajuan mandiri



48. E-LAYANAN (Layanan Kepegawaian Elektronik)

Luaran Data	Data Surat Persetujuan Tugas Belajar / SK Tugas Belajar; Data Surat Keterangan Tidak Dalam Proses Hukuman Disiplin; Data Surat Pengembalian Tugas Belajar / SK Pengaktifan Kembali; Data Surat Izin Mengikuti Seleksi Perguruan Tinggi; Data Surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Pertimbangan Perceraian; Data Surat Keterangan Riwayat Disiplin; Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru; Data SK Pengangkatan JFT melalui Inpassing; Data SK Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional; Data SK Pemberhentian dari Jabatan Fungsional; Data SK Pengangkatan Kembali JFT; Data SK Alih Jenjang Jabatan Fungsional; Data Surat Penetapan/Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional; Data SK Penyesuaian Jabatan Fungsional; Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama; Data SK Pengangkatan ke Jabatan Fungsional dari Jabatan Lain; Data SK Pengangkatan Jabatan Fungsional Non Guru; Data SK Pensiun Batas Usia Pensiun; Data SK Pensiun Janda/Duda; Data SK Pensiun APS; Data Penetapan Formasi Jabatan Fungsional; Data Sertifikat/hasil Uji Kompetensi JFT; Data SK Mutasi/Pemindahan PNS Tenaga Kependidikan; Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFT; Data SK Penyesuaian Nomenklatur JFU; Data SK Kenaikan Gaji Berkala; Data SK Penetapan Peninjauan Masa Kerja; Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Akademik); Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PNS); Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Gelar Profesi PPPK); Data Surat Persetujuan Tugas Belajar Mandiri; Data Surat Izin Perjalanan Dinas/Izin Keluar Negeri; Data SK Cuti di Luar Tanggungan Negara; Data Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana; Data SK Pengaktifan Kembali dari CLTN; Data SK Perpanjangan CLTN; Data Surat Izin Cuti Tahunan; Data Surat Izin Cuti Besar; Data Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting; Data Surat Izin Cuti Sakit; Data Surat Izin Cuti Melahirkan; Data Surat Perubahan Data Kepegawaian (Nama); Data Surat Perbaikan Data NIP; Data Surat Izin Mengajar; Data Hasil Rekonsiliasi SKP; Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Nama); Data Surat Perubahan Data Kepegawaian PPPK (Pendidikan)
Customer Data	1. Badan Kepegawaian
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	—
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Belum Ada Keterangan
Unit Operasional Teknologi	Badan Kepegawaian
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

49. SIMPPSDBS (Sistem Informasi Manajemen Pengumpulan Sumbangan dan Undian Sosial)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-002
Modul	-

**49. SIMPPSDBS (Sistem Informasi Manajemen Pengumpulan Sumbangan dan Undian Sosial)**

Uraian Aplikasi	Aplikasi Kemensos untuk perizinan pengumpulan sumbangan dan undian sosial.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan izin/rekomendasi; verifikasi; penerbitan rekomendasi izin.
Instansi	6. DINAS SOSIAL
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi; Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional; Layanan Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Provinsi
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TSKS)
Luaran	Rekomendasi Izin
Inputan Data	Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Skala Provinsi; Data Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional; Data Bidang Pemberdayaan Sosial
Supplier Data	Bidang Pemberdayaan Sosial; Permohonan Masyarakat
Luaran Data	Data Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah; Data Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang; Data Izin Pengumpulan Uang dan Barang
Customer Data	6. DINAS SOSIAL
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS SOSIAL
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

50. DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-003
Modul	-



50. DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional)

Uraian Aplikasi	Aplikasi pengelolaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Fungsi Aplikasi	Pemadanan data kependudukan; pemutakhiran data penerima bantuan; verifikasi-validasi.
Instansi	6. DINAS SOSIAL
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Proses Bisnis	Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh, Peksos, TSKS)
Luaran	Data Kependudukan
Inputan Data	Data DTSEN
Supplier Data	DTSEN
Luaran Data	Data Bantuan Usaha
Customer Data	6. DINAS SOSIAL
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS SOSIAL
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

51. WEB BAPPEDA (Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-004
Modul	-
Uraian Aplikasi	Situs web Bappeda Sumsel sebagai kanal informasi dan layanan perencanaan.

**51. WEB BAPPEDA (Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)**

Fungsi Aplikasi	Publikasi informasi perencanaan; layanan informasi via email; diseminasi dokumen.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Konsultasi/Koordinasi;; Layanan Informasi/Permintaan Data;; Layanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;; Layanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Lembar Pelayanan dalam Bentuk Email
Inputan Data	Data Pengajuan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi; Data Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Data Pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Data Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Supplier Data	OPD Provinsi, Kabupaten/Kota
Luaran Data	Data Kegiatan Pelayanan Konsultasi/Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Data Kegiatan Konsultasi/Koordinasi Permintaan Data; Data Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Data Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perangkat Daerah
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

52. BTD BAPPEDA (Buku Tamu Digital Bappeda)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-005
Modul	-

**52. BTD BAPPEDA (Buku Tamu Digital Bappeda)**

Uraian Aplikasi	Aplikasi buku tamu digital untuk pencatatan kunjungan tamu Bappeda.
Fungsi Aplikasi	Registrasi kunjungan; bukti kunjungan; rekapitulasi tamu.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Buku Tamu Digital
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Lembar Bukti Kunjungan, Rekapitulasi Kunjungan
Inputan Data	Data Statistik Jumlah Pengunjung
Supplier Data	Seluruh Pengunjung Bappeda
Luaran Data	Data Statistik Kunjungan Tamu pada Bappeda
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

53. SIGERTAK PLUS (Sistem Informasi Gerakan Serentak Pembangunan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-006
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Bappeda (Sigertak Plus) untuk pelaporan dan monitoring program.

**53. SIGERTAK PLUS (Sistem Informasi Gerakan Serentak Pembangunan)**

Fungsi Aplikasi	Input data program; monitoring capaian; pelaporan.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Memantau, Mengelola dan Menanggulangi angka Kemiskinan di Sumatera Selatan
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Laporan Data Program
Inputan Data	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Supplier Data	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Luaran Data	Data Program Penanggulangan Kemiskinan yang diintervensi
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Diskominfo
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	OPD/Diskominfo
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

54. OPPKPKE (Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-007
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrem (Oppkpke).
Fungsi Aplikasi	Perencanaan intervensi kemiskinan; monitoring & evaluasi; pelaporan.



54. OPPKPKE (Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)

Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Pelaporan Dokumen Perencanaan Kemiskinan Daerah RPKD, RAT Laporan Oppkpke
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Laporan Dokumen Perencanaan dan Monitoring Evaluasi
Inputan Data	Data Dokumen RPKD, RAT dan Oppkpke
Supplier Data	Seluruh Kab/kota dan Provinsi
Luaran Data	Data Kemiskinan Daerah
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

55. AKSI BANGDA (Aksi Konvergensi Pembangunan Daerah)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-008
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi Kemendagri (Aksi Bangda) untuk konvergensi penanganan stunting.
Fungsi Aplikasi	Pencatatan aksi konvergensi; analisis situasi; pelaporan.
Instansi	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA



55. AKSI BANGDA (Aksi Konvergensi Pembangunan Daerah)

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)

Layanan	Layanan Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting
Proses Bisnis	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
Luaran	Laporan Analisis Situasi
Inputan Data	Data Sistem Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting
Supplier Data	Kecamatan, Puskesmas, dan PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana)
Luaran Data	Data Laporan Analisis Situasi Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi
Customer Data	9. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

56. SIMAMPU (Sistem Informasi Manajemen Pusdalops)

IDENTITAS APLIKASI

ID	SUMSEL-DAA.02.02-009
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Manajemen Pusdalops (Simampu) untuk kebencanaan.
Fungsi Aplikasi	Pencatatan kejadian bencana; informasi kebencanaan; pelaporan Pusdalops.
Instansi	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCAN

KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)



56. SIMAMPU (Sistem Informasi Manajemen Pusdalops)

Layanan	Layanan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
Proses Bisnis	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
Luaran	Data Informasi Kejadian bencana
Inputan Data	Data Kejadian Bencana
Supplier Data	BPBD PROV. Sumsel
Luaran Data	Data Laporan Kejadian Bencana
Customer Data	20. BADAN PENANGGULANGAN BENCAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	BADAN PENANGGULANGAN BENCAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

57. SI-HUTSOS (Sistem Informasi Hutan Sosial)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-010
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem informasi hutan sosial (Si-Hutsos) untuk data kelompok perhutanan sosial.
Fungsi Aplikasi	Pendataan kelompok; statistik & data tabular; pelaporan.
Instansi	32. DINAS KEHUTANAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan akses data dan informasi mengenai implementasi perhutanan sosial di provinsi sumsel

57. SI-HUTSOS (Sistem Informasi Hutan Sosial)

Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
Luaran	Data Statistik dan Data Tabular Kelompok PS baik itu KPS maupun KUPS
Inputan Data	Data Kelompok PS (KPS) dan Data Kelompok PS (KUPS) di Sumsel
Supplier Data	Dinas Kehutanan
Luaran Data	Data Statistik dan Data Tabular Kelompok PS baik itu KPS maupun KUPS
Customer Data	32. DINAS KEHUTANAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEHUTANAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

58. WANA LESTARI (Sistem Informasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-011
Modul	-
Uraian Aplikasi	Aplikasi pengamanan/penegakan kehutanan (Wana Lestari).
Fungsi Aplikasi	Input data & barang bukti; pelaporan kasus; monitoring.
Instansi	32. DINAS KEHUTANAN
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif
Proses Bisnis	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan

**58. WANA LESTARI (Sistem Informasi Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan)**

Luaran	Pengimputan Data serta Barang Bukti yang sudah di verifikasi tim untuk perlombaan Wana lestari tingkat Nasional
Inputan Data	Data Penilaian peserta calon penerima penghargaan Wana Lestari secara terbuka dan obyektif
Supplier Data	Dinas Kehutanan
Luaran Data	Data Pemenang Tingkat Provinis Berdasarkan Kategori seperti penyuluh kehutanan, KTH, HKM, HA dan HD
Customer Data	32. DINAS KEHUTANAN
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	—
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Open Source
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Belum Ada Keterangan
Unit Operasional Teknologi	DINAS KEHUTANAN
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

59. SIDT UMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-012
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT UMKM).
Fungsi Aplikasi	Pendataan UMKM; basis data tunggal; pelaporan.
Instansi	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Data Tunggal UMKM
Proses Bisnis	Perlu Konfirmasi OPD
Luaran	Data UMKM

**59. SIDT UMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Inputan Data	Data Profile UMKM (Data Usaha, Data Diri) Tunggal
Supplier Data	Enumerator
Luaran Data	Data UMKM Tunggal
Customer Data	35. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Pemerintah Pusat
Sistem Penghubung Layanan	Belum Ada Keterangan
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Proprietary/Private
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Pemerintah Pusat
Unit Operasional Teknologi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

60. SITAMPAN (Sistem Informasi Tanaman Pangan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-013
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Tanaman Pangan (Sitamp) untuk data produksi.
Fungsi Aplikasi	Pendataan luas tanam/panen/produksi; statistik; pelaporan.
Instansi	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Pangan
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Luaran	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Inputan Data	Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Pangan

**60. SITAMPAN (Sistem Informasi Tanaman Pangan)**

Supplier Data	Kabid Tanaman Pangan
Luaran Data	Data Capaian Produksi Tanaman Pangan
Customer Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Pentas Sitepat (Sistem Teknologi Pertanian Terpadu)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Periodik
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

61. SIHORTI (Sistem Informasi Tanaman Hortikultura)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-014
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Tanaman Hortikultura (Sihorti).
Fungsi Aplikasi	Pendataan luas tanam/panen/produksi hortikultura; statistik; pelaporan.
Instansi	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Informasi dan Data Produksi Tanaman Hortikultura
Proses Bisnis	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Luaran	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura (Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah)
Inputan Data	Data Capaian Kinerja Pertanian Tanaman Hortikultura
Supplier Data	Kabid Tanaman Hortikultura

**61. SIHORTI (Sistem Informasi Tanaman Hortikultura)**

Luaran Data	Data Capaian Produksi Tanaman Hortikultura
Customer Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Pentas Sitepat (Sistem Teknologi Pertanian Terpadu)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Periodik
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

62. SISARAS (Sistem Informasi Sarana dan Prasarana)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-015
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Sarana & Prasarana pertanian (Sisaras).
Fungsi Aplikasi	Pendataan alsintan; alokasi sarana; pemetaan distribusi.
Instansi	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Informasi dan Data Alat dan Mesin Pertanian
Proses Bisnis	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
Luaran	Alokasi Alat dan mesin Pertanian, Peta Digital LBS, Laporan (Alsintan, Penyaluran Pupuk, KUR)
Inputan Data	Data Alat dan mesin Pertanian. Peta Digital LBS (Luas Baku Sawah), Laporan Data Penyaluran Pupuk
Supplier Data	Kabid Sarana dan Prasarana
Luaran Data	Data Alat dan mesin Pertanian dan Laporan Data Penyaluran Pupuk

**62. SISARAS (Sistem Informasi Sarana dan Prasarana)**

Customer Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR	
Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Pentas Sitepat (Sistem Teknologi Pertanian Terpadu)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Periodik
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan
TATA KELOLA & KLASIFIKASI	
Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU

63. SIBENIH (Sistem Informasi Perbenihan)

IDENTITAS APLIKASI	
ID	SUMSEL-DAA.02.02-016
Modul	-
Uraian Aplikasi	Sistem Informasi Perbenihan (Sibenih) untuk sertifikasi benih.
Fungsi Aplikasi	Pengajuan sertifikasi benih; pengawasan mutu; penerbitan sertifikat.
Instansi	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
KETERHUBUNGAN (DEPENDENCY)	
Layanan	Layanan Informasi Perbenihan
Proses Bisnis	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan PM
Luaran	Layanan Sertifikasi Benih
Inputan Data	Data Prosedur Sistem informasi Perbenihan
Supplier Data	Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Luaran Data	Data Sertifikasi Benih
Customer Data	41. DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA



63. SIBENIH (Sistem Informasi Perbenihan)

TEKNOLOGI & INFRASTRUKTUR

Basis Aplikasi	Web
Komputasi Awan	Belum Ada Keterangan
Perangkat Keras Server	Internal OPD
Sistem Penghubung Layanan	Pentas Sitepat (Sistem Teknologi Pertanian Terpadu)
Jaringan Intra Pemerintah	Belum Ada Keterangan
Tipe Lisensi Aplikasi	Lisensi Periodik
Bahasa Pemrograman	Belum Ada Keterangan
Kerangka Pengembangan	Belum Ada Keterangan
Nama Basis Data	Belum Ada Keterangan

TATA KELOLA & KLASIFIKASI

Unit Pengembang	Internal OPD
Unit Operasional Teknologi	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PA
RAA Level 1	RAA.02 APLIKASI KHUSUS
RAA Level 2	RAA.02.02 APLIKASI FUNGSI TERTENTU



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



METADATA

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TIK

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

— 2026 —





Metadata

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2026

*Dokumen ini memuat seluruh data inventarisasi aset infrastruktur
dari Lembar Kerja SI-01 sampai dengan FK-01*



Daftar Isi

Daftar Isi	3
1. Ringkasan Data	4
2. SI-01 — Sistem Penghubung Layanan	5
3. SI-02 — Jaringan Intra Pemerintah	6
4. PL-01 — Perangkat Lunak Platform	7
5. PL-02 — Perangkat Keras Server	8
6. PL-03 — Perangkat Keras Periferal	9
6.1 AC Unit	9
6.2 TV Monitoring	9
7. PL-04 — Perangkat Keras Media Penyimpan	10
8. PL-05 — Perangkat Keras Keamanan	11
9. PL-06 — Komputasi Awan	12
10. PL-07 — Perangkat Keras Jaringan	13
10.1 Atribut Seragam (berlaku untuk seluruh 61 perangkat)	13
10.2 Daftar Perangkat	13
11. FK-01 — Fasilitas Komputasi	16

(Klik kanan pada daftar isi lalu pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.)



1. Ringkasan Data

Dokumen ini merangkum seluruh data aset infrastruktur yang tercatat pada lembar kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Setiap aset telah diklasifikasikan mengikuti Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI) Level 1 sampai Level 3 serta diberi penomoran identitas dengan format SUMSEL-DAI.

No	Lembar Kerja	Jumlah	Domain RAI
1	SI-01 — Sistem Penghubung Layanan	1	RAI.02 Sistem Integrasi
2	SI-02 — Jaringan Intra Pemerintah	1	RAI.02 Sistem Integrasi
3	PL-01 — Perangkat Lunak Platform	1	RAI.03 Platform
4	PL-02 — Perangkat Keras Server	1	RAI.03 Platform
5	PL-03 — Perangkat Keras Periferal	2	RAI.03 Platform
6	PL-04 — Perangkat Keras Media Penyimpan	1	RAI.03 Platform
7	PL-05 — Perangkat Keras Keamanan	1	RAI.03 Platform
8	PL-06 — Komputasi Awan	1	RAI.03 Platform
9	PL-07 — Perangkat Keras Jaringan	61	RAI.03 Platform
10	FK-01 — Fasilitas Komputasi	1	RAI.01 Fasilitas Komputasi
-	TOTAL ASET	71	—

2. SI-01 — Sistem Penghubung Layanan

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	SPLP Pusat
ID	SUMSEL-DAI.02.02.01.01
Deskripsi Sistem Penghubung	Sistem penghubung layanan pusat
Jenis Sistem Penghubung	Sistem Penghubung Pemerintah
Status Kepemilikan	Instansi Pemerintah Lain
Nama Pemilik	Pemerintah Pusat (Komdigi)
← Aplikasi (Dependency)	Aplikasi Satu Data Sumsel, JDIH
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.02 Sistem Integrasi
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.02.02 Sistem Penghubung
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

3. SI-02 — Jaringan Intra Pemerintah

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Jaringan	Internet Bandwidth Data Center Dedicated 1000 Mbps
ID	SUMSEL-DAI.02.01.04.01
Deskripsi Jaringan	Layanan internet dedicated 2 ISP
Jenis Jaringan	Internet Dedicated
Kepemilikan	Pihak Ketiga
Nama Pemilik	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Integra
Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bidang TIK dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Bandwidth	Total = 1000 Mbps PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Bandwidth 600 Mbps dan PT Integra Bandwidth 400 Mbps
Tipe Media Jaringan	Fiber Optic
Media Lainnya	Tidak ada
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.02 Sistem Integrasi
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.02.01 Jaringan Intra
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum
→ Instansi (Dependency)	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

4. PL-01 — Perangkat Lunak Platform

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Perangkat Lunak	Proxmox VE
ID	SUMSEL-DAI.03.01.07.01
Deskripsi Perangkat Lunak	Platform Open Source untuk virtualisasi server (Hypervisor) berbasis KVM dan LXC.
Tipe Perangkat Lunak	Sistem Utilitas
Jenis Sistem Operasi (diisi jika tipe perangkat lunak adalah sistem operasi)	Unix
Jenis Lisensi	Kode Sumber Terbuka
Nama Pemilik Lisensi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Tidak ada
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	Data Center Diskominfo Prov. Sumatera Selatan
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

5. PL-02 — Perangkat Keras Server

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Server	pve-dashboard
ID	SUMSEL-DAI.03.01.01.01
Deskripsi Server	ProLiant DL380 Gen11 (P52561-B21), 64 x Intel(R) Xeon(R) Gold 5416S (2 Sockets) , 128GiB System Memory. Storage 8 TB
Jenis Penggunaan Server	Server Aplikasi
Status Kepemilikan	Sendiri
Nama Pemilik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Unit Pengelola Server	Bidang TIK dan Persandian
Lokasi Perangkat Lunak Server	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan di Kantor Gubernur
→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Proxmox VE
Kapasitas Memori	4*32GB
Jumlah Kapasitas Penyimpanan	8 TB
Teknik Penyimpanan	Raid 10
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.01.01 Server
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

6. PL-03 — Perangkat Keras Periferal

Lembar kerja ini memuat 2 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

6.1 AC Unit

Atribut	Nilai
Nama Perangkat Periferal	AC Unit
ID	SUMSEL-DAI.03.01.05.01
Deskripsi Periferal	Air Conditioner untuk ruang server
Tipe Periferal	Input
Lokasi Penempatan Periferal	Data Center Diskominfo Prov. Sumatera Selatan
Unit Pengelola Network/Communication Device	Bidan TIK dan Persandian
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.01.05 Peripheral
→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	Data Center Diskominfo Prov. Sumatera Selatan
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

6.2 TV Monitoring

Atribut	Nilai
Nama Perangkat Periferal	TV Monitoring
ID	SUMSEL-DAI.03.01.05.02
Deskripsi Periferal	Untuk menampilkan monitoring
Tipe Periferal	Output
Lokasi Penempatan Periferal	Data Center Diskominfo Prov. Sumatera Selatan
Unit Pengelola Network/Communication Device	Bidan TIK dan Persandian
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.01.05 Peripheral
→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	Data Center Diskominfo Prov. Sumatera Selatan
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

7. PL-04 — Perangkat Keras Media Penyimpan

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Data Storage	NAS Synology ds225+
ID	SUMSEL-DAI.03.01.02.01
Deskripsi Data Storage	Penyimpanan VM dan Container Server
← Data dan Informasi (Dependency)	Backup VM dan Container Server Proxmox
Status Kepemilikan	Sendiri
Nama Pemilik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Unit Pengelola Data Storage	Bidang TIK dan Persandian
Lokasi Data Storage	Data Center Diskominfo Prov. Sumatera Selatan
Kapasitas Penyimpanan	4 TB
Metode Akses Data Sharing	Network Attached Storage (NAS)
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	Server Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

8. PL-05 — Perangkat Keras Keamanan

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Perangkat Keamanan	SANGFOR Network Secure
ID	SUMSEL-DAI.03.01.04.01
Deskripsi Security Device	Perangkat firewall utama yang mengatur dan menyaring lalu lintas jaringan keluar-masuk
Tipe Security Device	Firewall
Status Kepemilikan	Sendiri
Nama Pemilik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
Unit Pengelola Security Device	Bidang TIK dan Persandian
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	Data Center Diskominfo Prov. Sumatera Selatan
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

9. PL-06 — Komputasi Awan

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Government Cloud	Pusat Data Nasional Sementara
ID	SUMSEL-DAI.03.02.02.01
Deskripsi Government Cloud	Layanan cloud infrastruktur dari Komdigi untuk instansi pusat & daerah
Tipe Goverment Cloud	IaaS
Status Kepemilikan	Instansi Pemerintah Lain
Nama Pemilik	Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Biaya Layanan	Gratis (APBN)
Unit Pengembang Government Cloud	Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital
→ Unit Operasional Government Cloud (Dependency)	Diskominfo Kabupaten GunungKidul
Jangka Waktu Pelayanan	Tidak Ditentukan
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.02 Teknologi Awan
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.02.02 IaaS
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Kabupaten GunungKidul

10. PL-07 — Perangkat Keras Jaringan

Lembar kerja ini memuat 61 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

10.1 Atribut Seragam (berlaku untuk seluruh 61 perangkat)

Atribut	Nilai
Deskripsi Network/Communication Device	Access Point untuk pengguna wifi
Tipe Network/Communication Device	Wireless Equipment
Status Kepemilikan	Pihak Ketiga
Nama Pemilik	Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan
Unit Pengelola Network/Communication Device	Bidan TIK dan Persandian
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.03 Platform
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
→ Instansi (Dependency)	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

10.2 Daftar Perangkat

No	ID	Nama Network/Communication Device
1	SUMSEL-DAI.03.01.03.01	AP R-RADIO
2	SUMSEL-DAI.03.01.03.02	AP RUANG_BIRO_PEMERINTAHAN_DAN_OTONOMI_DAERAH
3	SUMSEL-DAI.03.01.03.03	AP RUANG_BIRO_HUKUM_DAN_HAM
4	SUMSEL-DAI.03.01.03.04	AP R-HUMAS-BAG-AUDIO-VISUAL
5	SUMSEL-DAI.03.01.03.05	AP RUANG_BIRO_ORGANISASI
6	SUMSEL-DAI.03.01.03.06	AP RUANG_BIRO_HUMAS
7	SUMSEL-DAI.03.01.03.07	AP AUDITORIUM-BINA-PRAJA-1
8	SUMSEL-DAI.03.01.03.08	AP RUANG_RAPAT_BINAPRAJA
9	SUMSEL-DAI.03.01.03.09	AP RUANG_KASI_PERSANDIAN
10	SUMSEL-DAI.03.01.03.10	AP AUDITORIUM-BINA-PRAJA-2
11	SUMSEL-DAI.03.01.03.11	AP AUDITORIUM-BINA-PRAJA-3
12	SUMSEL-DAI.03.01.03.12	AP RUANG-SEKDAR-RAPAT-BIRO-ORGANISASI
13	SUMSEL-DAI.03.01.03.13	AP R-KEPUTUSAN-BIRO-HUKUM
14	SUMSEL-DAI.03.01.03.14	AP R-BAG-PEMBINAAN-APARATUR-BIRO-ORGANISASI
15	SUMSEL-DAI.03.01.03.15	AP RUANG-RAPAT-SEKDA
16	SUMSEL-DAI.03.01.03.16	AP RUANG-STAFF-SEKDA
17	SUMSEL-DAI.03.01.03.17	AP R-KEPALA-BIRO-ORGANISASI
18	SUMSEL-DAI.03.01.03.18	AP RUANG-BATAS
19	SUMSEL-DAI.03.01.03.19	AP R-KABAG-PUB-BIRO-PEMERINTAHAN-DAN-OTONOMI-DAERAH



No	ID	Nama Network/Communication Device
20	SUMSEL-DAI.03.01.03.20	AP R-TU-BIRO-BIRO-HUKUM
21	SUMSEL-DAI.03.01.03.21	AP R-TATA-LAKSANA-BIRO-ORGANISASI
22	SUMSEL-DAI.03.01.03.22	AP R-RAPAT-BIRO-HUKUM
23	SUMSEL-DAI.03.01.03.23	AP R-KARO-BIRO-ADPEM
24	SUMSEL-DAI.03.01.03.24	AP R-PEMPUS-BIRO-ADPEM
25	SUMSEL-DAI.03.01.03.25	AP R-RAPAT-BIRO-ADPEM
26	SUMSEL-DAI.03.01.03.26	AP R-BAG-AGAMA-BIRO-KESRA
27	SUMSEL-DAI.03.01.03.27	AP R-BAG-KESRA-BIRO-KESRA
28	SUMSEL-DAI.03.01.03.28	AP R-RAPAT-STAF-AHLI-GUBERNUR
29	SUMSEL-DAI.03.01.03.29	AP RUANG_PRODUKSI
30	SUMSEL-DAI.03.01.03.30	AP R-KARO-HUKUM
31	SUMSEL-DAI.03.01.03.31	AP R-STAF-KARO-HUKUM-BIRO-HUKUM
32	SUMSEL-DAI.03.01.03.32	AP R-BIRO-ADPEM
33	SUMSEL-DAI.03.01.03.33	AP R-STAF-AHLI-GUBERNUR
34	SUMSEL-DAI.03.01.03.34	AP R-TU-BIRO-HUMAS
35	SUMSEL-DAI.03.01.03.35	AP R-BAG-DPPO-BIRO-KESRA
36	SUMSEL-DAI.03.01.03.36	AP R-RAPAT-BIRO-KESRA
37	SUMSEL-DAI.03.01.03.37	AP R-RAPAT-BIRO-PEMERINTAHAN-DAN-OTONOMI
38	SUMSEL-DAI.03.01.03.38	AP R-BAG-OTONOMI-DAERAH-BIRO-PEMERINTAHAN
39	SUMSEL-DAI.03.01.03.39	AP R-BAG-PERUNDANG-UNDANGAN-BIRO-HUKUM
40	SUMSEL-DAI.03.01.03.40	AP R-KABAG-PROTOKOL-BIRO-HUMAS
41	SUMSEL-DAI.03.01.03.41	AP RUANG_PEP_BIRO_ADMINISTRASI_PEMBANGUNAN
42	SUMSEL-DAI.03.01.03.42	AP RUANG_BIRO_KESEJAHTERAAN
43	SUMSEL-DAI.03.01.03.43	AP RUANG_KERJA_ASISTEN_III
44	SUMSEL-DAI.03.01.03.44	AP RUANG_RAPAT_ASISTEN_II
45	SUMSEL-DAI.03.01.03.45	AP RUANG_RAPAT_SEKDA
46	SUMSEL-DAI.03.01.03.46	AP RUANG_KERJA_ASISTEN_1
47	SUMSEL-DAI.03.01.03.47	AP RUANG_RAPAT_ASISTEN_1
48	SUMSEL-DAI.03.01.03.48	AP RUANG_BIRO_PEREKONOMIAN
49	SUMSEL-DAI.03.01.03.49	AP RUANG_KERJA_SEKDA
50	SUMSEL-DAI.03.01.03.50	AP RUANG_RAPAT_ASISTEN_III
51	SUMSEL-DAI.03.01.03.51	AP RUANG_KERJA_ASISTEN_III
52	SUMSEL-DAI.03.01.03.52	AP R-HUMAS-HUBUNGAN-MEDIA-DAN-KERJA-SAMA
53	SUMSEL-DAI.03.01.03.53	AP RUANG_PKK_BIRO_UMUM
54	SUMSEL-DAI.03.01.03.54	AP RUANG_MEDIACENTER



panrb
PENGANTARAN
PERUBAHAN DAN APABATUN HEDANA
SARAN REFORMASI BERKUALITAS



No	ID	Nama Network/Communication Device
55	SUMSEL-DAI.03.01.03.55	AP RUANG_GUBERNUR
56	SUMSEL-DAI.03.01.03.56	AP RUANG_RAPAT_GUBERNUR
57	SUMSEL-DAI.03.01.03.57	AP R-SARANA-PEREKONOMIAN
58	SUMSEL-DAI.03.01.03.58	AP R-PPID
59	SUMSEL-DAI.03.01.03.59	AP R-TUNGGU-TAMU-GUBERNUR
60	SUMSEL-DAI.03.01.03.60	AP RUANG_WAGUB
61	SUMSEL-DAI.03.01.03.61	AP R-PROTOKOL-BIRO-HUMAS

11. FK-01 — Fasilitas Komputasi

Lembar kerja ini memuat 1 aset. Berikut rincian lengkap seluruh atribut yang terisi.

Atribut	Nilai
Nama Fasilitas Komputasi	Data Center Diskominfo Prov. Sumsel
ID	SUMSEL-DAI.01.01.03.01
Bandwidth Intranet	1000 Mbps
Bandwidth Internet	1000 Mbps
Lokasi	Data Center Diskominfo Prov. Sumsel
Kepemilikan(Information)	Sendiri
Unit Kerja Penanggung Jawab - Merupakan unit kerja pengelola yang bertanggung jawab atas operasional fasilitas	Bidang TIK dan Persandian
→ RAI Level 1 (Dependency)	RAI.01 Fasilitas Komputasi
→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI.01.01 Pusat Data
→ RAI Level 3 (Dependency)	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



METADATA

ARSITEKTUR KEAMANAN INFORMASI

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

— • 2026 • —





METADATA

ARSITEKTUR KEAMANAN PEMERINTAH DIGITAL

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2026

PENGANTAR

Dokumen ini memuat seluruh data kegiatan keamanan yang tercatat pada lembar kerja Sheet 1 sampai dengan Sheet 7. Data disalin apa adanya tanpa perubahan isi. Setiap tabel didahului penjelasan mengenai kegiatan yang dicatat dan arti setiap kolom di dalamnya, agar dapat dipahami oleh pembaca yang belum mengenal istilah keamanan informasi.

Setiap kegiatan memiliki nomor identitas dengan pola SUMSEL-DAK.[KODE].[NOMOR]. Kode menunjukkan jenis kegiatan, misalnya AK untuk audit keamanan dan PI untuk penanganan insiden. Nomor menunjukkan urutan pencatatan pada masing-masing lembar kerja.

DAFTAR ISI

Bab	Judul	Jumlah Data
1	Audit Keamanan	2 kegiatan
2	Identifikasi Kerentanan	2 kegiatan
3	Penanganan Insiden	2 kegiatan
4	Edukasi Kesadaran	2 kegiatan
5	Kelaikan Keamanan	2 kegiatan
6	Standar dan Prosedur	2 kegiatan
7	Peningkatan Keamanan	2 kegiatan
	Jumlah keseluruhan	14 kegiatan

BAB 1 AUDIT KEAMANAN

Bab ini mencatat kegiatan pemeriksaan keamanan yang dilakukan terhadap sistem elektronik milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tercatat dua kegiatan audit.

Tabel pada bab ini memuat enam keterangan. Deskripsi Kegiatan menjelaskan cakupan pemeriksaan. Hasil Audit menyatakan kesimpulan pemeriksaan, dengan pilihan bertingkat mulai dari kurang memadai, memadai, hingga perlu peningkatan. Jenis Audit menyatakan pelaksanaannya, yaitu Internal apabila dilakukan tim sendiri atau Eksternal apabila dilakukan auditor dari luar instansi. Tindak Lanjut menyatakan sejauh mana temuan audit telah diperbaiki, mulai dari belum ditindaklanjuti hingga penuh ditindaklanjuti. Tanggal Kegiatan menunjukkan waktu pelaksanaan.

1.1 Audit Keamanan Portal Layanan Digital Sumsel

Tabel berikut mencatat audit terhadap Portal Layanan Digital. Pada kolom Deskripsi tercantum empat hal yang diperiksa, yaitu keamanan aplikasi, manajemen akses, kelengkapan audit log, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kolom Hasil Audit berisi perlu peningkatan, yang berarti masih terdapat temuan yang harus dibenahi. Kolom Jenis Audit berisi Internal karena pemeriksaan dilakukan oleh tim sendiri, dan kolom Tindak Lanjut menyatakan sebagian besar temuan telah diperbaiki.

ID	SUMSEL-DAK.AK.01
Nama Kegiatan	Audit Keamanan Portal Layanan Digital Sumsel
Deskripsi Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Pelaksanaan audit komprehensif terhadap Portal Layanan Digital Pemprov Sumsel mencakup keamanan aplikasi, manajemen akses, kelengkapan audit log, serta kepatuhan terhadap UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi.
Hasil Audit Keamanan SPBE	c. perlu peningkatan
Jenis Audit Keamanan	Internal
Tindak Lanjut Audit Keamanan	c. sebagian besar ditindaklanjuti
Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	15 March 2026

1.2 Audit Keamanan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Tabel berikut mencatat audit terhadap Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEG, yang mengelola data aparatur sipil negara. Kolom Jenis Audit berisi Eksternal, yang berarti pemeriksaan dilakukan auditor bersertifikat dari luar instansi. Kolom Hasil Audit berisi memadai, dan kolom Tindak Lanjut menyatakan seluruh temuan telah ditindaklanjuti. Sebagaimana disebut pada kolom Deskripsi, audit ini dilakukan sebelum sistem diintegrasikan dengan layanan kepegawaian nasional pada Badan Kepegawaian Negara.

ID	SUMSEL-DAK.AK.02



Nama Kegiatan	Audit Keamanan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
Deskripsi Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Audit keamanan SIMPEG Provinsi yang mengelola data ASN Pemprov Sumsel oleh auditor eksternal bersertifikasi, sebelum integrasi dengan layanan ASN nasional BKN.
Hasil Audit Keamanan SPBE	b. memadai
Jenis Audit Keamanan	Eksternal
Tindak Lanjut Audit Keamanan	d. penuh ditindaklanjuti
Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	20 May 2026

BAB 2 IDENTIFIKASI KERENTANAN

Bab ini mencatat kegiatan pencarian celah keamanan pada sistem sebelum celah tersebut dimanfaatkan pihak yang tidak berhak. Tercatat dua kegiatan.

Tabel pada bab ini memuat tiga keterangan. Deskripsi Kegiatan menjelaskan metode pengujian dan bagian sistem yang diuji. Tanggal Kegiatan menunjukkan waktu pelaksanaan. Nomor identitas pada kolom ID menggunakan kode IK. Dua metode disebut dalam bab ini, yaitu vulnerability assessment yang mendata celah keamanan, dan penetration testing yang mencoba menembus sistem secara terkendali dengan izin pemilik sistem.

2.1 Vulnerability Assessment Website sumselprov.go.id

Tabel berikut mencatat pengujian terhadap laman resmi sumselprov.go.id. Kolom Deskripsi menyebut acuan pengujian, yaitu OWASP Top 10, suatu daftar sepuluh jenis celah keamanan aplikasi web yang paling sering ditemukan. Lima hal yang diperiksa disebutkan pada kolom tersebut, yaitu konfigurasi SSL/TLS yang mengamankan sambungan, SQL injection dan XSS yang merupakan teknik penyusupan melalui kolom isian, kesalahan konfigurasi keamanan, serta komponen perangkat lunak yang tidak diperbarui.

ID	SUMSEL-DAK.IK.01
Nama Kegiatan	Vulnerability Assessment Website sumselprov.go.id
Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Penilaian kerentanan menggunakan framework OWASP Top 10 terhadap website resmi Pemprov Sumsel, mencakup konfigurasi SSL/TLS, SQL injection, XSS, security misconfiguration, dan outdated components.
Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	10 March 2026

2.2 Penetration Testing Aplikasi e-Planning & e-Budgeting

Tabel berikut mencatat pengujian penetrasi terhadap aplikasi e-Planning dan e-Budgeting. Kolom Deskripsi menyebut dua sudut pengujian. Black-box berarti penguji tidak diberi akses maupun informasi awal, menyerupai posisi penyerang dari luar. Grey-box berarti penguji diberi akses terbatas, menyerupai posisi pengguna yang menyalahgunakan wewenangnya. Empat aspek yang diuji juga tercantum, yaitu otentikasi, otorisasi, alur logika aplikasi, dan keamanan antarmuka pemrograman atau API. Pengujian dilakukan sebelum aplikasi disambungkan ke Portal Layanan Digital.

ID	SUMSEL-DAK.IK.02
Nama Kegiatan	Penetration Testing Aplikasi e-Planning & e-Budgeting



Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Pengujian penetrasi metode black-box dan grey-box terhadap aplikasi perencanaan-penganggaran sebelum integrasi dengan Portal Layanan Digital. Mencakup uji otentikasi, otorisasi, business logic, dan API security.
Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	05 June 2026

BAB 3 PENANGANAN INSIDEN

Bab ini mencatat gangguan keamanan yang benar-benar terjadi beserta tindakan penanganannya. Penanganan dilakukan oleh CSIRT, yaitu tim tanggap insiden siber di lingkungan Pemerintah Provinsi. Tercatat dua insiden.

Tabel pada bab ini memuat empat keterangan. Deskripsi Kegiatan menguraikan kejadian dan langkah penanganannya. Tanggal Kegiatan menunjukkan waktu penanganan. Nilai Kematangan menyatakan mutu proses penanganan dalam lima tingkat. Level 1 berarti penanganan masih bersifat rintisan. Level 2 berarti sudah terkelola. Level 3 berarti prosedurnya telah baku dan terdokumentasi. Level 4 berarti hasil penanganan telah diukur dengan indikator. Level 5 berarti proses terus disempurnakan. Semakin tinggi nilainya, semakin baik penanganannya.

3.1 Penanganan Insiden Phishing terhadap ASN Dinas Kesehatan

Tabel berikut mencatat penanganan insiden phishing, yaitu pengiriman surat elektronik palsu yang memancing penerima menyerahkan kata sandi. Kolom Deskripsi menyebut sasaran serangan sebanyak lima belas pegawai Dinas Kesehatan, dua di antaranya sempat mengklik tautan berbahaya. Empat langkah penanganan tercantum pada kolom yang sama, yaitu pemblokiran domain, pengaturan ulang kata sandi akun terdampak, pengisolasian perangkat, dan sosialisasi ulang ke seluruh perangkat daerah. Kolom Nilai Kematangan berisi Level 3, yang berarti penanganan mengikuti prosedur baku.

ID	SUMSEL-DAK.PI.01
Nama Kegiatan	Penanganan Insiden Phishing terhadap ASN Dinas Kesehatan
Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tim CSIRT Provinsi menangani phishing campaign yang menargetkan 15 ASN Dinkes; 2 ASN sempat mengklik link berbahaya. Tindakan: pemblokiran domain, reset password akun terdampak, isolasi endpoint, dan sosialisasi ulang ke seluruh OPD.
Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	22 January 2026
Nilai Kematangan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Level 3 - Terdefinisi

3.2 Penanganan Web Defacement Subdomain OPD

Tabel berikut mencatat penanganan web defacement, yaitu perubahan paksa tampilan halaman situs oleh pihak yang tidak berhak. Kolom Deskripsi menyebut penyebabnya, yaitu celah pada plugin sistem pengelola konten atau CMS. Lima langkah penanganan tercantum, yaitu pengisolasian server, pemulihan dari cadangan terverifikasi, penelusuran akar masalah, penambalan celah, dan pemeriksaan ulang seluruh subdomain terkait. Kolom Nilai Kematangan berisi Level 4, yang berarti hasil penanganan telah terukur.

ID	SUMSEL-DAK.PI.02



Nama Kegiatan	Penanganan Web Defacement Subdomain OPD
Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Subdomain salah satu OPD mengalami web defacement akibat kerentanan plugin CMS. Tim CSIRT melakukan isolasi server, restorasi dari backup terverifikasi, root cause analysis (RCA), patching kerentanan, dan asesmen ulang seluruh subdomain terkait.
Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	08 May 2026
Nilai Kematangan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Level 4 - Terukur

BAB 4 EDUKASI KESADARAN

Bab ini mencatat kegiatan peningkatan pemahaman keamanan bagi pegawai. Sasaran kegiatan adalah manusia sebagai pengguna sistem, bukan perangkat teknologinya. Tercatat dua kegiatan.

Tabel pada bab ini memuat tiga keterangan. Deskripsi Kegiatan menyebutkan materi yang disampaikan dan pesertanya. Tanggal Kegiatan menunjukkan waktu pelaksanaan. Nomor identitas pada kolom ID menggunakan kode EK.

4.1 Sosialisasi UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi

Tabel berikut mencatat sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kolom Deskripsi menyebut empat pokok materi, yaitu hak subjek data atau pemilik data, kewajiban pengendali data yaitu instansi yang mengelola data, sanksi atas pelanggaran, serta penerapannya di lingkungan perangkat daerah. Pesertanya adalah seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi.

ID	SUMSEL-DAK.EK.01
Nama Kegiatan	Sosialisasi UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi
Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Sosialisasi UU PDP kepada seluruh ASN Pemprov Sumsel mencakup hak subjek data, kewajiban pengendali data, sanksi pelanggaran, serta implementasi praktis di lingkungan OPD.
Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	18 February 2026

4.2 Workshop Anti-Phishing & Social Engineering Awareness

Tabel berikut mencatat pelatihan pengenalan phishing dan social engineering. Social engineering adalah manipulasi psikologis untuk memperoleh informasi rahasia dari korban. Kolom Deskripsi menyebut praktik keamanan dasar yang diajarkan, yaitu penyusunan kata sandi yang kuat, penggunaan verifikasi berlapis atau MFA, dan pemeriksaan keaslian pengirim surat elektronik. Peserta pelatihan adalah pegawai Diskominfo serta penanggung jawab teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.

ID	SUMSEL-DAK.EK.02
Nama Kegiatan	Workshop Anti-Phishing & Social Engineering Awareness
Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Pelatihan keamanan untuk mengenali pola phishing, social engineering, serta praktik keamanan dasar (password yang kuat, MFA, verifikasi pengirim email) bagi ASN Diskominfo & PIC TIK seluruh OPD.
Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	22 April 2026

BAB 5 KELAIKAN KEAMANAN

Bab ini mencatat penilaian atas kelaikan suatu sistem atau fasilitas untuk dioperasikan atau disambungkan dengan sistem lain. Penilaian dilakukan sebelum sistem digunakan. Tercatat dua kegiatan.

Tabel pada bab ini memuat tiga keterangan. Deskripsi Kegiatan merinci aspek yang dinilai. Tanggal Kelaikan menunjukkan waktu penilaian. Nomor identitas pada kolom ID menggunakan kode KK. Aspek yang dinilai umumnya meliputi keamanan fisik yang menyangkut bangunan dan akses masuk, keamanan lingkungan yang menyangkut kelistrikan dan pendinginan, serta keamanan logis yang menyangkut jaringan dan konfigurasi sistem.

5.1 Penilaian Kelaikan Keamanan Pusat Data Daerah Sumsel

Tabel berikut mencatat penilaian kelaikan Pusat Data Daerah. Kolom Deskripsi memerinci ketiga aspek penilaian. Aspek fisik meliputi pengendalian akses, kamera pengawas, dan sistem pemadam api. Aspek lingkungan meliputi pendinginan dan kelistrikan. Aspek logis meliputi segmentasi jaringan dan hardening server, yaitu pengetatan konfigurasi server untuk mengurangi celah. Penilaian dilakukan sebelum migrasi ke Ekosistem Pusat Data Nasional.

ID	SUMSEL-DAK.KK.01
Nama Kegiatan	Penilaian Kelaikan Keamanan Pusat Data Daerah Sumsel
Deskripsi Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Asesmen kelaikan PDD Sumsel terhadap standar keamanan fisik (akses, CCTV, fire suppression), lingkungan (cooling, kelistrikan), dan logis (segmentasi jaringan, hardening server) sebelum migrasi ke Ekosistem Pusat Data Nasional.
Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	12 April 2026

5.2 Kelaikan Keamanan SIMPEG Terintegrasi dengan BKN

Tabel berikut mencatat penilaian kelaikan SIMPEG sebelum diintegrasikan dengan Badan Kepegawaian Negara. Kolom Deskripsi menyebut dua acuan yang digunakan, yaitu standar Badan Siber dan Sandi Negara serta pedoman interoperabilitas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Interoperabilitas berarti kemampuan dua sistem berbeda untuk bertukar data secara aman.

ID	SUMSEL-DAK.KK.02
Nama Kegiatan	Kelaikan Keamanan SIMPEG Terintegrasi dengan BKN
Deskripsi Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Penilaian kesiapan keamanan SIMPEG Provinsi sebelum integrasi dengan BKN dan layanan ASN nasional sesuai standar BSSN dan pedoman interoperabilitas Kementerian PANRB.
Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	18 July 2026



panrb
KEMENTERIAN
PERENCANAAN DAN KEBANGSAHANSISWAHAN
DAN REFORMASI BIROKRASI



Arsitektur Pemerintah Digital



BAB 6 STANDAR DAN PROSEDUR

Bab ini mencatat dokumen aturan yang menjadi pegangan pelaksanaan keamanan informasi. Tercatat dua dokumen.

Tabel pada bab ini memuat empat keterangan. Jenis Standar menyatakan sumber acuan dokumen, dengan kategori 1 untuk standar nasional atau peraturan terkait, dan kategori 2 untuk standar internasional. Deskripsi menjelaskan isi dan kedudukan dokumen. Tanggal Mulai Penerapan menunjukkan sejak kapan aturan berlaku. Tanggal Akhir Penerapan dikosongkan apabila aturan masih berlaku hingga saat ini, sehingga tanda hubung pada kolom tersebut berarti masih berlaku, bukan berarti data belum diisi.

6.1 Pergub Sumsel tentang Kebijakan Keamanan Informasi

Tabel berikut mencatat Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Keamanan Informasi. Kolom Jenis Standar berisi kategori 1 karena dokumen ini mengacu pada peraturan nasional. Kolom Deskripsi menyebut dua acuan tersebut, yaitu Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kolom Tanggal Akhir Penerapan kosong karena peraturan masih berlaku.

ID	SUMSEL-DAK.SP.01
Nama Kegiatan	Pergub Sumsel tentang Kebijakan Keamanan Informasi
Jenis Standar Keamanan	1. Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
Deskripsi	Peraturan Gubernur yang menetapkan kebijakan keamanan informasi di lingkungan Pemprov Sumsel selaras dengan Perpres Pemerintah Digital 2026 dan UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi.
Tanggal Mulai Penerapan	01 March 2026
Tanggal Akhir Penerapan (kosongkan jika masih berlaku)	-

6.2 SOP Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi

Tabel berikut mencatat Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi. Kolom Jenis Standar berisi kategori 2 karena mengacu pada standar internasional. Kolom Deskripsi menyebut dua acuannya, yaitu ISO/IEC 27035 dan NIST SP 800-61, yang keduanya mengatur tahapan penanganan insiden. Dokumen ini menjadi panduan kerja teknis bagi CSIRT Provinsi. Kolom Tanggal Akhir Penerapan kosong karena prosedur masih berlaku.

ID	SUMSEL-DAK.SP.02
Nama Kegiatan	SOP Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi
Jenis Standar Keamanan	2. Standar Internasional Terkait Keamanan Informasi



Deskripsi	Standar operasional prosedur penanganan insiden keamanan informasi berdasarkan ISO/IEC 27035 dan NIST SP 800-61 sebagai panduan kerja CSIRT Provinsi Sumsel.
Tanggal Mulai Penerapan	15 February 2026
Tanggal Akhir Penerapan (kosongkan jika masih berlaku)	-

BAB 7 PENINGKATAN KEAMANAN

Bab ini mencatat langkah perbaikan yang dikerjakan sebagai tindak lanjut atas temuan audit, hasil uji kerentanan, dan pelajaran dari insiden. Tercatat dua kegiatan.

Tabel pada bab ini memuat tiga keterangan. Deskripsi Kegiatan menjelaskan wujud perbaikan yang dilakukan. Tanggal Kegiatan menunjukkan waktu pelaksanaan. Nomor identitas pada kolom ID menggunakan kode PK.

7.1 Implementasi Multi-Factor Authentication (MFA) pada Portal Layanan

Tabel berikut mencatat penerapan Multi-Factor Authentication atau MFA, yaitu mekanisme yang mensyaratkan bukti kedua di samping kata sandi, misalnya kode sekali pakai dari aplikasi pada telepon genggam. Dengan mekanisme ini, kata sandi yang bocor tidak cukup untuk masuk ke sistem. Kolom Deskripsi menyebut sasaran penerapannya, yaitu akun administrator dan pengguna istimewa pada Portal Layanan Digital, karena kedua jenis akun tersebut memiliki kewenangan paling luas.

ID	SUMSEL-DAK.PK.01
Nama Kegiatan	Implementasi Multi-Factor Authentication (MFA) pada Portal Layanan
Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Penerapan MFA berbasis OTP/Authenticator app untuk seluruh akun administrator dan pengguna istimewa (privileged users) pada Portal Layanan Digital Pemprov Sumsel sebagai bagian peningkatan kontrol akses.
Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	01 April 2026

7.2 Penguatan Kapasitas CSIRT Provinsi Sumsel

Tabel berikut mencatat penguatan kapasitas CSIRT Provinsi. Kolom Deskripsi menyebut empat bentuk penguatan. Pertama, sertifikasi internasional bagi personel berupa CEH dan CHFI. Kedua, pengadaan SIEM, yaitu perkakas yang mengumpulkan dan menganalisis catatan aktivitas sistem untuk mendeteksi kejanggalan sedini mungkin. Ketiga, penyusunan playbook atau panduan langkah penanganan insiden. Keempat, simulasi tanggap insiden yang dilaksanakan setiap tahun.

ID	SUMSEL-DAK.PK.02
Nama Kegiatan	Penguatan Kapasitas CSIRT Provinsi Sumsel
Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Peningkatan kapasitas CSIRT Provinsi melalui sertifikasi internasional (CEH, CHFI), pengadaan tool monitoring SIEM, penyusunan playbook penanganan insiden terbaru, serta simulasi tanggap insiden tahunan.
Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	15 June 2026